



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistim, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan Peta Proses Bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Reformasi Birokrasi adalah suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
8. Proses Utama adalah proses pertama dalam penyusunan Peta Proses Bisnis yang dikutip dari sasaran pada rencana pembangunan Daerah yang diampu oleh PD yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dan diubah menjadi bahasa proses.
9. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik yang memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktifitas pada proses inti.
10. Proses Manajerial adalah proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daerah.
11. Peta Sub Proses adalah penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
12. Peta Lintas Fungsi/*Cross Function Map* adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
13. Peta Relasi/Peta Hubungan adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.
14. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
15. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
16. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan menggunakan sumber daya yang disediakan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi PD untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar PD untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 539

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan Tujuan pembangunan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

- 1) mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
- 2) mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
- 3) memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah:

- 1) mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- 2) memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

C. Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah atau stakeholder lainnya untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- 2) Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan.
- 3) Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- 4) Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
- 5) Proses manajerial merupakan proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daerah.
- 6) Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
- 7) Peta relasi (relationship map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- 8) Peta Lintas Fungsi/ Cross Function Map adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh sasaran, program pembangunan daerah dan program nomenklatur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023-2026

A. Visi

Penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Buton dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, adapun visi dalam RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025, yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025”

Pengertian “Masyarakat Industri” pada visi tersebut adalah suatu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya melakukan usaha dalam segala sektor dan segala bentuk berorientasi profit (profit oriented). Sedangkan “Berbudaya” mengandung makna memiliki kepribadian dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa umumnya dan budaya buton khususnya dan senantiasa mengapresiasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berakulturisasi dengan pengaruh budaya-budaya luar serta lestari aset-aset budaya peninggalan leluhur. Berdasarkan pernyataan di atas, makna dari Visi Kabupaten Buton adalah Kabupaten Buton ingin mewujudkan daerah yang menyejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Dengan masyarakat yang sejahtera maka akan menjadikan Buton sebagai kawasan terdepan yang handal dan menjadi andalan dalam pembangunan seluruh sektor. Dengan demikian akan tercipta daerah yang mandiri, handal, tangguh dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton.

B. Misi

Dalam upaya mengoperasionalkan visi tersebut dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Buton pada masa yang akan datang maka misi pembangunan Kabupaten Buton pada tahun keempat RPJPD, sebagai berikut:

- 1) Misi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Pemerataan Pendapatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Misi ini diarahkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton, dengan titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan peningkatan pada “Core Business” yaitu pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat serta sektor-sektor penyangga yaitu pertambangan dan pariwisata sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan kinerja sektor utama dan penyangga tersebut maka keterlibatan masyarakat sangat

diperlukan. Dalam hal ini diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam berberbagai bentuk dan pendekatan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Kabupaten Buton tidak hanya menempatkan diri sebagai obyek pembangunan namun sekaligus sebagai pelaku (subyek) pembangunan. Peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif. Hal ini diperkuat dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Ini ditempuh dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

- 2) Misi Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Misi ini diarahkan pada pencapaian SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif (berdaya saing tinggi), kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kabupaten Buton; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Pembangunan SDM yang berkualitas tersebut harus mendapat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.
- 3) Misi Mewujudkan Good Governance, Clean Government pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum Misi ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.
- 4) Misi Mewujudkan Kabupaten Buton yang Aman dan Bersatu Melalui Penerapan Nilai-nilai Budaya Buton yang Lestari Misi ini mendorong

pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat, memperkuat karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama. Kemudian melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Buton; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Buton dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan serta menginventarisasi dan melindungi potensi budaya Buton, meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan budaya khas Kabupaten Buton ; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif.

- 5) Misi Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berkelanjutan Misi ini ditempuh melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana daerah yang telah ada serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Tujuan & Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan Wilayah Kabupaten Buton mempunyai kekayaan dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Pada saat ini potensi sumber daya alam tersebut belum diolah secara maksimal sehingga nilai ekonomisnya masih rendah, seperti pada sektor pertanian, belum ada pengolahan hasil-hasil pertanian yang mampu meningkatkan nilai ekonomis hasil-hasil pertanian Kabupaten Buton. Demikian halnya dengan sektor perikanan juga belum diolah dengan maksimal, padahal hasil perikanan juga tidak kalah jika mampu dikembangkan dengan maksimal, sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan Kabupaten Buton mampu bersaing dengan produk luar daerah dan luar negeri. Berdasarkan pernyataan di atas, peningkatan daya saing produk unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Peningkatan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan Kabupaten Buton. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan seimbang, tanpa merugikan

ekosistem lingkungan sekitar. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal. Perekonomian lokal dapat tumbuh dan berkembang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,1-5,3 persen; pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,9-1,5 persen; pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,6-12,6 persen pada tahun 2026.
 - Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas air sebesar 53,75 persen, indeks kualitas udara sebesar 87,81 persen, dan indeks kualitas tutupan tanah sebesar 85,40 persen pada tahun 2026.
- 2) Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Selanjutnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang merata dan berkualitas, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika didukung dengan adanya partisipasi gender dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi gender ini diharapkan pembangunan akan berjalan dengan lebih baik. Partisipasi gender ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal-hal yang produktif. Di samping terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan mengembangkan puskesmas di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang harus ditingkatkan agar usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton dapat meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:
- Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Buton semakin membaik dapat dilihat dari Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) naik menjadi 13,81 dan Rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,94 tahun pada tahun 2026, dan Angka Harapan Hidup yang naik menjadi 70,24 tahun pada tahun 2026.
 - Menurunnya angka kemiskinan daerah. Keberhasilan peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2026 diukur dari penurunan angka kemiskinan pada tahun 2026 mencapai 12,25-11,98 persen, peningkatan Pendapatan Perkapita semakin naik menjadi Rp30,60 - Rp31,30 juta rupiah, peningkatan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp7.325 ribu, Gini Ratio sebesar 0,19-0,12, dan penurunan Angka Pengangguran sebesar 3,39-3,20 persen pada tahun 2026.
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olah raga. Tingkat keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari kategori Kabupaten Layak Anak yang mencapai nilai 450-550 dengan

kategori Pratama, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 81,42 persen, Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan mencapai, dan Persentase Cabang Olahraga yang Terseleksi Mengikuti Event Olahraga Daerah, Regional dan Nasional mencapai 100 persen pada tahun 2026.

- 3) Tujuan 3 : Mewujudkan Tataan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance), Baik (Good Governance), Berkualitas dan Bertanggung Jawab Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas akan memberikan dampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik maka akan berdampak baik baik pada beberapa aspek kehidupan masyarakat, seperti mudah dan cepatnya investor melakukan penyelesaian administratif sehingga investor lebih dapat mengembangkan bisnis. Hal ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang pastinya berdampak pula pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tujuan diatas, sasaran pembangunan ini adalah:
- Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dianggap berhasil jika pada tahun 2026 skor Nilai SAKIP Kabupaten Buton mencapai 62-73 atau kategori “B”, mendapatkan Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 30-35 persen.
 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian Persentase Indeks Desa membangun dengan skor 87,95.
- 4) Tujuan 4 : Mewujudkan Masyarakat Buton yang Menghargai Nilai-nilai Budaya dan Bersatu Dalam Pembangunan Melalui Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pemahaman Norma, Tata Nilai Budaya Buton Dengan kekhasan dan keunikan yang miliki oleh Kabupaten Buton, hal ini menjadi potensi yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan budaya lokal daerah. Melalui pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal akan mampu merangsang tumbuhnya sektor pariwisata pada Kabupaten Buton. Aneka aset budaya dapat dikembangkan dengan maksimal sehingga akan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan sektor wisata ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan pengembangan pariwisata ini maka akan dapat menarik investor dan meningkatkan PAD. Melalui hal ini pergerakan perekonomian masyarakat dapat lebih bergerak lebih agresif dengan adanya peluang-peluang yang terbuka pada sektor pariwisata. Selain itu pengembangan kekayaan budaya daerah menjadi aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Buton merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan penciptaan kemandirian dalam pembangunan di Kabupaten Buton. Guna mewujudkan masyarakat Buton yang menghargai nilainilai budaya dan bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Kekayaan budaya dan kearifan lokal dapat dijadikan salah satu sektor yang dapat menarik investor dan meningkatkan PAD melalui peningkatan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan mencapai 67,47 persen pada tahun 2026, sehingga melalui pelestarian warisan budaya tak benda tersebut dapat menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
 - Terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian persentase penyelesaian tindak kejahatan yang mencapai 3,96 persen, dan persentase ormas aktif sebesar 100 persen pada tahun 2026.
- 5) Tujuan 5 : Mewujudkan konektivitas antar wilayah Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, akan mendorong pergerakan sektor-sektor perekonomian lainnya. Kondisi infrastruktur dasar yang ada hingga saat ini, dipandang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur tersebut. Salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam segala bidang adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Selanjutnya dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor perdagangan dan pertambangan melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata. Keberhasilan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata Kabupaten Buton dapat dilihat dengan capaian indeks infrastruktur wilayah sebesar 31,69 persen pada tahun 2026.
 - Meningkatnya ketersediaan energi listrik. Ketersediaan energi listrik merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan sektor perekonomian. Keberhasilan ini dilihat dari Rasio Elektrifikasi yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2026.

D. Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Buton

Adapun Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Buton dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kebijakan Umum Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	OPD Penanggung Jawab
1	2	6	7	8
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemertaan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
T1	Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan			
S1	Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal			
		Program Peningkatan Produktivitas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Dinas Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Peningkatan Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Program Wisata Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Pangan Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	

			Program Pengawasan Keamanan	
		Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Program Peleyanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi & UMKM
			Program Pengawasan & Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	
			Program Pengembangan UMKM	
		Program Pengembangan Industri	Program Perencanaan & Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	

		Program Peningkatan Iklim Usaha Kondusif	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Program Dalam Negeri	
		Program Promosi & Kemitraan Usaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda

S2	Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan			
		Program Buton Lestari	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	
		Program Buton Bersih	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
		Program Tanggap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Produktivitas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan	
Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan SDM yang berkualitas				
T2	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
S3	Meningkatnya Kualitas pendidikan dan kesehatan			
		Program Buton Cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
		Program Pustaka Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno	
		Program Buton Religius	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Buton Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

		Program Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		Program Layanan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Produktivitas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
S4	Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah			
		Program Pendidikan Murah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda

		Program Pengembangan Jaminan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Rumah dan Lingkungan Layak	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR

		Program Layanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Warga Nagara Migran Korban Tindak Kekerasan	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
		Program Peningkatan Produktivitas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Pemberdayaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

		Program Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi & UMKM
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	
			Program Pengembangan UMKM	
		Program Pengembangan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian

		Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
S5	Meningkatnya Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga			
		Program Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	
		Program Pemuda Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan & Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	

			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum				
T3	Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean goverment), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab.			
S6	Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
		Program Layanan dan Informasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan & Capil
			Program Pendaftaran Penduduk	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan

			Publik	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo & Persandian
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
		Program Peningkatan Kapasitas SDM	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	
		Program Perencanaan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo & Persandian
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BALIT-BANG
		Program Efisiensi dan Efektivitas Anggaran	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA

			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan & Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Program Penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		Program Administrasi	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD dan Kecamatan
			Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah

			Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Sekretariat Dewan
S7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa			
		Program Pembinaan Desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintah Desa	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari				
T4	Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton			
S8	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal			

		Program Buton Berbudaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Program Wisata Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
S9	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat			
		Program Buton Aman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	

			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Satpol-PP
			Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan				
T5	Mewujudkan konektivitas antar wilayah			
S10	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata			
		Program Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

			Program Pengelolaan Pelayaran	
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	

			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Program Pengembangan Permukiman	
		Program Informatika	Program Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo & Persandian
		Program Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
S1 1	Meningkatnya ketersediaan energi listrik			
		Program Tanggap Energi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

E. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas:

1) Peta proses;

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) proses yaitu proses utama, manajemen dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Proses manajerial merupakan proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daerah. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Peta proses yang meliputi Proses Utama, Manajerial dan Pendukung, diberikan kode sebagai berikut:

a. Proses Utama, terdiri dari 6 (enam) proses yaitu:

BTN-01 Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal.

BTN-02 Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

BTN-03 Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan.

BTN-04 Penurunan Angka Kemiskinan Daerah.

BTN-05 Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga.

BTN-06 Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal.

b. Proses Pendukung, terdiri dari 4 (empat) proses yaitu:

BTN-07 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

BTN-08 Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat.

BTN-09 Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.

BTN-10 Peningkatan ketersediaan energi listrik.

c. Proses Manajerial, terdiri dari 6 (enam) proses yaitu:

BTN-11 Pengelolaan Layanan dan Informasi.

BTN-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

BTN-13 Perencanaan Pembangunan

BTN-14 Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BTN-15 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian.

BTN-16 Tata Kelola Administrasi.

2) Peta Sub Proses

Peta Sub Proses Pemerintah Kabupaten Buton diidentifikasi melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, proses-proses tersebut adalah :

Tabel 2.2
Identifikasi Peta Sub Proses

No	Proses Utama/Pendukung/Manajerial	Kode	Peta Sub Proses	Kode
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal	BTN-01		
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-01.01
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-01.02
			Peningkatan Jaringan Irigasi	BTN-01.03
			Peningkatan Wisata Daerah	BTN-01.04
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-01.05
			Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	BTN-01.06
			Pengembangan Industri	BTN-01.07
			Peningkatan Iklim Usaha Kondusif	BTN-01.08
			Peningkatan Promosi & Kemitraan Usaha	BTN-01.09
2.	Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	BTN-02		
			Peningkatan Buton Lestari	BTN-02.01
			Peningkatan Buton Bersih	BTN-02.02
			Tanggap Bencana	BTN-02.03
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-02.04
3.	Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan	BTN-03		

			Peningkatan Buton Cerdas	BTN-03.01
			Peningkatan Pustaka Daerah	BTN-03.02
			Peningkatan Buton Religius	BTN-03.03
			Peningkatan Buton Sehat	BTN-03.04
			Peningkatan Keluarga Berencana	BTN-03.05
			Peningkatan Layanan Sosial	BTN-03.06
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-03.07
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-03.08
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-03.09
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	BTN-03.10
4.	Penurunan Angka Kemiskinan Daerah	BTN-04		
			Peningkatan Pendidikan Murah	BTN-04.01
			Pengembangan Jaminan Kesehatan	BTN-04.02
			Peningkatan Rumah dan Lingkungan Layak	BTN-04.03
			Peningkatan Layanan Sosial	BTN-04.04
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-04.05
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-04.06
			Pemberdayaan Desa	BTN-04.07
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-04.08
			Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	BTN-04.09

			Pengembangan Industri	BTN-04.10
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	BTN-04.11
5.	Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga	BTN-05		
			Peningkatan Perlindungan Anak	BTN-05.01
			Peningkatan Pemuda Berprestasi	BTN-05.02
6.	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal.	BTN-06		
			Peningkatan Buton Berbudaya Peningkatan Pembinaan Desa	BTN-06.01
			Peningkatan Wisata Daerah	BTN-06.02
7.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	BTN-07		
			Peningkatan Pembinaan Desa	BTN-07.01
8.	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	BTN-08		
			Peningkatan Buton Aman	BTN-08.01
9.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	BTN-09		
			Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan	BTN-09.01
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	BTN-09.02
			Peningkatan Informatika	BTN-09.03

			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-09.04
10.	Peningkatan ketersediaan energi listrik	BTN-10		
			Peningkatan Tanggap Energi	BTN-10.01
11.	Pengelolaan Data dan Informasi	BTN-11		
			Peningkatan Layanan dan Informasi	BTN-11.01
12.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BTN-12		
			Peningkatan Kapasitas SDM	BTN-12.01
13.	Perencanaan Pembangunan	BTN-13		
			Perencanaan Daerah	BTN-13.01
14.	Pengelolaan Keuangan dan Aset	BTN-14		
			Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran	BTN-14.01
15.	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	BTN-15		
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	BTN-15.01
16.	Tata Kelola Administrasi	BTN-16		
			Pengelolaan Administrasi	BTN-16.01

- 3) Peta Relasi
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 37 Dinas/Kantor/Badan sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (tipe B)

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton (tipe C)
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton (tipe A)
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Buton (tipe A)
6. Dinas Perikanan Kabupaten Buton (tipe A)
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton (tipe A)
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (tipe B)
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tipe B)
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Buton (tipe B)
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton (tipe B)
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton (tipe B)
13. Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton (tipe B)
14. Dinas Pertanian Kabupaten Buton (tipe B)
15. Dinas Perindustrian Kabupaten Buton (tipe B)
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton (tipe B)
17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Buton (tipe B)
18. Dinas Sosial Kabupaten Buton (tipe B)
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton (tipe B)
20. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton (tipe B)
21. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton (tipe B)
22. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton (tipe B)
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton (tipe B)
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton (tipe B)
25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
26. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton (tipe B)
27. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton (tipe C)
28. Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (tipe C)
29. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton (tipe C)
30. Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton (tipe C)
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
32. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
33. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton (tipe C)
35. Badan Riset dan Inovasi Daerah (tipe C)
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton
37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton

Selain 37 OPD di atas, juga terdapat 7 Kecamatan, Kementerian/Lembaga, juga stakeholder lainnya yang menjadi bagian dari peta relasi.

Tabel 2.3
Identikasi Peta Relasi Program Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Buton

No	Proses Utama/Pendukung/Manajerial	Kode	Peta Sub Proses	Kode	Peta Relasi
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal	BTN-01			
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-01.01	Dinas Perikanan
					Kelompok Nelayan
					Penyuluh Perikanan
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					BAPEDDA
					BKAD
					Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan (PSDKP)
					POLAIRUD DAN TNI
					Masyarakat (pengguna perairan wilayah buton)

					Kelompok masyarakat pengolah dan pemasar
					Balai Karantina Ikan
					Kelompok Pembudidaya Ikan
					BPOM
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-01.02	Dinas Pertanian
					BAPPEDA
					BKAD
					Setda (Bag.Perekonomian, Bag.Hukum, Bag.PBJ)
					Pemerintah Kecamatan/desa
					Balai Penyuluh Pertanian
					Puskesmas
					Kelompok Tani (Poktan)/Gapoktan
			Peningkatan Jaringan Irigasi	BTN-01.03	Dinas PUPR
					BAPPEDA
					BKAD

					Dinas Lingkungan Hidup
					Bagian Hukum Setda
					Bagian Adm. Pembangunan Setda
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					BPBD
					Dinas Ketahanan Pangan
					Pemerintah Kecamatan
			Peningkatan Wisata Daerah	BTN-01.04	Dinas Pariwisata
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas PUPR
					Dinas Lingkungan Hidup
					Dinas Perindustrian
					Dinas Koperasi dan UMKM
					Dinas KOMINFO
					Dinas Pendidikan

					Pelaku Usaha Ekraf
					Dinas Perdagangan
					BALITBANGDA
					Dinas Kebudayaan
					DEKRANASDA
					Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pelaku Usaha Ekraf (Masyarakat)
					Bagian umum Setda
					Lembaga Pemuda Pariwisata (Pokdarwis dan HPI)
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-01.05	Dinas Ketahanan Pangan
					BAPPEDA
					BKAD
					Badan Pangan Nasional
					Dinas Perikanan
					Dinas Perdagangan
					Dinas Perhubungan

					Inspektorat
					Badan Pusat Statistik
					Bulog
					BPBD
					Dinas Sosial
					Dinas Kesehatan
					Dinas Perindustrian
					Satgas Pangan
					Loka POM
			Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	BTN-01.06	Dinas Koperasi dan UKM
					DPM PTSP
					KPP
					Anggota Koperasi
					Pendamping Koperasi
					Koperasi
					Dinas Perdagangan

					Dinas Perikanan
					Dinas Pertanian
					BAPEDDA
					BKAD
					Pelaku UMKM
			Pengembangan Industri	BTN-01.07	Dinas Perindustrian
					Kelompok Industri Kecil Menengah
					DPM PTSP
					BPOM
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas Kesehatan
					Kementrian Agama
					Kementerian Perindustrian
			Peningkatan Iklim Usaha Kondusif	BTN-01.08	Dinas Perdagangan

					Pedagang pasar
					BAPPEDA
					BKAD
					DPMPTSP
					Pelaku Usaha
					SATPOLPP
					PKL dan Pedagang Asongan
					UPT METROLOGI
					BSML
					DIREKTORAT METROLOGI
					BAPENDA
					Bagian Perekonomian Setda
					Dinas Pertanian
					Dinas Ketahanan Pangan
					Bulog
					Media Massa

					Perusahaan/calon eksportir
			Peningkatan Promosi & Kemitraan Usaha	BTN-01.09	DPMPTSP
					BAPPEDA
					BKAD
					OPD Terkait
					Bagian Hukum Setda
					KEMENKUMHAM
					DPRD
					Pelaku Usaha
					Dinas Pendidikan
					Perguruan Tinggi
					Pemerintah Kecamatan
					Dinas Sosial
					Disdukcapil
2.	Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	BTN-02			
			Peningkatan Buton Lestari	BTN-02.01	Dinas Lingkungan Hidup

					BAPPEDA
					BKAD
					Bagian Hukum Setda
					OPD/ Instansi Terkait
					Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra
					Kementerian Lingkungan Hidup
					DIR PPA KLHK
					Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3
					DPMPTSP
					Narasumber
					Pemerintah Desa/Kelurahan
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi
					Aparat Penegak Hukum
					Balai Prasarana Pemukiman Wilayah

					Kementerian PUPR
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Buton Bersih	BTN-02.02	Dinas Lingkungan Hidup
					BAPPEDA
					BKAD
					Balai Prasarana Pemukiman Wilayah
					Dinas PUPR
					BPBD
					Pemerintah Kecamatan
			Tanggap Bencana	BTN-02.03	BPBD
					BAPPEDA
					BKAD
					TNI/POLRI
					Dinas Sosial
					Dinas PUPR
					Pemerintah Kecamatan/Desa/ Kelurahan

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Kelompok Satuan Relawan Kebakaran
					Puskesmas
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-02.04	Dinas Perikanan
					BAPPEDA
					BKAD
					Kelompok Nelayan
					Penyuluh Perikanan
					DPMPTSP
					Balai Karantina Ikan
					Kelompok Pembudidaya Ikan
3.	Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan	BTN-03			
			Peningkatan Buton Cerdas	BTN-03.01	Dinas Pendidikan
					BAPPEDA
					BKAD

					Dinas Kependudukan dan Capil
					BPS
					Satuan Pendidikan (Sekolah PAUD,SD dan SMP)
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Masyarakat
					BKPSDM
					DPMPTSP
			Peningkatan Pustaka Daerah	BTN-03.02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas Pendidikan
					Pemerintah Kecamatan
					Anggota Perpustakaan
					Pustakawan
					Dinas Kebudayaan

					Masyarakat Adat Lokal
					Arsiparis
			Peningkatan Buton Religius	BTN-03.03	Dinas Pendidikan
					BAPPEDA
					BKAD
					Perguruan Tinggi
					Pemerintah Kecamatan
					Dinas Sosial
					Disdukcapil
			Peningkatan Buton Sehat	BTN-03.04	Dinas Kesehatan
					RSUD
					BAPPEDA
					BKAD
					BPJS
					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB BKKBN
					Labkesda
					Dinas Ketahanan Pangan

					Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa
					Puskesmas
					BKPSDM
					Apotek
					Dinas PUPR
					Dinas Sosial
					Masyarakat
			Peningkatan Keluarga Berencana	BTN-03.05	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					BAPPEDA
					BKAD
					Bagian Hukum Setda
					OPD/ Instansi Terkait
					BKKBN Perwakilan Prov.Sultra
					BKKBN
			Peningkatan Layanan Sosial	BTN-03.06	Dinas Sosial
					BAPPEDA

					BKAD
					Disdukcapil
					Desa/Kelurahan
					KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
					Bank Himbara dan PT Pos
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-03.07	Dinas Perikanan
					BAPPEDA
					BKAD
					Balai Karantina Ikan
					Kelompok Pembudidaya Ikan
					Penyuluh Perikanan
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-03.08	Dinas Ketahanan Pangan
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas Pertanian
					Dinas Perikanan

					Dinas Perdagangan
					Dinas perhubungan
					Inspektorat
					BPS
					Bulog
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-03.09	Dinas Pertanian
					BAPPEDA
					BKAD
					Bagian Hukum Setda
					Petani/Kelompok Tani
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	BTN-03.10	Dinas PUPR
					BAPPEDA
					BKAD
					Bagian Hukum Setda
					BPBD
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

					Dinas Ketahanan Pangan
					Dinas Perdagangan
					Pemerintah Kecamatan
4.	Penurunan Angka Kemiskinan Daerah	BTN-04			
			Peningkatan Pendidikan Murah	BTN-04.01	Dinas Pendidikan
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas Kependudukan dan Capil
					BPS
					Satuan Pendidikan Sekolah PAUD,SD dan SMP
					Dinas Sosial
					Pemerintah Kecamatan
			Pengembangan Jaminan Kesehatan	BTN-04.02	Dinas Kesehatan
					RSUD
					BAPPEDA
					BKAD

					BPJS
					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					BKKBN
					Labkesda
					Dinas Ketahanan Pangan
					Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa
					Puskesmas
					BKPSDM
					Apotek
					Dinas PUPR
					Dinas Sosial
					Masyarakat
			Peningkatan Rumah dan Lingkungan Layak	BTN-04.03	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas PUPR
					Dinas Lingkungan Hidup

					Dinas Kesehatan
					Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kemeterian PUPR
					Bagian Hukum Setda
					BPBD
					Dinas Ketahanan Pangan
					Dinas Perdagangan
					Pemerintah Kecamatan
			Peningkatan Layanan Sosial	BTN-04.04	Dinas Sosial
					BAPPEDA
					BKAD
					Kementerian Sosial
					Pemerintah Desa/Kelurahan
					Lembaga Kesejahteraan Sosial
					Komunitas Adat Terpencil (KAT)
					Dinas Sosial Provinsi Sultra

					Bank Himbara dan PT Pos
					Lansia, Disabilitas dan Anak Terlantar
					Dinas Kependudukan dan Capil
					KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
					BPBD
					Masyarakat
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-04.05	Dinas Perikanan
					Kelompok Nelayan
					BAPPEDA
					BKAD
					Penyuluh Perikanan
					DPMPTSP
					Balai Karantina Ikan
					Kelompok Pembudidaya Ikan
					BPOM

					Kelompok Masyarakat Pengolah dan Pemasar
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-04.06	Dinas Pertanian
					BAPPEDA
					BKAD
					Setda (Bag. Perekonomian, Bag.Hukum, Bag.PBJ)
					Pemerintah Kecamatan/desa
					Balai Penyuluh Pertanian
					Puskeswan
					Kelompok Tani (Poktan)/Gapoktan
			Pemberdayaan Desa	BTN-04.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					BAPPEDA
					BKAD
					BAPPEDADesa
					Lembaga Adat
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-04.08	Dinas Ketahanan Pangan
					BAPPEDA

					BKAD
					Badan Pangan Nasional
					Dinas Perikanan
					Dinas Perdagangan
					Dinas Perhubungan
					Inspektorat
					Badan Pusat Statistik
					Bulog
					BPBD
					Dinas Sosial
					Dinas Kesehatan
					Dinas Perindustrian
					Satgas Pangan
					Loka POM
			Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	BTN-04.09	Dinas Koperasi dan UKM
					BAPPEDA

					BKAD
					DPM PTSP
					KPP
					Anggota Koperasi
					Pendamping Koperasi
					Koperasi
					Dinas Perdagangan
					Dinas Perikanan
					Dinas Pertanian
					Pelaku UMKM
			Pengembangan Industri	BTN-04.10	Dinas Perindustrian
					BAPPEDA
					BKAD
					Kelompok Industri Kecil Menengah
					DPMPTSP
					BPOM

			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	BTN-04.11	Dinas Tenaga Kerja
					Perusahaan
					Kelompok Masyarakat Pencari Kerja
					BAPPEDA
					KEMNAKER RI
					Kantor Imigrasi Kota/Provinsi
					BPJS ketenagakerjaan
					Tenaga Kerja
					Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi
					Dinas PUPR
					Bagian Hukum Setda
					BKAD
					Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemerintah Kecamatan
5.	Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga	BTN-05			
			Peningkatan Perlindungan Anak	BTN-05.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas Kependudukan dan Capil
					PPKB
					Dinas Kesehatan
					Dinas Pendidikan
					Dinas Sosial
					Dinas Tenaga Kerja
					RSUD
					POLRI
					Kejaksaan
					Pengadilan Negeri
					Kementerian Agama
			Penyelenggaraan Berafirmatif Gender dan Perlindungan Perempuan	BTN-05.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					BAPPEDA

					BKAD
					Dinas Kependudukan dan Capil
					PPKB
					Dinas Kesehatan
					Dinas Pendidikan
					Dinas Sosial
					Dinas Tenaga Kerja
					RSUD
					POLRI
					Kejaksaan
					Pengadilan Negeri
					Kementerian Agama
					Pengadilan Agama
					Dinas Komunikasi dan Informatika
					Badan Pusat Statistik

			Peningkatan Pemuda Berprestasi	BTN-05.03	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					BAPPEDA
					BKAD
					KESBANGPOL
					Organisasi Kepemudaan Masyarakat
					Dinas Pendidikan
					KWARCAB
					KONI
6.	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	BTN-06			
			Peningkatan Buton Berbudaya	BTN-06.01	Dinas Kebudayaan
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas Pendidikan
					Dinas Pariwisata
					Brida

					Dinas Koperasi dan UMKM
					Dinas Perindustrian
					Dinas Perdagangan
					Tokoh masyarakat
					Dinas PUPR
					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Peningkatan Wisata Daerah	BTN-06.02	Dinas Pariwisata
					BAPPEDA
					BKAD
					Dinas KOMINFO
					Dinas Koperasi dan UMKM
					Dinas Perindustrian
					Dinas Kebudayaan
					DEKRANASDA
					Dinas Pemuda dan Olahraga

					Pelaku Usaha Ekraf (Masyarakat)
					Dinas Tenaga kerja
					Lembaga Pemuda Pariwisata (Pokdarwis dan HPI)
7.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	BTN-07			
			Peningkatan Pembinaan Desa	BTN-07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					BAPPEDA
					BKAD
					Pemerintah Desa
					Kementerian Desa
					Bagian Hukum Setda
					Lembaga Adat
					Pihak Ketiga
8.	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	BTN-08			
			Peningkatan Buton Aman	BTN-08.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					BAPPEDA

					BKAD
					Bagian Hukum Setda
					Pelajar
					DPRD
					Partai Politik
					Masyarakat
					ORMAS/LSM
					BNN
					SATPOLPP
					FORKOPIMDA
					TNI/POLRI
					FKUB
					Dinas Perhubungan
					Pemerintah Kecamatan
9.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	BTN-09			
			Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan	BTN-09.01	Dinas PUPR

					BAPPEDA
					BKAD
					Bagian Hukum Setda
					Dinas Perhubungan
					Pemerintah Kecamatan
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					BPBD
					Dinas lingkungan hidup
					Dinas Ketahanan Pangan
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Pemerintah Kelurahan/Desa
					SATPOLPP
					Badan Pertanahan Nasional
					BAPPEDA Provinsi
					Bagian Administrasi Pembangunan Setda

					Dinas Pariwisata
					Dinas Kebudayaan
					Dinas Perdagangan
					Dinas Perindustrian
					Dinas Ketahanan Pangan
					BPBD
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	BTN-09.02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Dinas lingkungan Hidup
					Bappeda
					Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kemeterian PUPR
					BPBD
					Dinas Kesehatan
					Bagian Hukum Setda
					Dinas Perindustrian

					Dinas Perdagangan
					Dinas Ketahanan Pangan
					Pemerintah Kecamatan
					Dinas Sosial
					BKAD
					Dinas Kesehatan
			Peningkatan Informatika	BTN-09.03	Dinas Komunikasi dan Informatika
					BAPPEDA
					BKAD
					Kementerian Terkait
					Pemerintah Provinsi
					Bagian Hukum Setda
					Pemerintah Desa
					Semua OPD
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-09.04	Dinas Pertanian
					BAPPEDA

					BKAD
					Setda (Bag.Perekonomian, Bag.Hukum, Bag.PBJ)
					Pemerintah Kecamatan/desa
					Balai Penyuluh Pertanian
					Puskesmas
					Kelompok Tani (Poktan)/Gapoktan
10.	Peningkatan ketersediaan energi listrik	BTN-10			
			Peningkatan Tanggap Energi	BTN-10.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Dinas lingkungan Hidup
					Bappeda
					Dinas Perhubungan
					BKAD
					Inspektorat
11.	Pengelolaan Layanan dan Informasi	BTN-11			
			Peningkatan Layanan dan Informasi	BTN-11.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

					BAPPEDA
					BKAD
					Pelaku Usaha
					Dinas Kependudukan dan Capil
					Inspektorat
					Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa
					Sekretariat Daerah
					Dinas Komunikasi dan Informatika
					Organisasi Perangkat Daerah
					Masyarakat
					Lembaga Sandi Negara
12.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BTN-12			
			Peningkatan Kapasitas SDM	BTN-12.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					BAPPEDA
					BKAD

					Pemerintah Pusat
					Pemerintah Provinsi
					Seluruh OPD
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
					Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa
13.	Perencanaan Pembangunan	BTN-13			
			Perencanaan Daerah	BTN-13.01	BAPPEDA
					BKAD
					Pemerintah Pusat
					Pemerintah Provinsi
					Seluruh OPD
					Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
					Pemerintah Kecamatan/Keluraha/, Desa
14.	Pengelolaan Keuangan dan Aset	BTN-14			
			Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran	BTN-14.01	BKAD

					BAPPEDA
					Pemerintah Pusat
					Pemerintah Provinsi
					Seluruh OPD
					Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa
					BPK
15.	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian	BTN-15			
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	BTN-15.01	Inspektorat
					BAPPEDA
					BKAD
					Pemerintah Pusat
					Pemerintah Provinsi
					Seluruh OPD
					Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa
16.	Tata Kelola Administrasi	BTN-16			
			Pengolaan Administrasi	BTN-16.01	Sekretariat Daerah
					BAPPEDA

					BKAD
					Pemerintah Pusat
					Pemerintah Provinsi
					Seluruh OPD
					Pemerintah Kecamatan/ Kelurahan/Desa
					Ormas/Parpol/LSM

4) Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi Pemerintah Kabupaten Buton diidentifikasi melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Identifikasi Peta Lintas Fungsi Program Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Buton

No	Proses Utama/Pendukung/Manajerial	Kode	Peta Sub Proses	Kode	Peta Lintas Fungsi	Kode
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal	BTN-01				
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-01.01	Pengelolaan Perikanan Tangkap	BTN-01.01 CFM01
					Pengelolaan Perikanan Budidaya	BTN-01.01 CFM02
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	BTN-01.01 CFM03
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	BTN-01.01 CFM04
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-01.02	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BTN-01.02 CFM01
					Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	BTN-01.02 CFM02
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	BTN-01.02 CFM03
					Perizinan Usaha Pertanian	BTN-01.02 CFM04
					Penyuluhan Pertanian	BTN-01.02 CFM05

			Peningkatan Jaringan Irigasi	BTN-01.03	Pengelolaan Sumber Daya Air	BTN-01.03 CFM01
			Peningkatan Wisata Daerah	BTN-01.04	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	BTN-01.04 CFM01
					Peningkatan Pemasaran Pariwisata	BTN-01.04 CFM02
					Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	BTN-01.04 CFM03
					Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	BTN-01.04 CFM04
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-01.05	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	BTN-01.05 CFM01
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	BTN-01.05 CFM02
					Penanganan Kerawanan Pangan	BTN-01.05 CFM03
					Pengawasan Keamanan	BTN-01.05 CFM04
			Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	BTN-01.06	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	BTN-01.06 CFM01
					Pengawasan & Pemeriksaan Koperasi	BTN-01.06 CFM02
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	BTN-01.06 CFM03
					Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	BTN-01.06 CFM04

					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	BTN-01.06 CFM05
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	BTN-01.06 CFM06
					Pengembangan UMKM	BTN-01.06 CFM07
			Pengembangan Industri	BTN-01.07	Perencanaan & Pembangunan Industri	BTN-01.07 CFM01
					Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	BTN-01.07 CFM02
					Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	BTN-01.07 CFM03
			Peningkatan Iklim Usaha Kondusif	BTN-01.08	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	BTN-01.08 CFM01
					Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	BTN-01.08 CFM02
					Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	BTN-01.08 CFM03
					Pengembangan Ekspor	BTN-01.08 CFM04
					Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	BTN-01.08 CFM05
					Penggunaan dan Pemasaran Program Dalam Negeri	BTN-01.08 CFM06
			Peningkatan Promosi & Kemitraan Usaha	BTN-01.09	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	BTN-01.09 CFM01
					Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	BTN-01.09 CFM02

					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	BTN-01.09 CFM03
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	BTN-01.09 CFM04
2.	Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	BTN-02				
			Peningkatan Buton Lestari	BTN-02.01	Perencanaan Lingkungan Hidup	BTN-02.01 CFM01
					Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	BTN-02.01 CFM02
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	BTN-02.01 CFM03
					Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	BTN-02.01 CFM04
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	BTN-02.01 CFM05
					Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	BTN-02.01 CFM06
					Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	BTN-02.01 CFM07
					Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	BTN-02.01 CFM08

					Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	BTN-02.01 CFM09
					Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	BTN-02.01 CFM10
			Peningkatan Buton Bersih	BTN-02.02	Pengelolaan Persampahan	BTN-02.02 CFM01
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	BTN-02.02 CFM02
			Tanggap Bencana	BTN-02.03	Penanggulangan Bencana	BTN-02.03 CFM01
					Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	BTN-02.03 CFM02
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-02.04	Pengelolaan Perikanan Tangkap	BTN-02.04 CFM01
					Pengelolaan Perikanan Budidaya	BTN-02.04 CFM02
3.	Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan	BTN-03				
			Peningkatan Buton Cerdas	BTN-03.01	Pengelolaan Pendidikan	BTN-03.01 CFM01
					Pengembangan Kurikulum	BTN-03.01 CFM02
					Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	BTN-03.01 CFM03

					Pengendalian Perizinan Pendidikan	BTN-03.01 CFM04
			Peningkatan Pustaka Daerah	BTN-03.02	Pembinaan Perpustakaan	BTN-03.02 CFM01
					Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno	BTN-03.02 CFM02
			Peningkatan Buton Religius	BTN-03.03	Pengelolaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BTN-03.03 CFM01
			Peningkatan Buton Sehat	BTN-03.04	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BTN-03.04 CFM01
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	BTN-03.04 CFM02
					Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	BTN-03.04 CFM03
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	BTN-03.04 CFM04
			Peningkatan Keluarga Berencana	BTN-03.05	Pengendalian Penduduk	BTN-03.05 CFM01
					Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	BTN-03.05 CFM02
					Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	BTN-03.05 CFM03
			Peningkatan Layanan Sosial	BTN-03.06	Perlindungan dan Jaminan Sosial	BTN-03.06 CFM01
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-03.07	Pengelolaan Perikanan Budidaya	BTN-03.07 CFM01
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-03.08	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	BTN-03.08 CFM01

			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-03.09	Penyuluhan Pertanian	BTN-03.09 CFM01
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	BTN-03.10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	BTN-03.10 CFM01
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	BTN-03.10 CFM02
4.	Penurunan Angka Kemiskinan Daerah	BTN-04				
			Peningkatan Pendidikan Murah	BTN-04.01	Pengelolaan Pendidikan	BTN-04.01 CFM01
					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BTN-04.01 CFM02
			Pengembangan Jaminan Kesehatan	BTN-04.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BTN-04.02 CFM01
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	BTN-04.02 CFM02
					Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	BTN-04.02 CFM03
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	BTN-04.02 CFM04
			Peningkatan Rumah dan Lingkungan Layak	BTN-04.03	Pengelolaan Kawasan Permukiman	BTN-04.03 CFM01
					Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	BTN-04.03 CFM02
					Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	BTN-04.03 CFM03

					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	BTN-04.03 CFM04
			Peningkatan Layanan Sosial	BTN-04.04	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	BTN-04.04 CFM01
					Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial	BTN-04.04 CFM02
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	BTN-04.04 CFM03
					Penanganan Korban Bencana	BTN-04.04 CFM04
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	BTN-04.05	Pengelolaan Perikanan Tangkap	BTN-04.05 CFM01
					Pengelolaan Perikanan Budidaya	BTN-04.05 CFM02
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	BTN-04.05 CFM03
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-04.06	Penyediaan dan Pengembangan Sarana	BTN-04.06 CFM01
					Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BTN-04.06 CFM01
					Penyuluhan Pertanian	BTN-04.06 CFM01
			Pemberdayaan Desa	BTN-04.07	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	BTN-04.07 CFM01
			Peningkatan Pangan Daerah	BTN-04.08	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	BTN-04.08 CFM01
					Penanganan Kerawanan Pangan	BTN-04.08 CFM02

			Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM	BTN-04.09	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	BTN-04.09 CFM01
					Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	BTN-04.09 CFM02
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	BTN-04.09 CFM03
					Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	BTN-04.09 CFM04
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	BTN-04.09 CFM05
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	BTN-04.09 CFM06
					Pengembangan UMKM	BTN-04.09 CFM07
			Pengembangan Industri	BTN-04.10	Perencanaan dan Pembangunan Industri	BTN-04.10 CFM01
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	BTN-04.11	Perencanaan Tenaga Kerja	BTN-04.11 CFM01
					Penempatan Tenaga Kerja	BTN-04.11 CFM02
					Peningkatan Hubungan Industrial	BTN-04.11 CFM03
					Pengembangan Kawasan Transmigrasi	BTN-04.11 CFM04
					Pengembangan Jasa Konstruksi	BTN-04.11 CFM05
5.	Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga	BTN-05				
			Peningkatan Perlindungan Anak	BTN-05.01	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	BTN-05.01 CFM01
					Perlindungan Khusus Anak	BTN-05.01 CFM02

			Penyelenggaraan Berafirmatif Gender dan Perlindungan Perempuan	BTN-05.02	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	BTN-05.02 CFM01
					Peningkatan Perlindungan Perempuan	BTN-05.02 CFM02
					Peningkatan Kualitas Keluarga	BTN-05.02 CFM03
					Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	BTN-05.02 CFM04
			Peningkatan Pemuda Berprestasi	BTN-05.02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	BTN-05.03 CFM01
					Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	BTN-05.03 CFM02
					Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
6.	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	BTN-06				
			Peningkatan Buton Berbudaya	BTN-06.01	Pengembangan Kebudayaan	BTN-06.01 CFM01
					Pengembangan Kesenian Tradisional	BTN-06.01 CFM02
					Pembinaan Sejarah	BTN-06.01 CFM03
					Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	BTN-06.01 CFM04
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	BTN-06.01 CFM05
			Peningkatan Wisata Daerah	BTN-06.02	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	BTN-06.02 CFM01

					Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	BTN-06.02 CFM02
7.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	BTN-07				
			Peningkatan Pembinaan Desa	BTN-07.01	Penataan Desa	BTN-07.01 CFM01
					Peningkatan Kerjasama Desa	BTN-07.01 CFM02
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	BTN-07.01 CFM03
8.	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	BTN-08				
			Peningkatan Buton Aman	BTN-08.01	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BTN-08.01 CFM01
					Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BTN-08.01 CFM02
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	BTN-08.01 CFM03
					Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	BTN-08.01 CFM04
					Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BTN-08.01 CFM05
					Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	BTN-08.01 CFM06

9.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	BTN-09				
			Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan	BTN-09.01	Peningkatan Penyelenggaraan Jalan	BTN-09.01 CFM01
					Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	BTN-09.01 CFM02
					Pengelolaan Pelayaran	BTN-09.01 CFM03
					Perencanaan Kawasan Transmigrasi	BTN-09.01 CFM04
					Pembangunan Kawasan Transmigrasi	BTN-09.01 CFM05
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	BTN-09.01 CFM06
					Penataan Bangunan Gedung	BTN-09.01 CFM07
					Penataan Bangunan dan Lingkungannya	BTN-09.01 CFM08
					Penyelenggaraan Penataan Ruang	BTN-09.01 CFM09
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	BTN-09.02	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	BTN-09.02 CFM01
					Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	BTN-09.02 CFM02
					Pengembangan Perumahan	BTN-09.02 CFM03
					Pengelolaan Kawasan Permukiman	BTN-09.02 CFM04

					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	BTN-09.02 CFM05
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	BTN-09.02 CFM06
					Pengembangan Permukiman	BTN-09.02 CFM07
			Peningkatan Informatika	BTN-09.03	Pengelolaan Aplikasi Informatika	BTN-09.03 CFM01
			Peningkatan Produktivitas Pertanian	BTN-09.04	Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	BTN-09.04 CFM01
10.	Peningkatan ketersediaan energi listrik	BTN-10				
			Peningkatan Tanggap Energi	BTN-10.01	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	BTN-10.01 CFM01
					Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	BTN-10.01 CFM02
11.	Pengelolaan Data dan Informasi	BTN-11				
			Peningkatan Layanan dan Informasi	BTN-11.01	Pelayanan Penanaman Modal	BTN-11.01 CFM01
					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	BTN-11.01 CFM02
					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	BTN-11.01 CFM03
					Pendaftaran Penduduk	BTN-11.01 CFM04
					Pengelolaan Profil Kependudukan	BTN-11.01 CFM05
					Pencatatan Sipil	BTN-11.01 CFM06

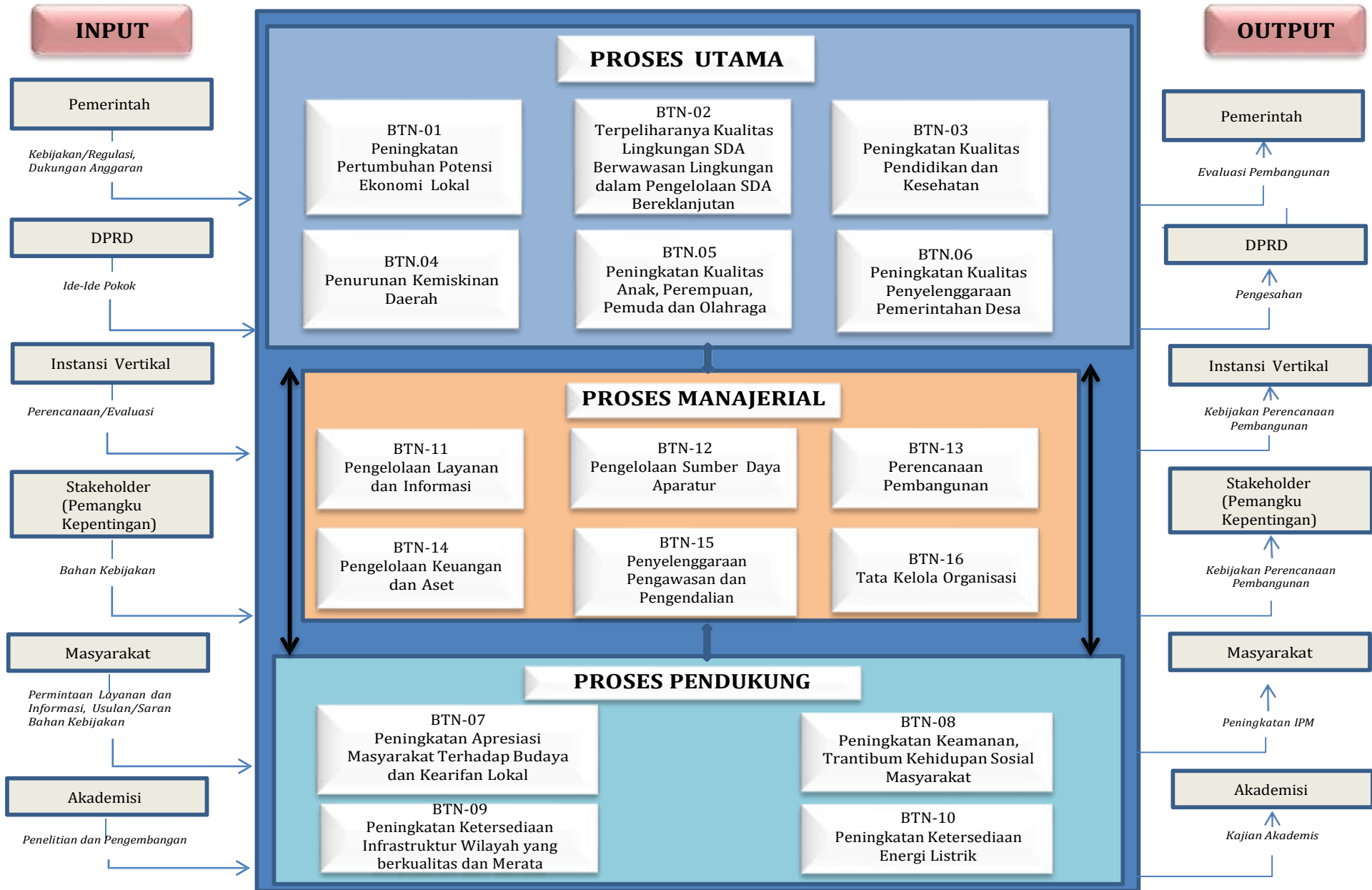
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	BTN-11.01 CFM07
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	BTN-11.01 CFM08
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	BTN-11.01 CFM09
12.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BTN-12				
			Peningkatan Kapasitas SDM	BTN-12.01	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	BTN-12.01 CFM01
					Pengembangan Sumber Daya Manusia	BTN-12.01 CFM02
					Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	BTN-12.01 CFM03
13.	Perencanaan Pembangunan	BTN-13				
			Perencanaan Daerah	BTN-13.01	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BTN-13.01 CFM01
					Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BTN-13.01 CFM02
					Penyelenggaraan Statistik Sektor	BTN-13.01 CFM03
					Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	BTN-13.01 CFM04
14.	Pengelolaan Keuangan dan Aset	BTN-14				
			Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran	BTN-14.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	BTN-14.01 CFM01

					Pengelolaan Keuangan Daerah	BTN-14.01 CFM02
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	BTN-14.01 CFM03
15.	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian	BTN-15				
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	BTN-15.01	Penyelenggaraan pengawasan	BTN-15.01 CFM01
					Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	BTN-15.01 CFM02
16.	Tata Kelola Administrasi	BTN-16				
			Pengolaan Administrasi	BTN-16.01	Pengelolaan Arsip	BTN-16.01 CFM01
					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	BTN-16.01 CFM02
					Perizinan Penggunaan Arsip	BTN-16.01 CFM03
					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BTN-16.01 CFM04
					Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	BTN-16.01 CFM05
					Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BTN-16.01 CFM06
					Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BTN-16.01 CFM07
					Penyelenggaraan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	BTN-16.01 CFM08

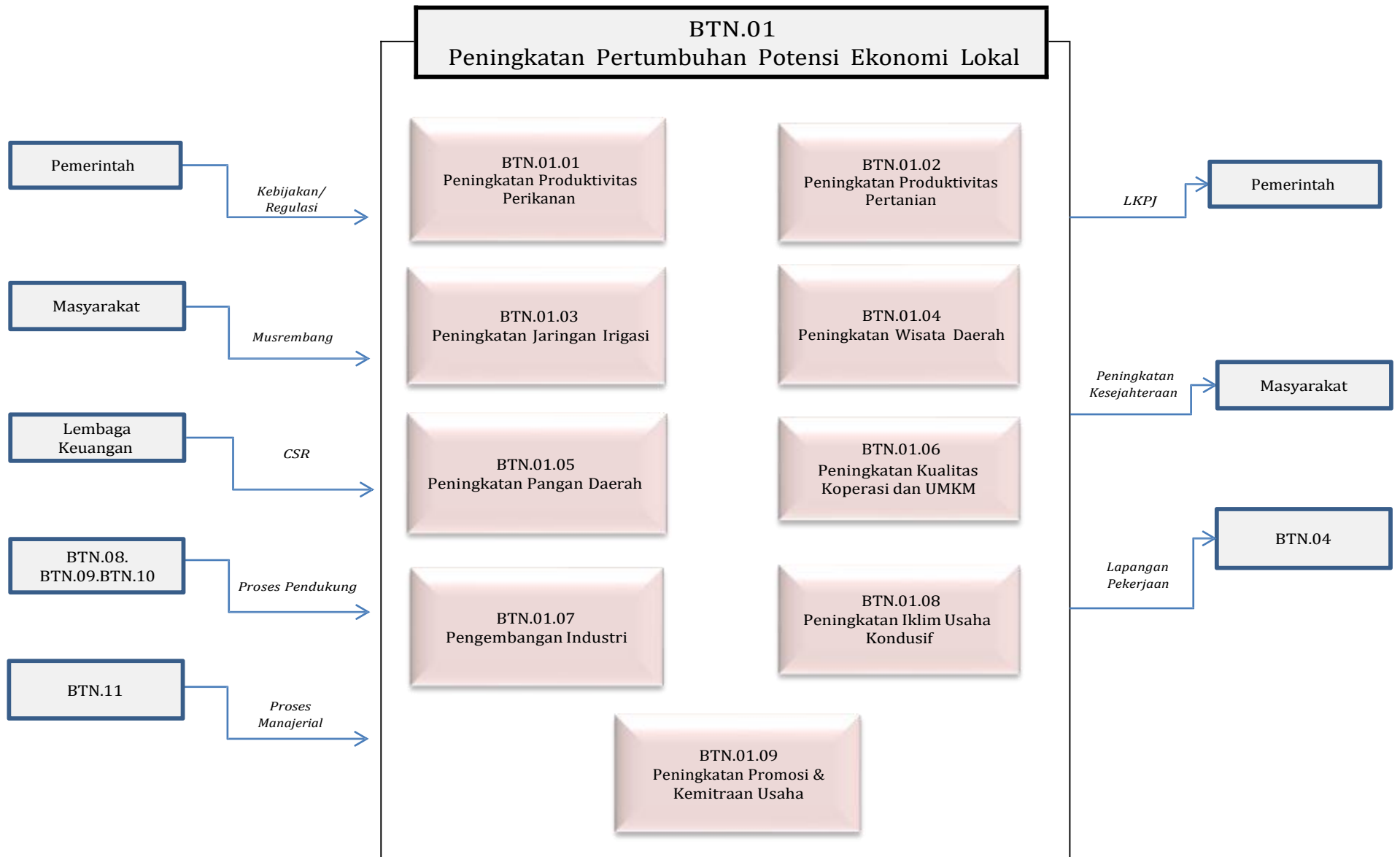
BAB III

BAGAN PETA PROSES BISNIS

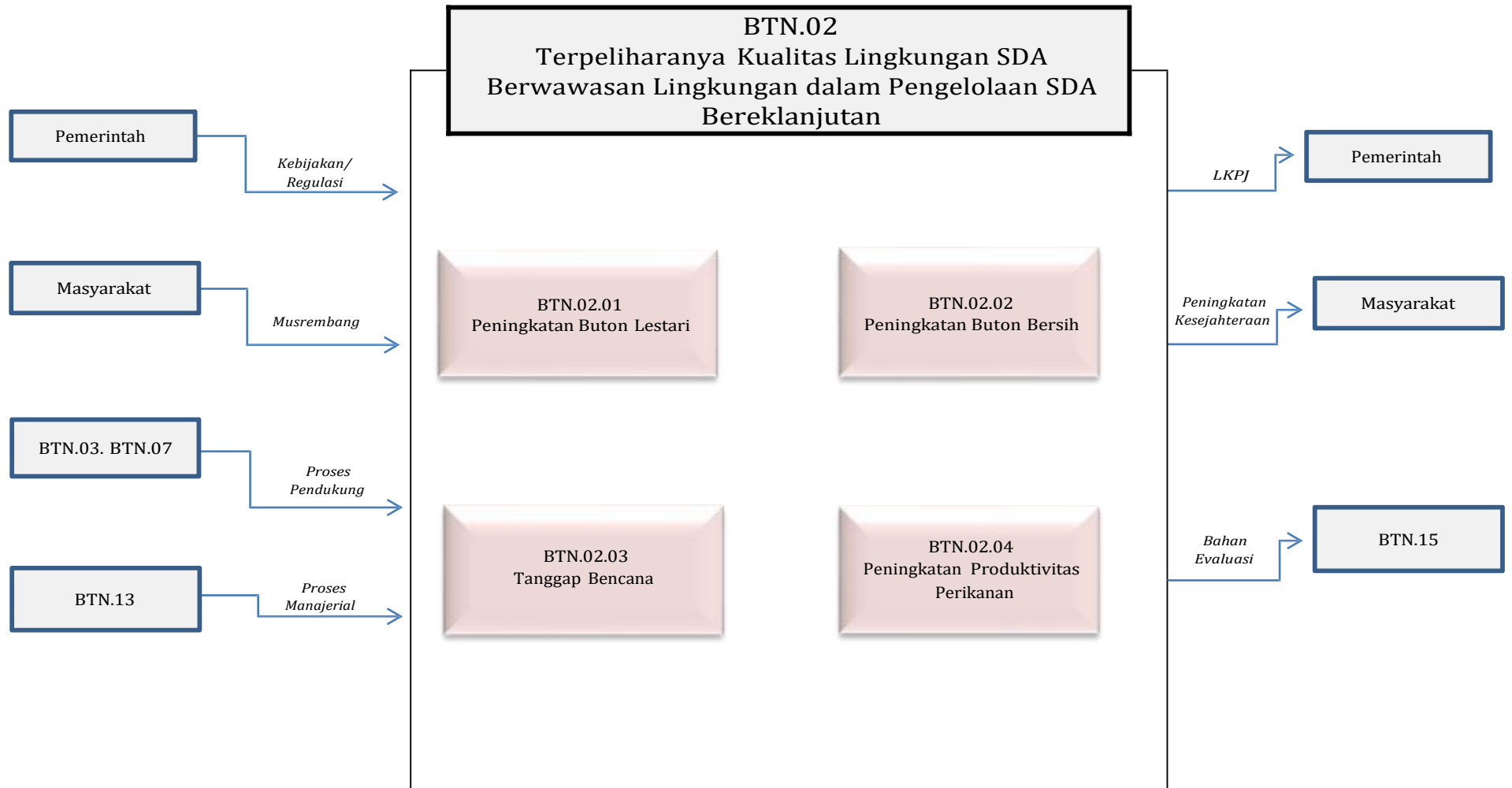
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON



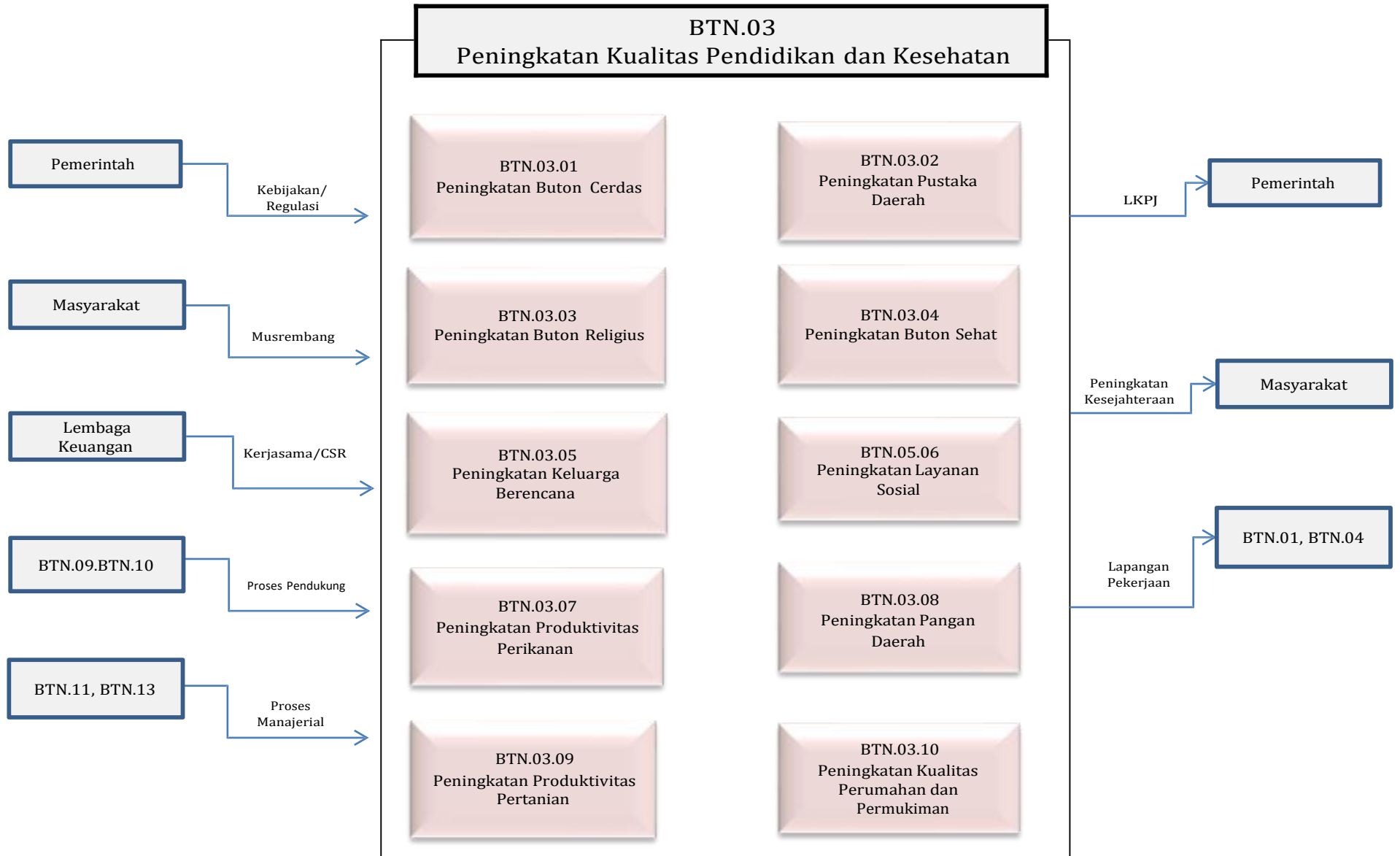
PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES

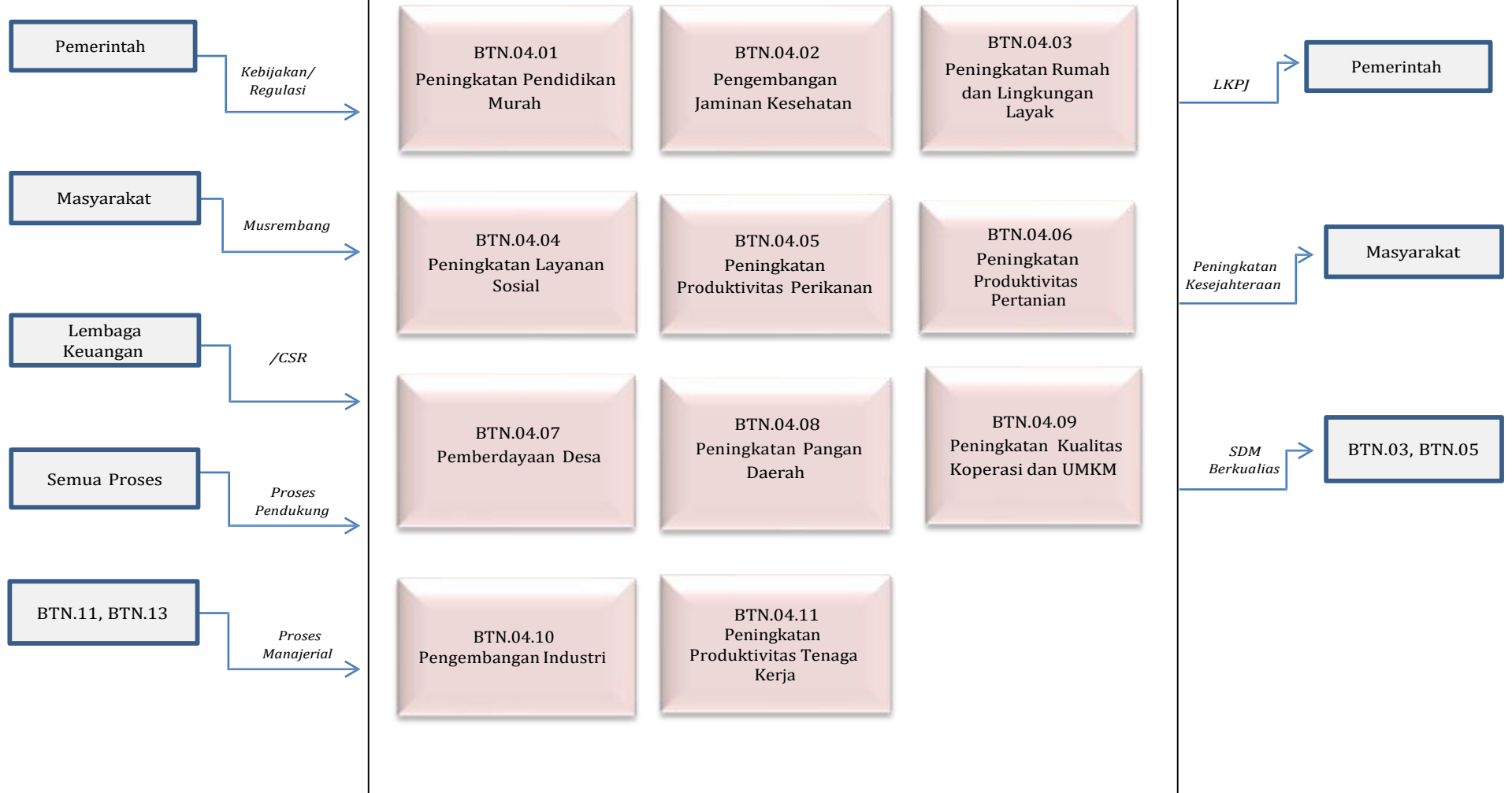


PETA SUB PROSES

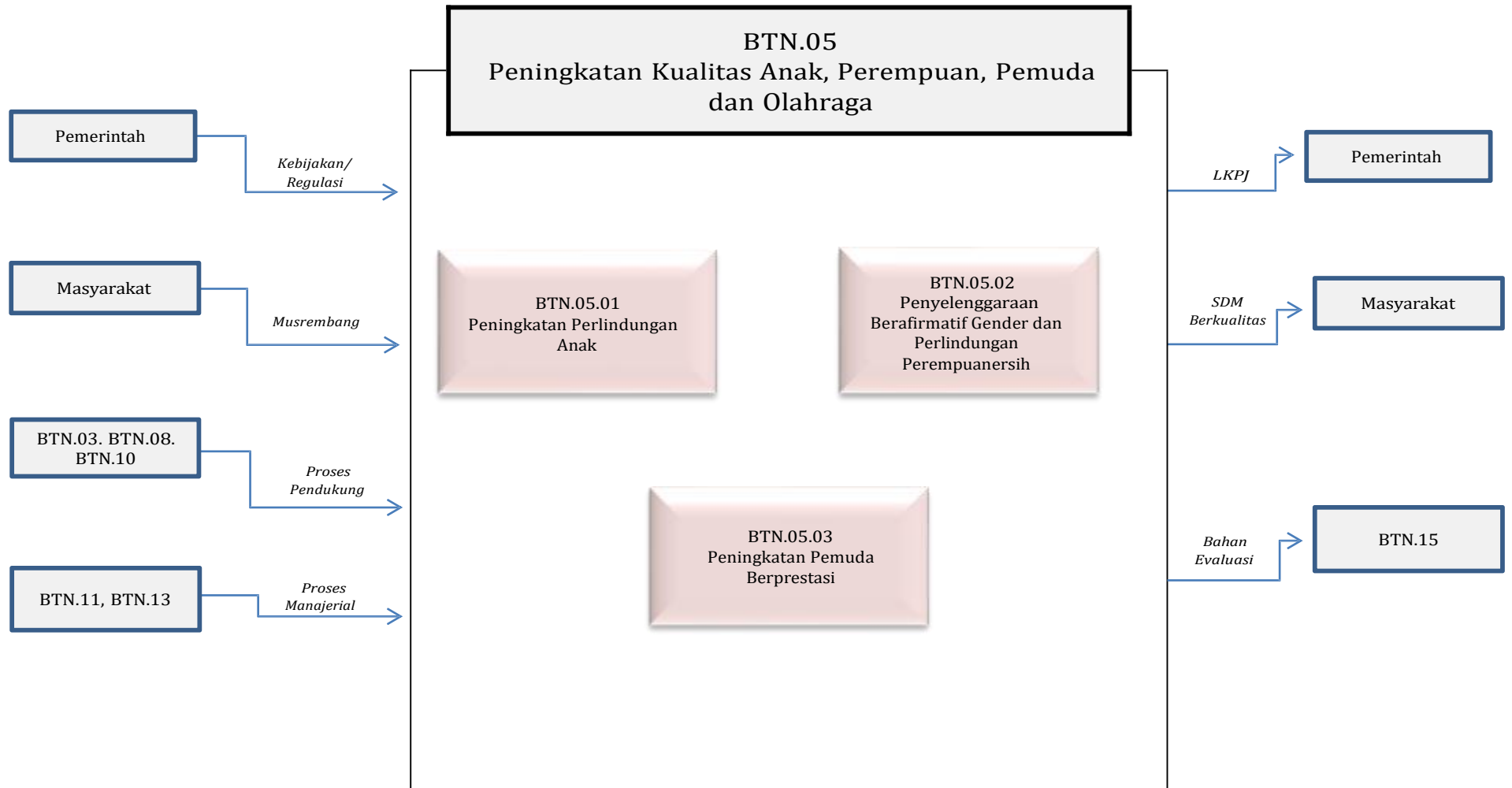


PETA SUB PROSES

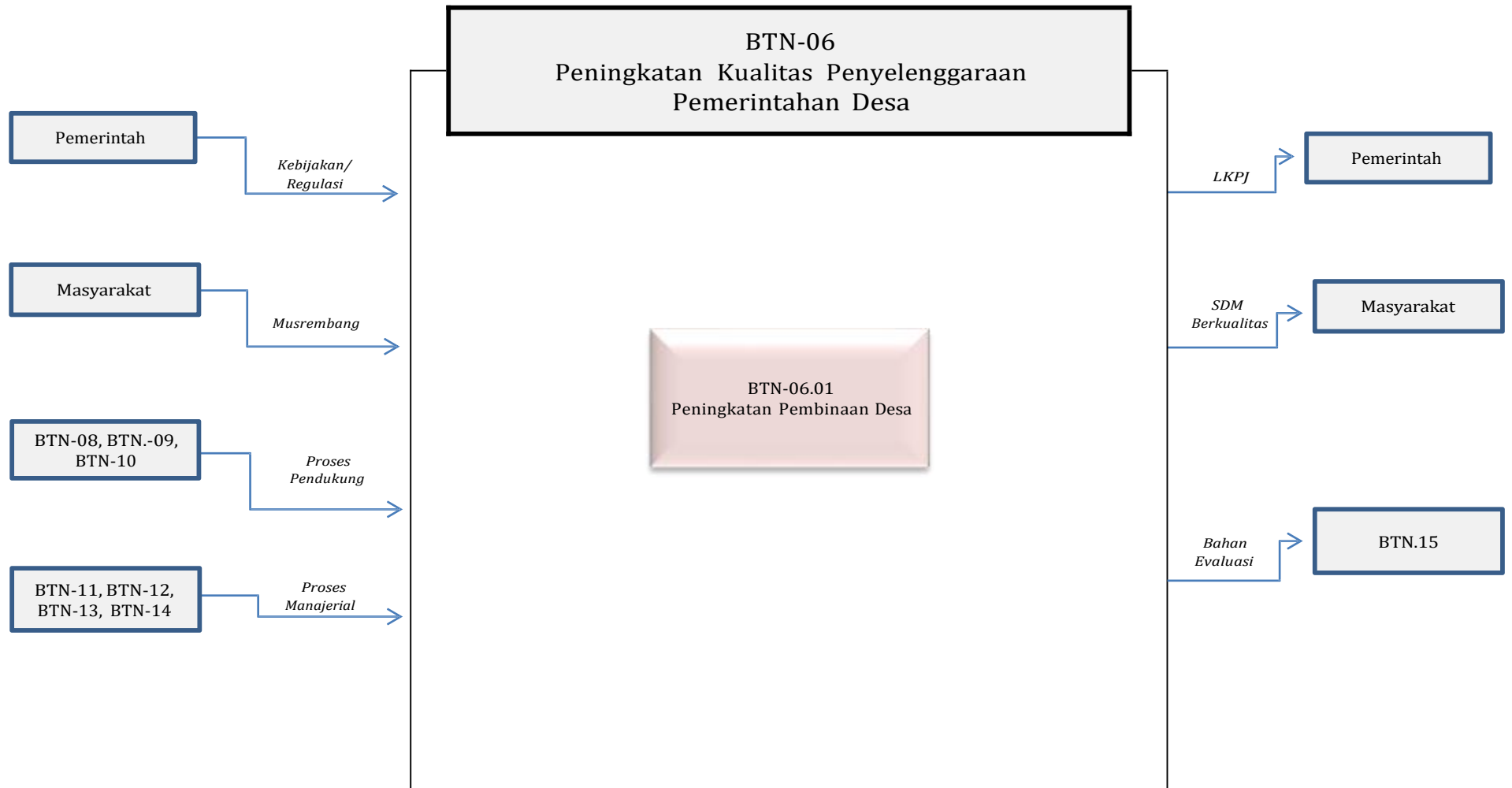
BTN-04 Penurunan Kemiskinan Daerah



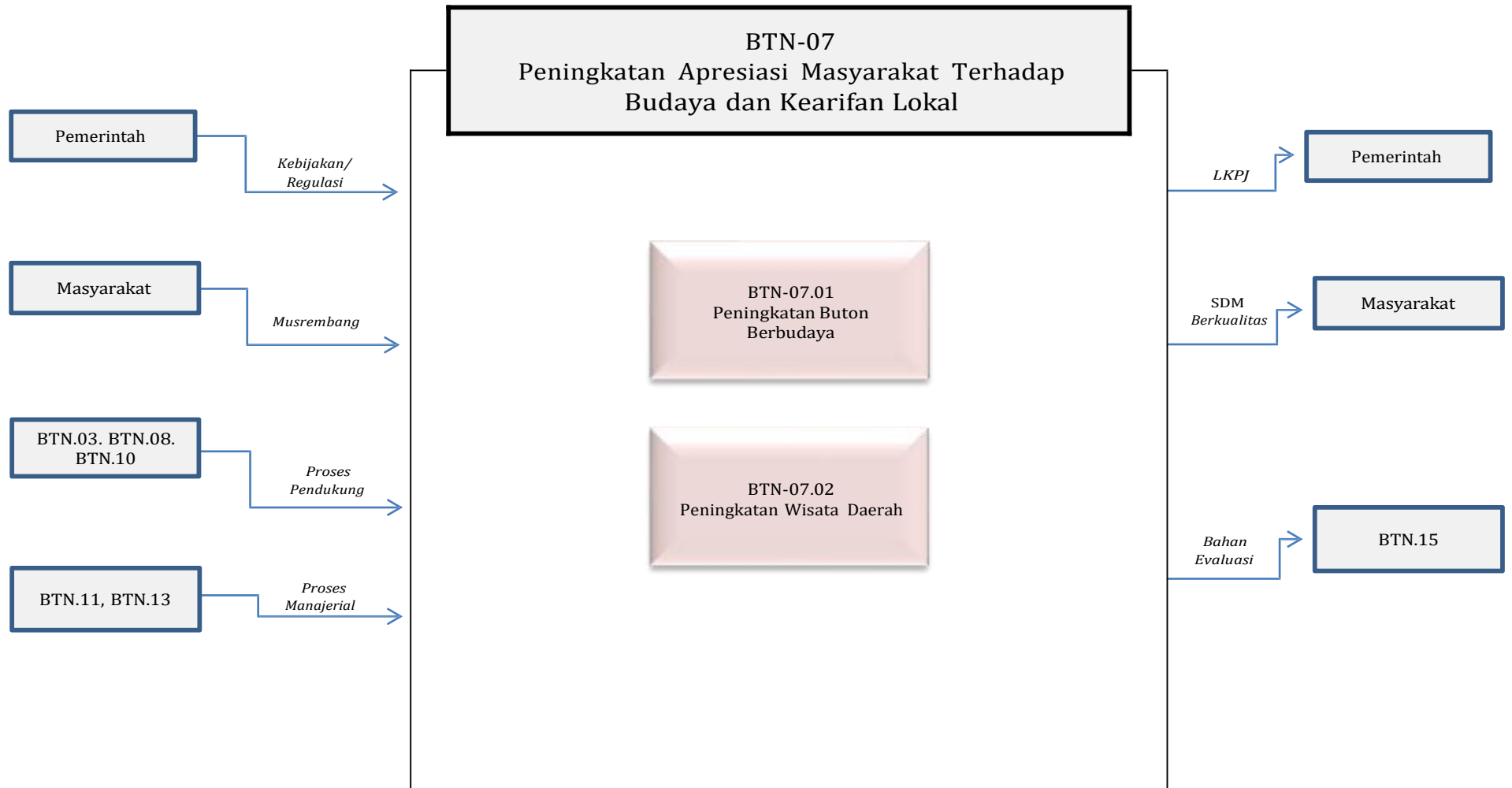
PETA SUB PROSES



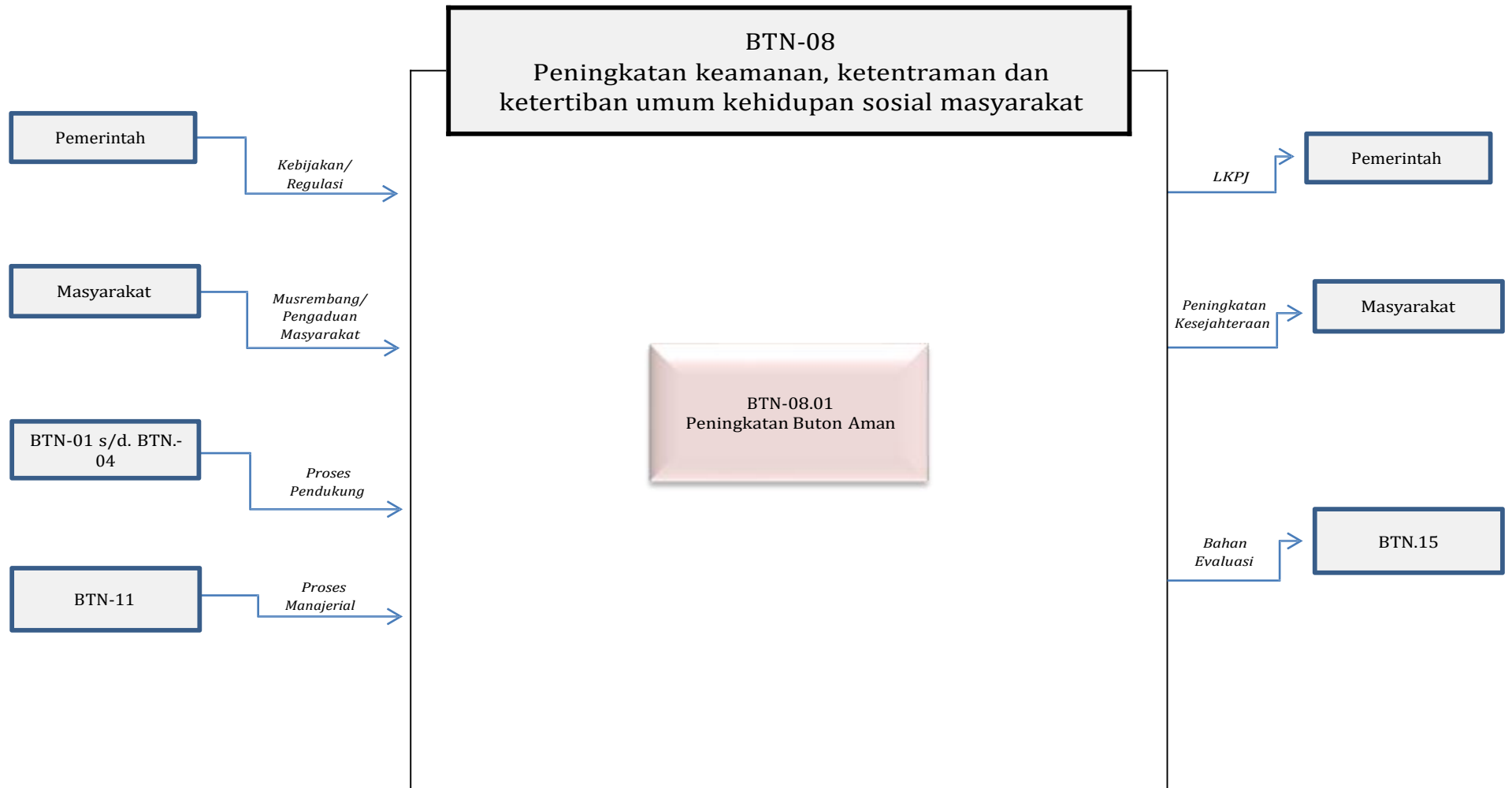
PETA SUB PROSES



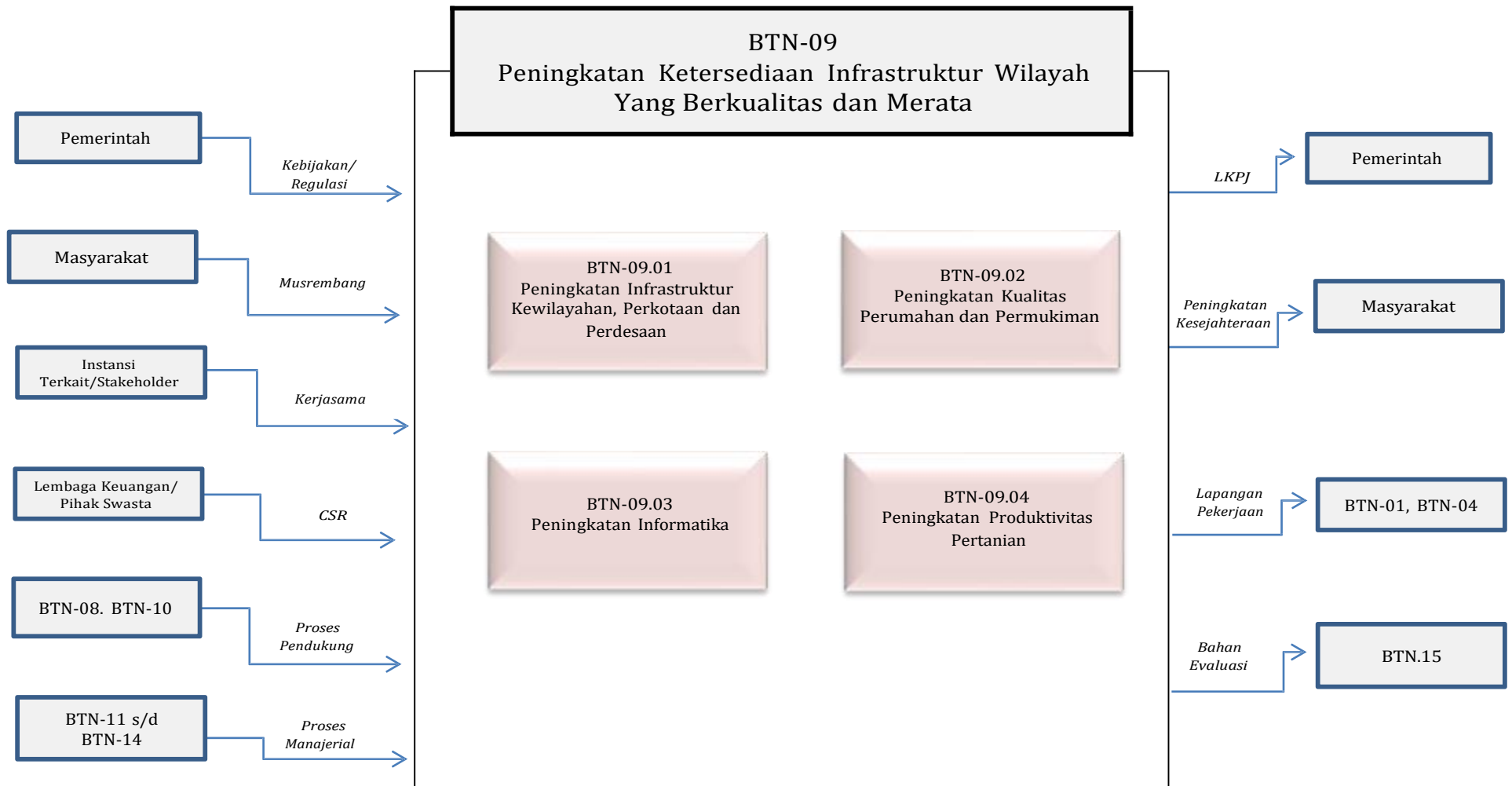
PETA SUB PROSES



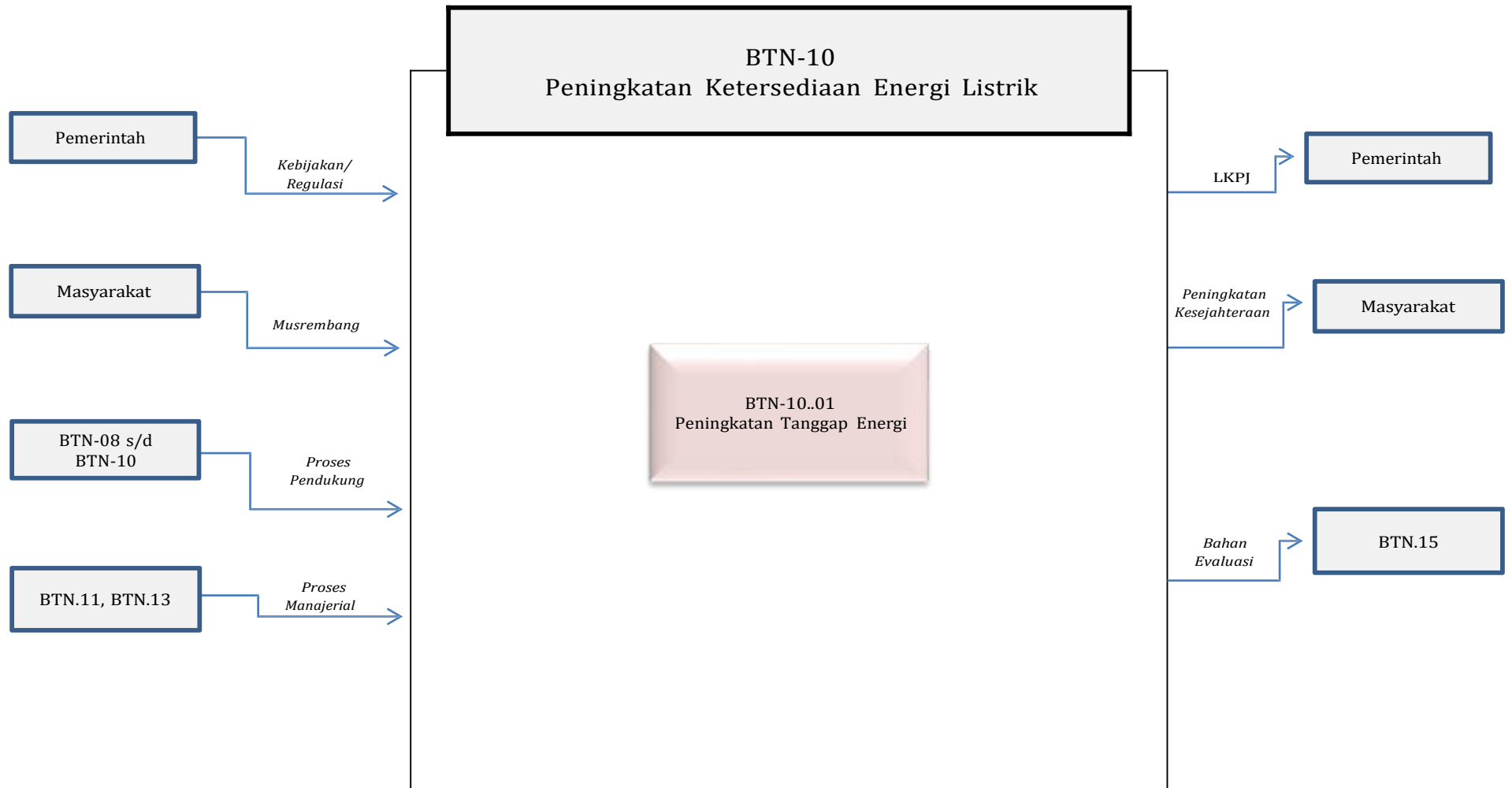
PETA SUB PROSES



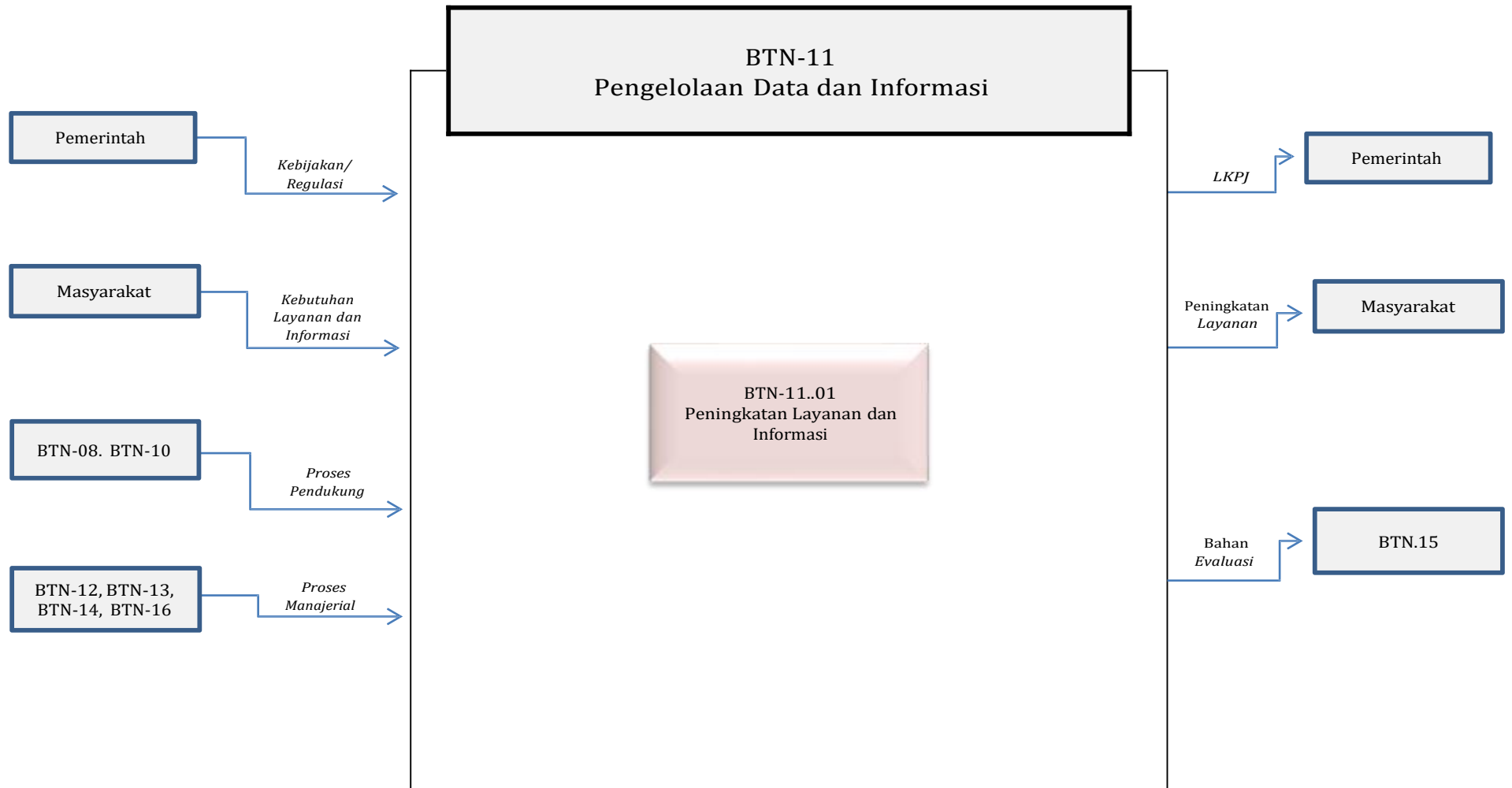
PETA SUB PROSES



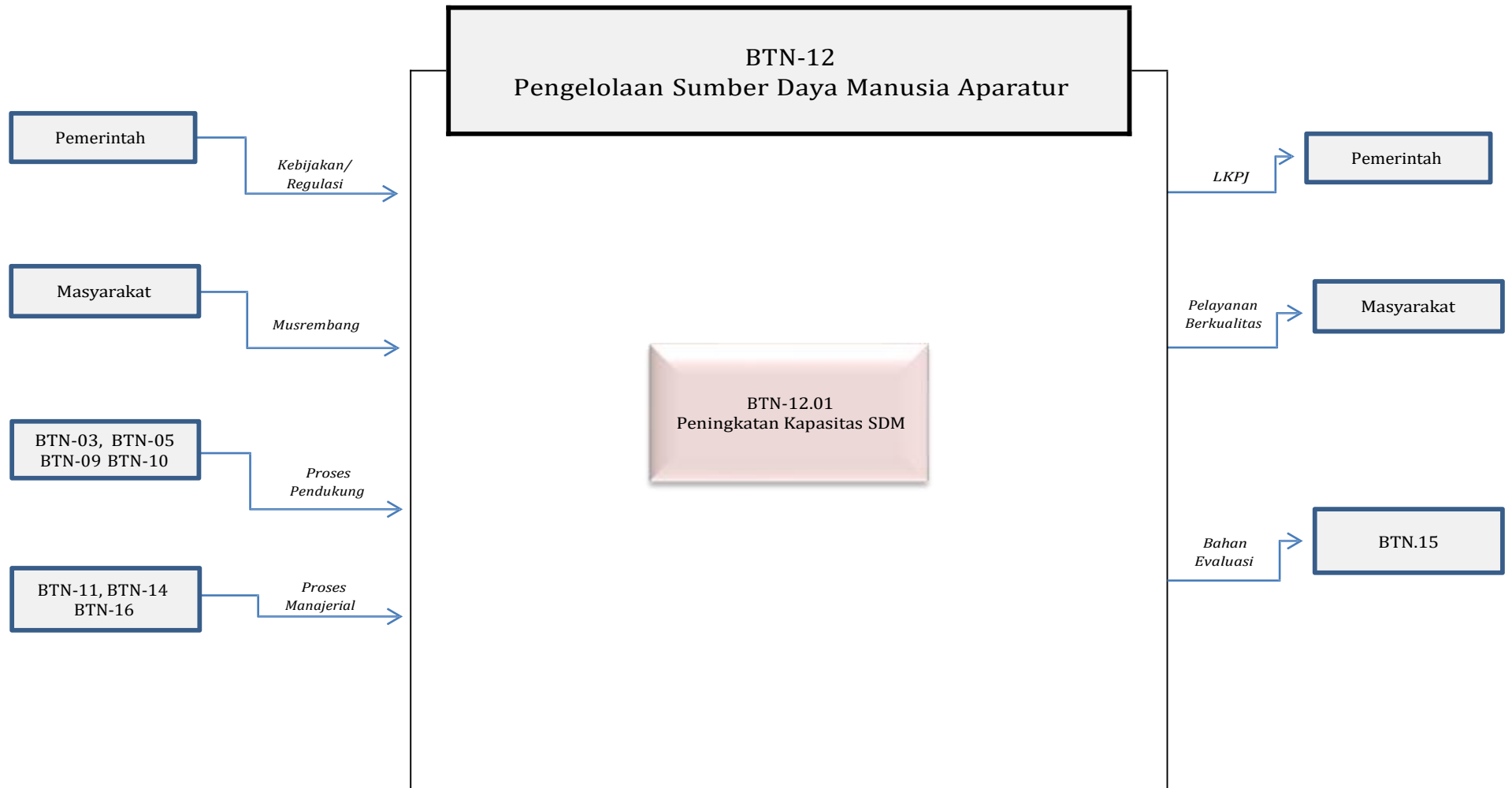
PETA SUB PROSES



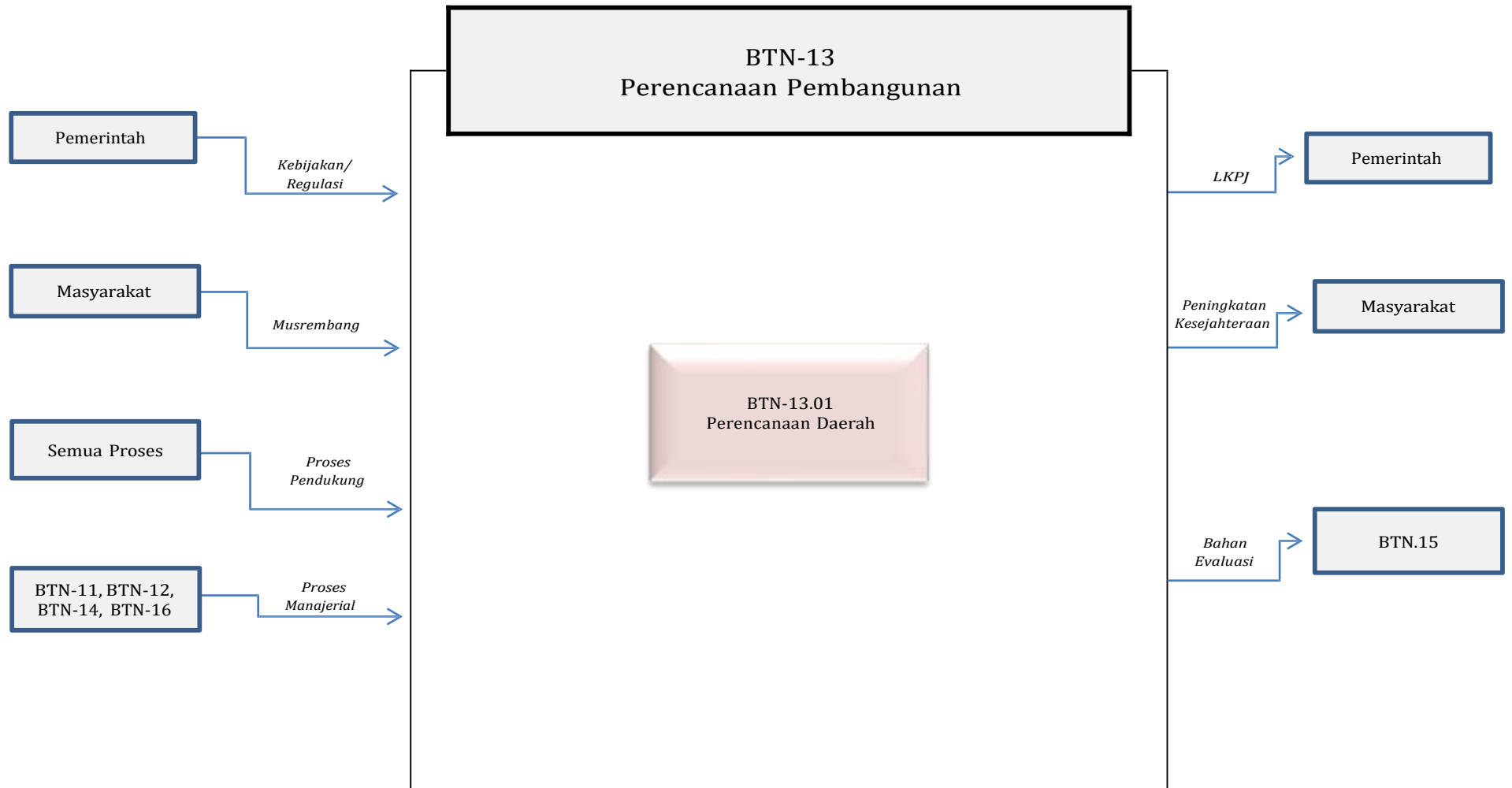
PETA SUB PROSES



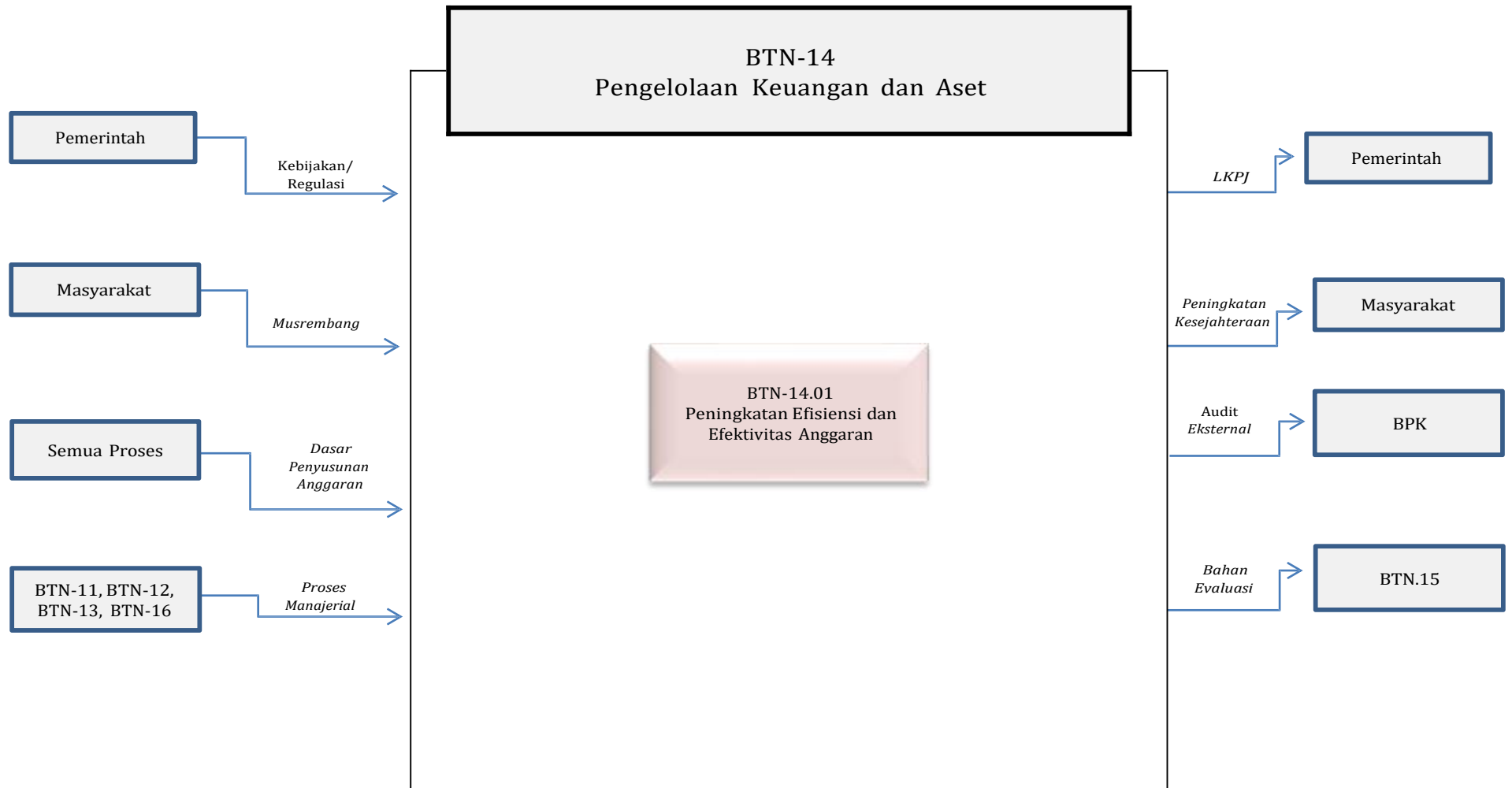
PETA SUB PROSES



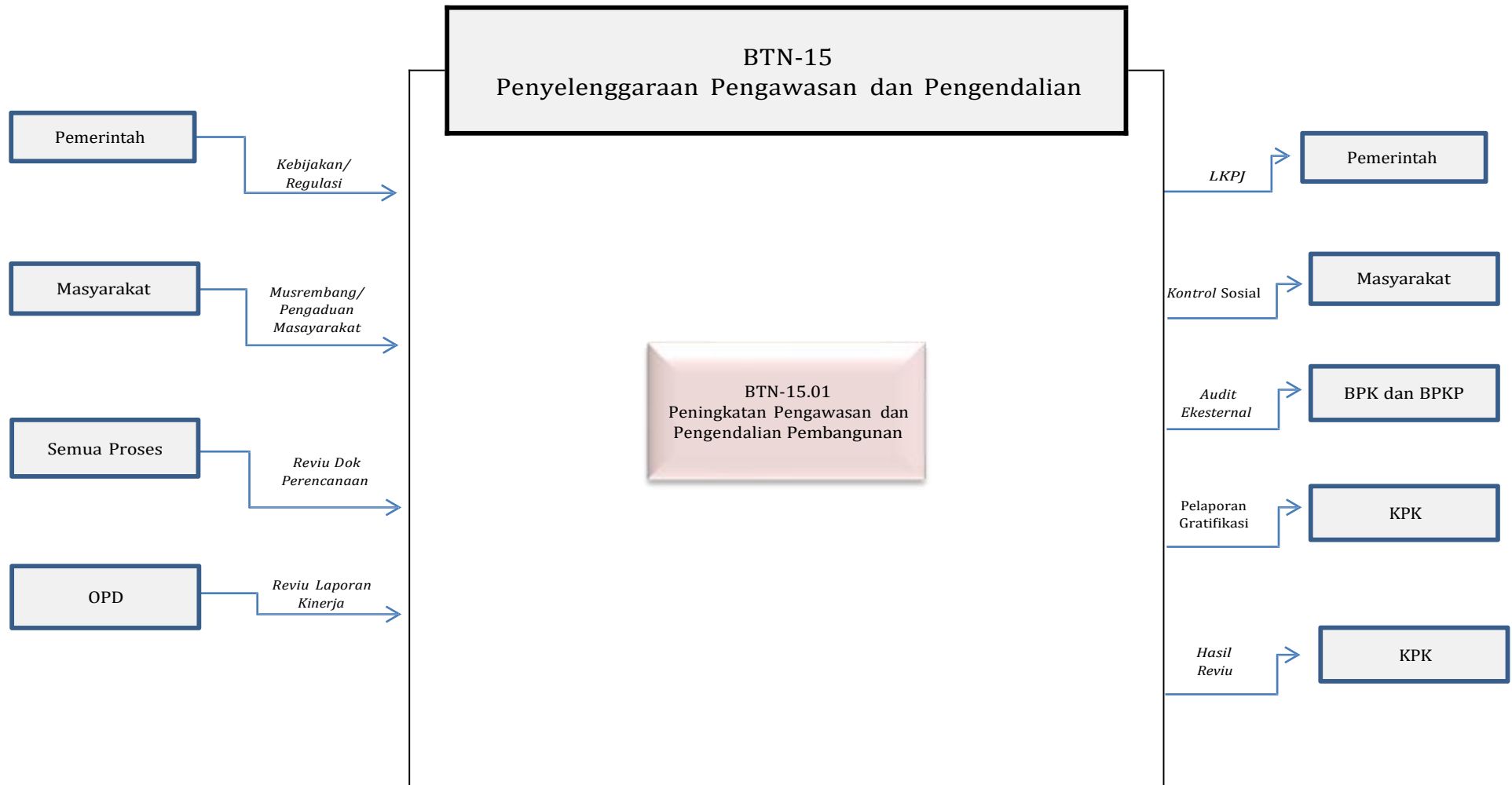
PETA SUB PROSES



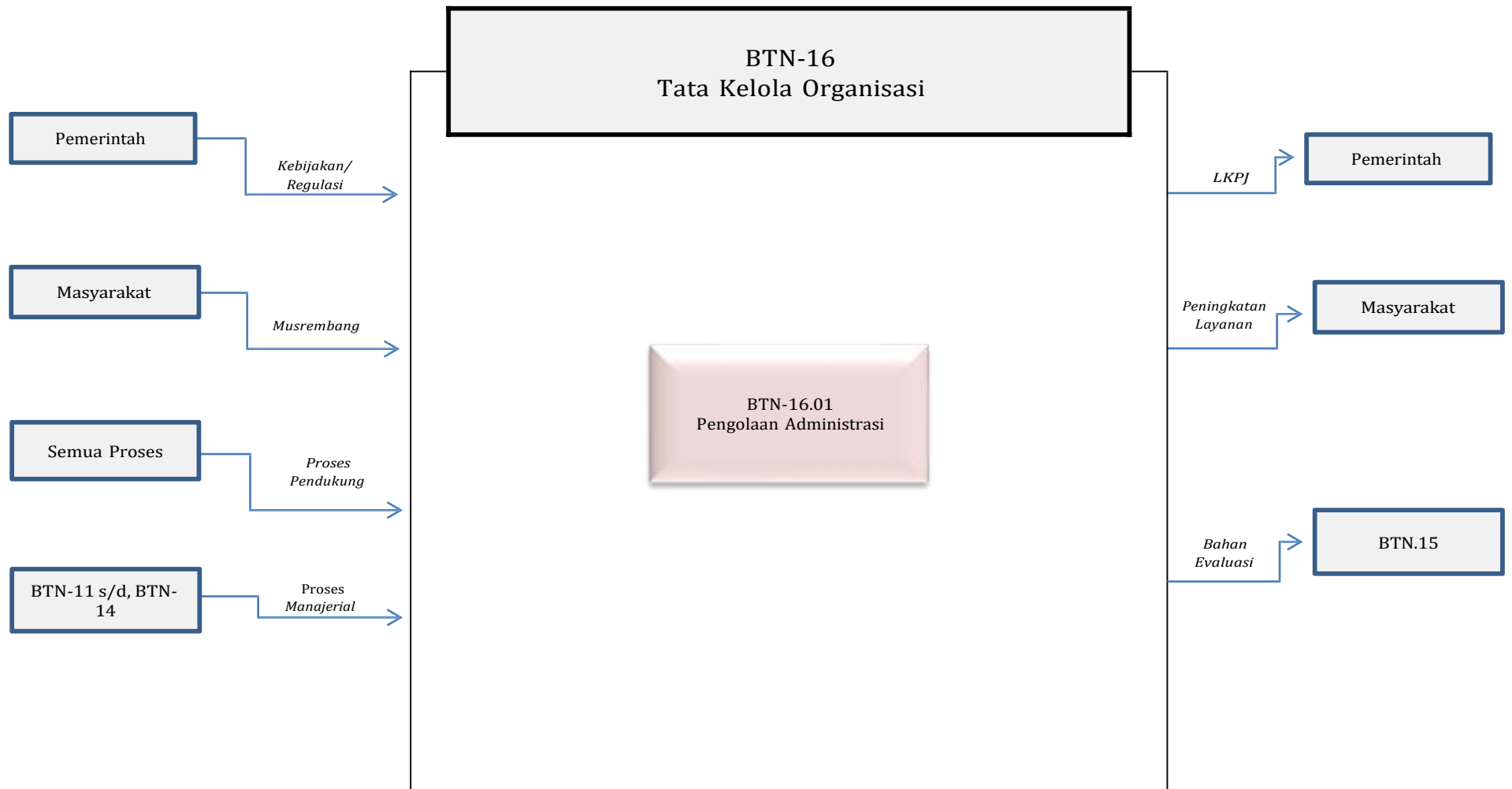
PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



PETA RELASI

BTN-01.01 Peningkatan Produktivitas Perikanan

DINAS PERIKANAN

Kelompok Nelayan
Penangkapan Ikan

Penyuluh Perikanan

Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

BAPEDDA

Pengawasan Sumber Daya
kelautan dan Perikanan
(PSDKP)

POLAIRUD dan TNI

Masyarakat

Balai Karantina Ikan

Balai Karantina Ikan

BPOM

PETA RELASI

BTN-01.02 Peningkatan Produktivitas Pertanian

DINAS PERTANIAN

SETDA

Petani/Kelompok Tani

Pemerintah Kecamatan/desa

PP Puskesmas,
Poktan/Gapoktan

PETA RELASI

BTN-01.03 Peningkatan Jaringan Irigasi

DINAS PUPR

BAPPEDA

BKAD

Dinas Lingkungan Hidup

Bagian Hukum

Bagian Administrasi
Pembangunan

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

BPBD

Dinas Ketahanan Pangan

Pemerintah Kecamatan

PETA RELASI

BTN-01.04 Peningkatan Wisata Daerah

Dinas Pariwisata

BAPPEDA

BKAD

Dinas PUPR

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perindustrian

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas KOMINFO

Dinas Pendidikan

Pelaku Usaha Ekraf
(Masyarakat)

Dinas Perdagangan

BALITBANGDA

Dinas Kebudayaan

DEKRANASDA

Dinas Pemuda dan Olahraga

Bagian umum sekretariat

Lembaga Pemuda Pariwisata
(Pokdarwis dan HPI)

PETA RELASI

BTN-01.05 Peningkatan Pangan Daerah

Dinas Ketahanan Pangan

BAPPEDA

Badan Pangan Nasional

Dinas Perikanan

Dinas Perdagangan

Dinas Perhubungan
Inspektorat

Badan Pusat Statistik

Bulog

BPBD

Dinas Sosial

Dinas Kesehatan

Dinas Perindustrian

Satgas Pangan

Loka POM

PETA RELASI

BTN-01.06
Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM

DPM PTSP

KPP

Masyarakat Anggota Koperasi

Pendamping Koperasi

Koperasi

Dinas Perdagangan

Dinas Perikanan

Dinas Pertanian

BAPEDDA

Masyarakat Pelaku UMKM

PETA RELASI

BTN-01.07 Pengembangan Industri

Dinas Perindustrian

Kelompok Industri Kecil
Menengah

DPM PTSP

BPOM

BAPPEDA

Dinas Kesehatan

Kementrian Agama

Kementrian Perindustrian

PETA RELASI

BTN-01.08
Peningkatan Iklim Usaha Kondusif

Dinas Perdagangan

Pedagang pasar

BAPPEDA

DPMPTSP

Pelaku Usaha

SATPOLPP

PKL dan Pedagang Asongan

UPT METROLOGI

BSML

DIREKTORAT METROLOGI

BKAD

BAPENDA

Bagian Perekonomian Setda

Dinas Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan

Bulog

Media Massa

Perusahaan/calon eksportir

PETA RELASI

BTN-01.09
Peningkatan Promosi & Kemitraan Usaha

DPMPTSP

Dinas Terkait

Bagian Hukum

KEMENKUMHAM

DPRD

Sekda

Pelaku Usaha

Dinas Pendidikan

Perguruan Tinggi

Kecamatan

Dinas Sosial

Disdukcapil

BKAD

PETA RELASI

BTN-02.01 Peningkatan Buton Lestari

Dinas Lingkungan Hidup

Sekretariat Daerah

OPD/ Instansi Terkait

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sultra

Kementerian Lingkungan
Hidup

BAPPEDA

DIR PPA KLHK

Pelaku Usaha/Kegiatan
Penghasil Limbah B3

DPMPSTP

Narasumber

Desa/Kelurahan

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi

Aparat Penegak Hukum

Balai Prasarana Pemukiman
Wilayah

Kementerian PUPR

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

PETA RELASI

BTN-02.02
Peningkatan Buton Bersih

Dinas Lingkungan Hidup

Balai Prasarana Pemukiman
Wilayah

Dinas PUPR

BPKAD

BAPPEDA

BPBD

Kecamatan

PETA RELASI

BTN-02.03 Tanggap Bencana

BPBD

TNI/POLRI

Dinas Sosial

Dinas PUPR

PEMERINTAH
KEC/DESA/KELURAHAN

Masyarakat/Dunia Usaha

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Kelompok Satuan Relawan
Kebakaran

Puskesmas

PETA RELASI

BTN-02.04 Peningkatan Produktivitas Perikanan

Dinas Perikanan

Kelompok Nelayan
Penangkapan Ikan

Penyuluh Perikanan

DPMPPTSP

BAPEDDA

BPOM

Kelompok Masyarakat
Pengolah dan Pemasar

PETA RELASI

BTN-03.01 Peningkatan Buton Cerdas

Dinas Pendidikan

Dinas Kependudukan dan
Capil

BPS

Satuan Pendidikan Sekolah
PAUD,SD dan SMP

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Masyarakat

BKPSDM

BKAD

DPMPTSP

PETA RELASI

BTN-03.02 Peningkatan Pustaka Daerah

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Pendidikan

Kecamatan

Masyarakat Anggota
Perpustakaan

Pustakawan

Dinas Kebudayaan

Masyarakat Adat Lokal

Arsiparis

PETA RELASI

BTN-03.03 Peningkatan Buton Religius

Dinas Pendidikan

Perguruan Tinggi

Kecamatan

Dinas Sosial

Disdukcapil

BKAD

PETA RELASI

BTN-03.04 Peningkatan Buton Sehat

Dinas Kesehatan

RSUD

BPJS

Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB
BKKBN

Labkesda

Dinas Ketahanan Pangan

Camat/Lurah/Kades

Puskesmas

BKPSDM

Apotek

Dinas PUPR

Dinas Sosial

Masyarakat

PETA RELASI

BTN-03.05 Peningkatan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Sekretariat Daerah

OPD/ Instansi Terkait

BKKBN Perwakilan
Prov.Sultra

BKKBN

BAPPEDA

PETA RELASI

BTN-03.06
Peningkatan Layanan Sosial

Dinas Sosial

Disdukcapil

Desa/Kelurahan

KPM (Keluarga Penerima
Manfaat)

Bank Himbara dan PT Pos

PETA RELASI

BTN-03.07
Peningkatan Produktivitas Perikanan

Dinas Perikanan

Balai Karantina Ikan

Kelompok Pembudidaya Ikan

Penyuluh Perikanan

BAPEDDA

PETA RELASI

BTN-03.08
Peningkatan Pangan Daerah

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian

Dinas Perikanan

Dinas Perdagangan

Dinas perhubungan

Inspektorat

BPS

Bulog

PETA RELASI

BTN-03.09
Peningkatan Produktivitas Pertanian

Dinas Pertanian

SETDA

Petani/Kelompok Tani

PETA RELASI

BTN-03.10
Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Dinas PUPR

BAPPEDA

Bagian Hukum

BPBD

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Perdagangan

Kecamatan

PETA RELASI

BTN-04.01 Peningkatan Pendidikan Murah

Dinas Kependudukan dan
Capil

BPS

Satuan Pendidikan Sekolah
PAUD,SD dan SMP

Dinas Sosial

Kecamatan

PETA RELASI

BTN-04.02 Pengembangan Jaminan Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSUD

BPJS

Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB
BKKBN

Labkesda

Dinas Ketahanan Pangan

Camat/Lurah/Kades

Puskesmas

BKAD

BKPSDM

Apotek

Dinas PUPR

Dinas Sosial

Masyarakat

PETA RELASI

BTN-04.03 Peningkatan Rumah dan Lingkungan Layak

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Dinas PUPR

BAPPEDA

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kesehatan

Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Kemeterian PUPR

Bagian Hukum

BPBD

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Perdagangan

Kecamatan

PETA RELASI

BTN-04.04 Peningkatan Layanan Sosial

Dinas Sosial

Kementerian Sosial

Desa/Kelurahan

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Komunitas Adat Terpencil
(KAT)

Dinas Sosial Provinsi Sultra

Bank Himbara dan PT Pos

Lansia, Disabilitas dan Anak
Terlantar

Dinas Kependudukan dan
Capil

KPM (Keluarga Penerima
Manfaat)

BPBD

Masyarakat

PETA RELASI

BTN-04.05
Peningkatan Produktivitas Perikanan

Dinas Perikanan

Kelompok Nelayan
Penangkapan Ikan

Penyuluh Perikanan

DPMPTSP

BAPEDDA

Balai Karantina Ikan

Kelompok Pembudidaya Ikan

BPOM

Kelompok Masyarakat
Pengolah dan Pemasar

PETA RELASI

BTN-04.06
Peningkatan Produktivitas Pertanian

Dinas Pertanian

SETDA

Petani/Kelompok Tani

Pemerintah Kecamatan/desa

BPP Puskeswan

Poktan/Gapoktan

PETA RELASI

BTN-04.07
Pemberdayaan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pemerintah Desa

Lembaga Adat

PETA RELASI

BTN-04.08 Peningkatan Pangan Daerah

Dinas Ketahanan Pangan

BAPPEDA

Badan Pangan Nasional

Dinas Perikanan

Dinas Perdagangan

Dinas Perhubungan
Inspektorat

Badan Pusat Statistik

Bulog

BPBD

Dinas Sosial

Dinas Kesehatan

Dinas Perindustrian

Satgas Pangan

Loka POM

PETA RELASI

BTN-04.09
Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM

DPM PTSP

KPP

Masyarakat Anggota Koperasi

Pendamping Koperasi

Koperasi

Dinas Perdagangan

Dinas Perikanan

Dinas Pertanian

BAPEDDA

Masyarakat Pelaku UMKM

PETA RELASI

BTN-04.10
Pengembangan Industri

Dinas Perindustrian

Kelompok Industri Kecil
Menengah

DPMPTSP

BPOM

BAPEDDA

PETA RELASI

BTN-04.11 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Perusahaan

Kelompok Masyarakat Pencari
Kerja

BAPPEDA

KEMNAKER RI

Kantor Imigrasi Kota/Provinsi

BPJS KETENAGAKERJAAN

Tenaga Kerja

Balai Latihan Kerja (BLK)
Provinsi

Dinas PUPR

Bagian Hukum Setda

BKAD

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kecamatan

PETA RELASI

BTN-05.01 Peningkatan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Dinas Kependudukan dan
Capil

PPKB

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja

RSUD

Dinas Kepolisian

Kejaksaan

Pengadilan Negeri

Kementerian Agama

PETA RELASI

BTN-05.02 Penyelenggaraan Berafirmatif Gender dan Perlindungan Perempuan

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Dinas Kependudukan dan
Capil

PPKB

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja

RSUD

Dinas Kepolisian

Kejaksaan

Pengadilan Negeri

Kementerian Agama

Pengadilan Agama

BAPPEDA

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Badan Pusat Statistik

PETA RELASI

BTN-05.03 Peningkatan Pemuda Berprestasi

Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

BAPPEDA

BKAD

KESBANGPOL

Organisasi Kepemudaan
Masyarakat

Dinas Pendidikan

KWARCAB

KONI

PETA RELASI

BTN-06.01 Peningkatan Pembinaan Desa

Pemerintah Desa

Kementerian Desa

Lembaga Adat

Pihak Ketiga

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Bagian Hukum Setda

PETA RELASI

BTN-07.01 Peningkatan Buton Berbudaya

Dinas Kebudayaan

Badan Perencana
Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Pariwisata

Brida

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Perindustrian

Dinas Perdagangan

Tokoh masyarakat

Dinas PUPR

Dinas Komunikasi dan
Informatika

PETA RELASI

BTN-07.02 Peningkatan Wisata Daerah

Dinas Pariwisata

Dinas KOMINFO

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Perindustrian

Dinas Kebudayaan

DEKRANASDA

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pelaku Usaha Ekraf
(Masyarakat)

Dinas Tenaga kerja

Lembaga Pemuda Pariwisata
(Pokdarwis dan HPI)

PETA RELASI

BTN-08.01 Peningkatan Buton Aman

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SETDA

Pelajar

DPRD

Partai Politik

Masyarakat

ORMAS/LSM

BNN

SATPOLPP

FORKOPIMDA

TNI/POLRI

FKUB

Dinas Perhubungan

Kecamatan

PETA RELASI

BTN-09.01 Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan

DINAS PUPR

BAG. HUKUM SETDA

DINAS PERHUBUNGAN

KECAMATAN

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERKIM

BPBD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAPPEDA

BKAD

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

Kelurahan/Desa

SATPOLPP

Badan Pertanahan Nasional

BAPPEDA Provinsi

Bagian Administrasi
Pembangunan Setda

Dinas Pariwisata

Dinas Kebudayaan

Dinas Perdagangan

Dinas Perindustrian

Dinas Ketahanan Pangan

BPBD

Pemerintah Desa

PETA RELASI

BTN-09.02 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas lingkungan Hidup

Bappeda

Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Kemeterian PUPR

BPBD

Dinas Kesehatan

Bagian Hukum Setda

Dinas Perindustrian

Dinas Perdagangan

Dinas Ketahanan Pangan

Kecamatan

Dinas Sosial

BKAD

Dinas Kesehatan

PETA RELASI

BTN-09.03 Peningkatan Informatika

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kementerian Terkait

Pemerintah Provinsi

Bappeda

Bagian Hukum

Pemdes

Semua OPD

PETA RELASI

BTN-09.04 Peningkatan Produktivitas Pertanian

Dinas Pertanian

Bagian Perekonomian Setda

Bagian Hukum Setda

Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa

Pemerintah Kecamatan/desa,

BPP

Puskesmas,

Poktan/Gapoktan

PETA RELASI

BTN-10.01
Peningkatan Tanggap Energi

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas lingkungan Hidup

Bappeda

Dinas Perhubungan,

BKAD

Inspektorat

PETA RELASI

BTN-11.01
Peningkatan Layanan dan Informasi

Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

Masyarakat/Pelaku Usaha

Dinas Kependudukan dan
Capil

Inspektorat

Kecamatan/Kelurahan/Desa,

Sekretariat Daerah

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Perangkat Daerah

Masyarakat

Lembaga Sandi Negara

PETA RELASI

BTN-12.01 Peningkatan Kapasitas SDM

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Seluruh Perangkat Daerah

Kecamatan, Kelurahan,
Pemdes

PETA RELASI

BTN-13.01 Perencanaan Daerah

BAPPEDA

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Seluruh Perangkat Daerah

Kecamatan, Kelurahan,
Pendes

Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian

PETA RELASI

BTN-14.01
Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

BKAD

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Badan Pemeriksa Keuangan

Seluruh Perangkat Daerah

Kecamatan, Kelurahan,
Pemdes

PETA RELASI

BTN-15.01
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan

Inspektorat

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Seluruh Perangkat Daerah

Kecamatan, Kelurahan,
Pendes

PETA RELASI

BTN-16.01
Pengolaan Administrasi

Sekretariat Daerah

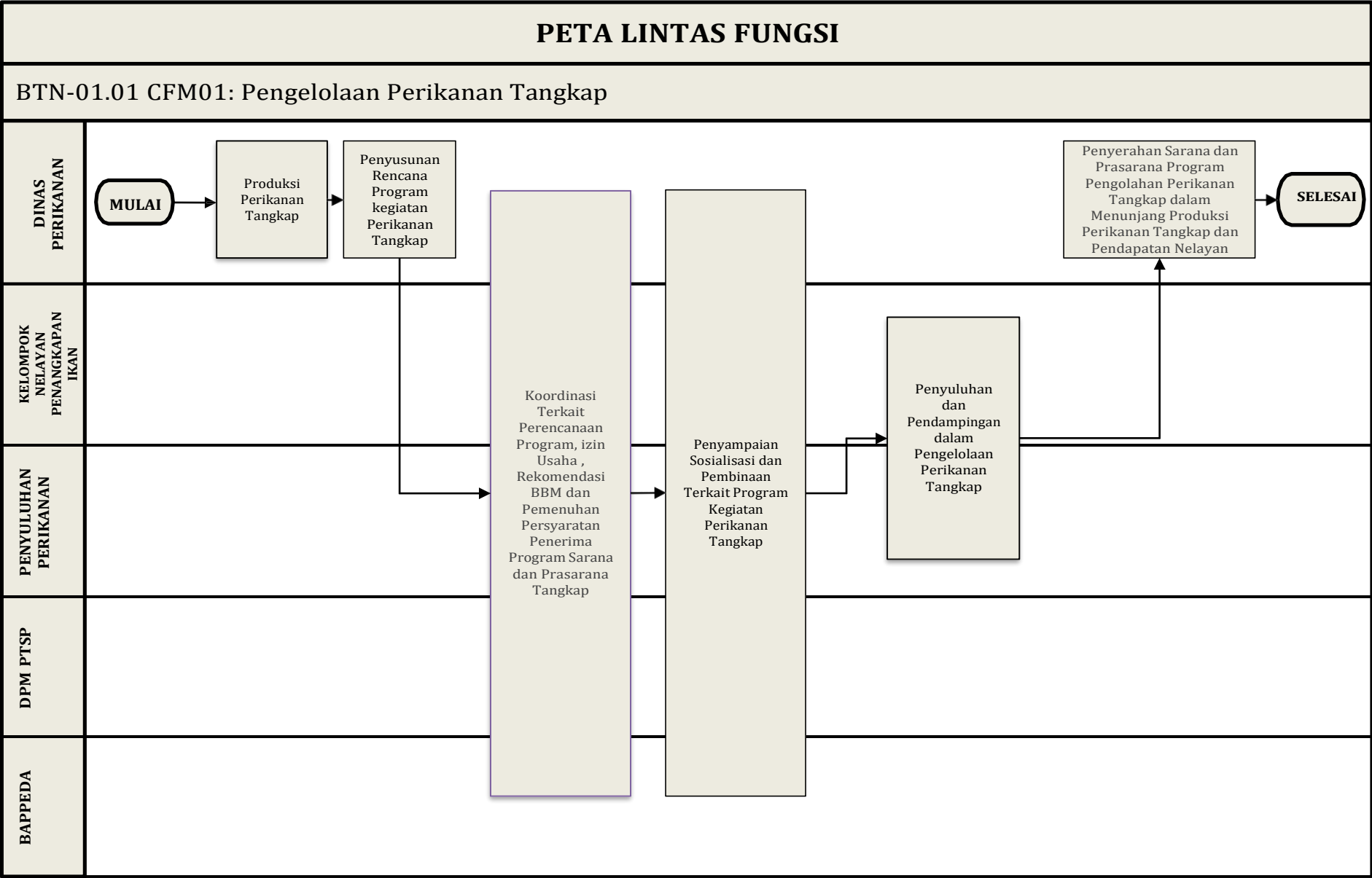
Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Seluruh Perangkat Daerah

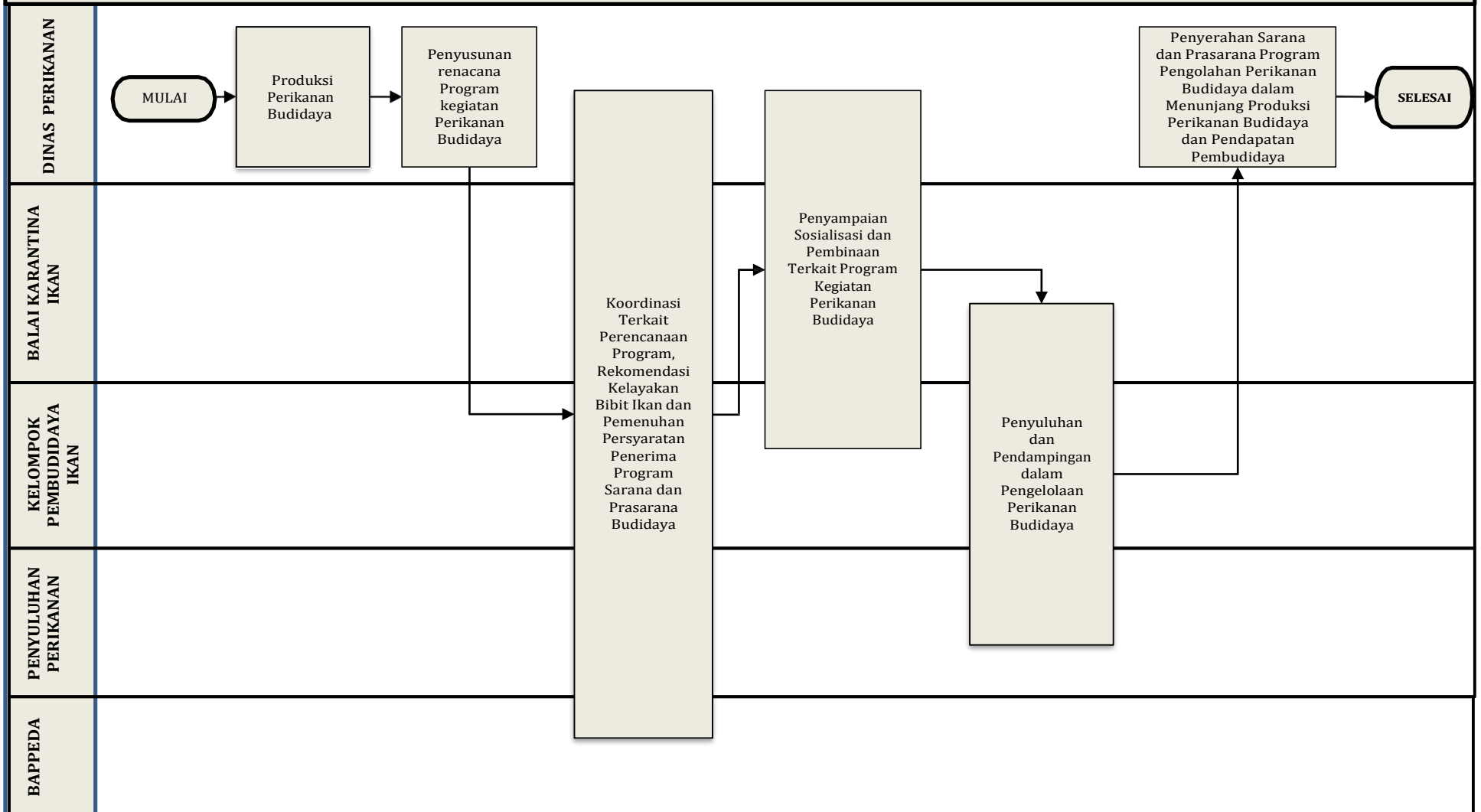
Kecamatan, Kelurahan,
Pendes

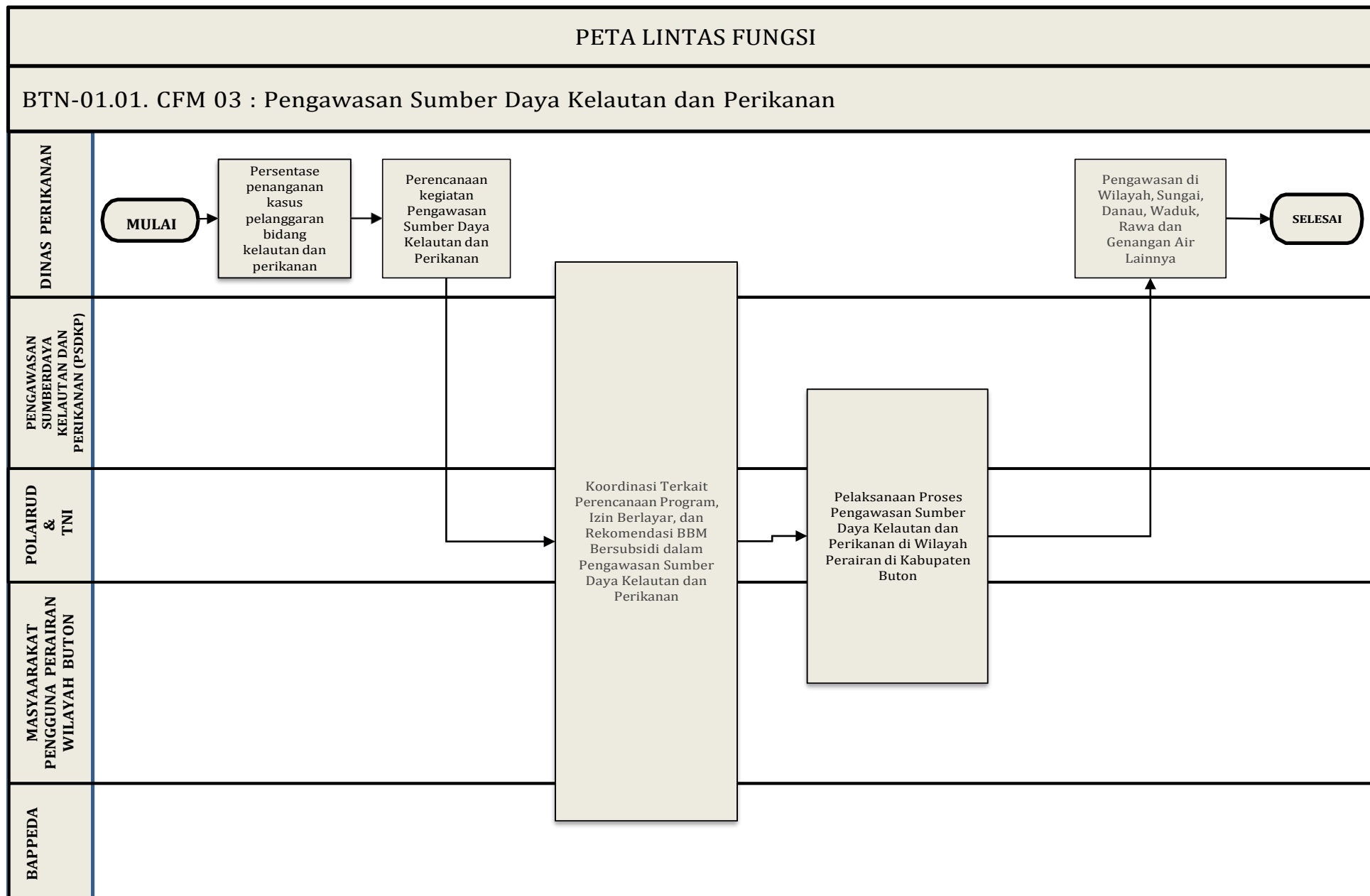
Ormas/Parpol/LSM

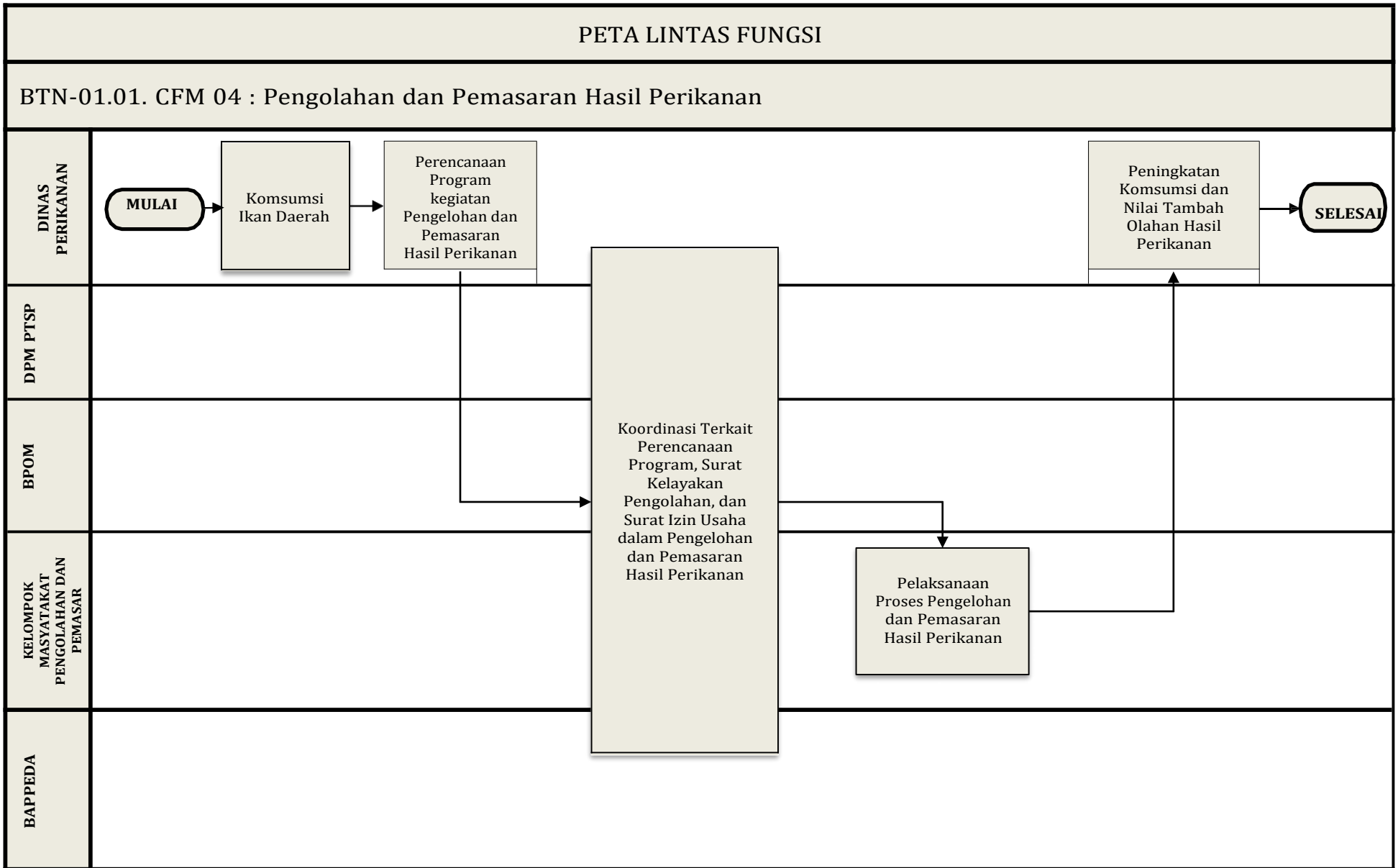


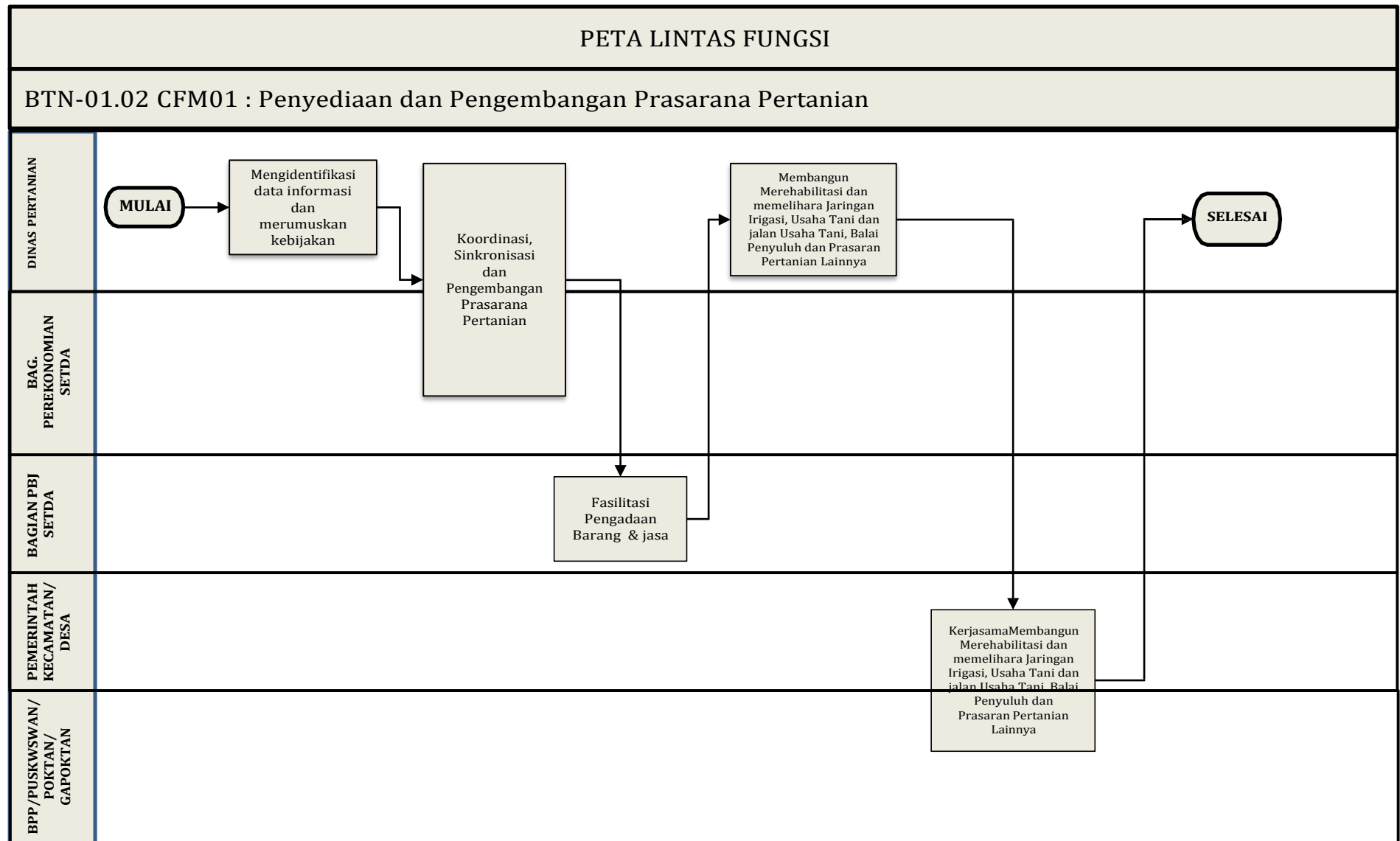
PETA LINTAS FUNGSI

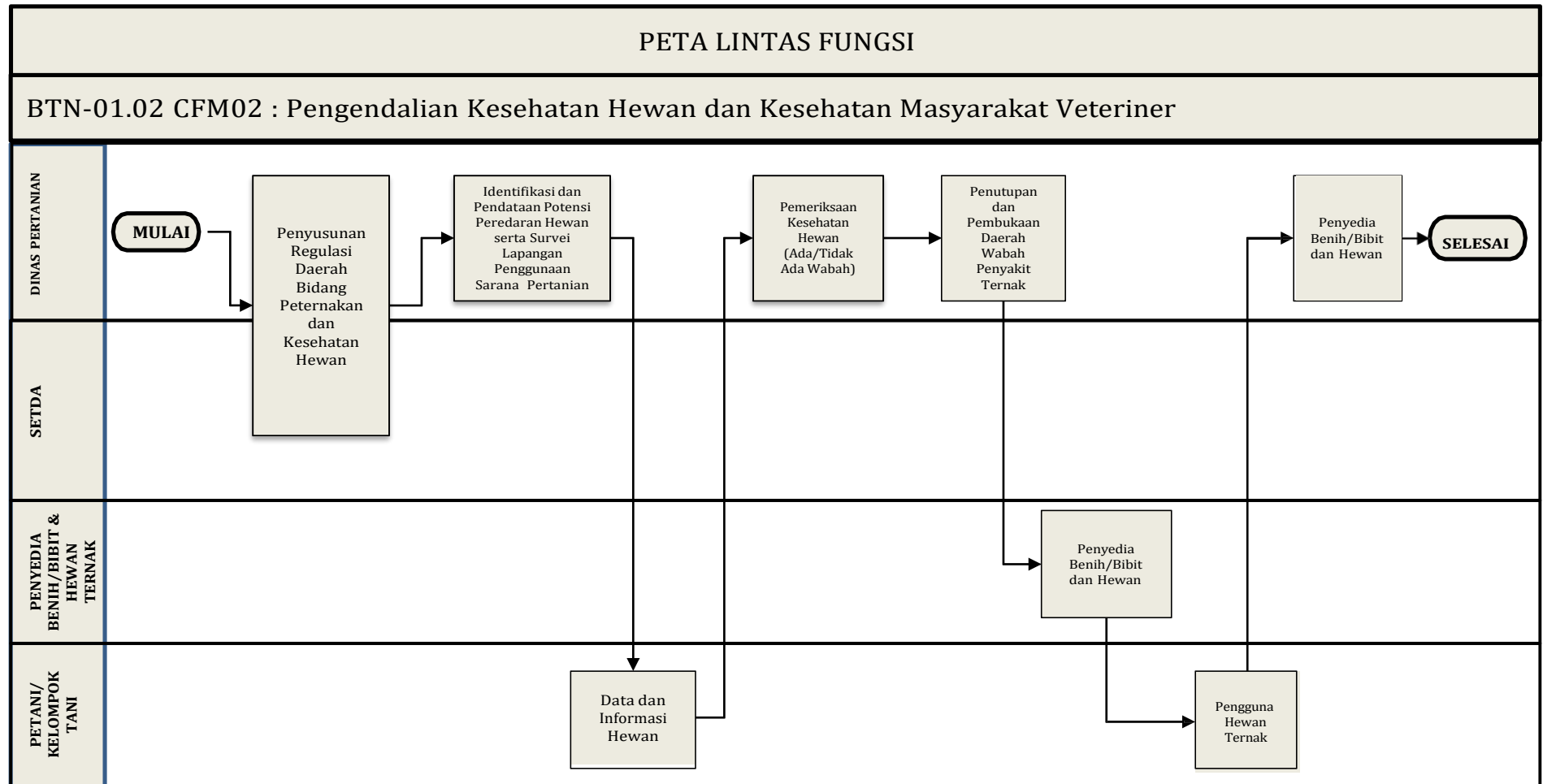
BTN-01.01 CFM02 : Pengelolaan Perikanan Budidaya

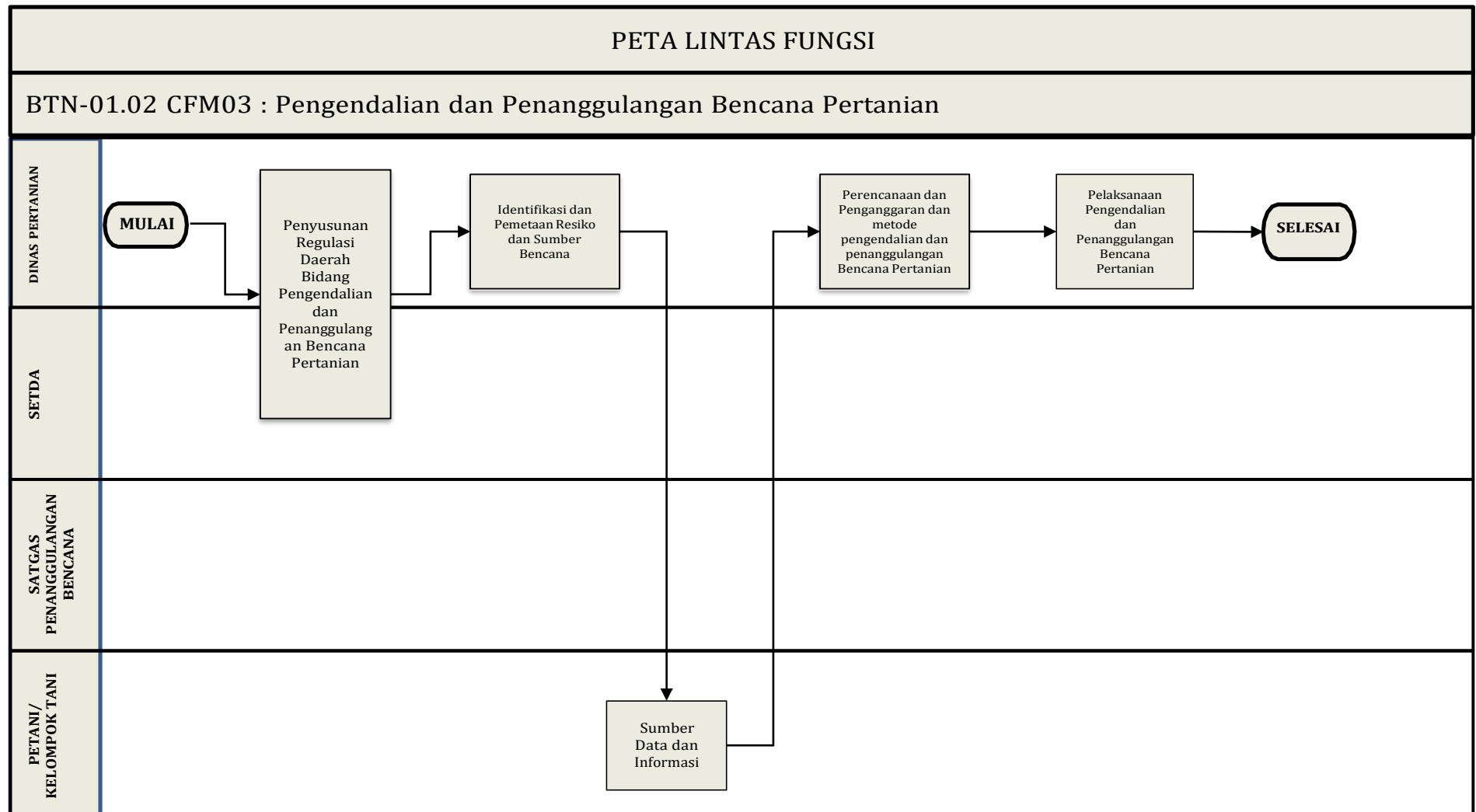


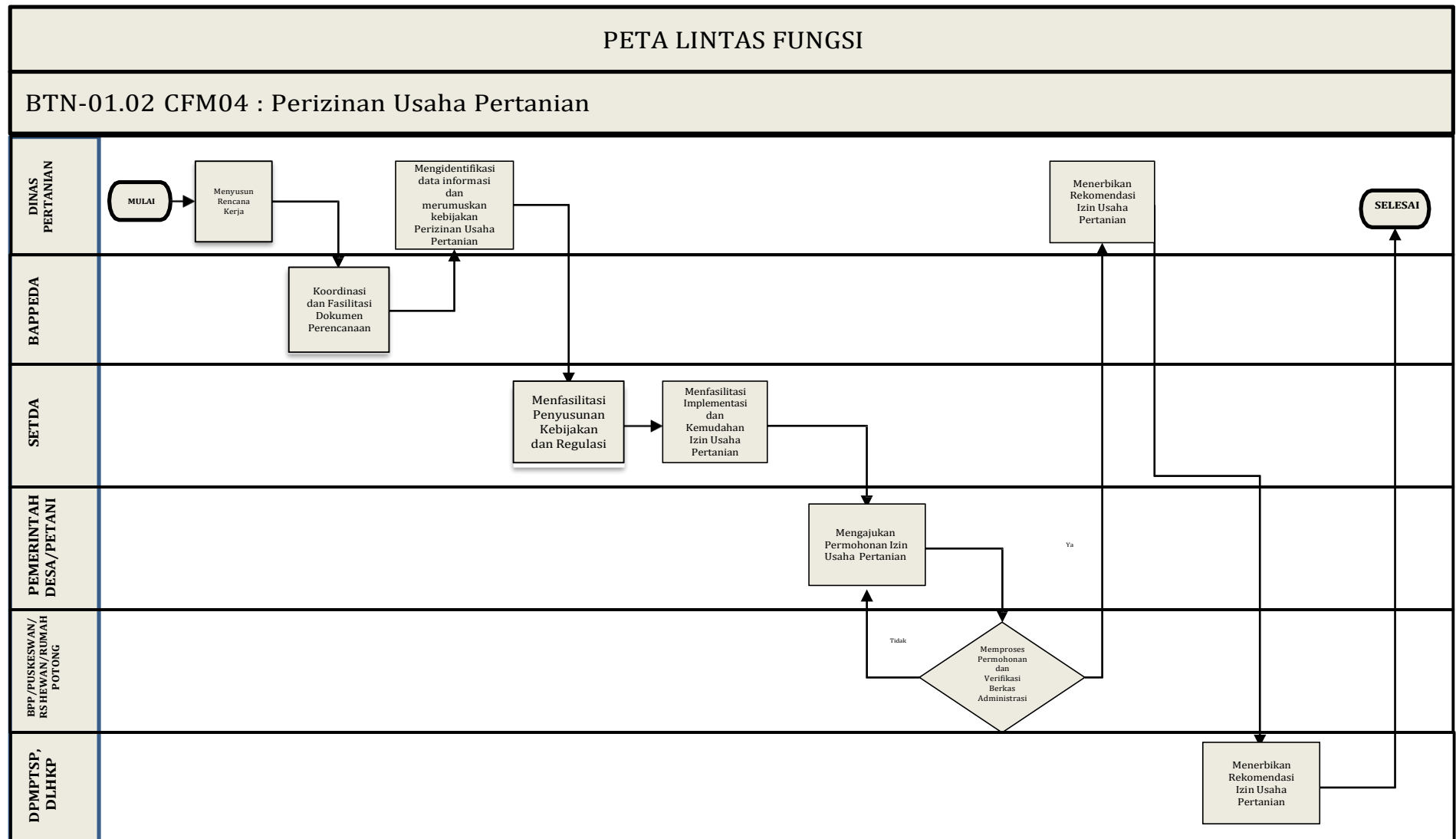


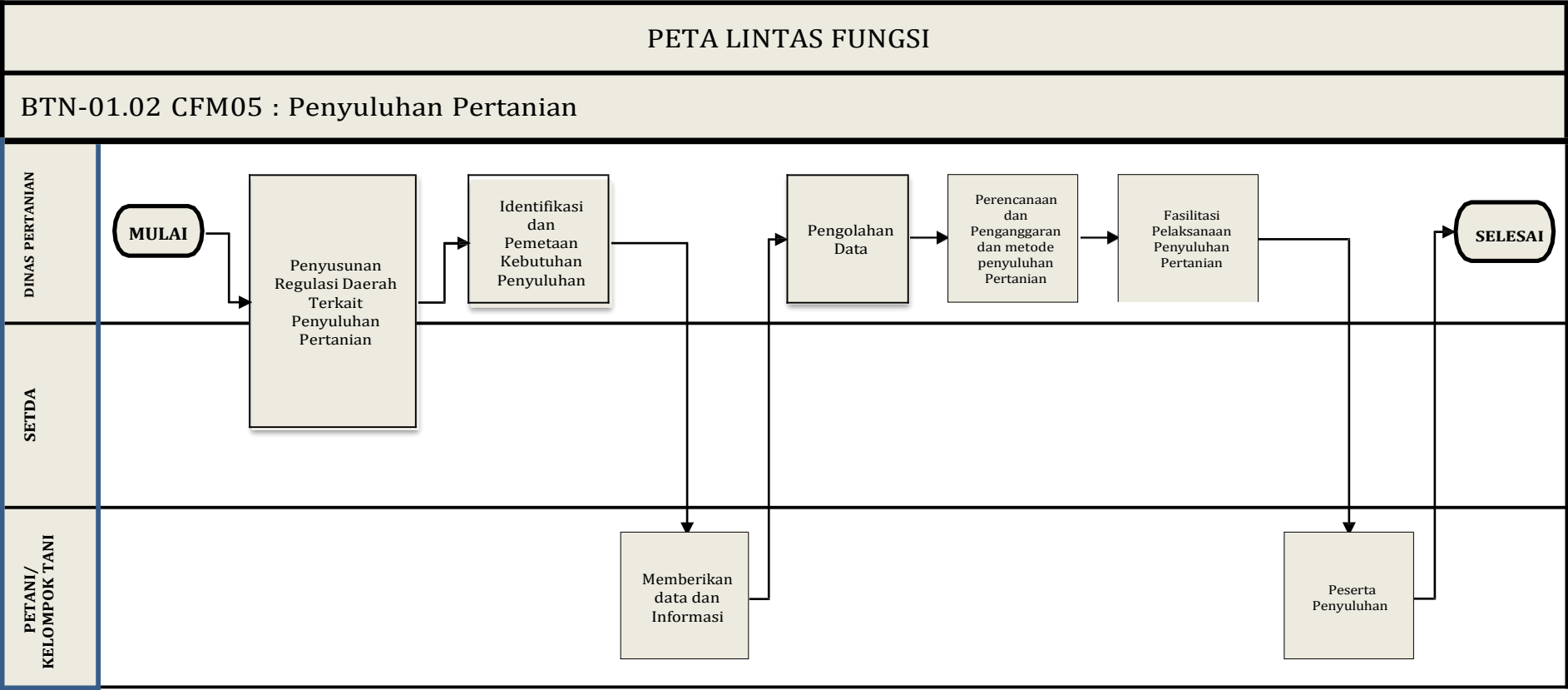






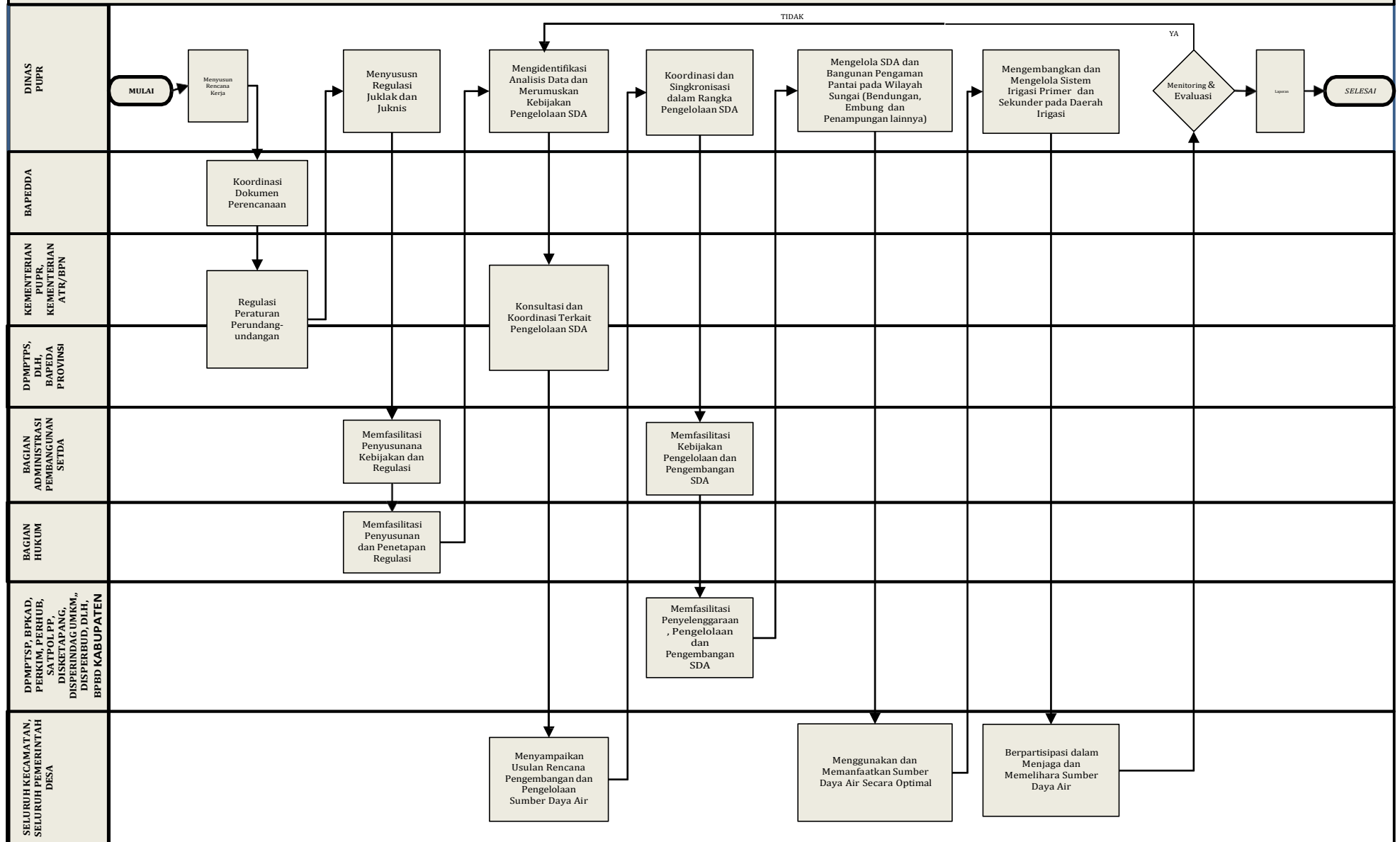






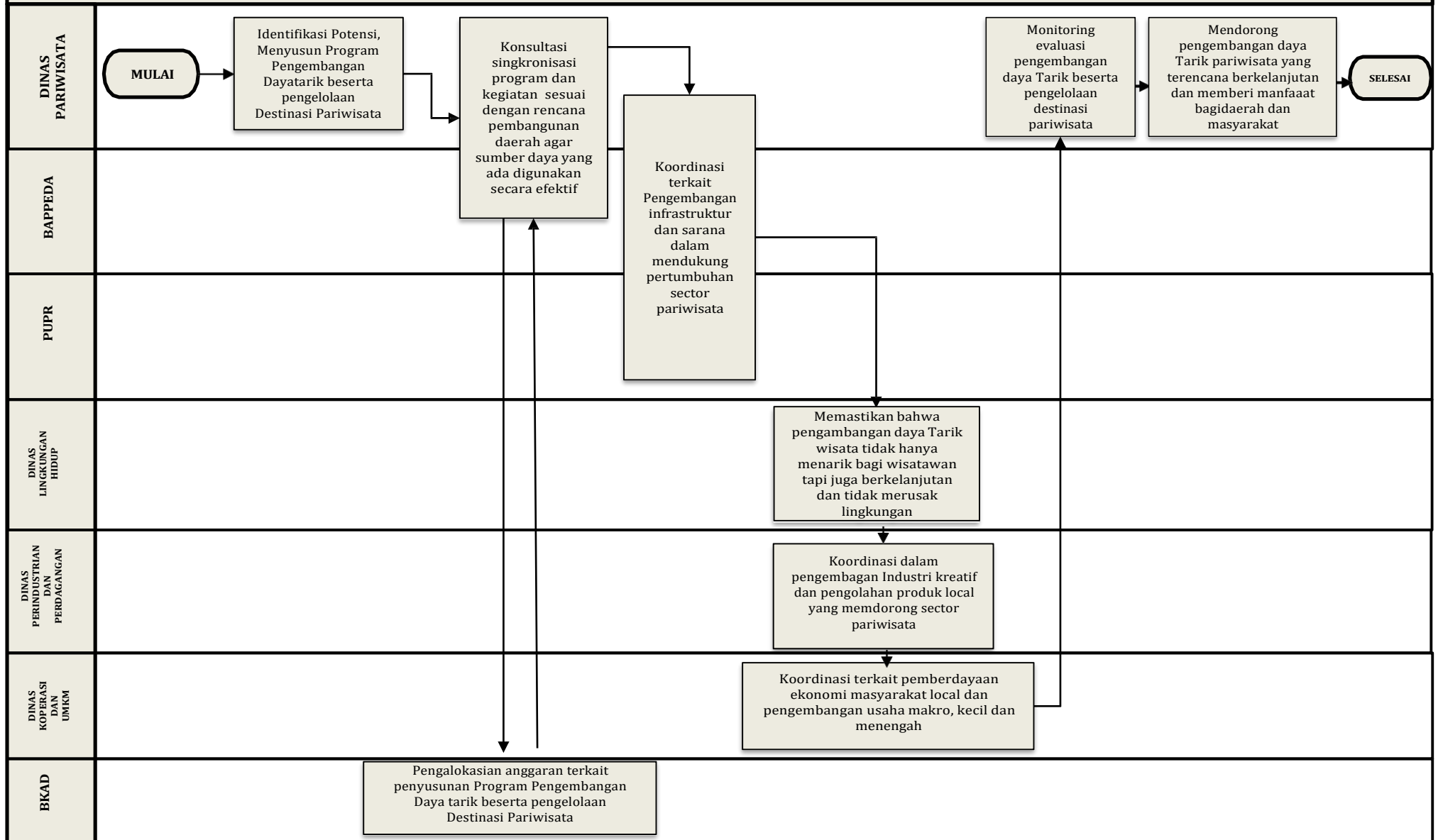
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.03 CFM 01 : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



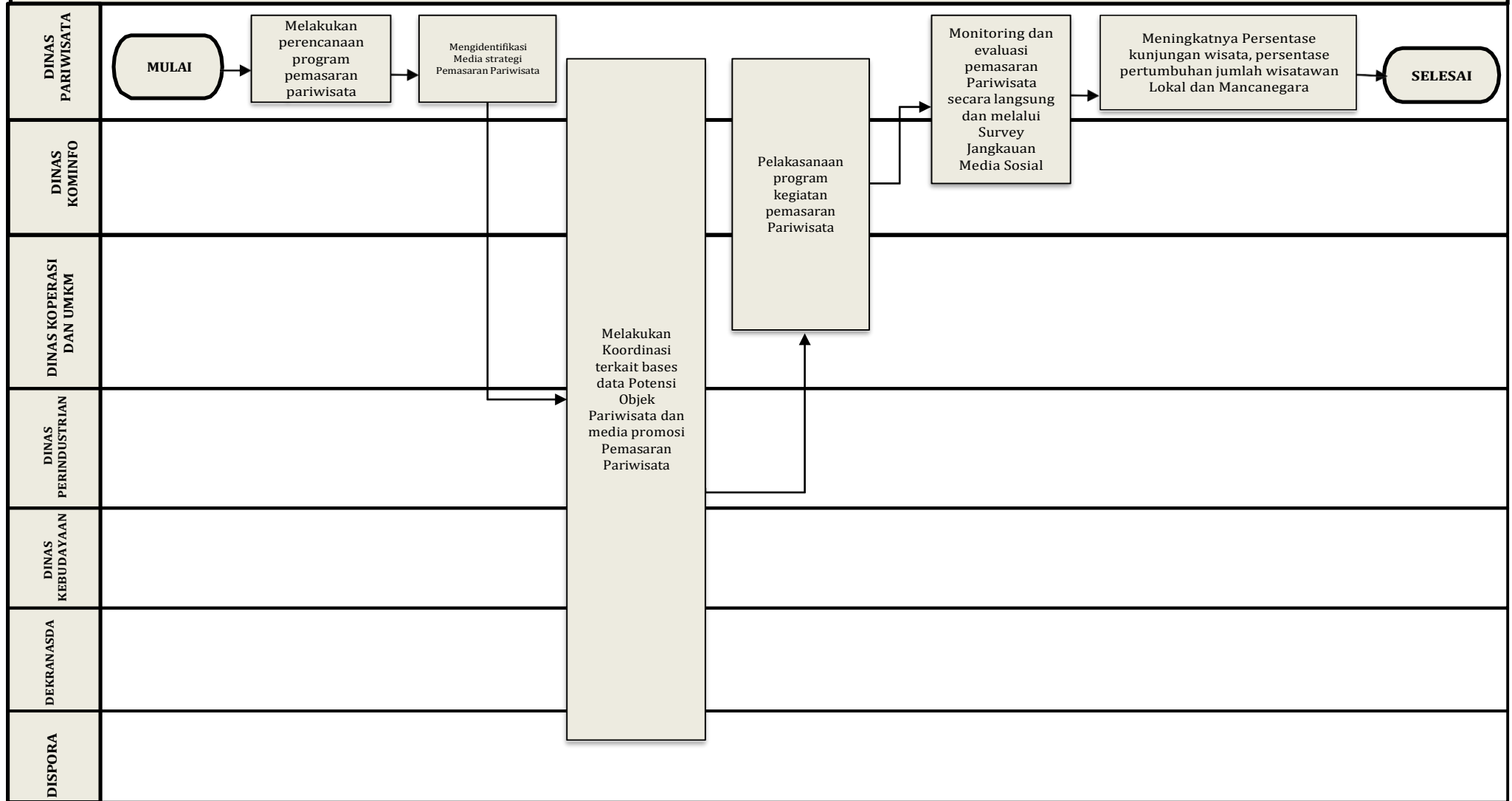
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.04 CFM 01 : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



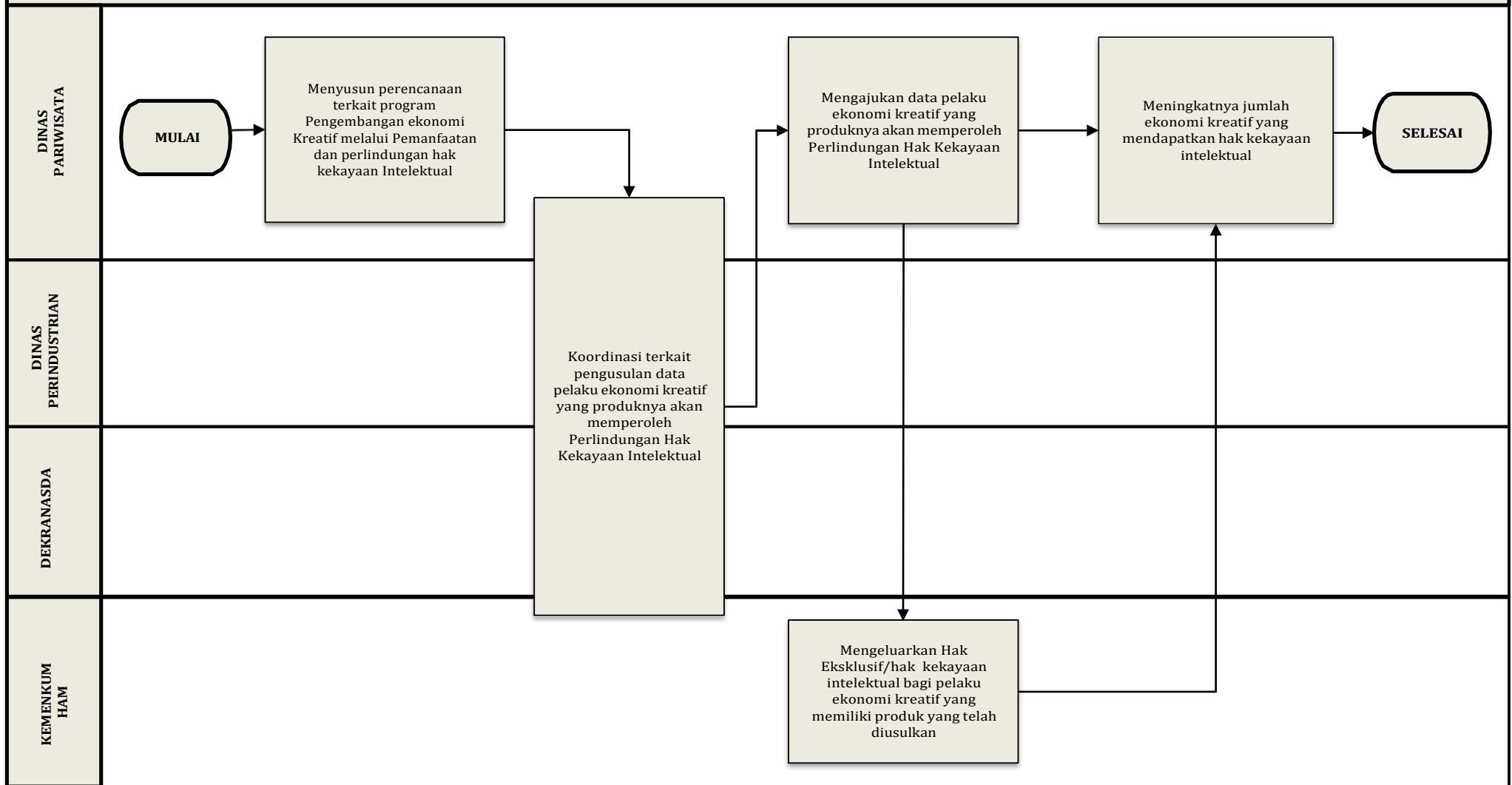
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.04 CFM02 : Peningkatan Pemasaran Pariwisata



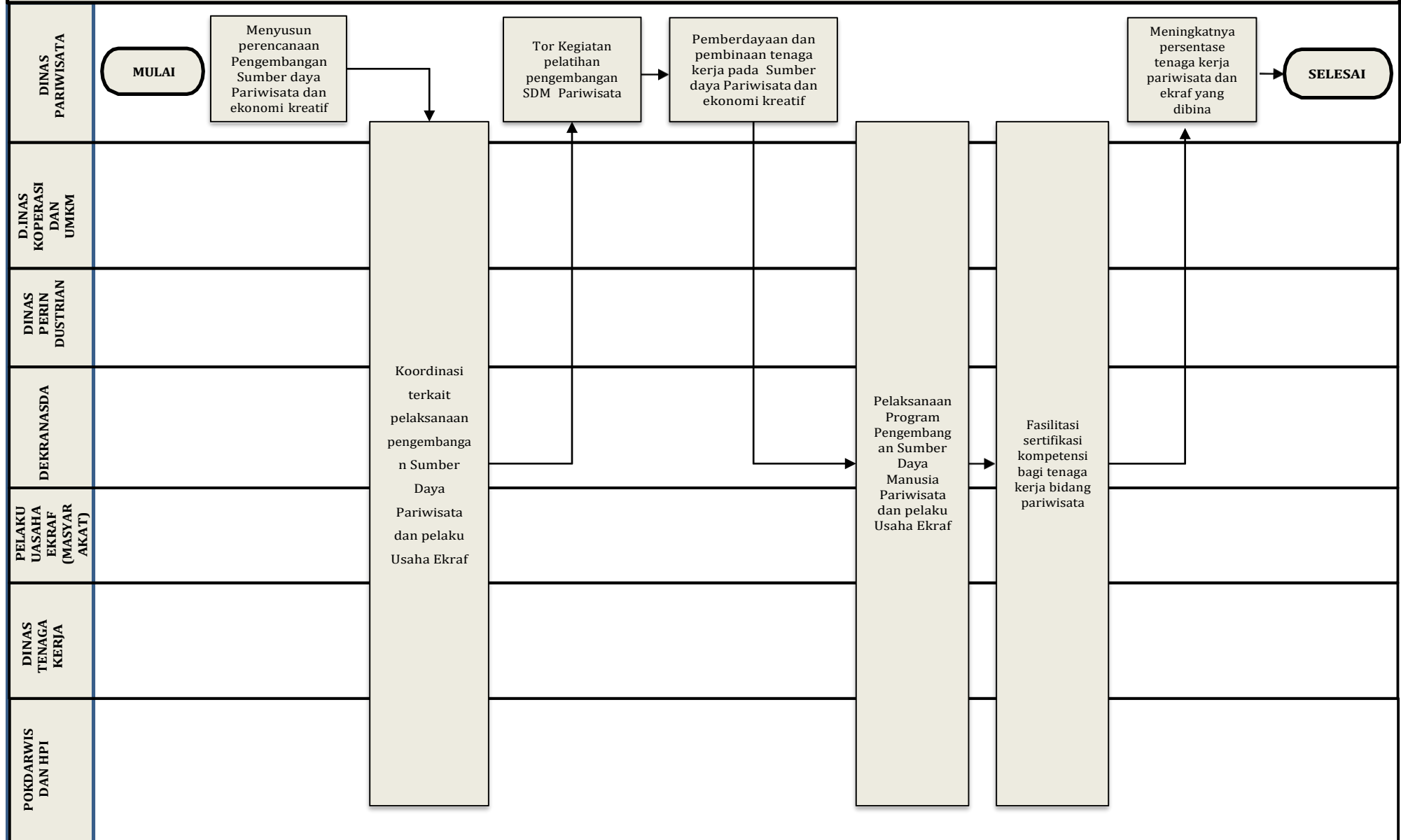
PETA LINTAS FUNGSI

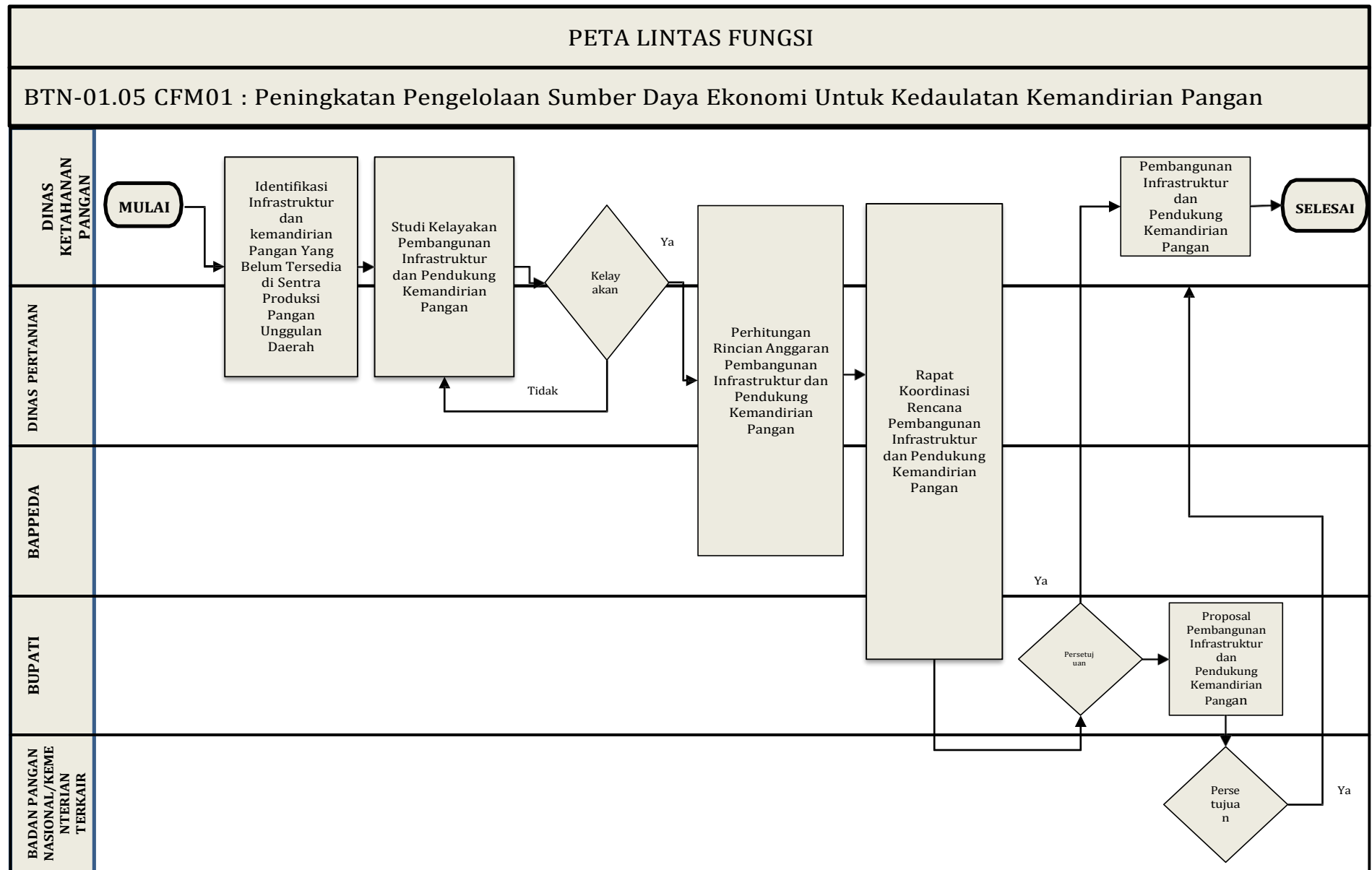
BTN-01.04 CFM03 : Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



PETA LINTAS FUNGSI

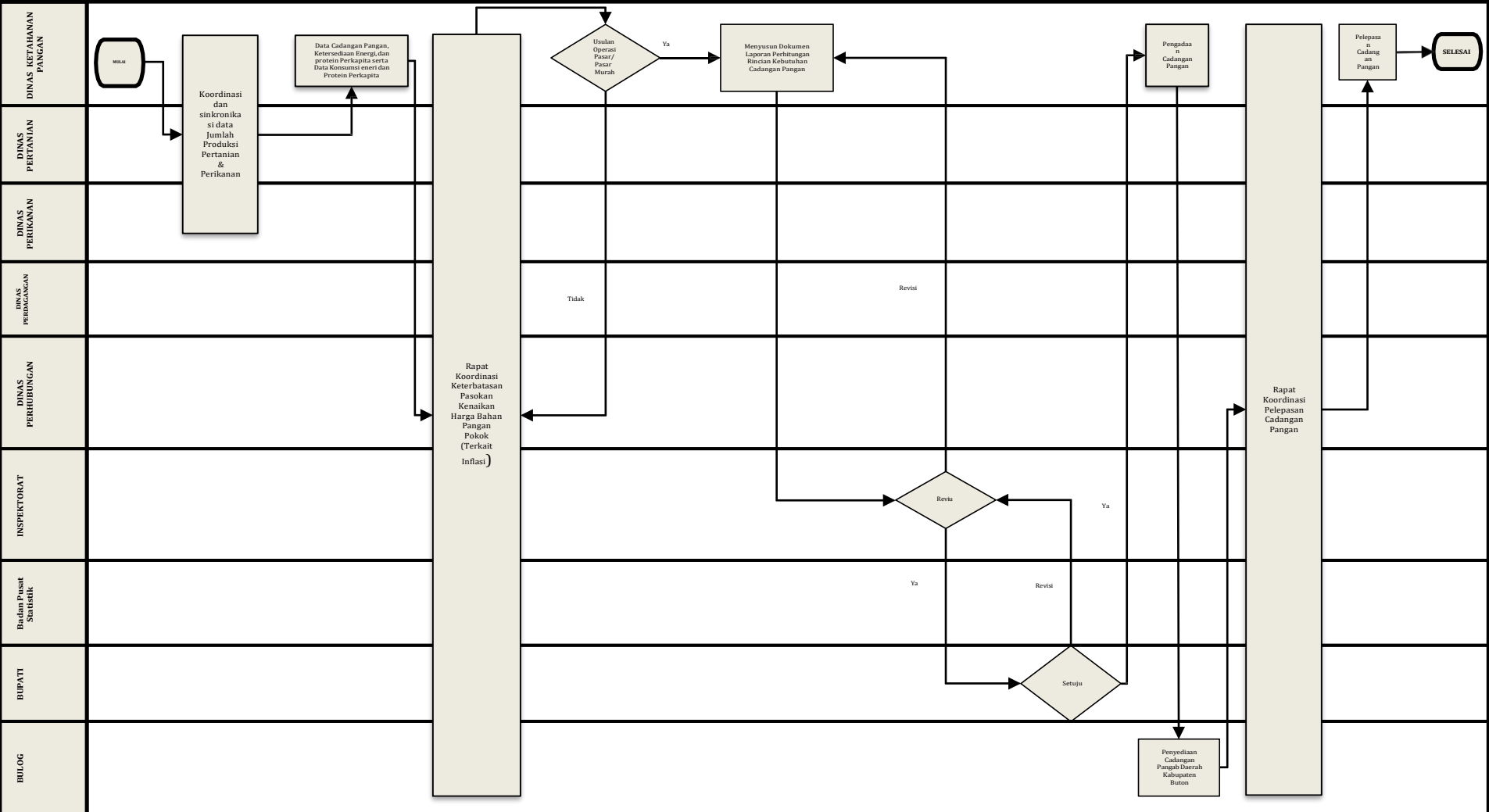
BTN-01.04 CFM04 : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

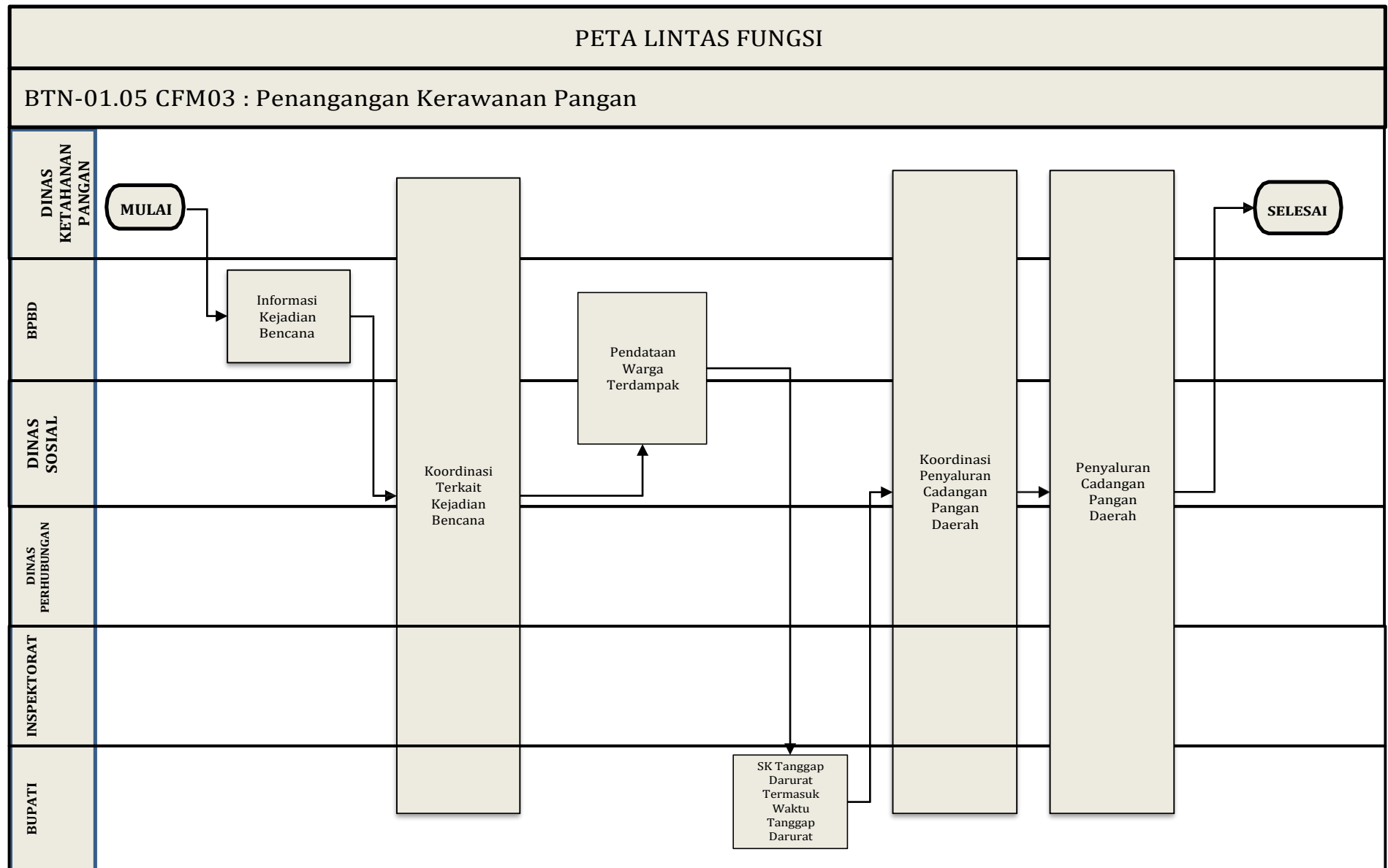




PETA LINTAS FUNGSI

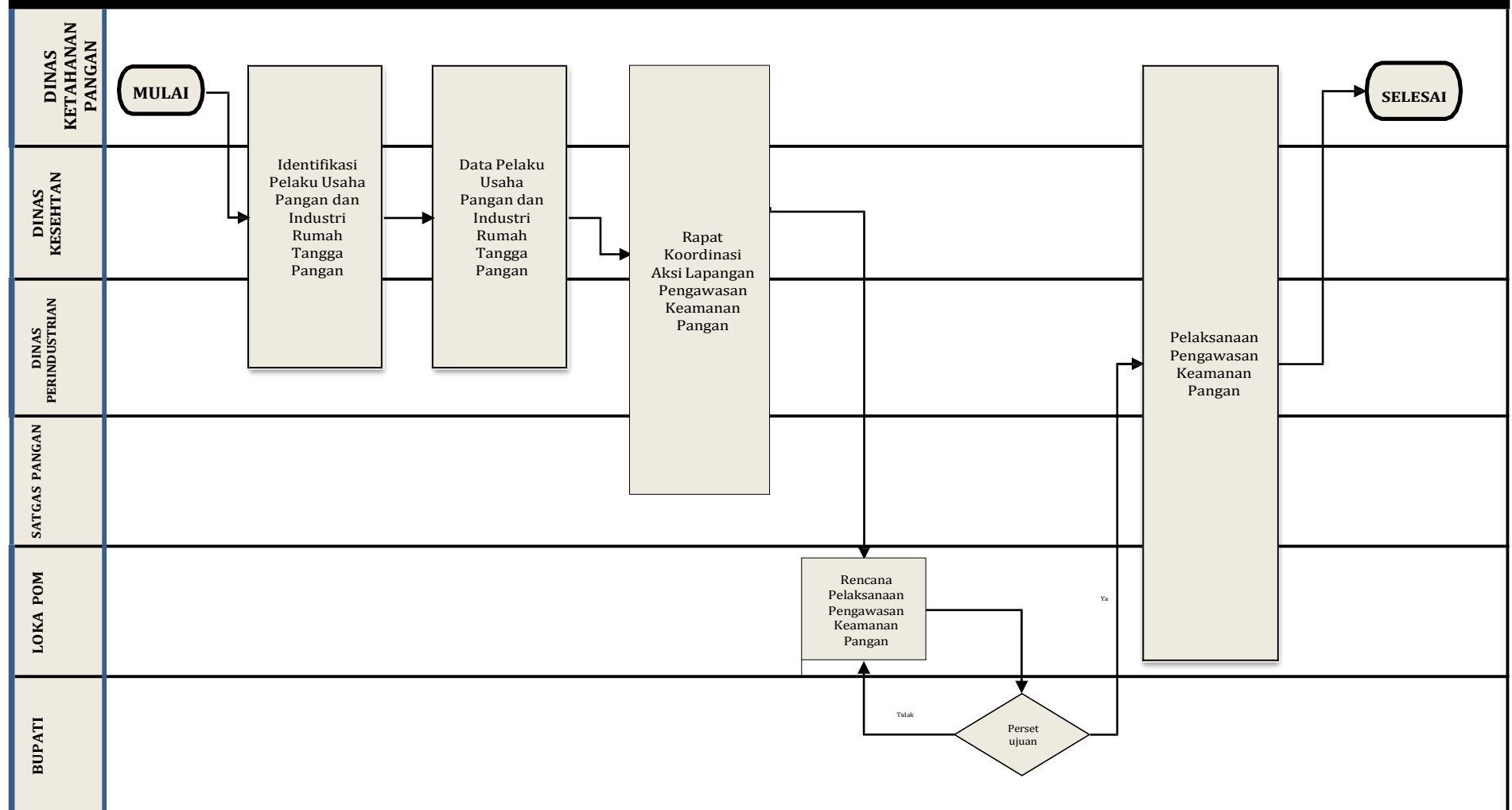
BTN-01.05 CFM02 : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat





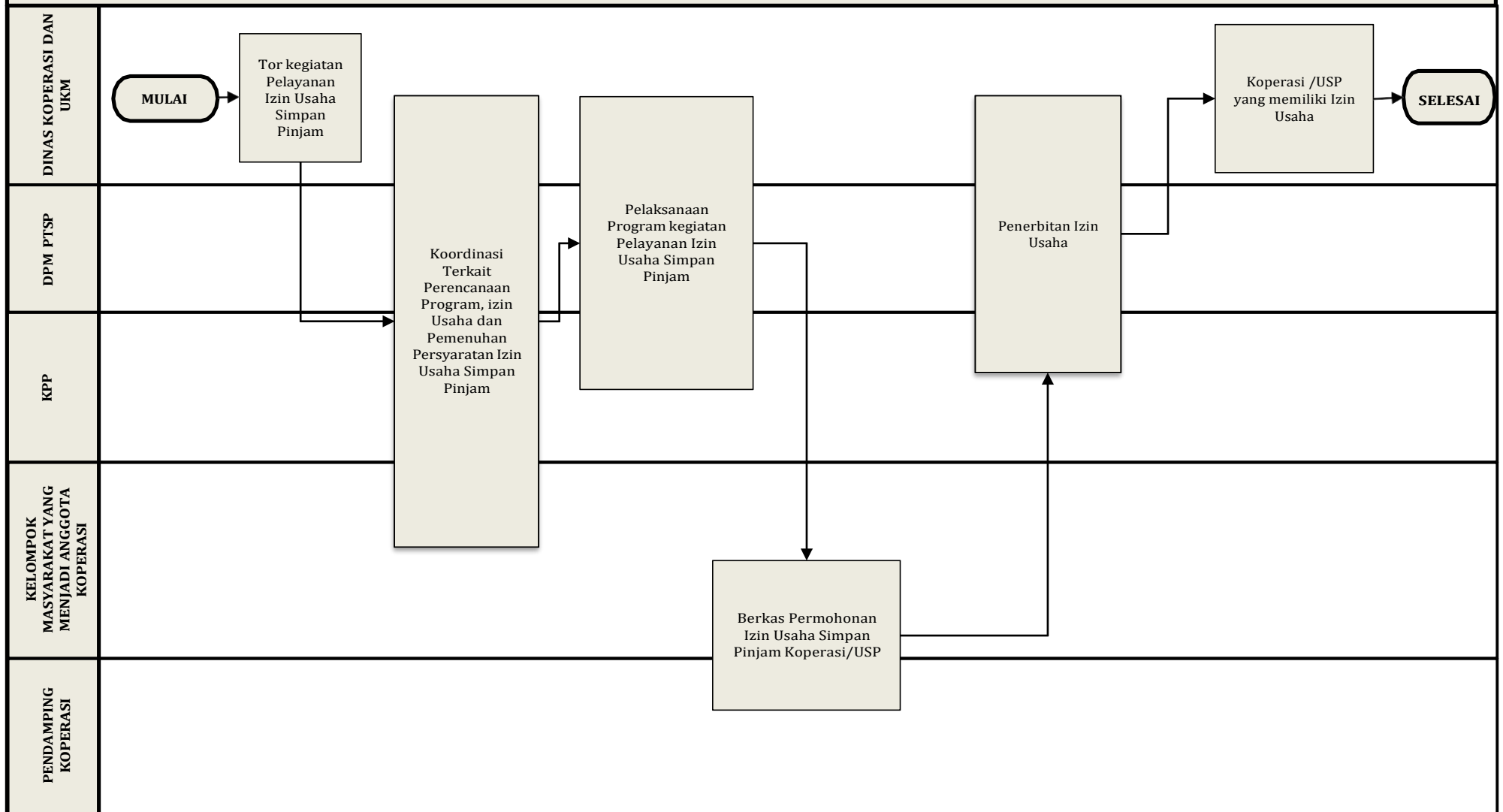
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.05 CFM04 : Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan



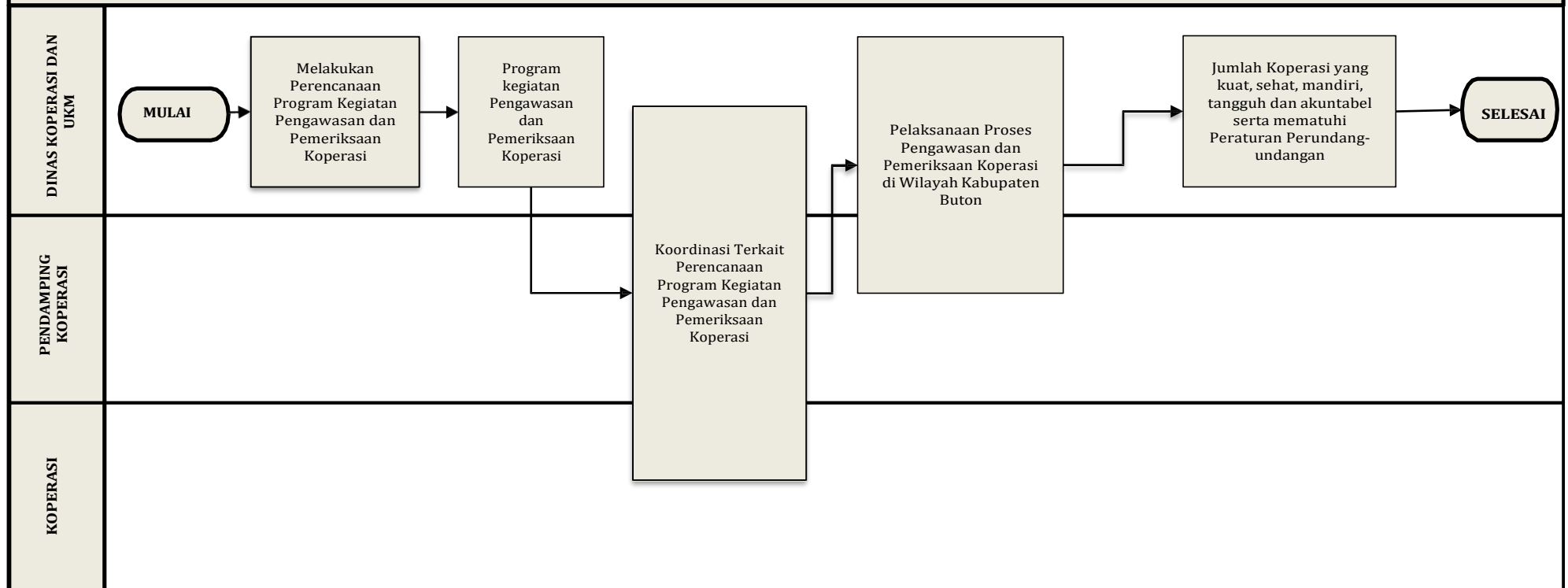
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.06 CFM01: Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam



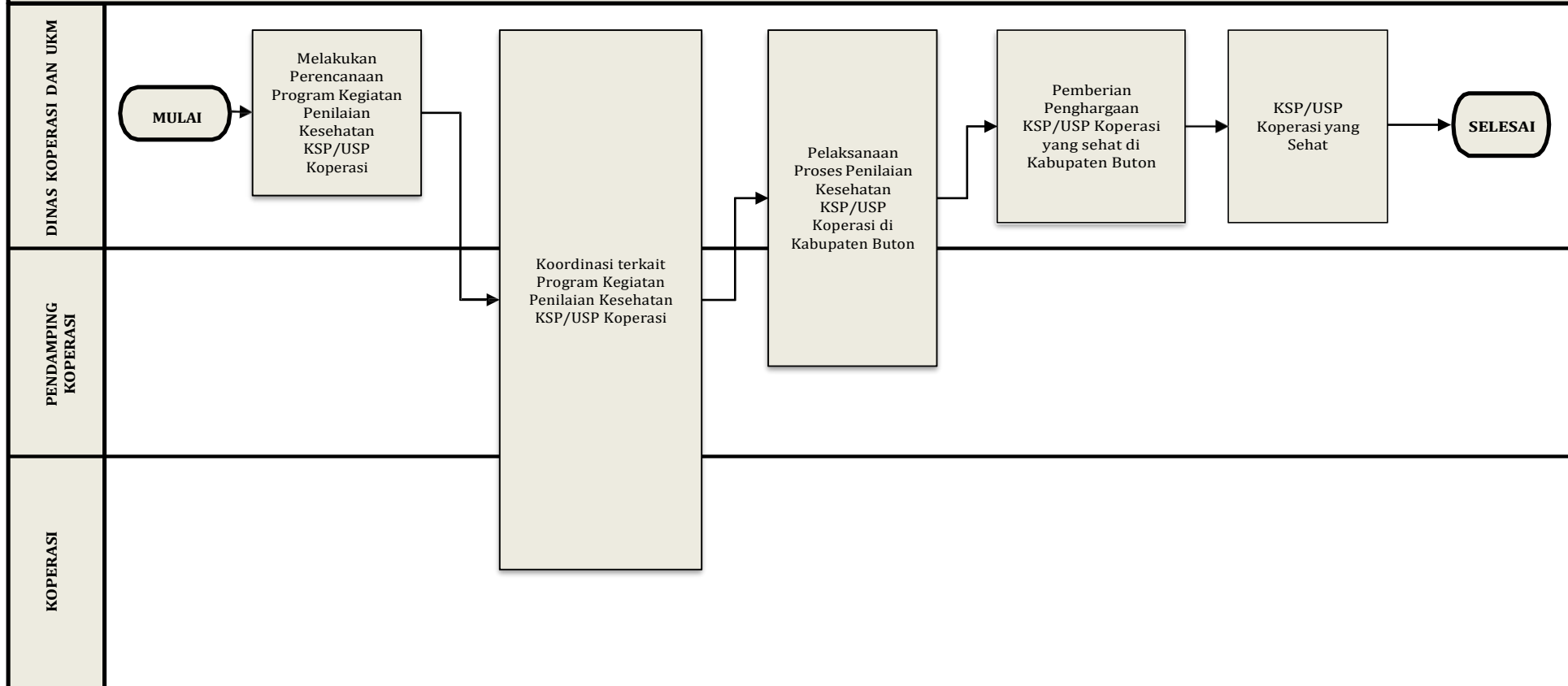
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.06 CFM02 : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



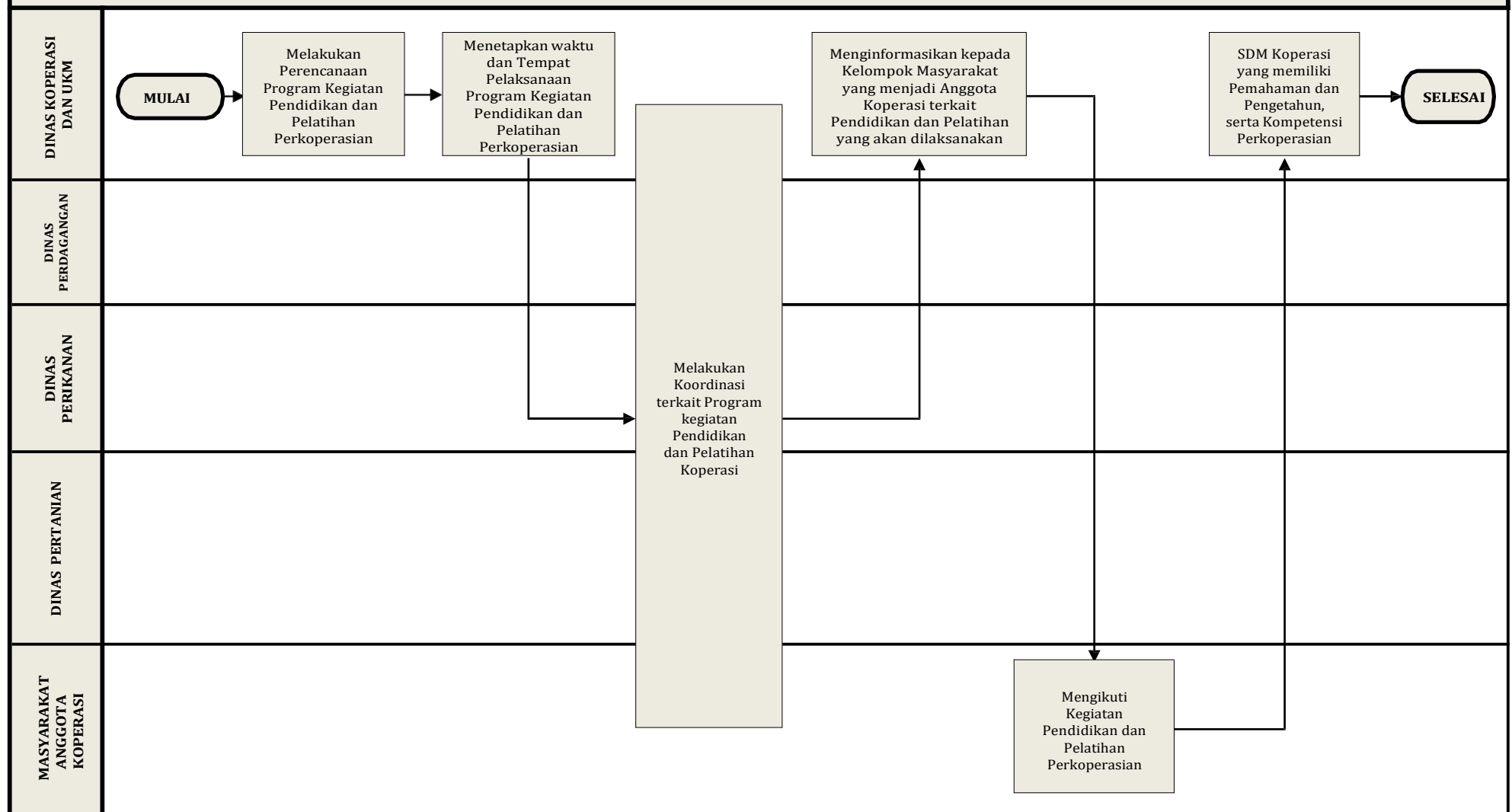
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.06 CFM03 : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi



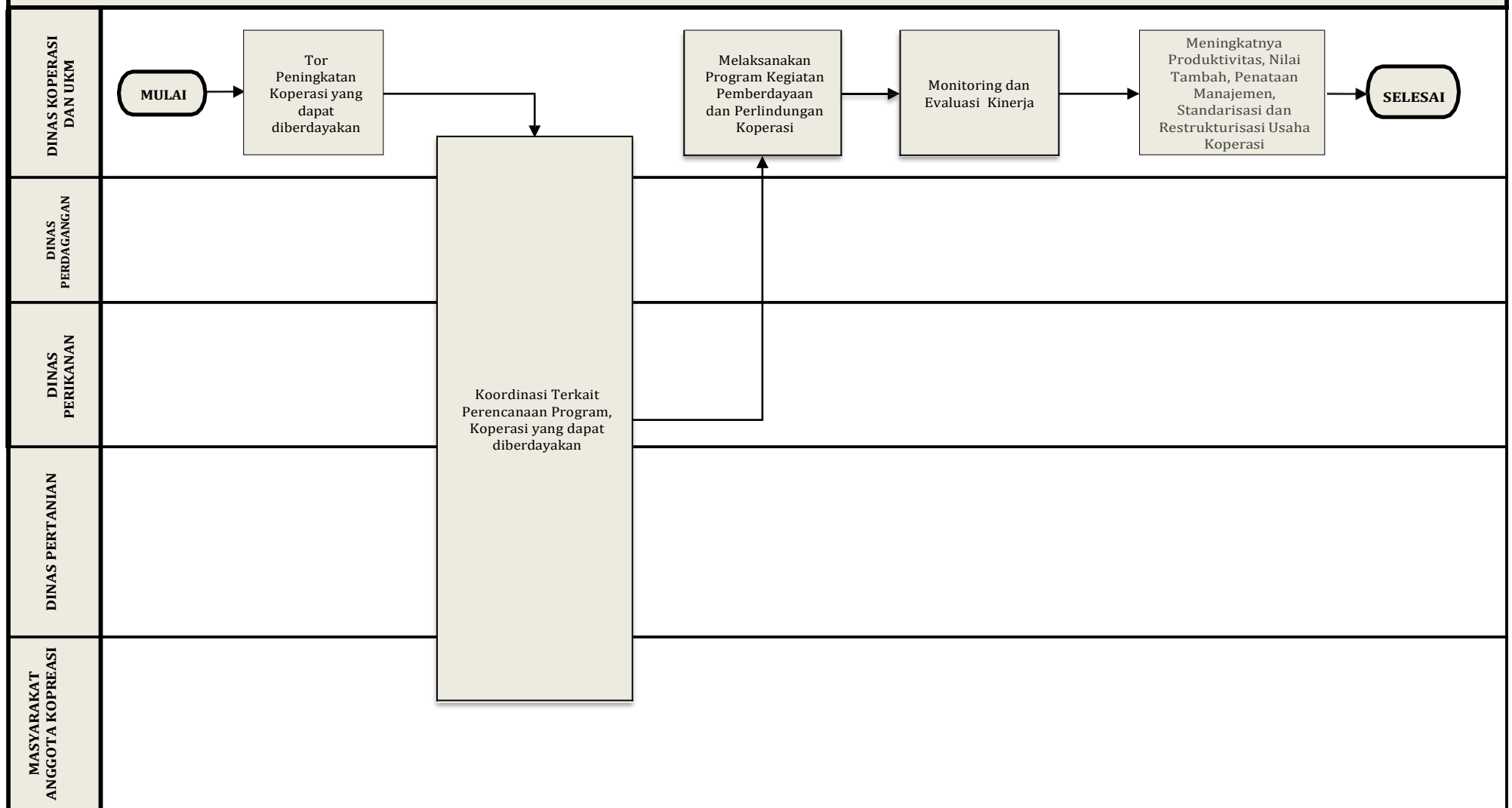
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.06 CFM04 : Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



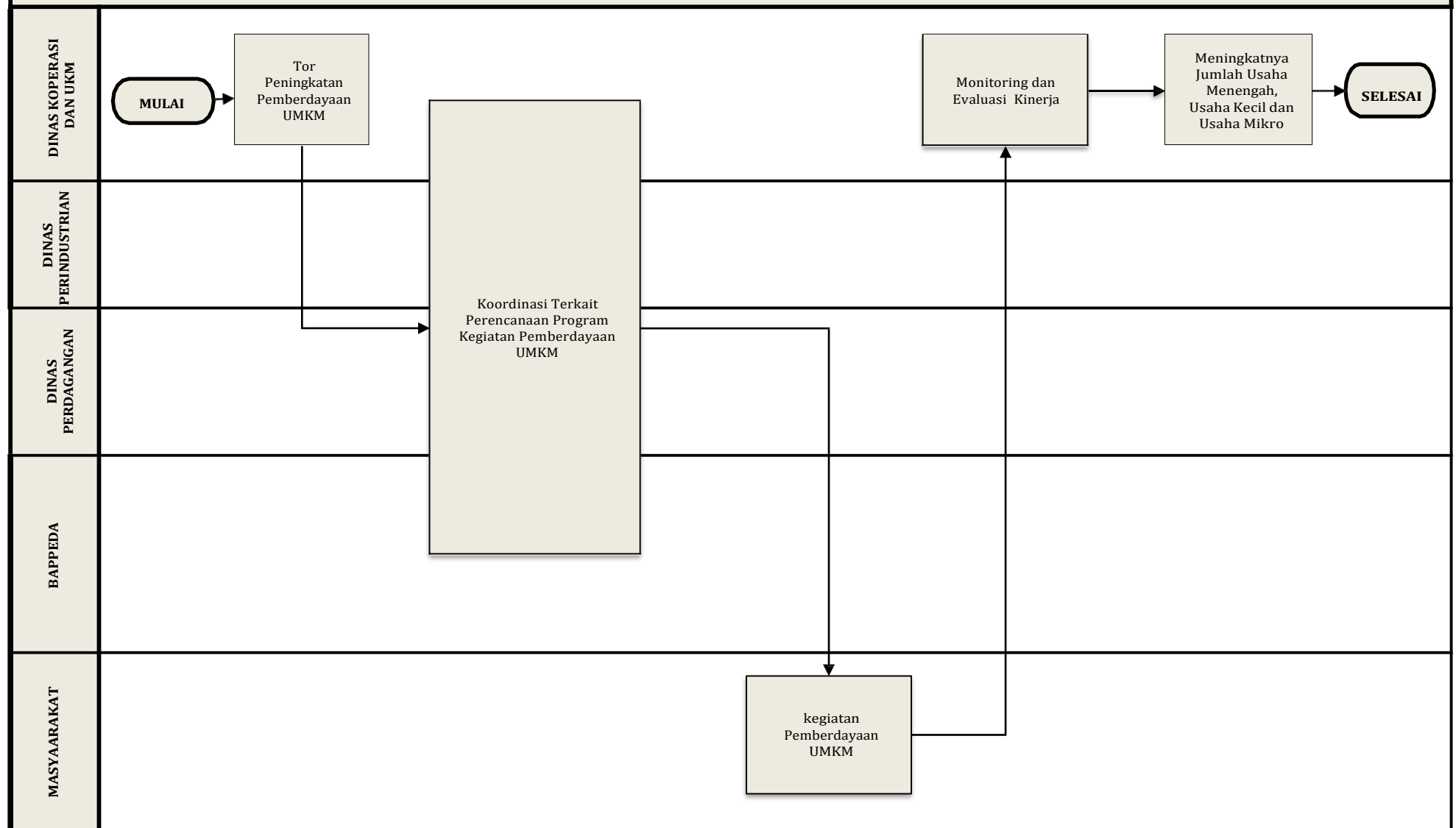
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.06 CFM05 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



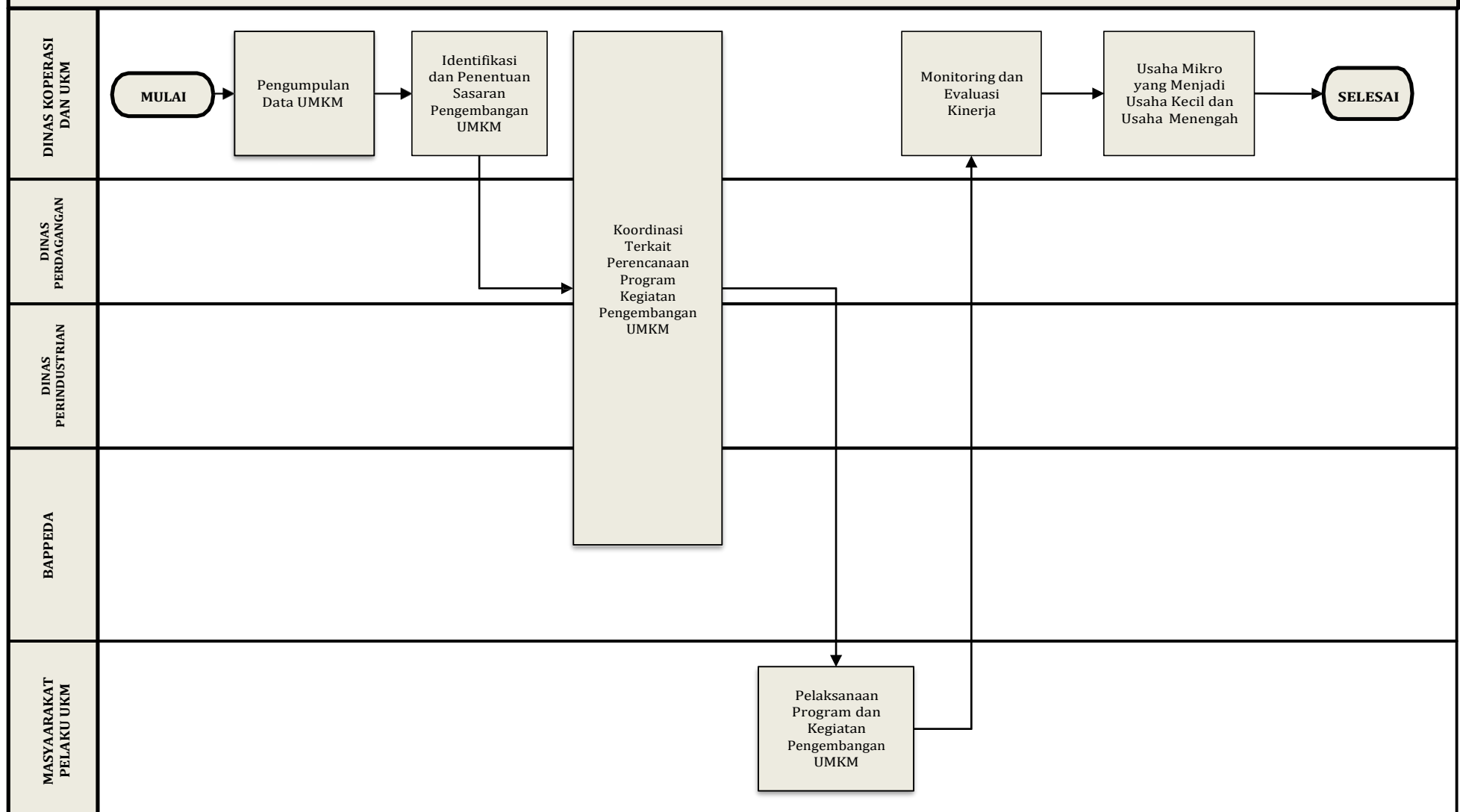
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.06 CFM06: Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro



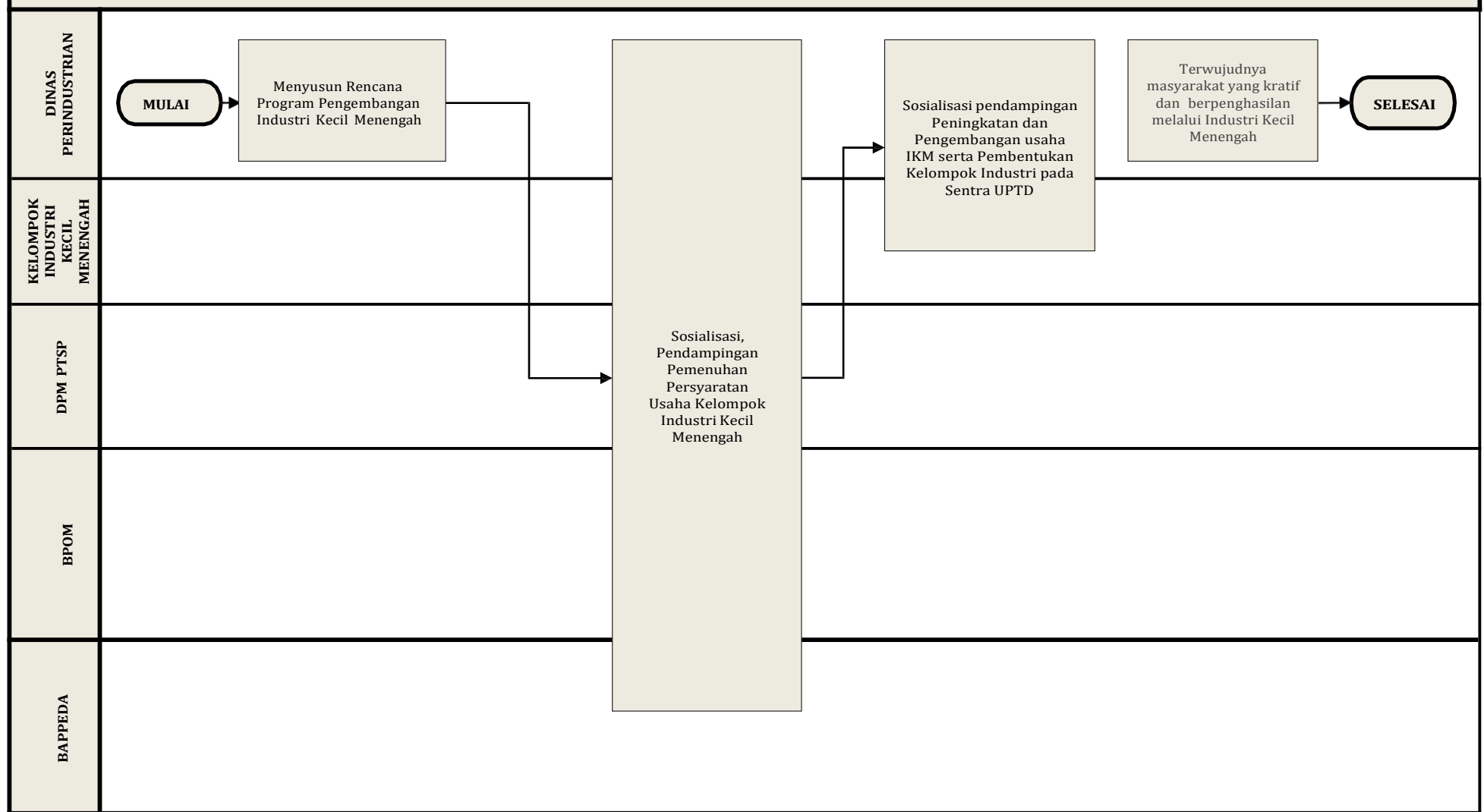
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.06 CFM07 : Pengembangan UMKM



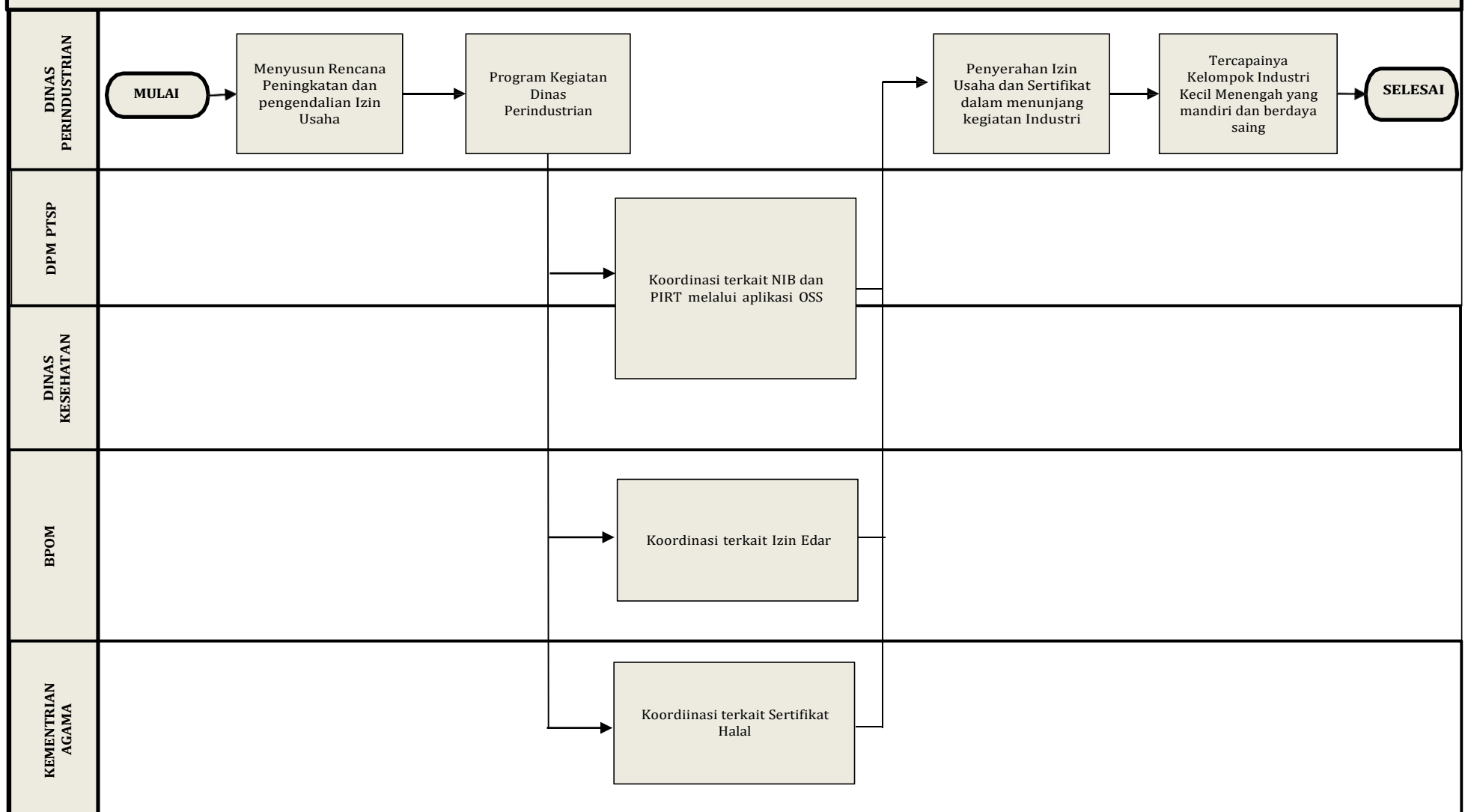
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.07 CFM01 : Perencanaan dan Pembangunan Industri



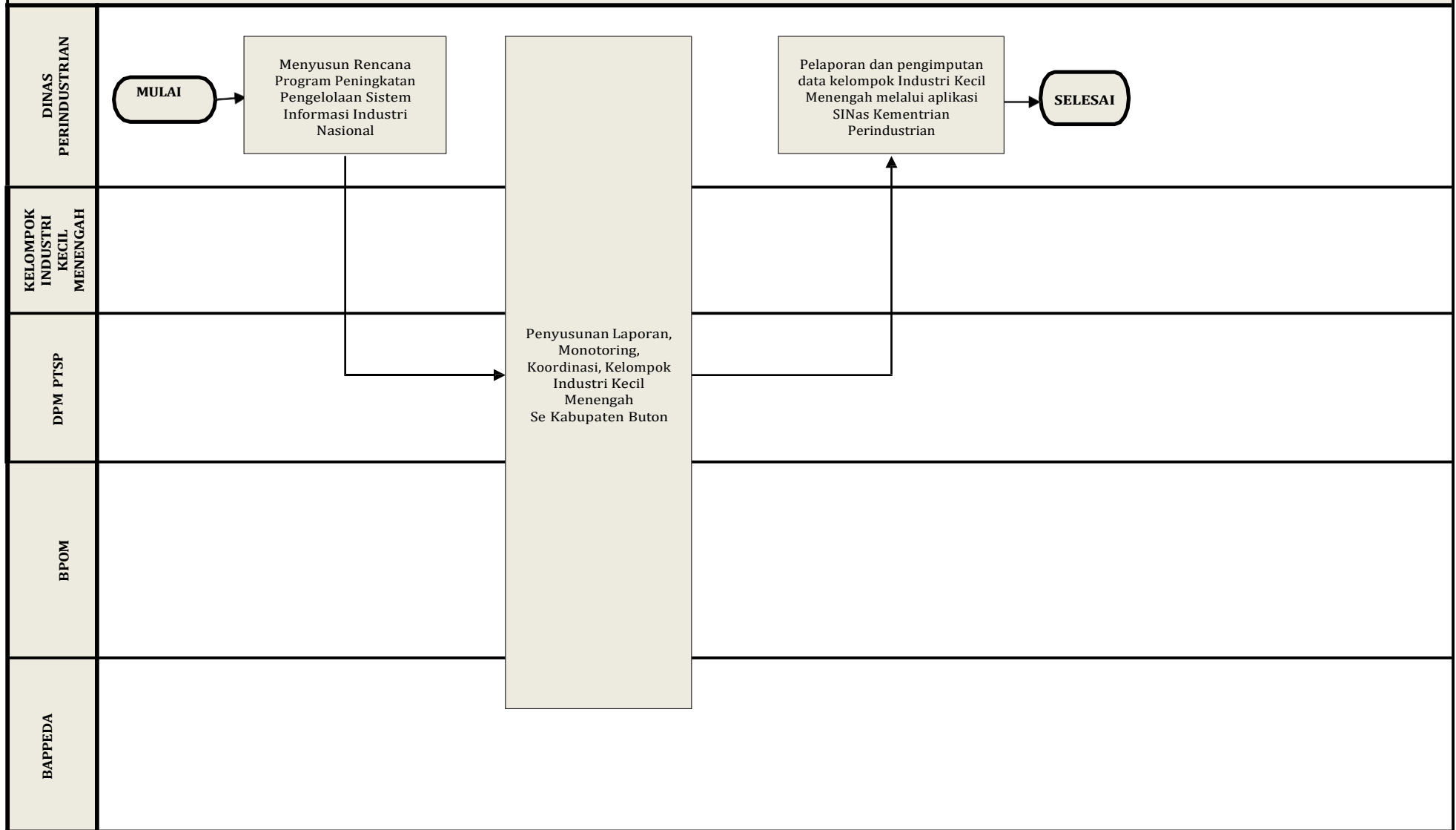
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.07 CFM02 : Pengendalian Izin Usaha Industri



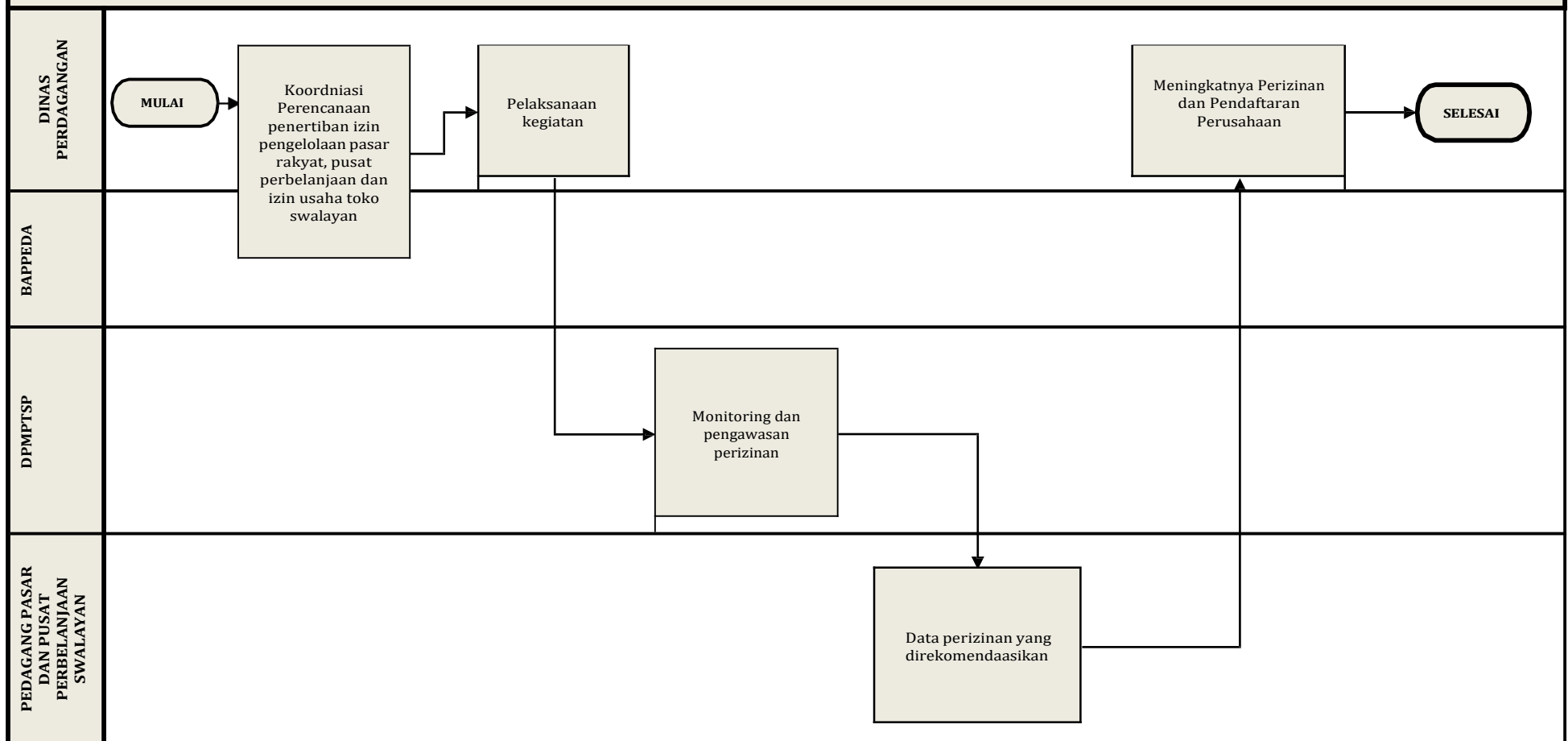
PETA LINTAS FUNGSI

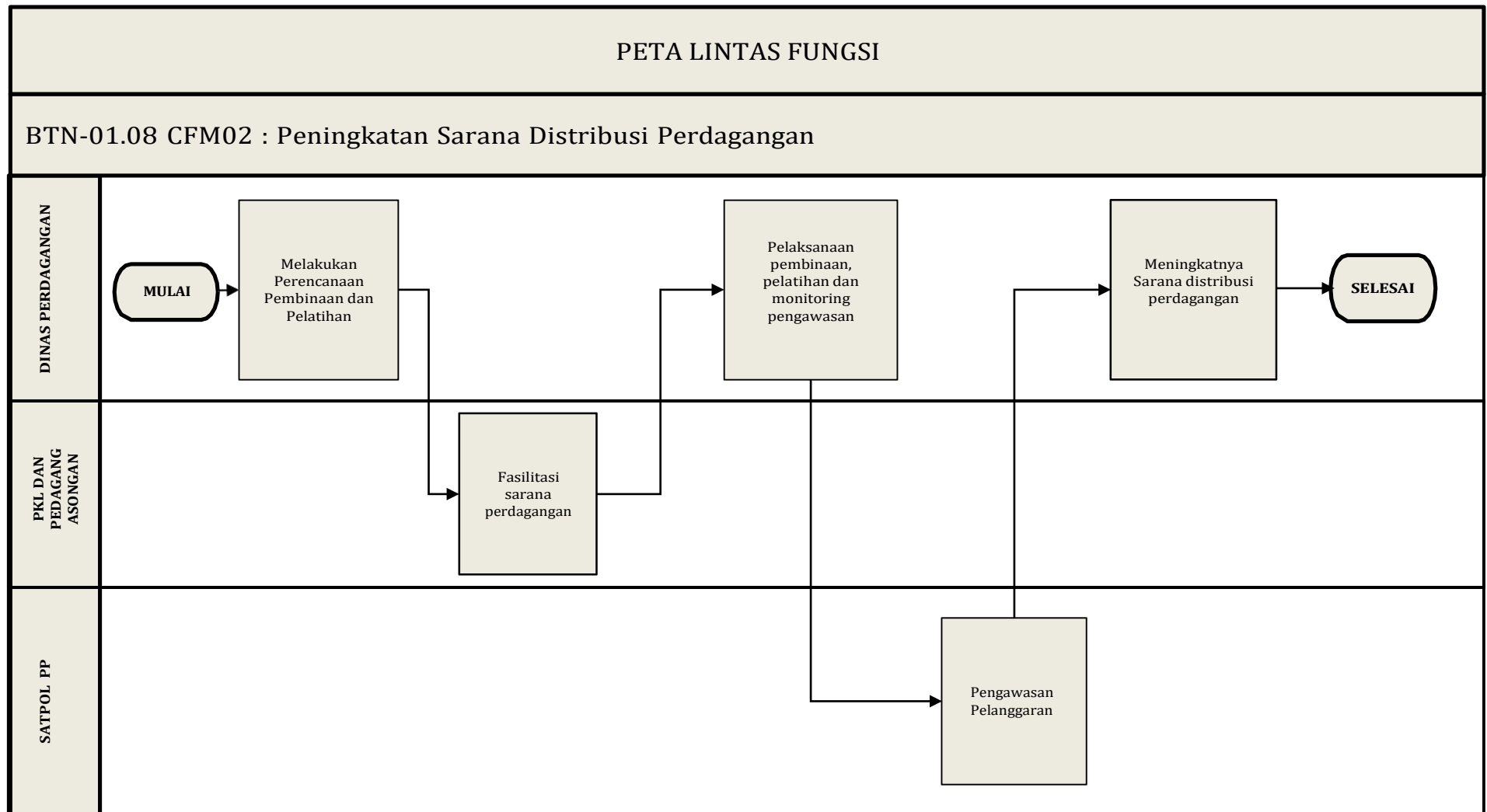
BTN-01.07 CFM03 : Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional



PETA LINTAS FUNGSI

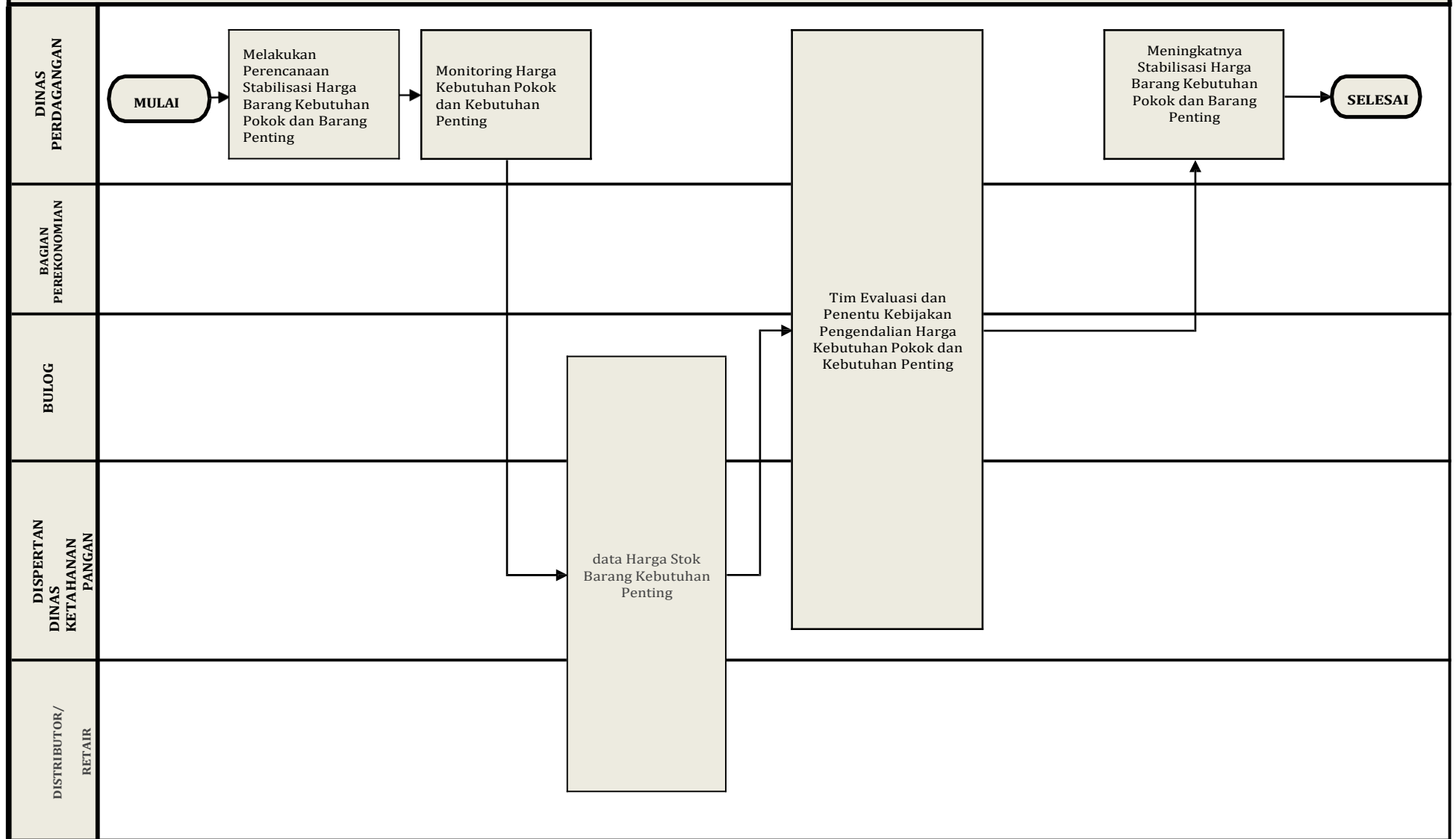
BTN-01.08 CFM01 : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

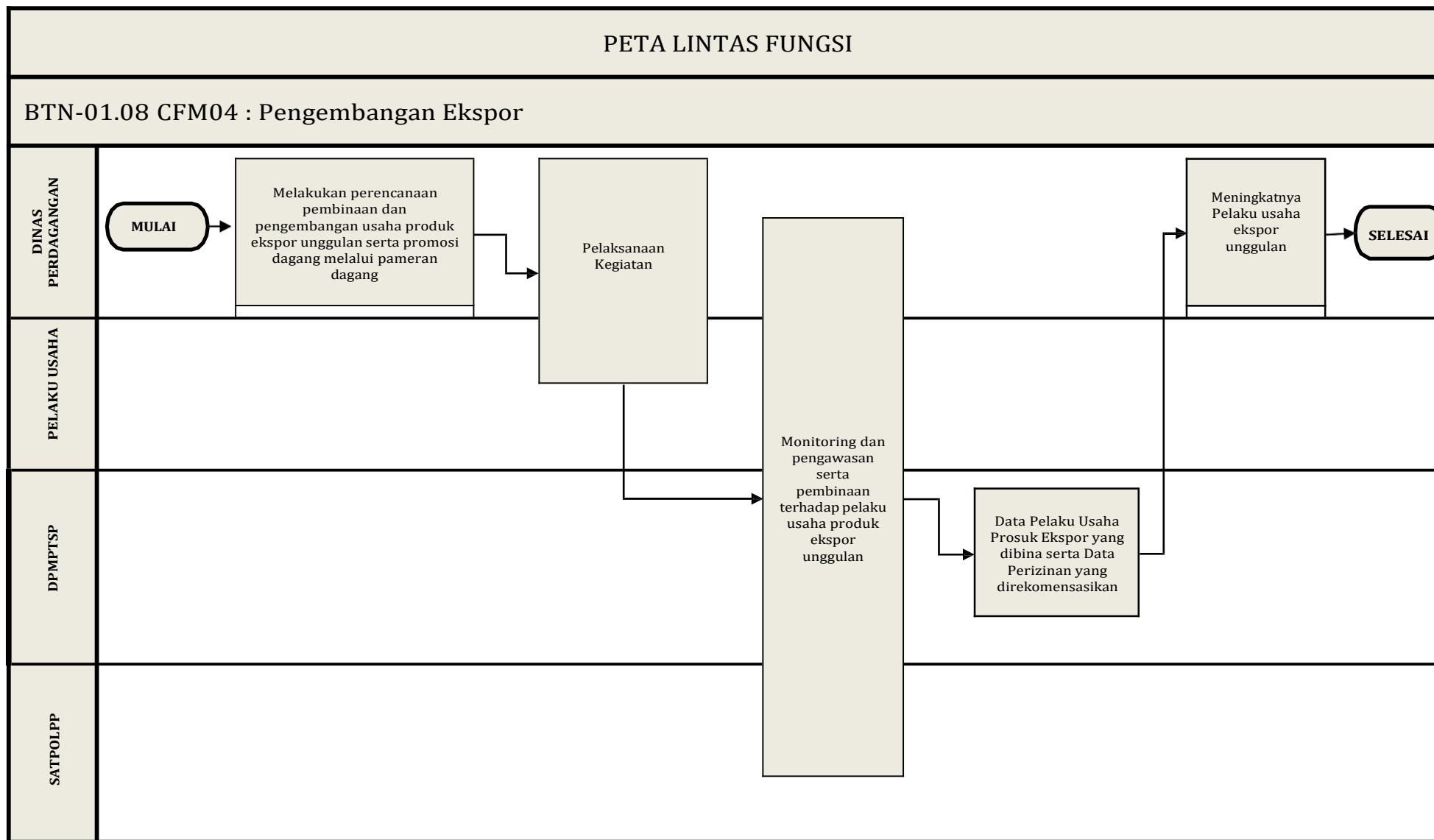




PETA LINTAS FUNGSI

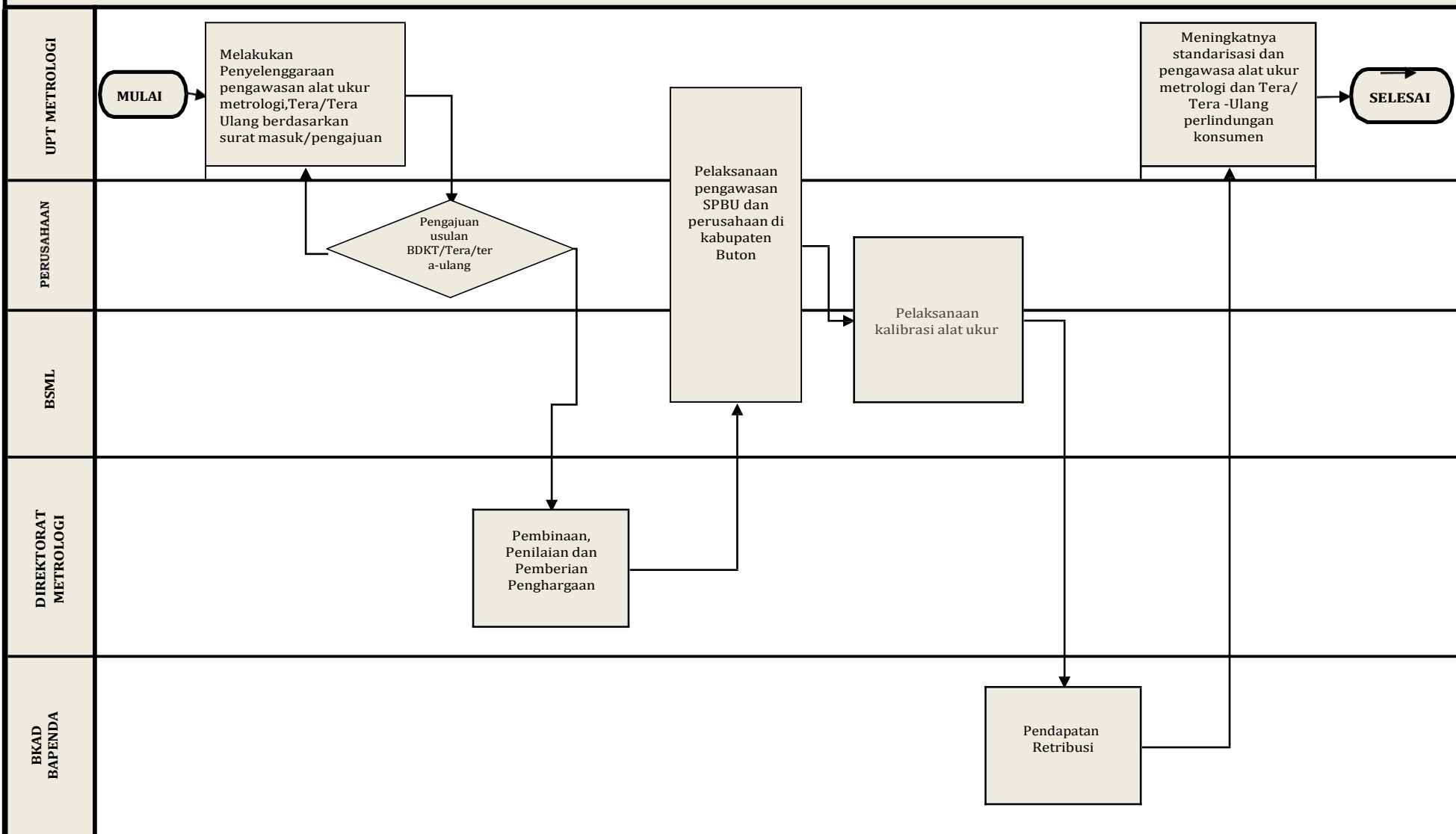
BTN-01.08 CFM03 : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

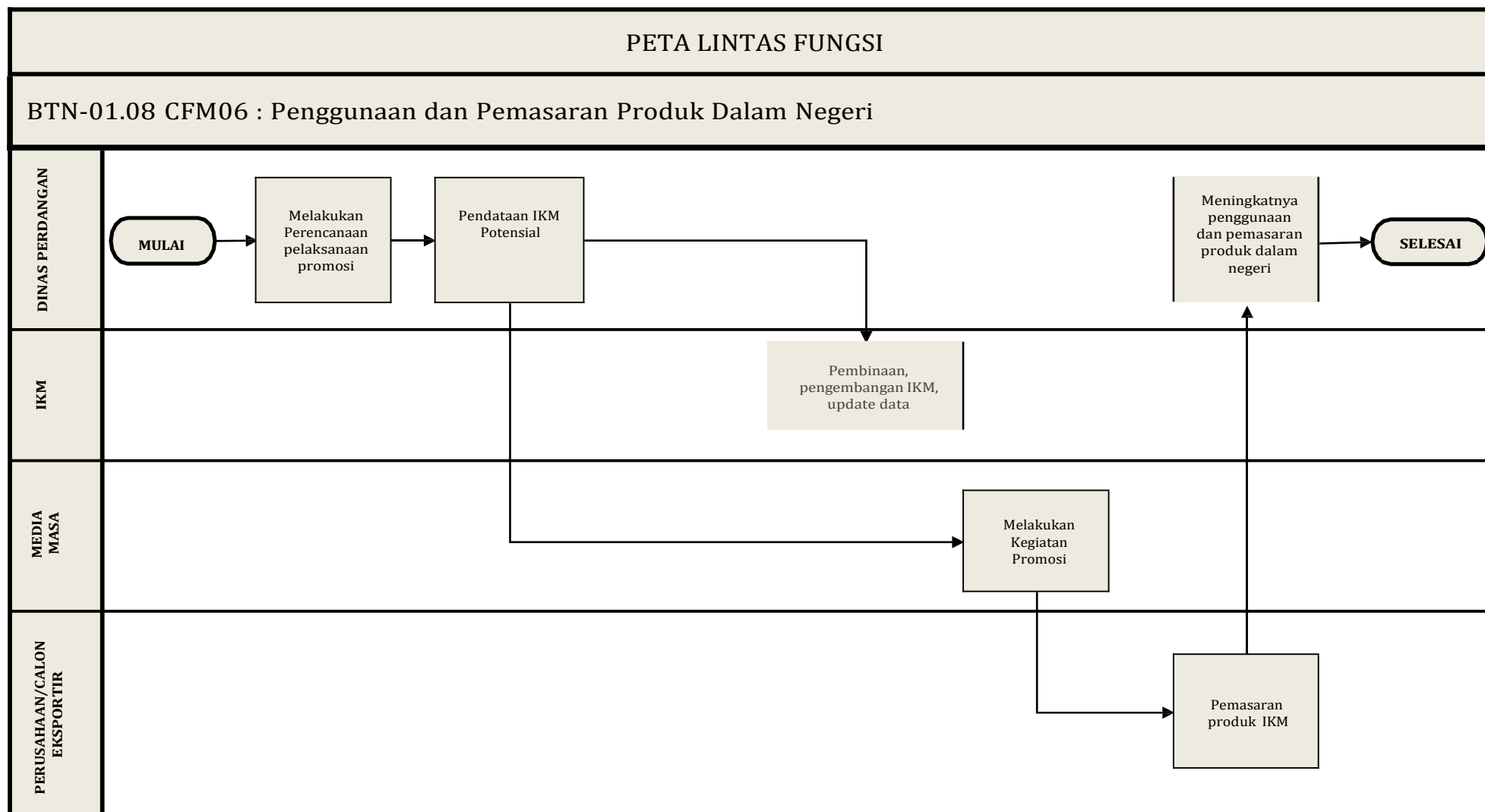




PETA LINTAS FUNGSI

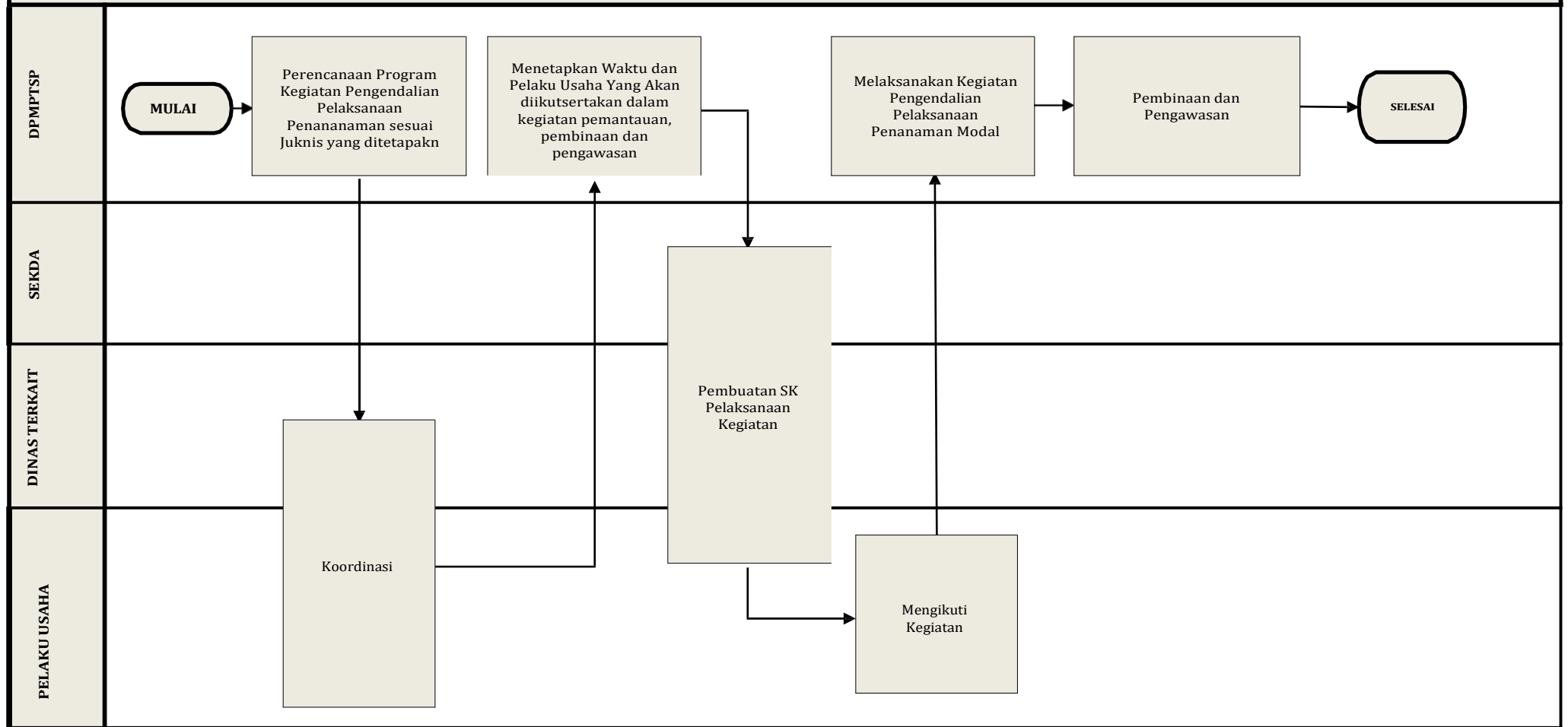
BTN-01.08 CFM05 : Standarisasi dan Perlindungan Konsumen





PETA LINTAS FUNGSI

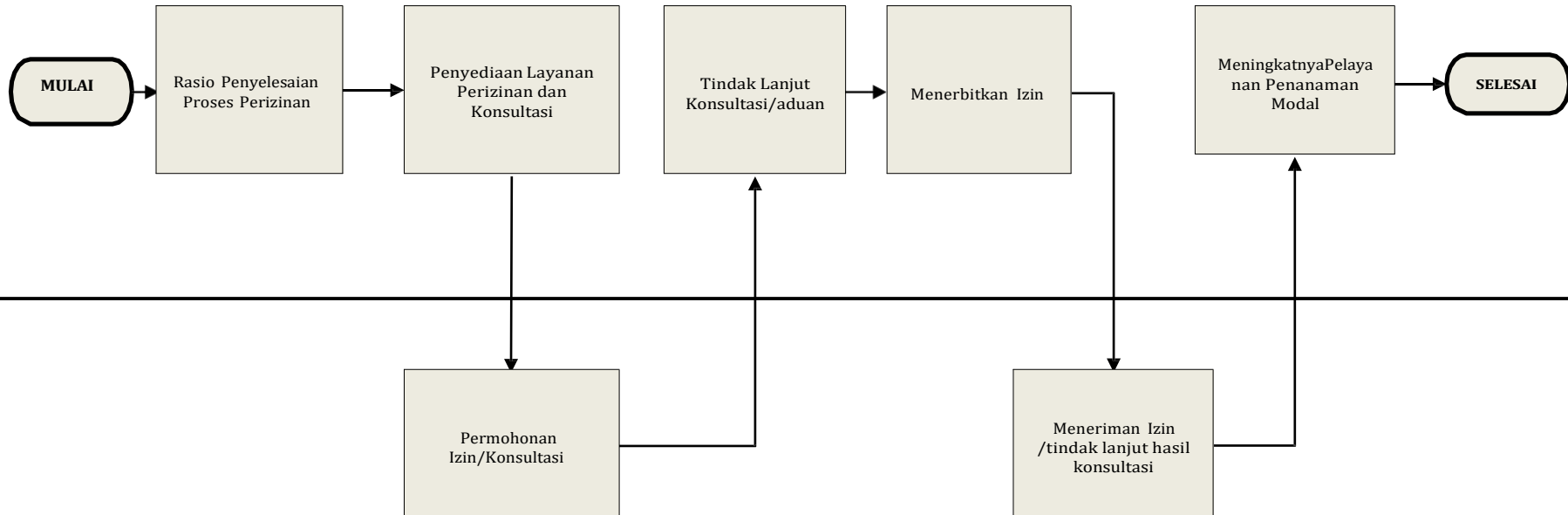
BTN-01.09 CFM01: Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.09 CFM02: Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

DPMP TSP



PELAKU USAHA / MASYARAKAT

PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.09 CFM03 : Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

DPMPPTSP

MULAI

Perencanaan
Program dan
Kegiatan

Pengumpulan
Data Dengan
Melaksanakan
Kegiatan
Lapangan

Menetapkan
Waktu dan
Pelaku Usaha
Yang Akan
Dikunjungi

Penyusunan
Dokumen Data
dan Informasi
Yang Telah
diperoleh

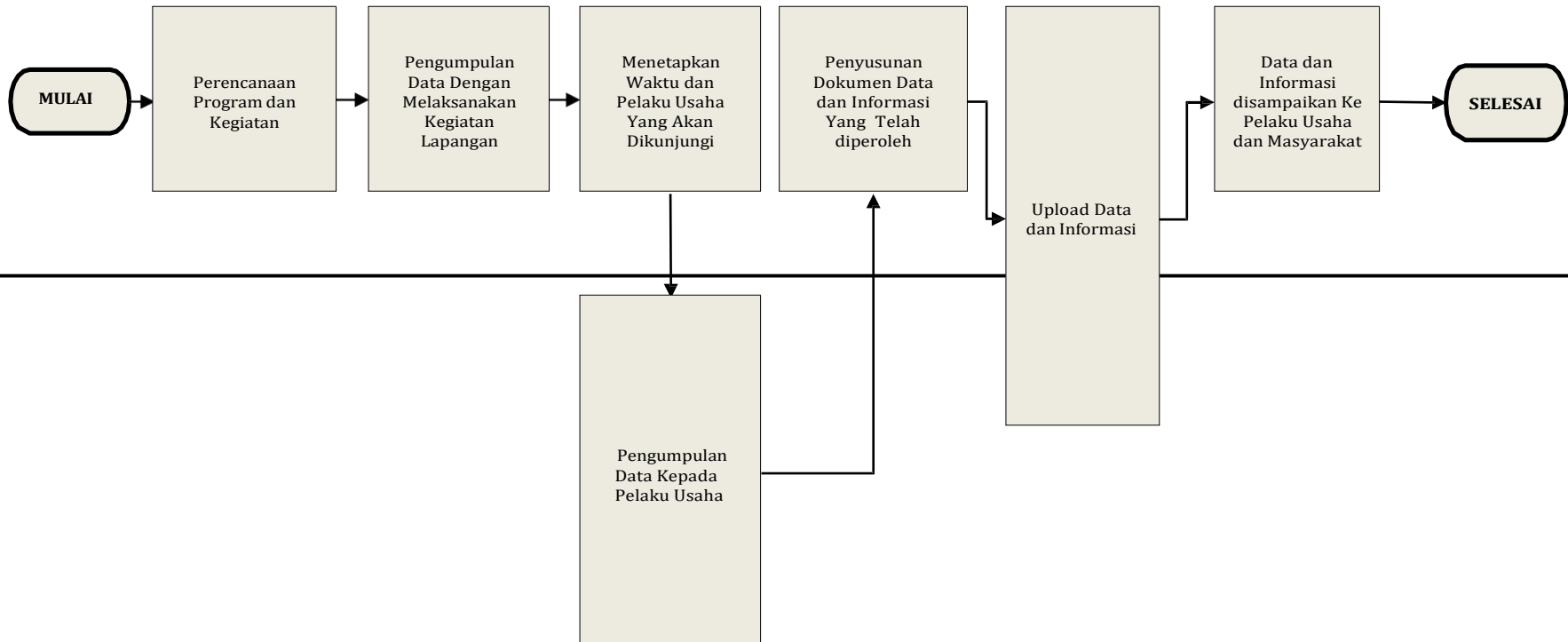
Upload Data
dan Informasi

Data dan
Informasi
disampaikan Ke
Pelaku Usaha
dan Masyarakat

SELESAI

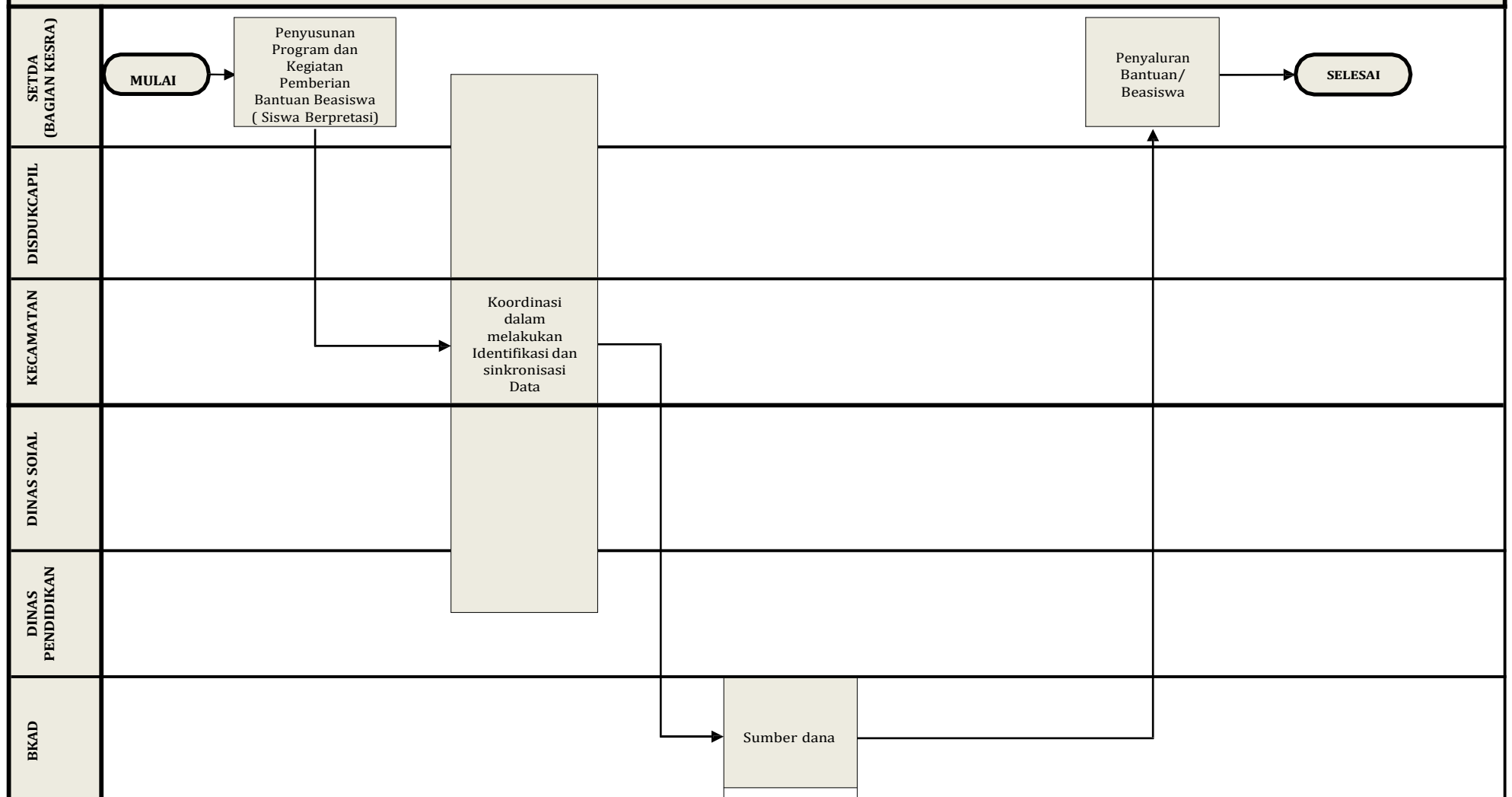
PELAKU USAHA, MASYARAKAT

Pengumpulan
Data Kepada
Pelaku Usaha



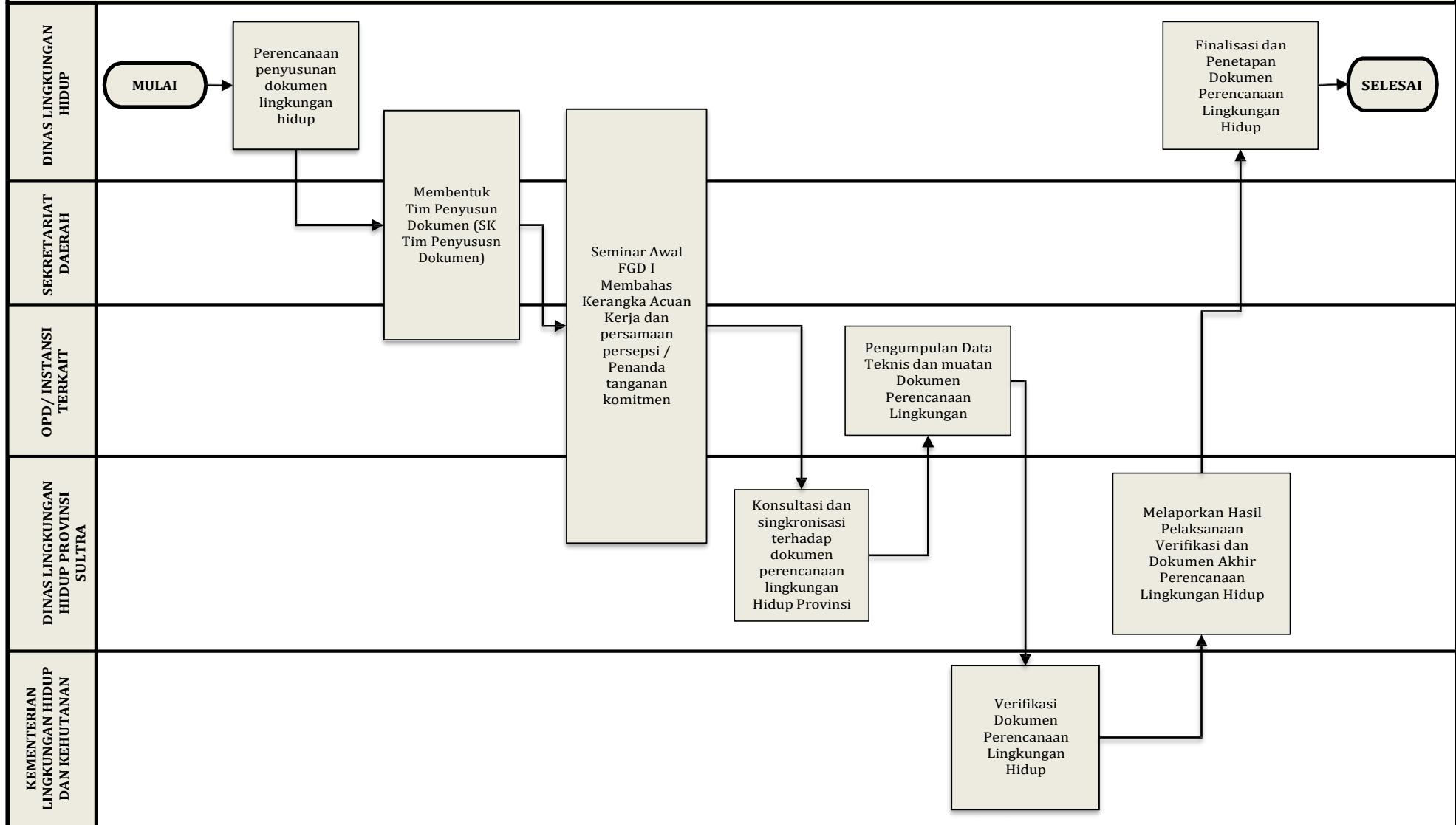
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-01.09 CFM04 : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat



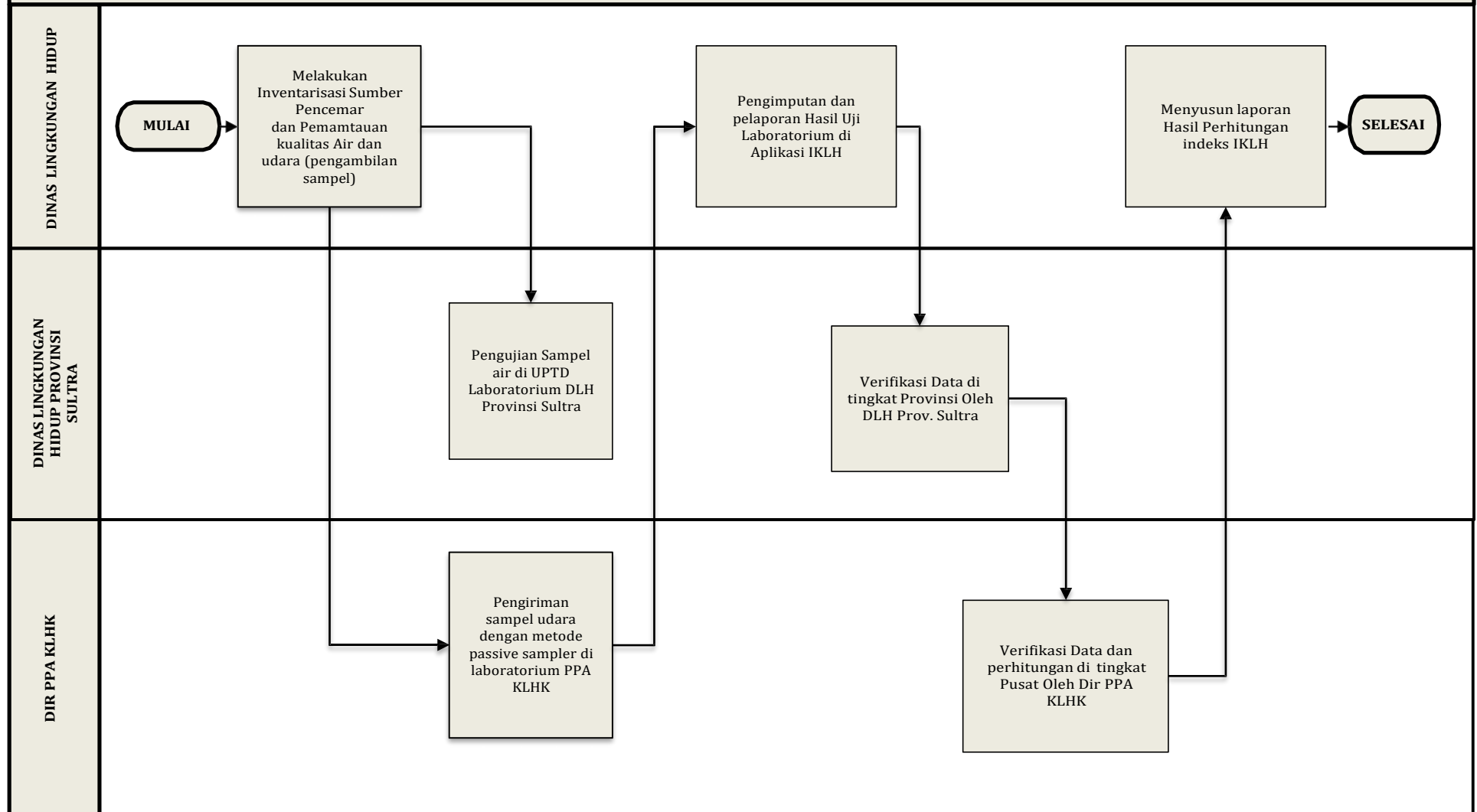
PETA LINTAS FUNGSI

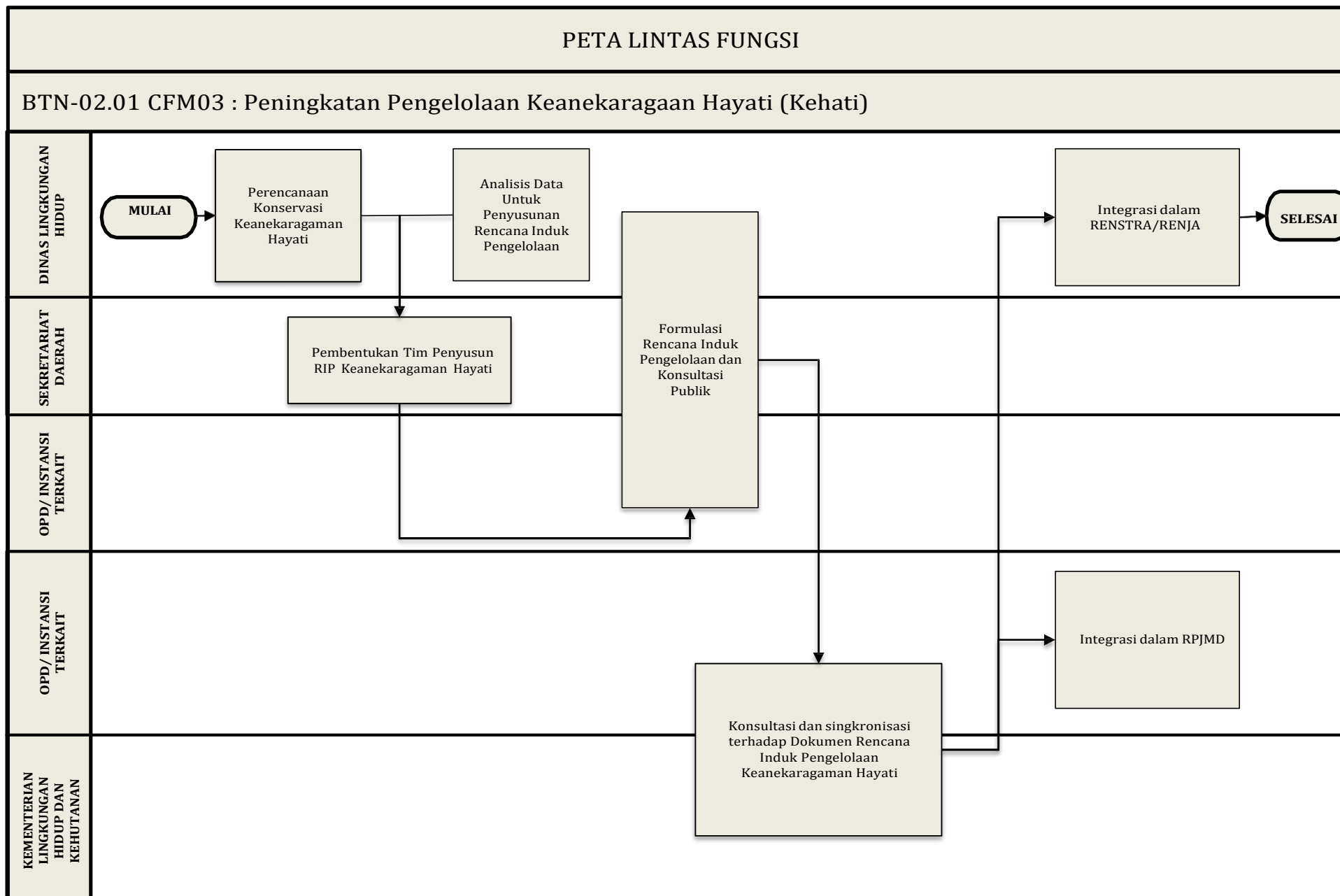
BTN-02.01 CFM01 : Perencanaan Lingkungan Hidup
--



PETA LINTAS FUNGSI

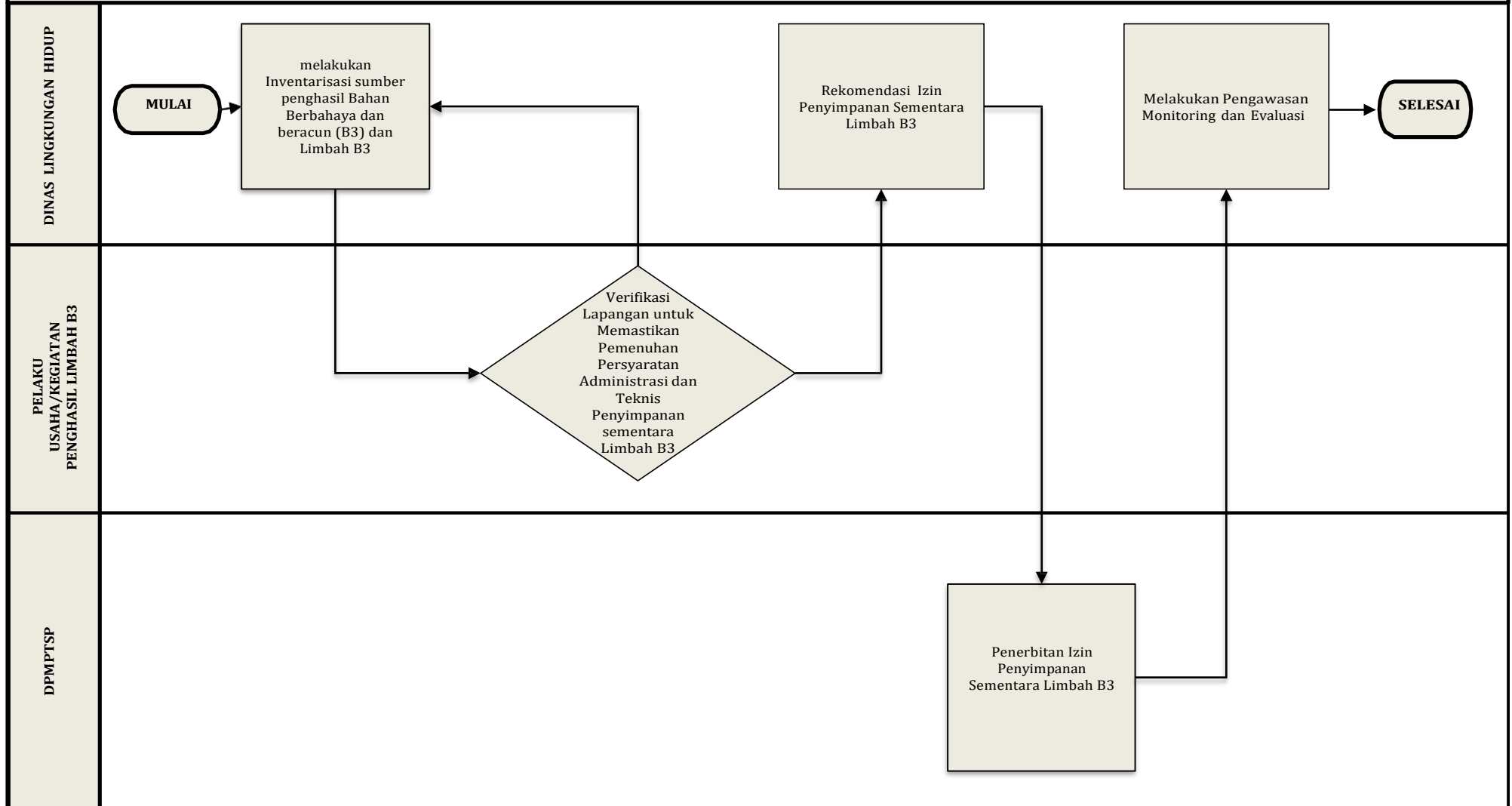
BTN-02.01 CFM02 : Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup





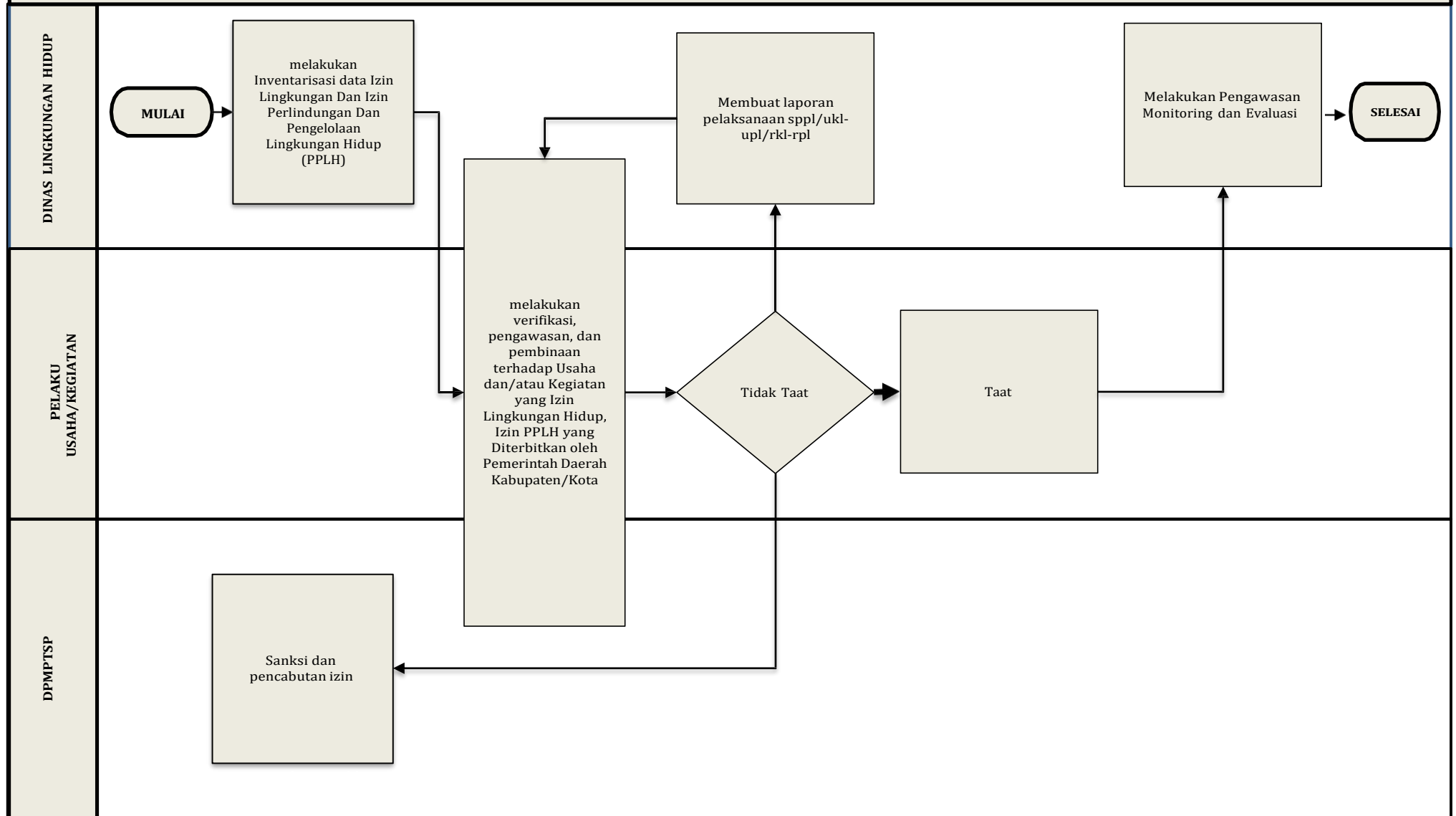
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-02.01 CFM04 : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)



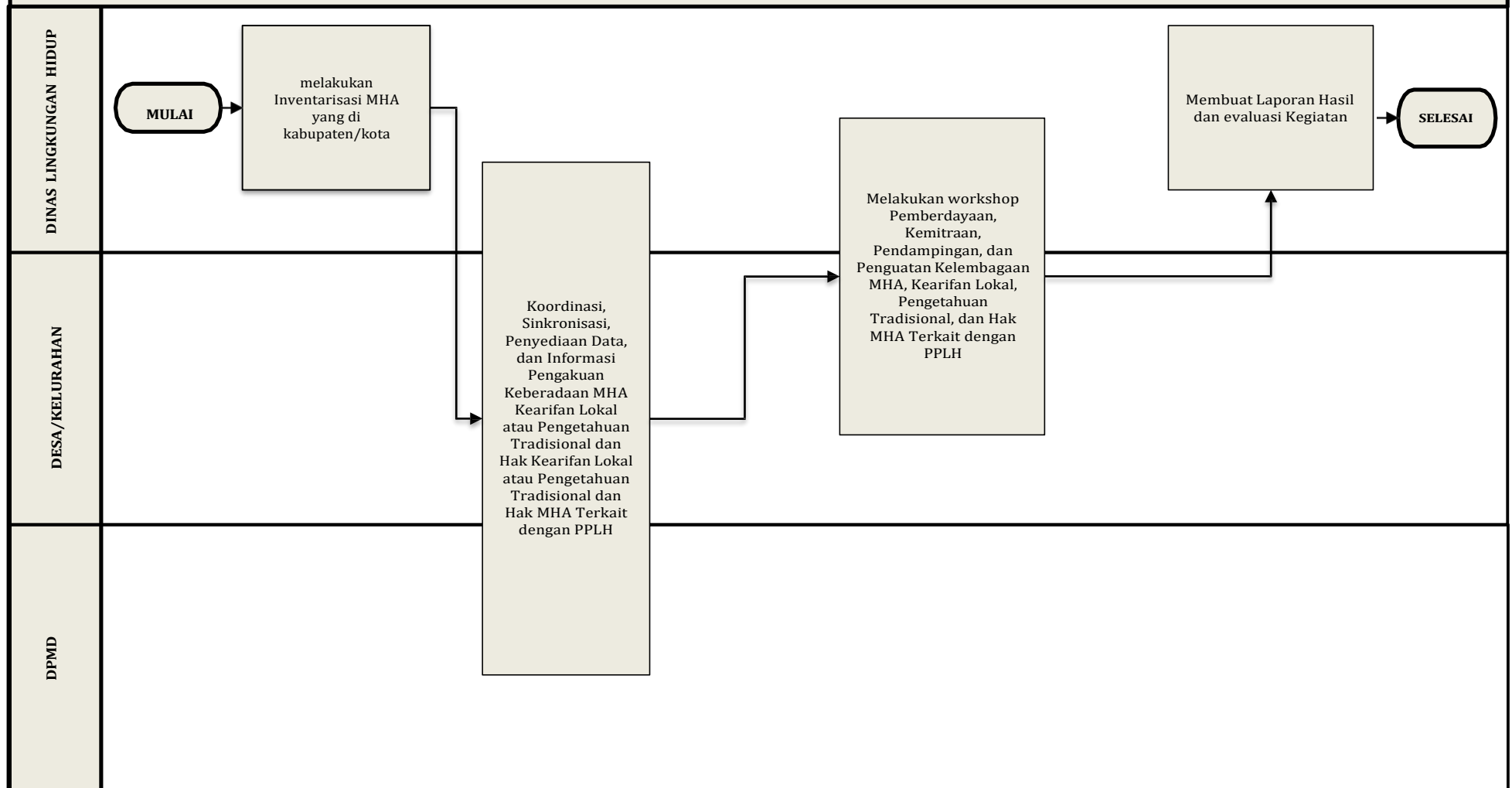
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-02.01 CFM05 : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



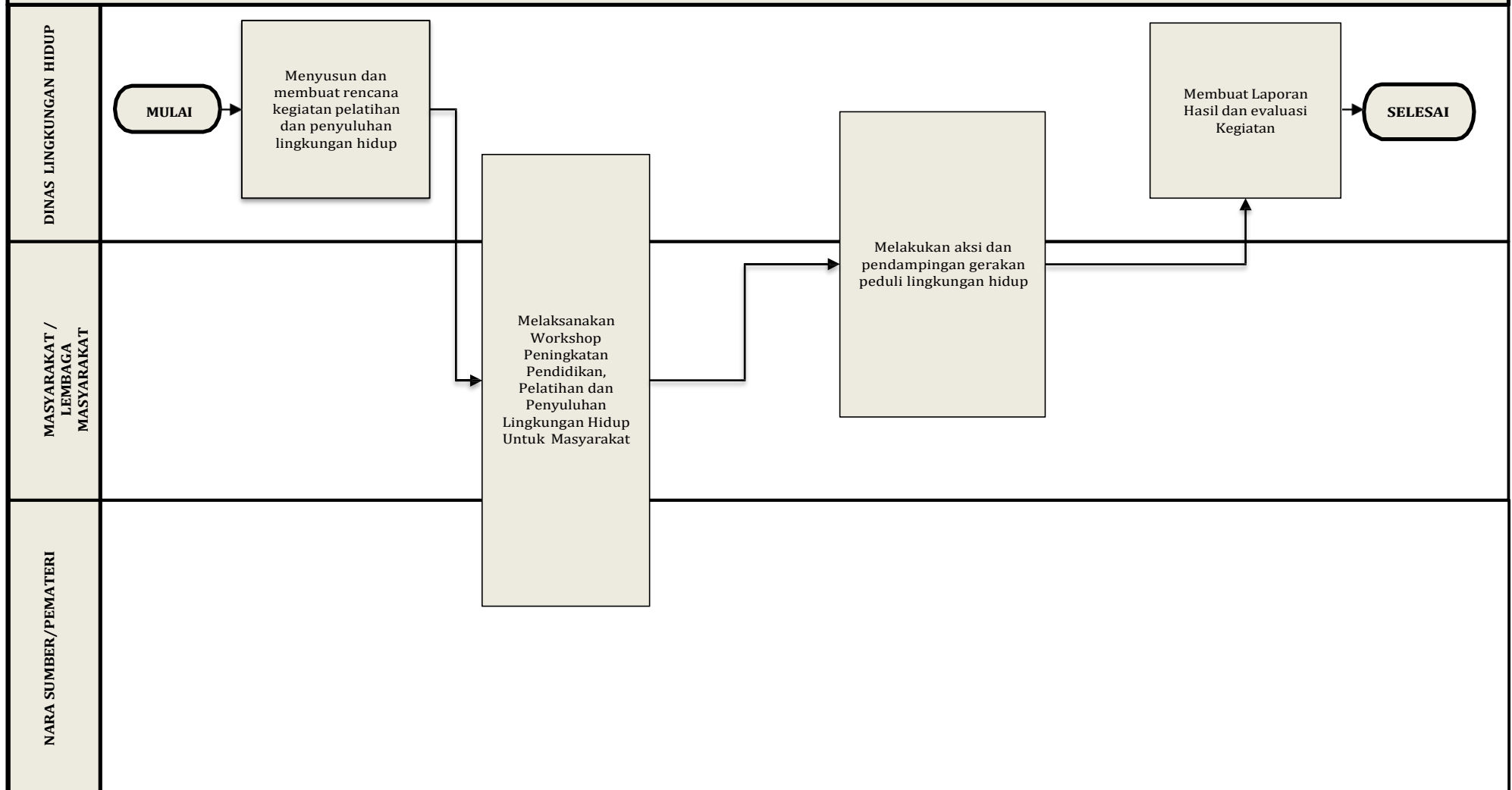
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-02.01 CFM06 : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH



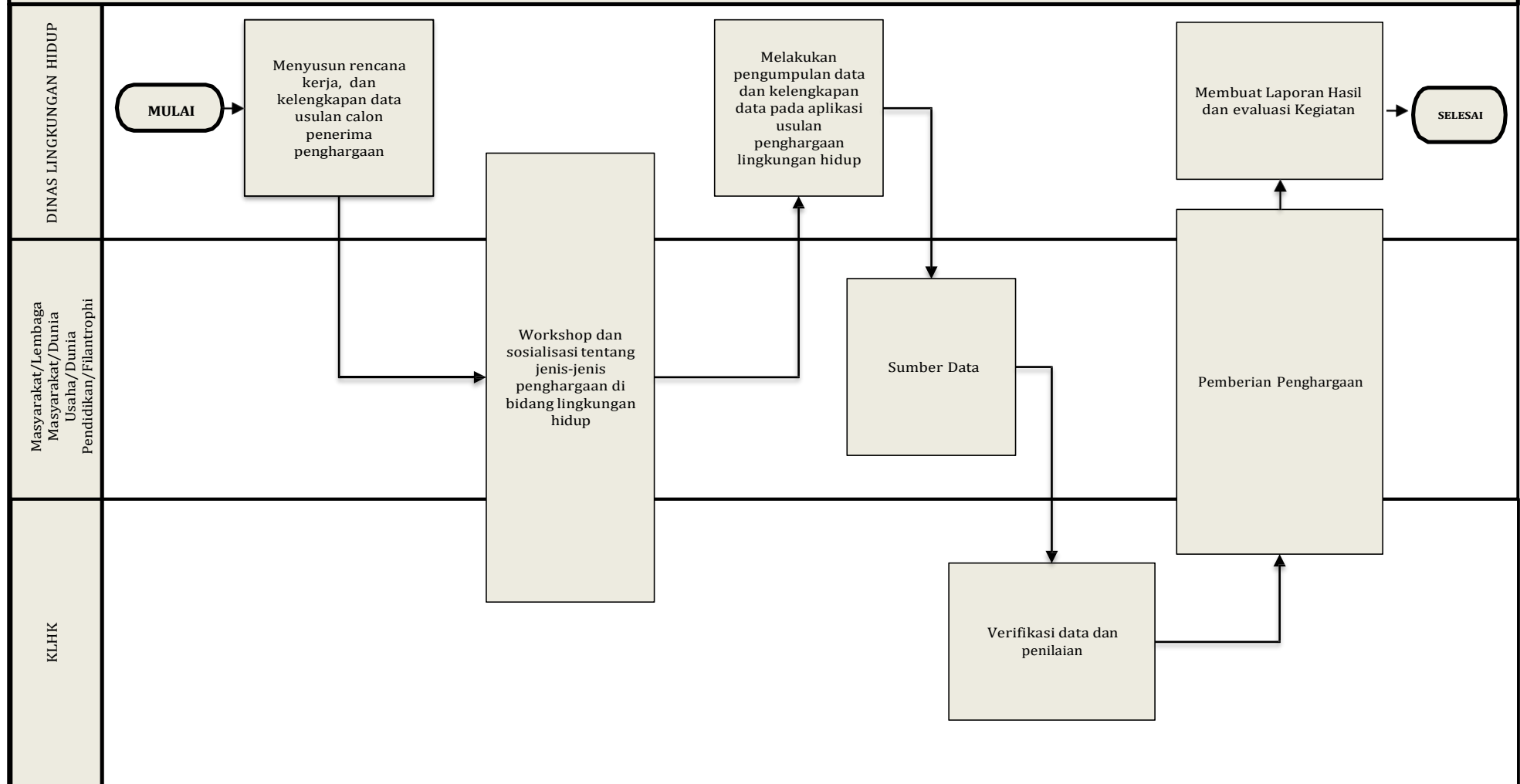
PETA LINTAS FUNGSI

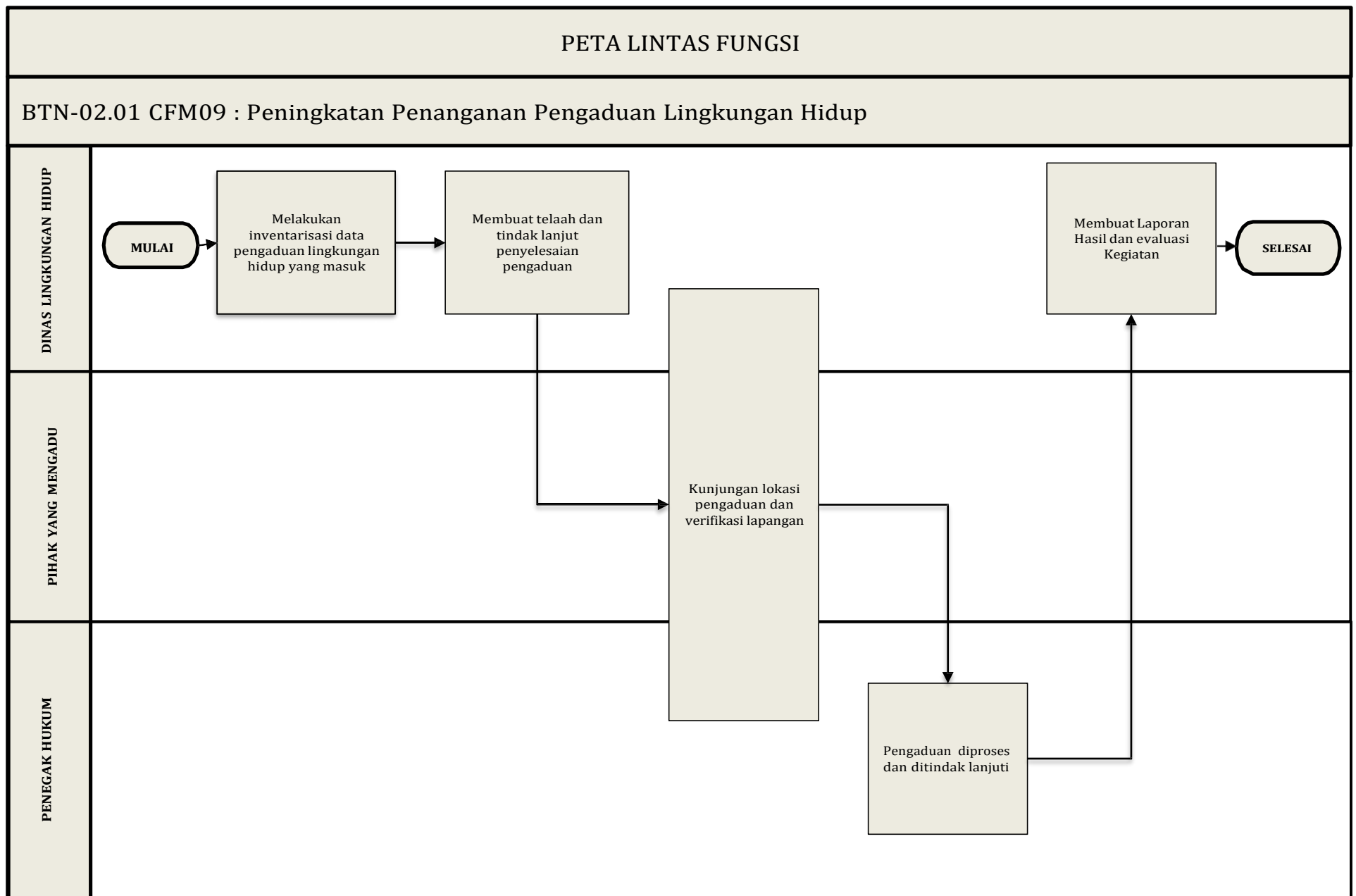
BTN-02.01 CFM07 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

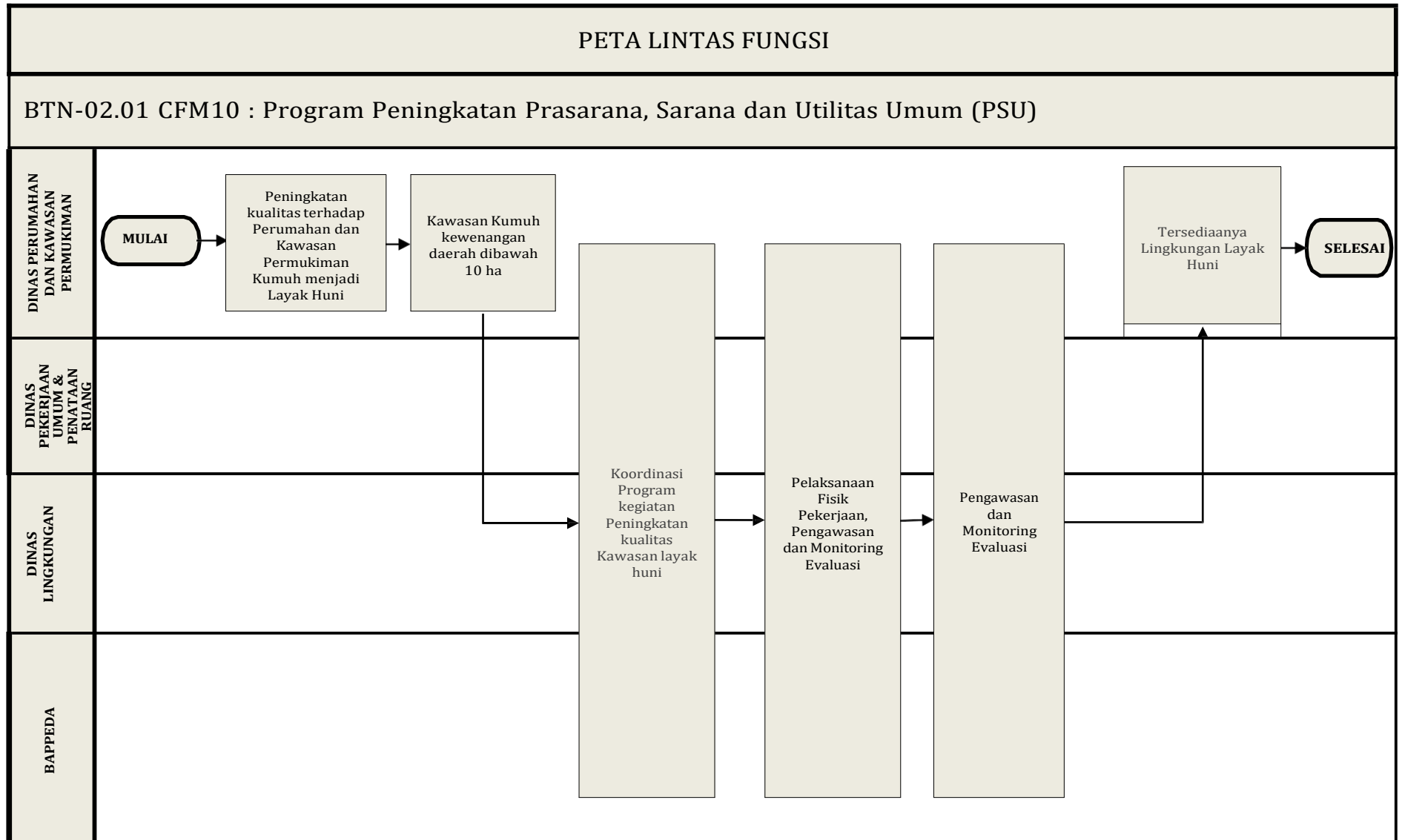


PETA LINTAS FUNGSI

BTN-02.01 CFM08 : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

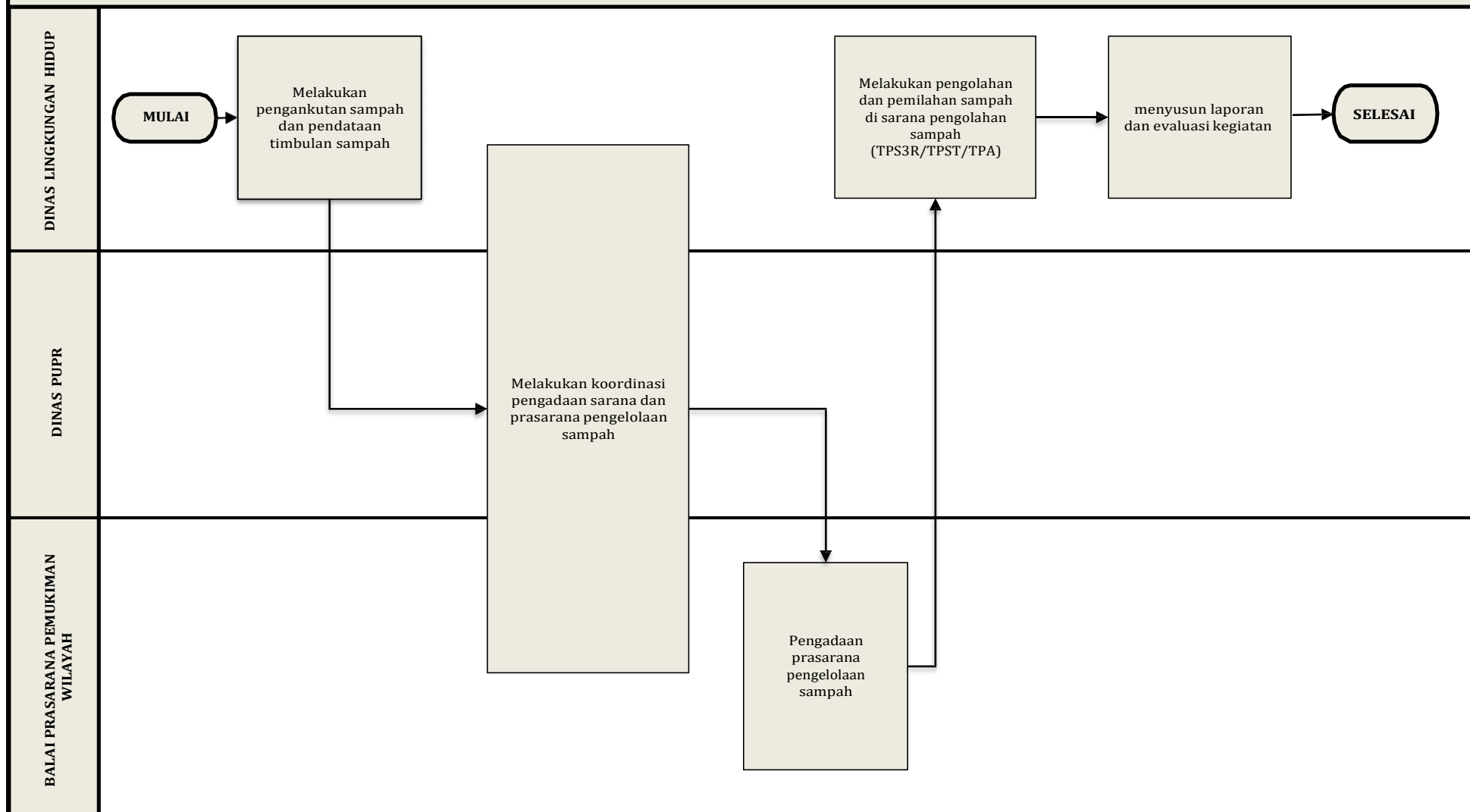






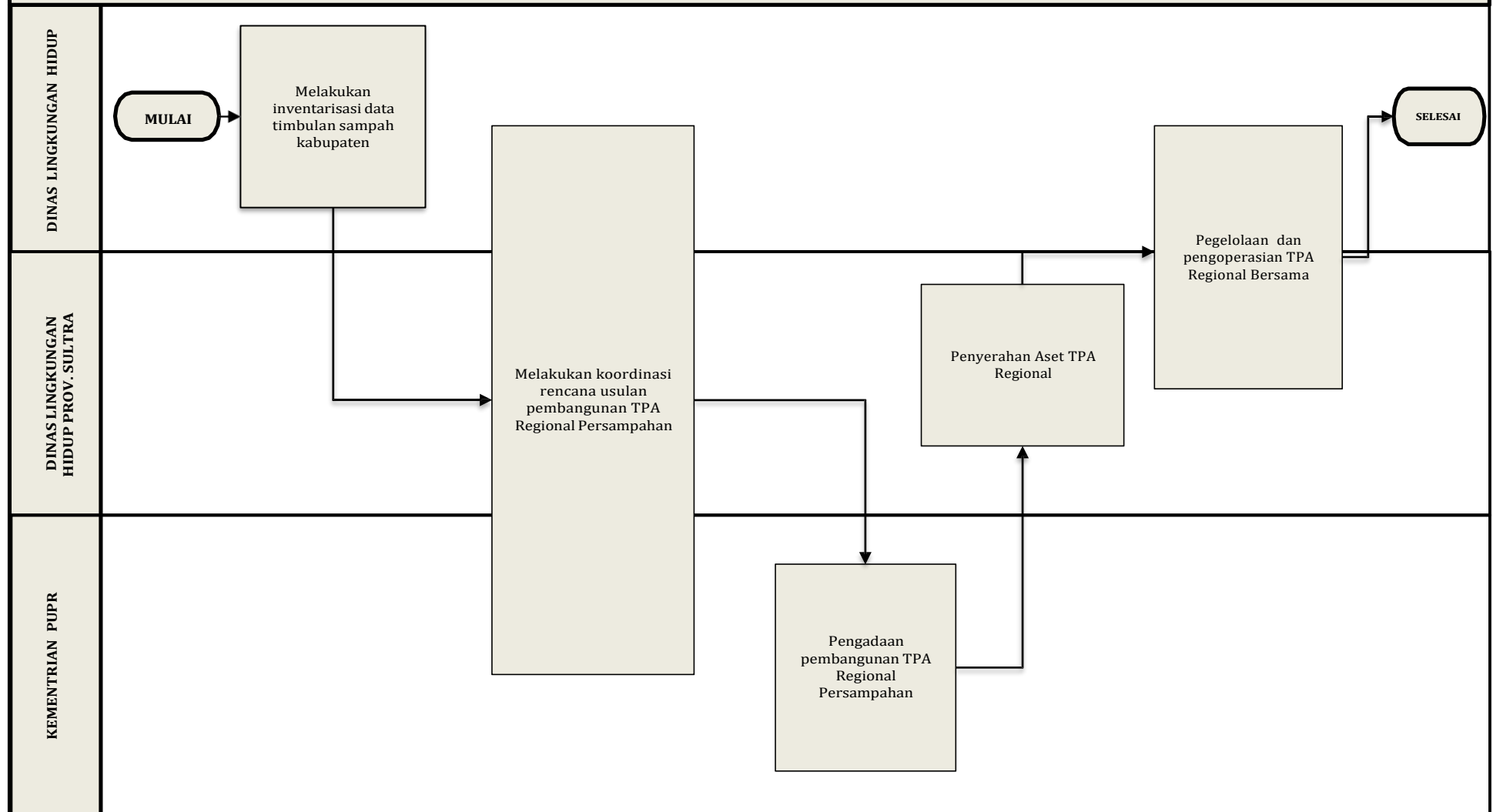
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-02.02 CFM01: Pengelolaan Persampahan



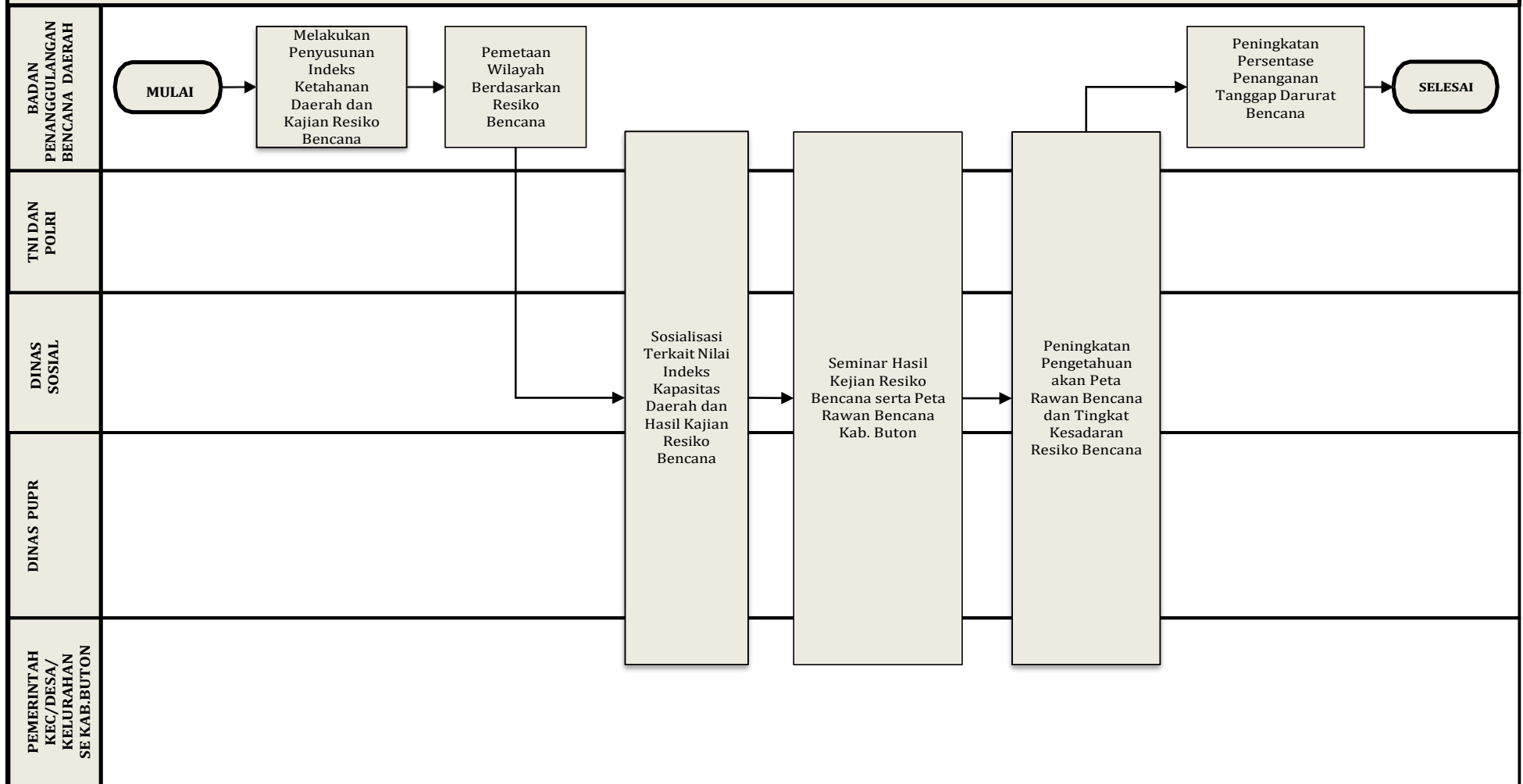
PETA LINTAS FUNGSI

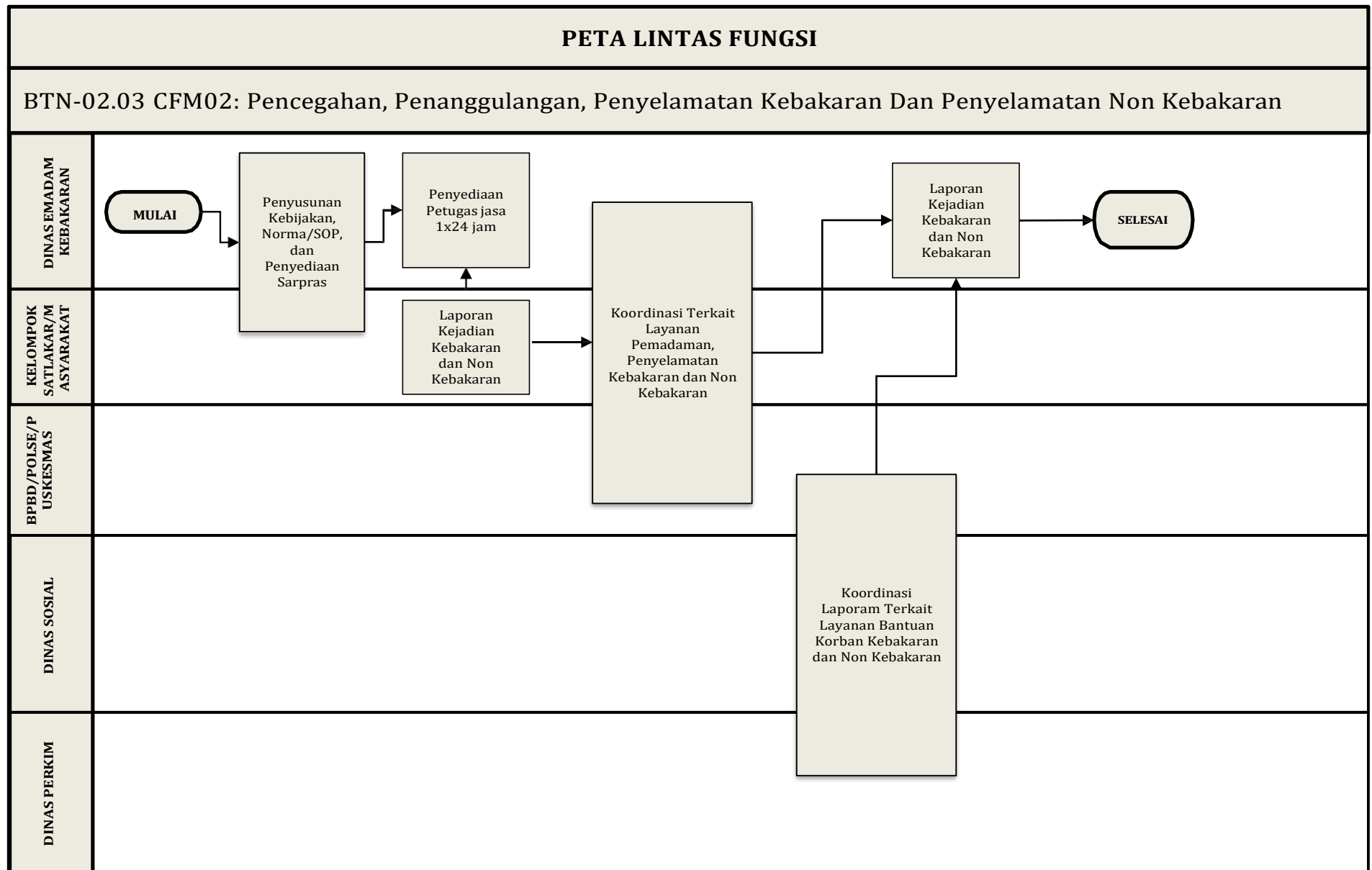
BTN-02.02 CFM02 : Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

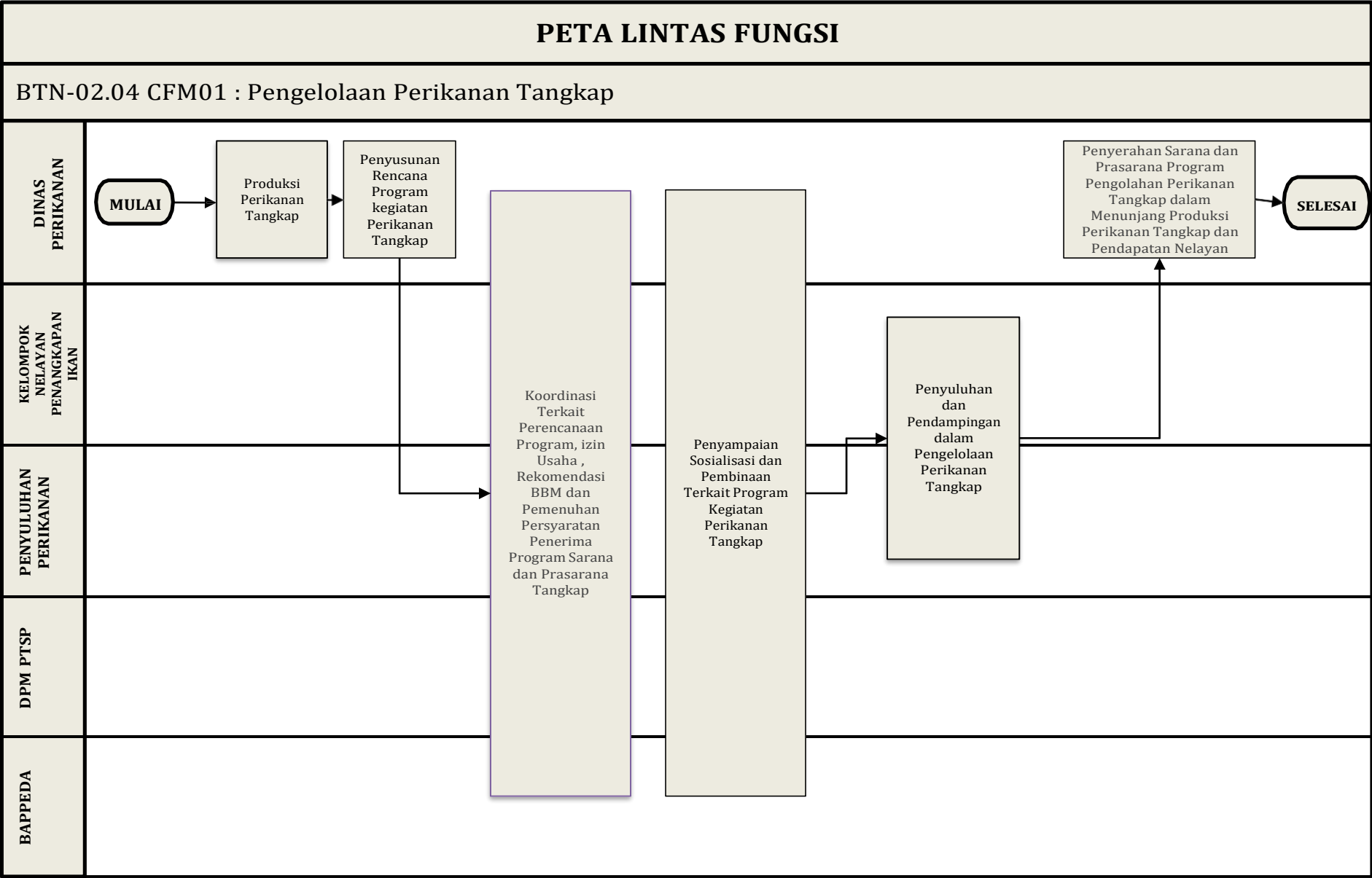


PETA LINTAS FUNGSI

BTN-02.03 CFM01: Penanggulangan Bencana

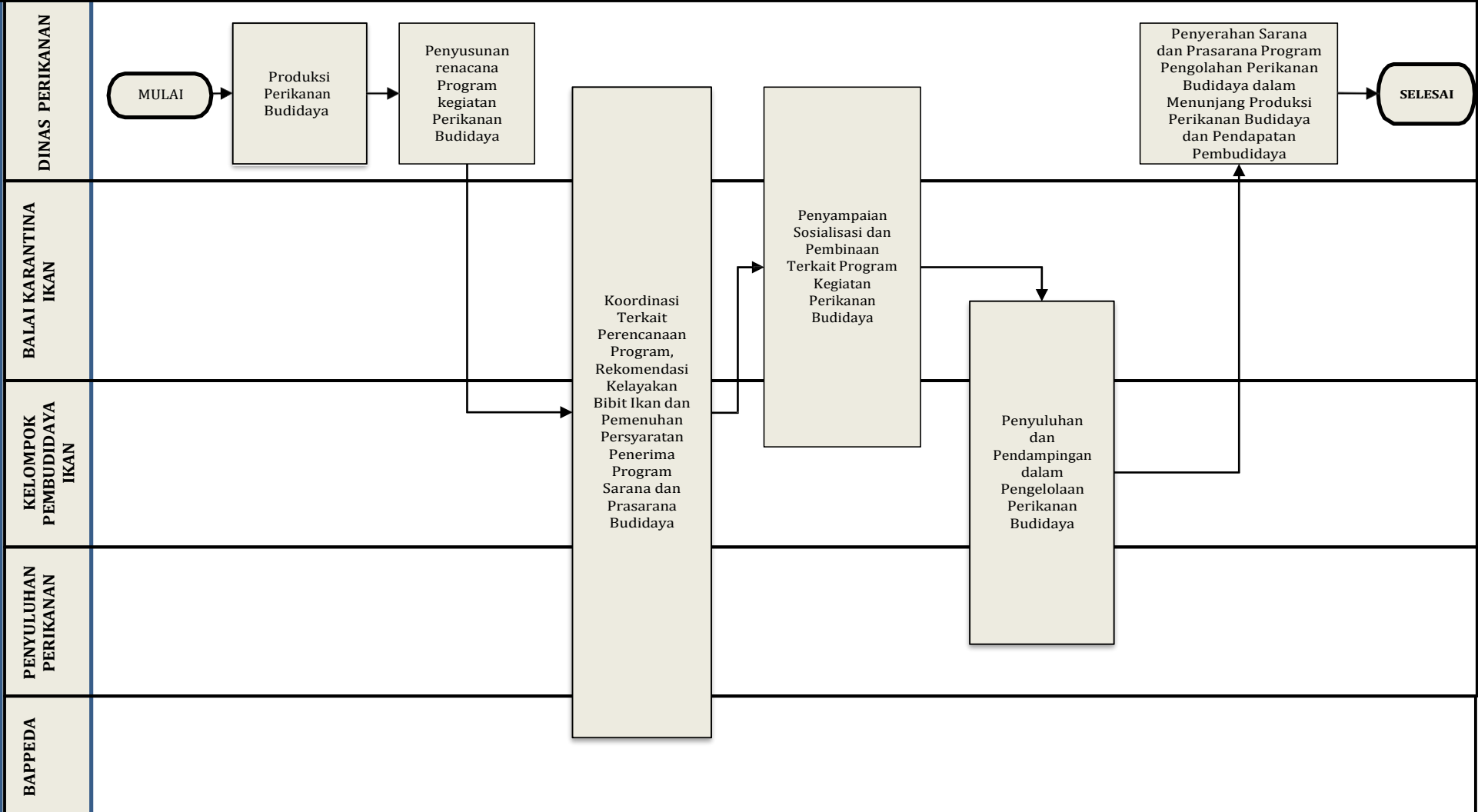






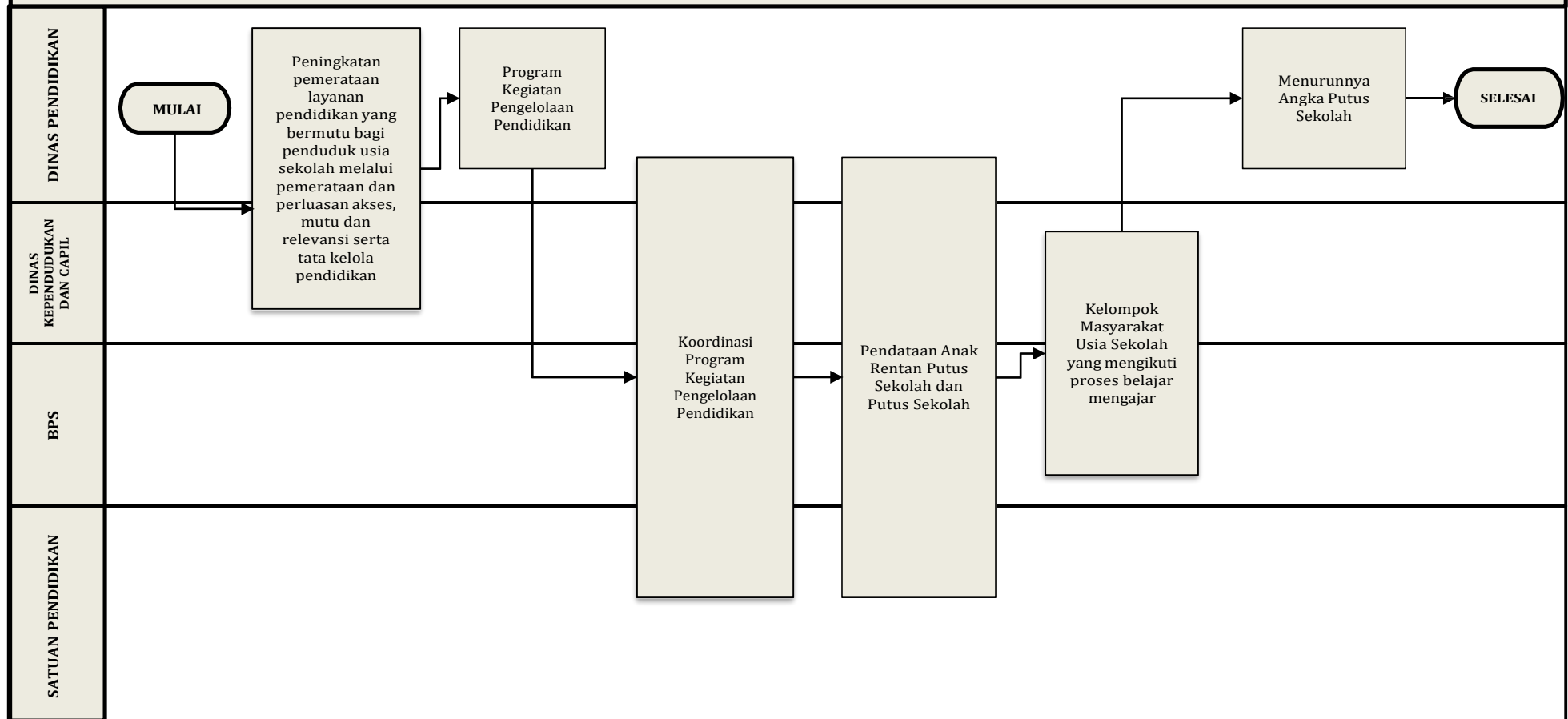
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-02.04 CFM04 : Pengelolaan Perikanan Budidaya
--



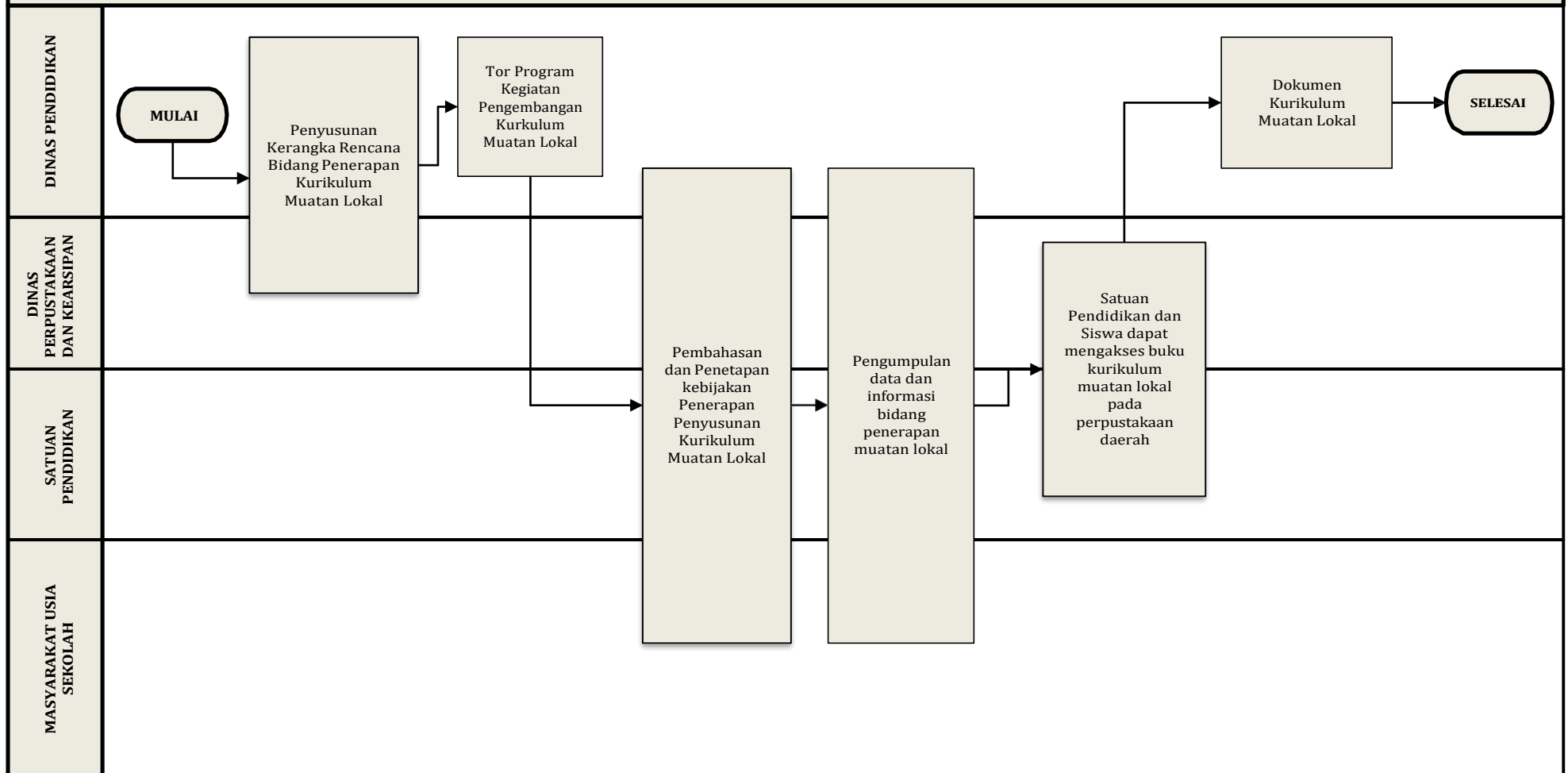
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.01 CFM01 : Pengelolaan Pendidikan



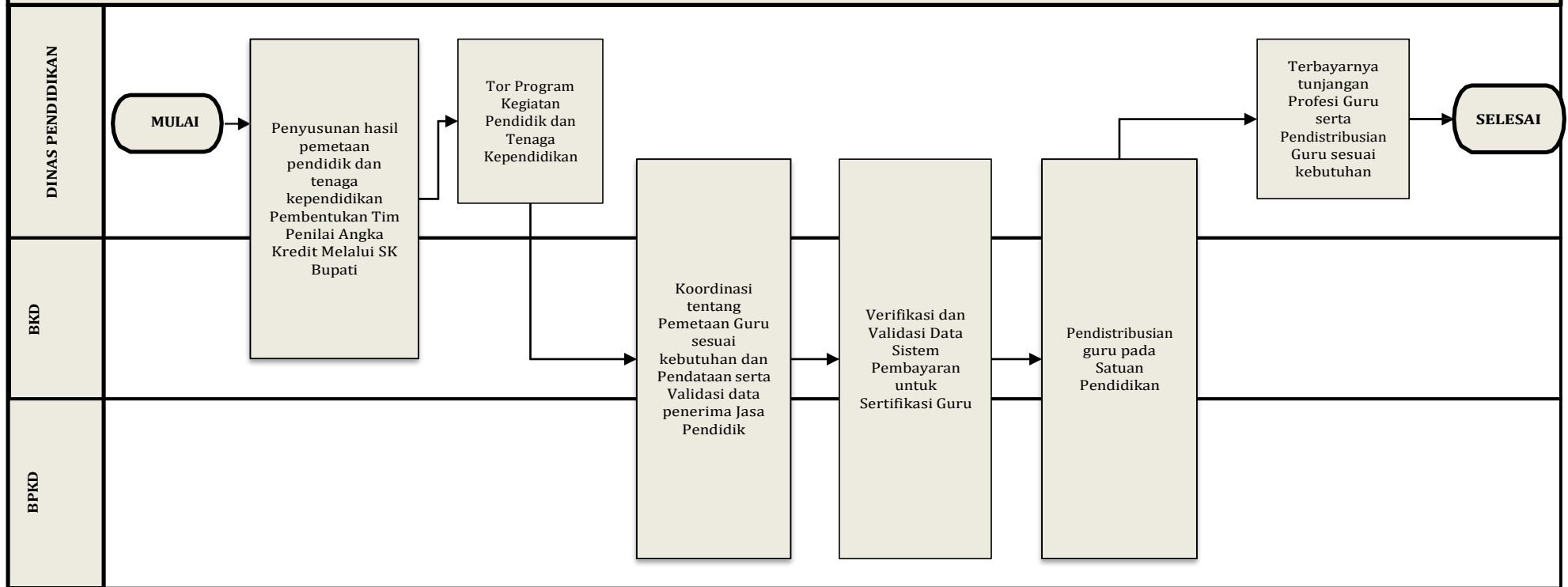
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.01 CFM02 : Pengembangan Kurikulum



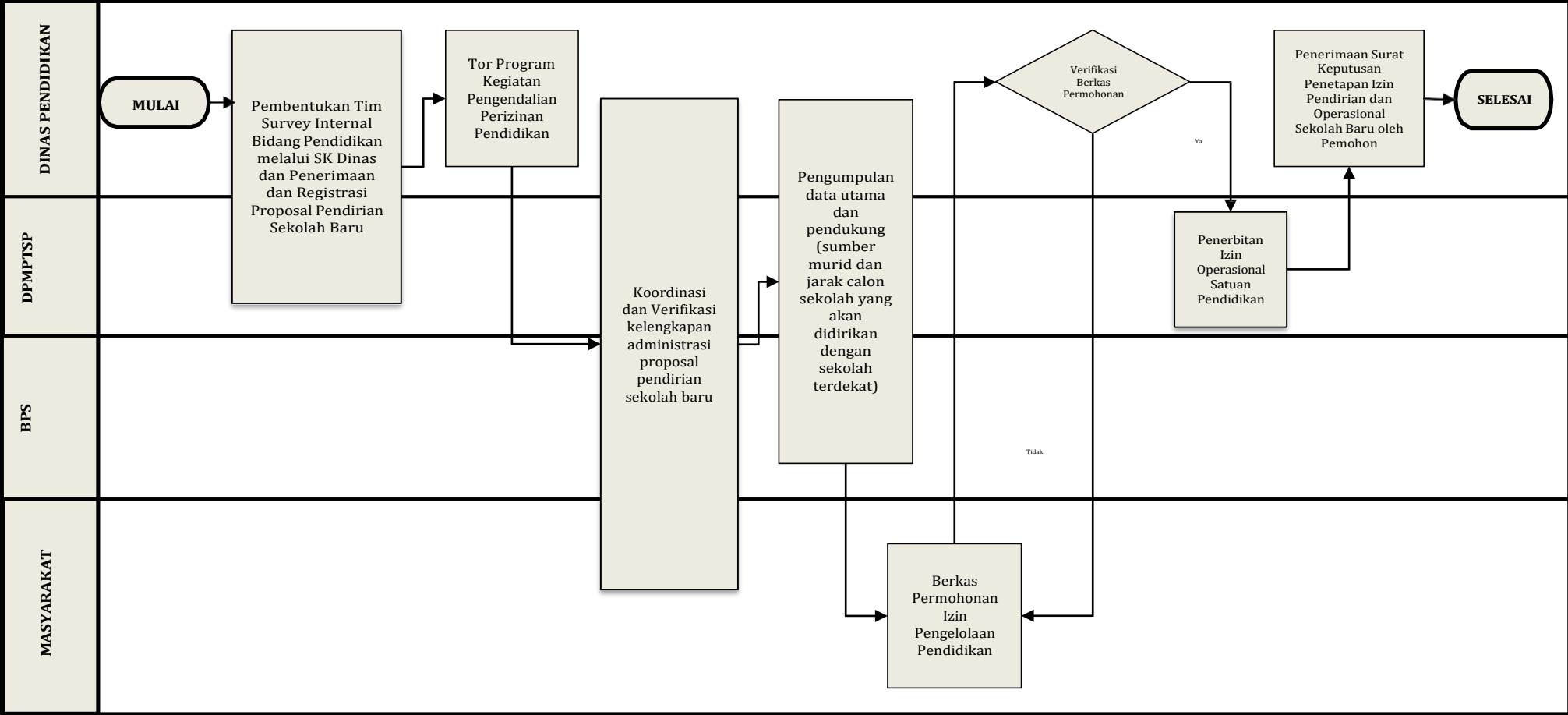
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.01 CFM03 : Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan



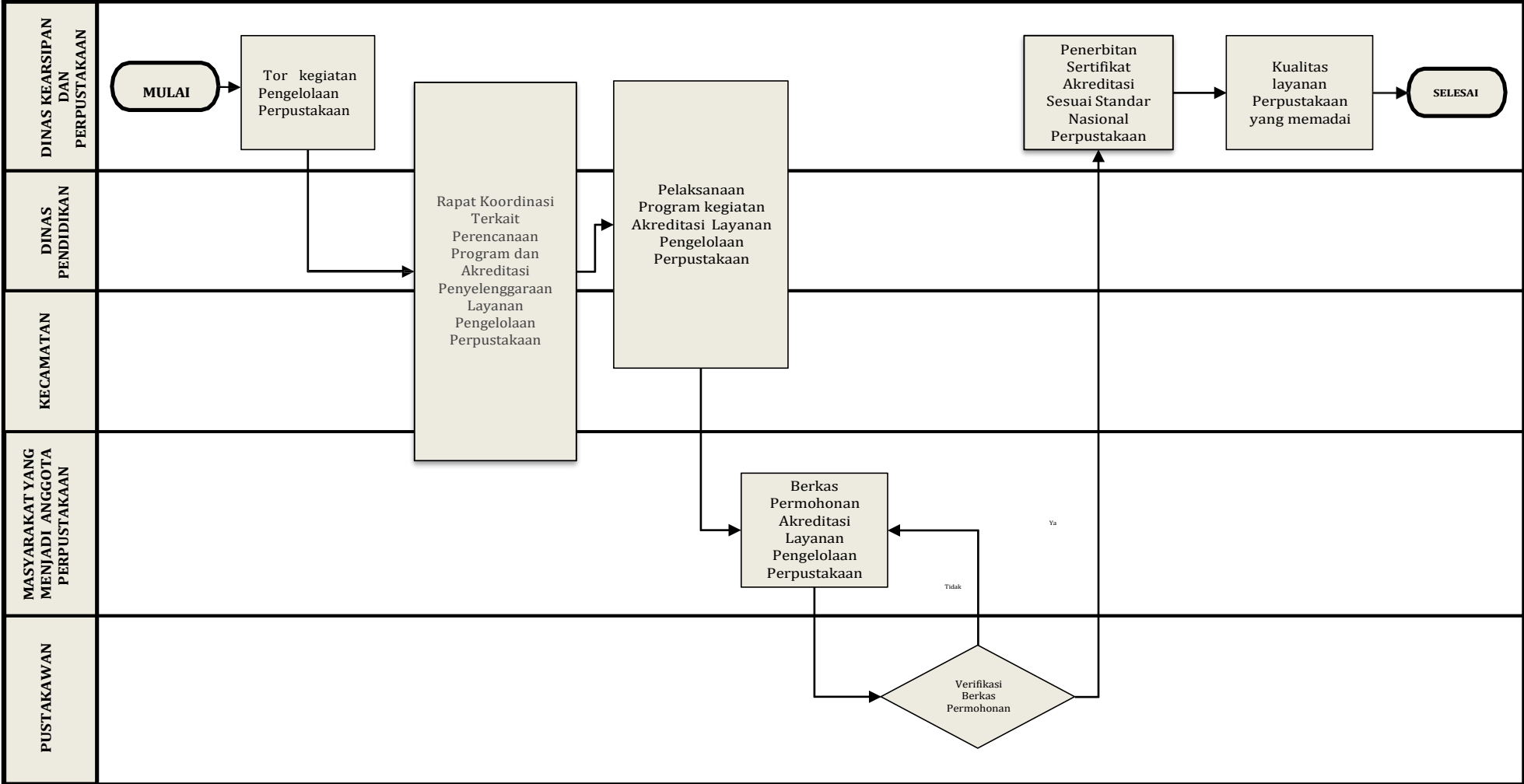
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.01 CFM04 : Pengendalian Perizinan Pendidikan



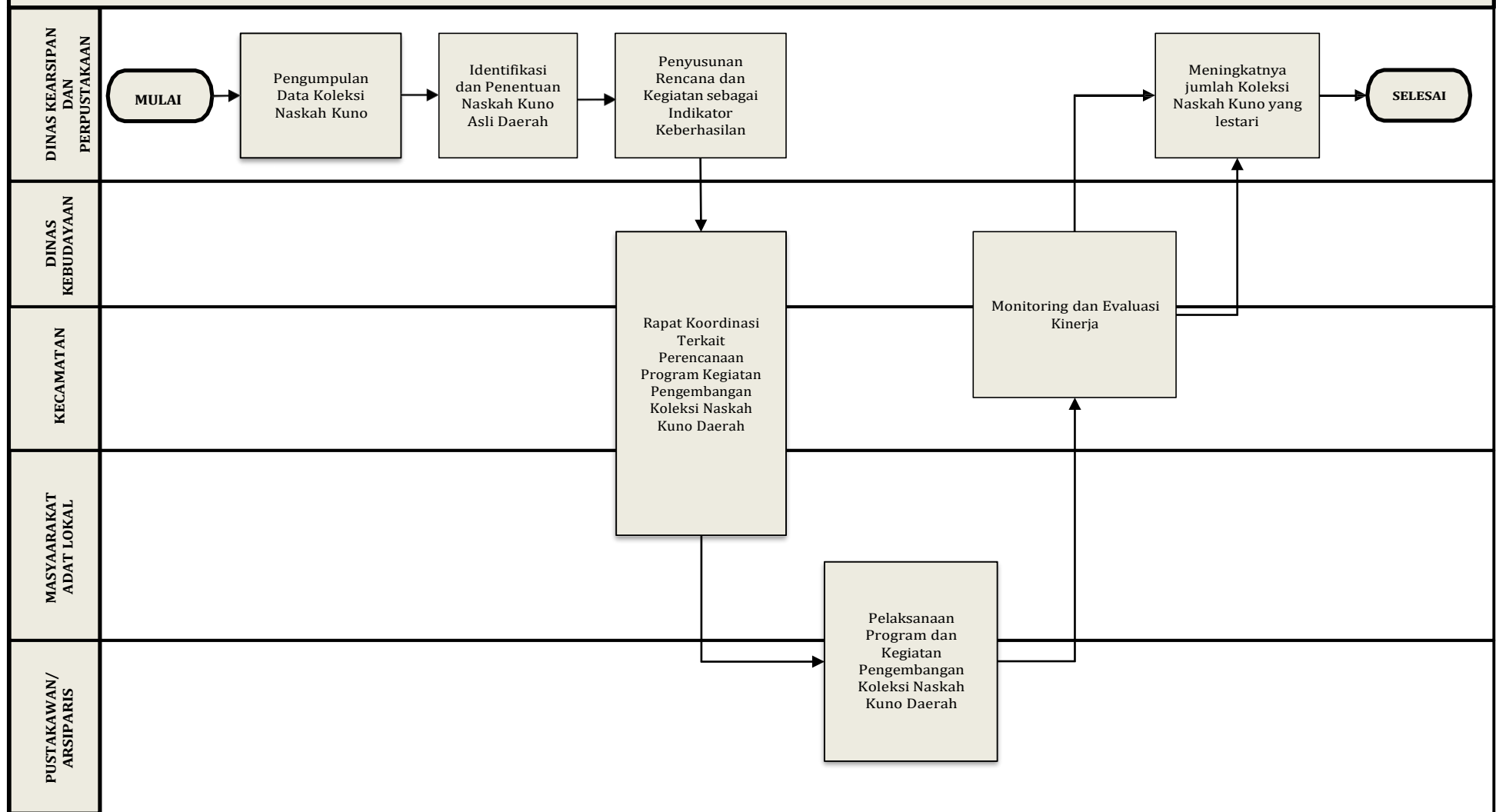
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.02 CFM01 : Pembinaan Perpustakaan
--



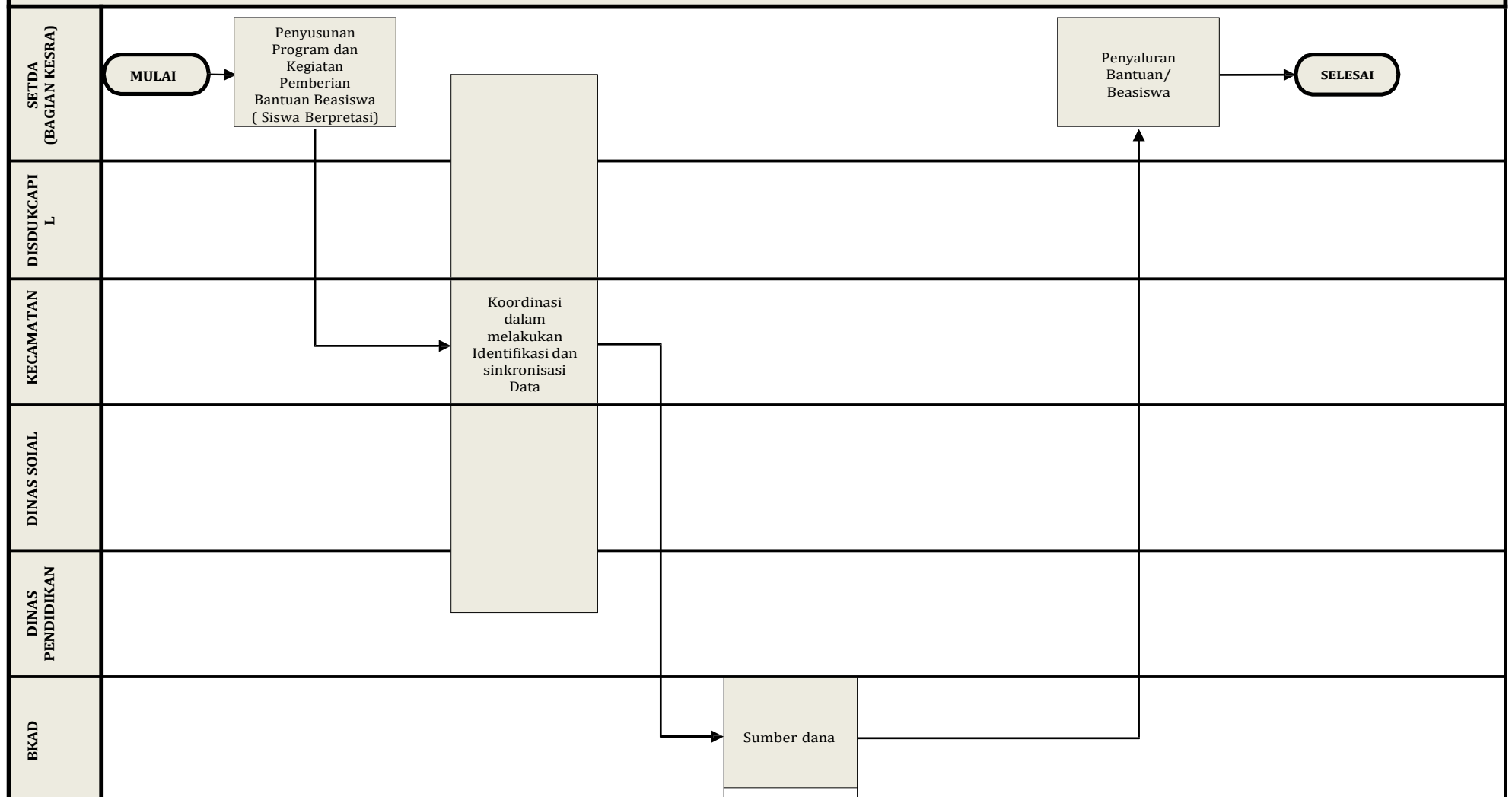
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.02 CFM02 : Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno



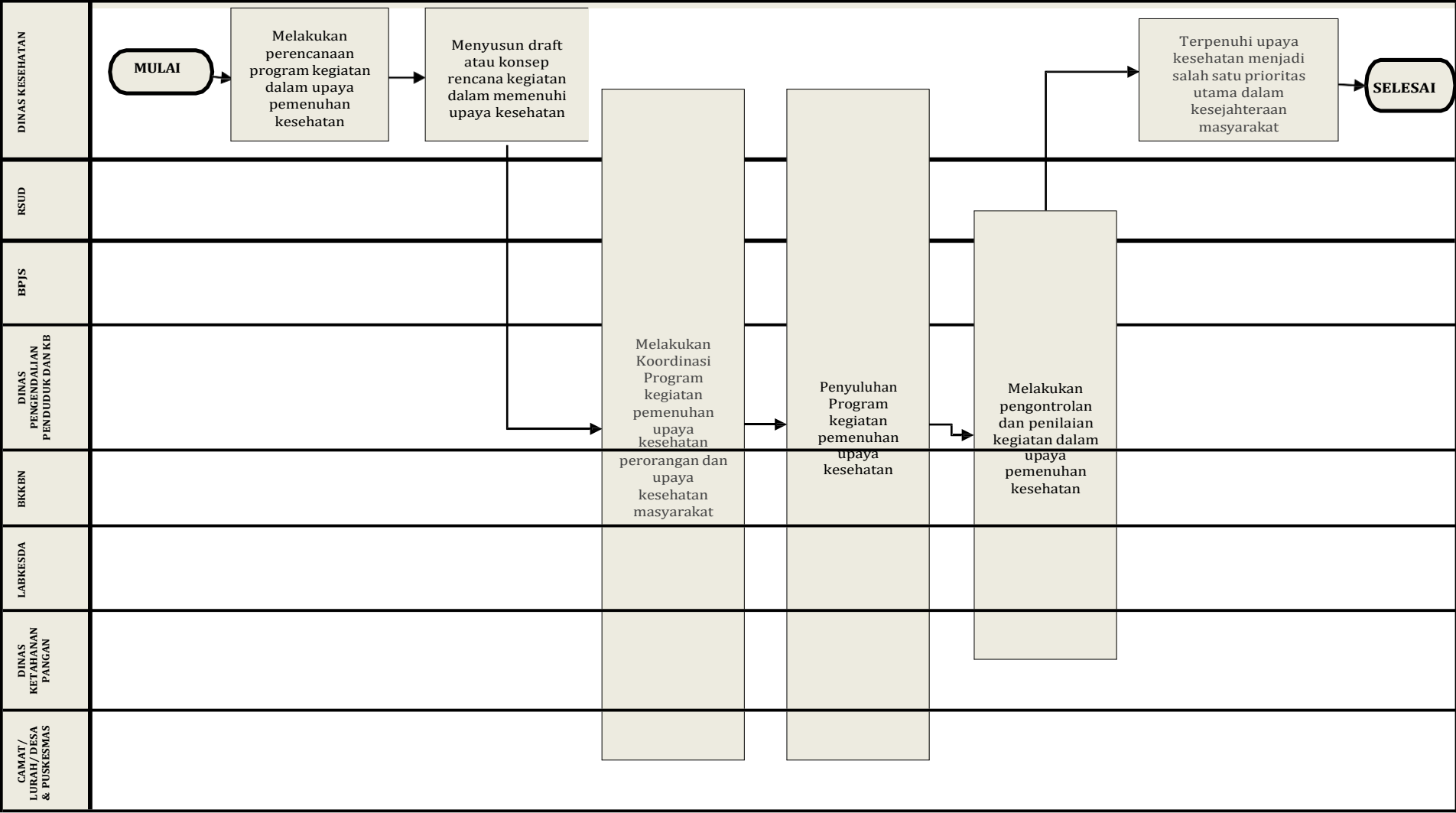
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.03 CFM01 : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat



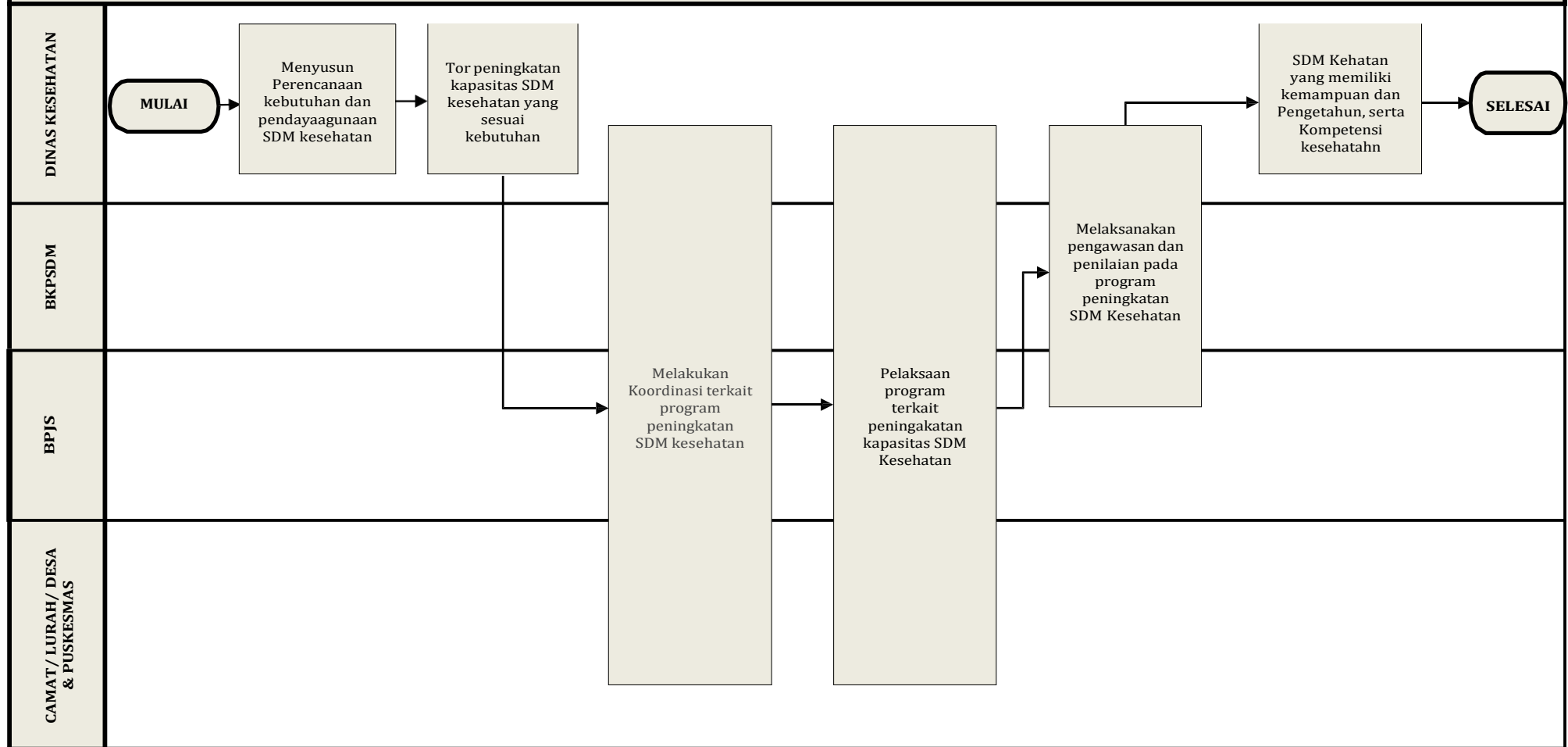
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.04 CFM01 : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat



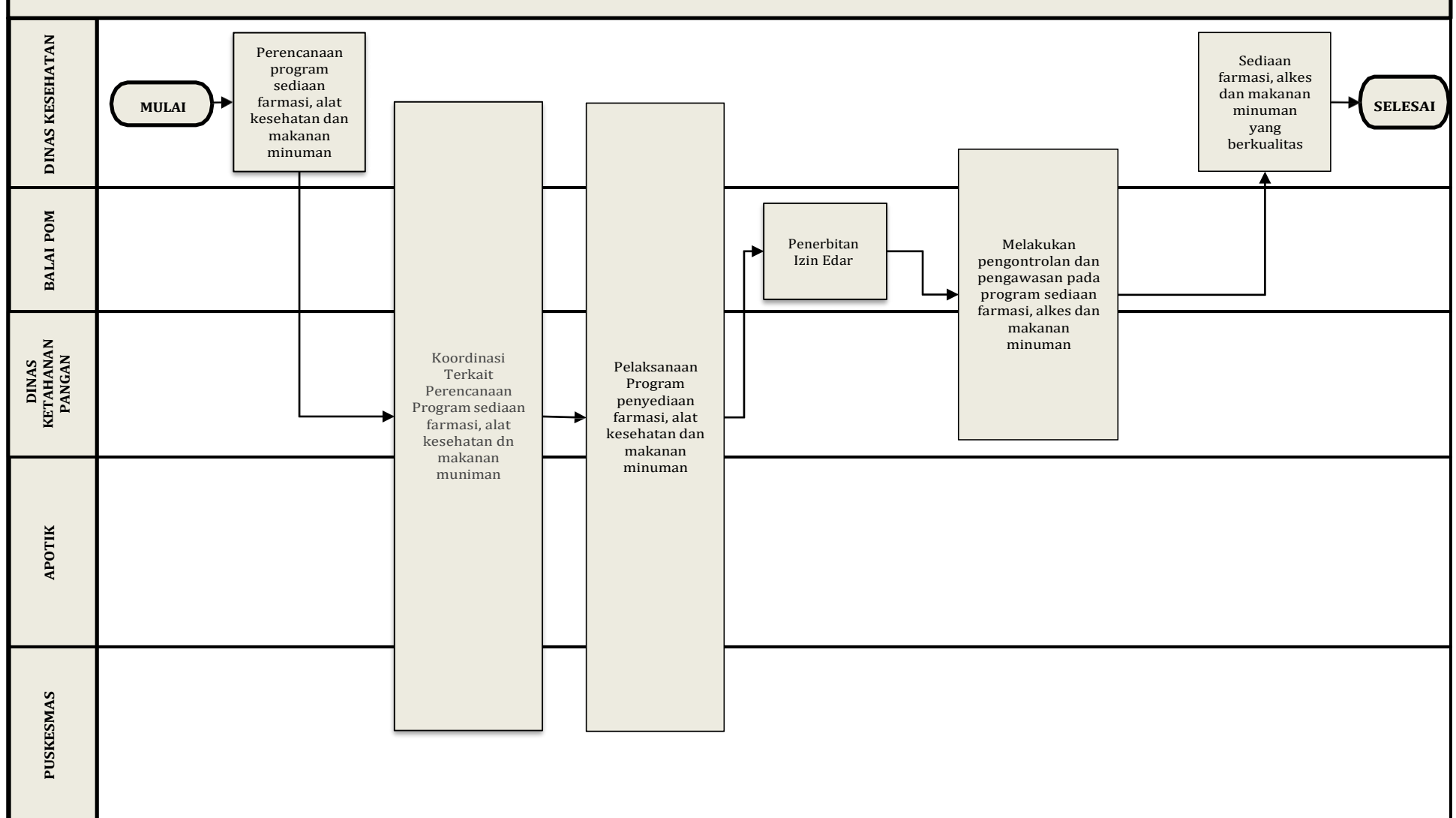
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.04 CFM02 : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan



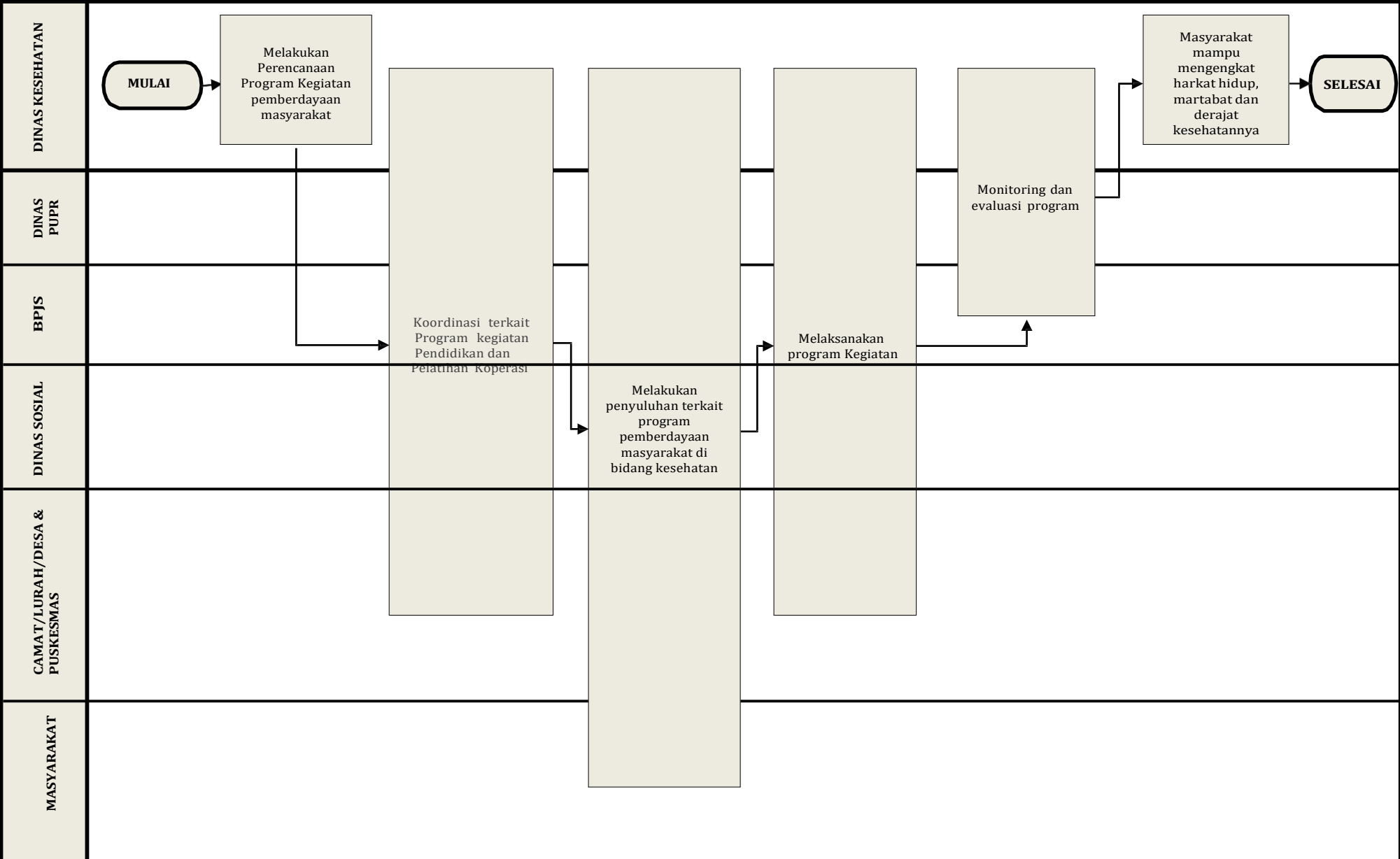
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.04 CFM03 : Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman



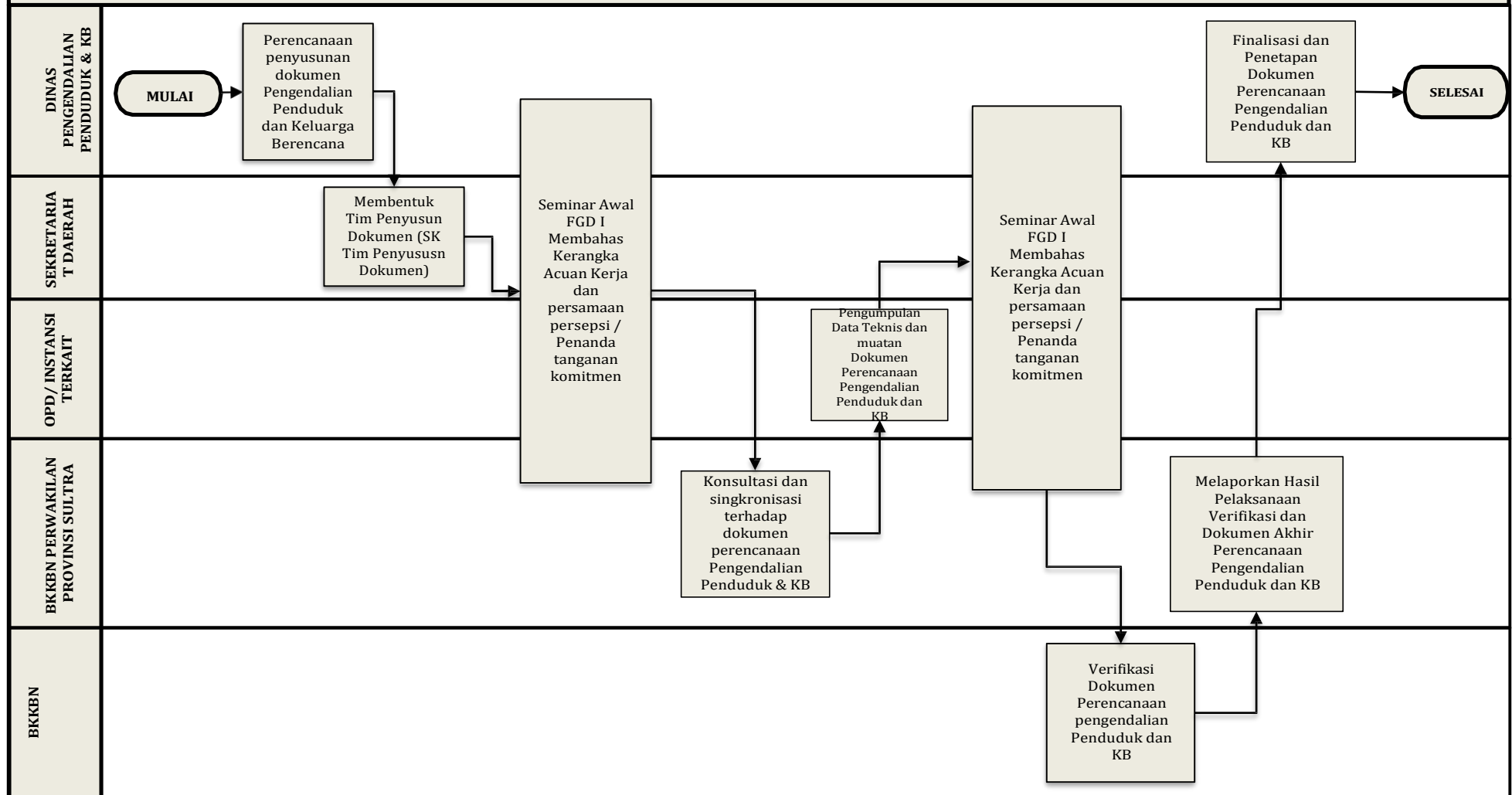
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.04 CFM04 : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
--



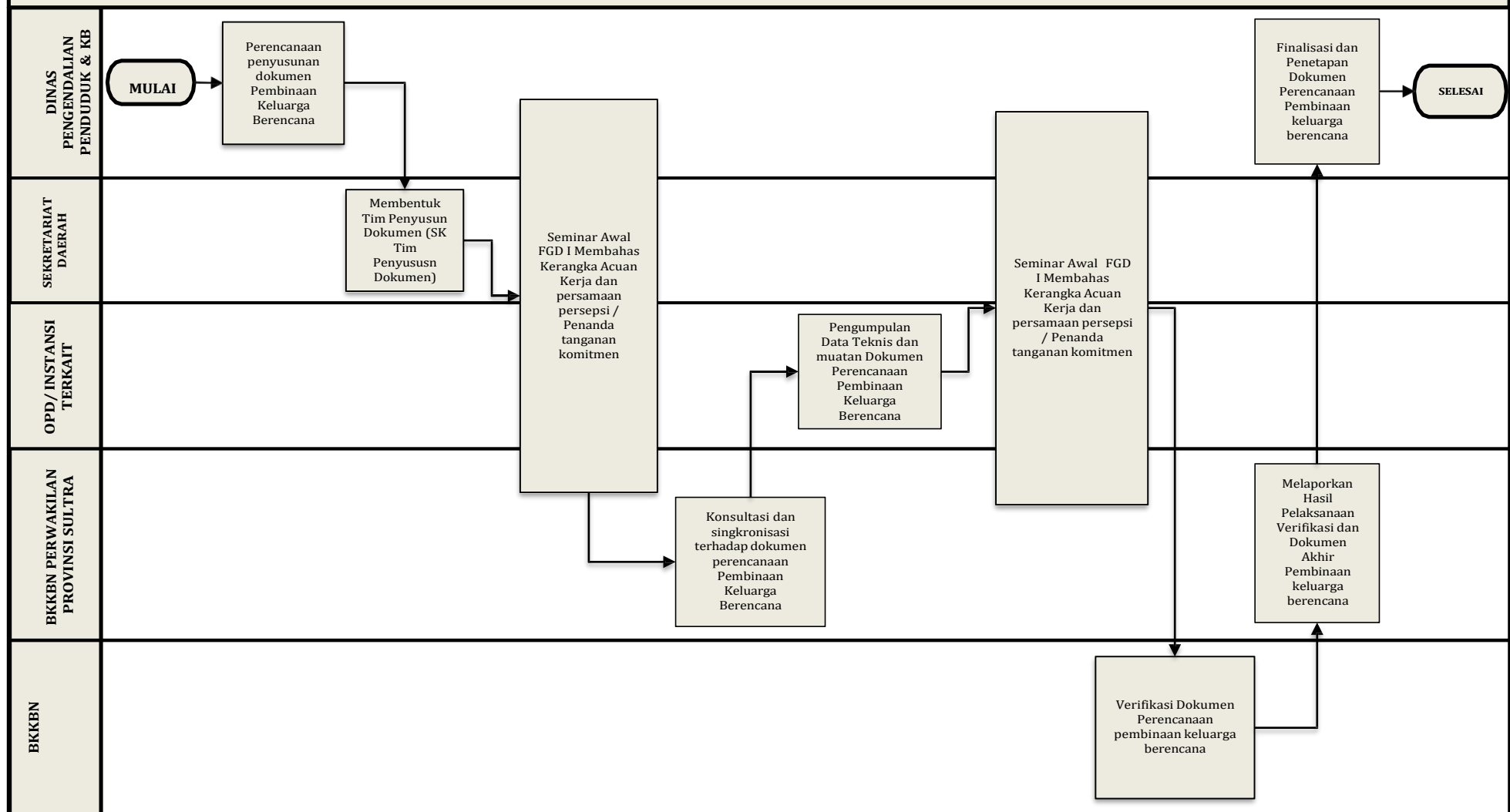
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.05 CFM01: PENGENDALIAN PENDUDUK



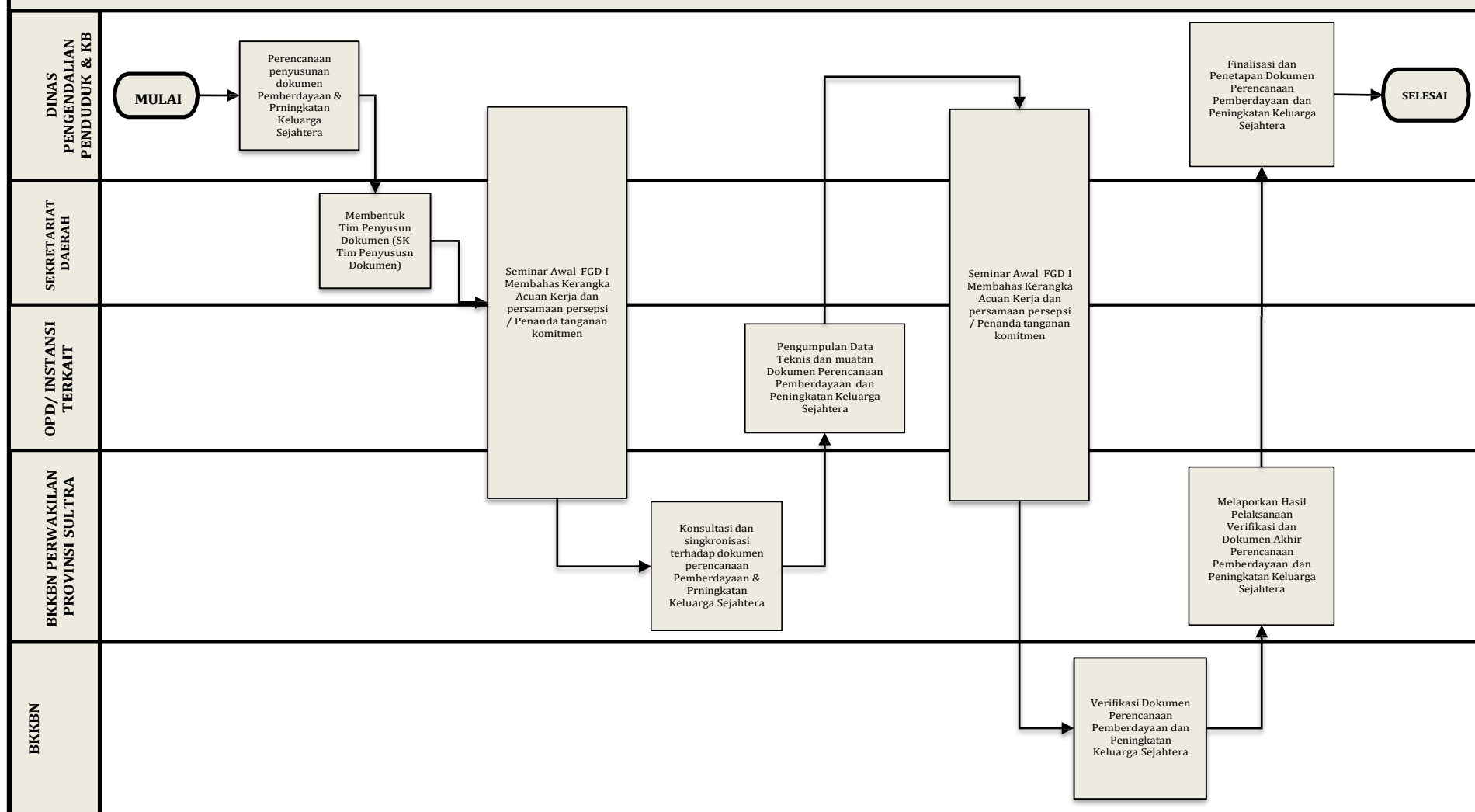
PETA LINTAS FUNGSI

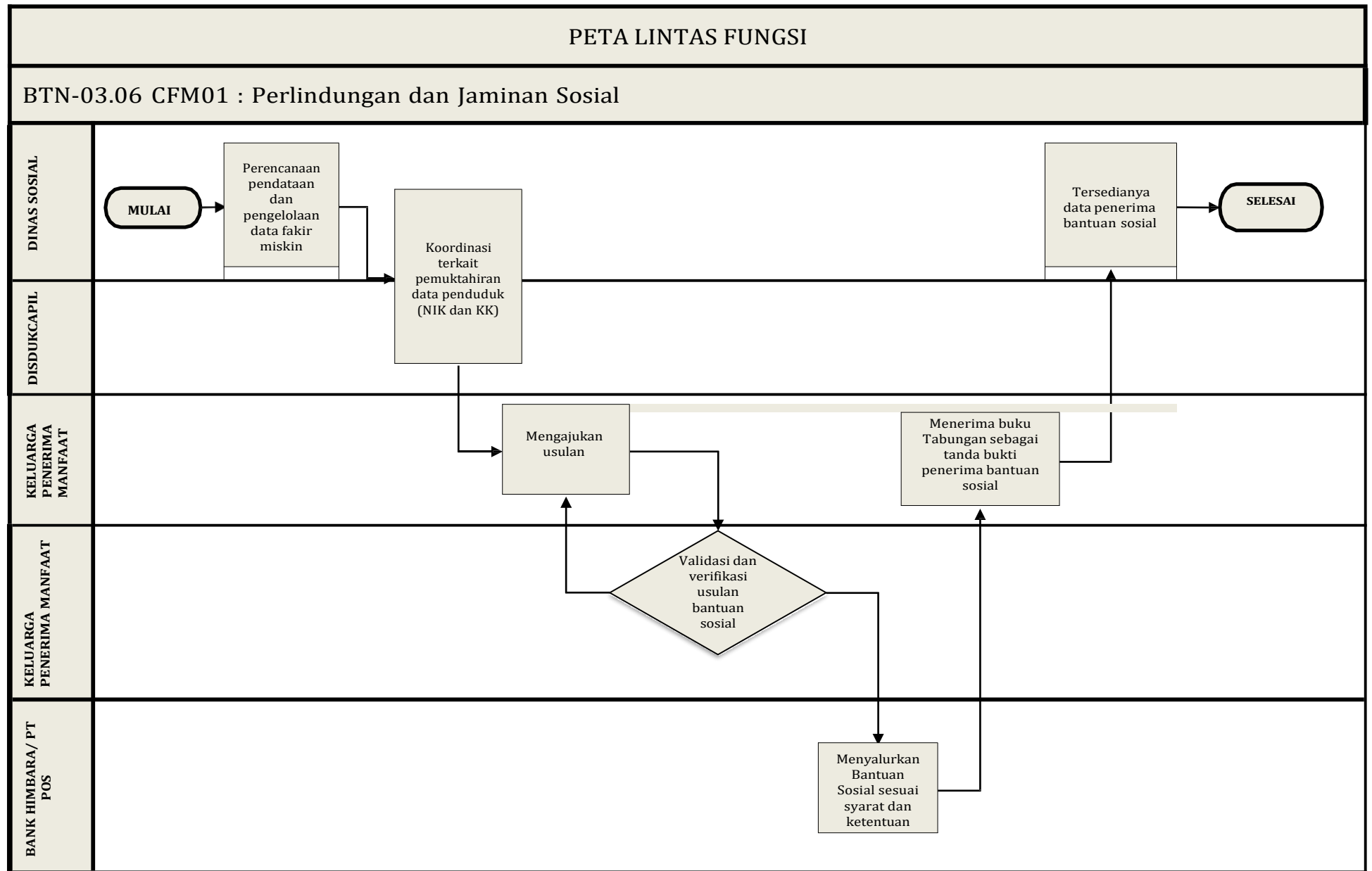
BTN-03.05 CFM02 : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)



PETA LINTAS FUNGSI

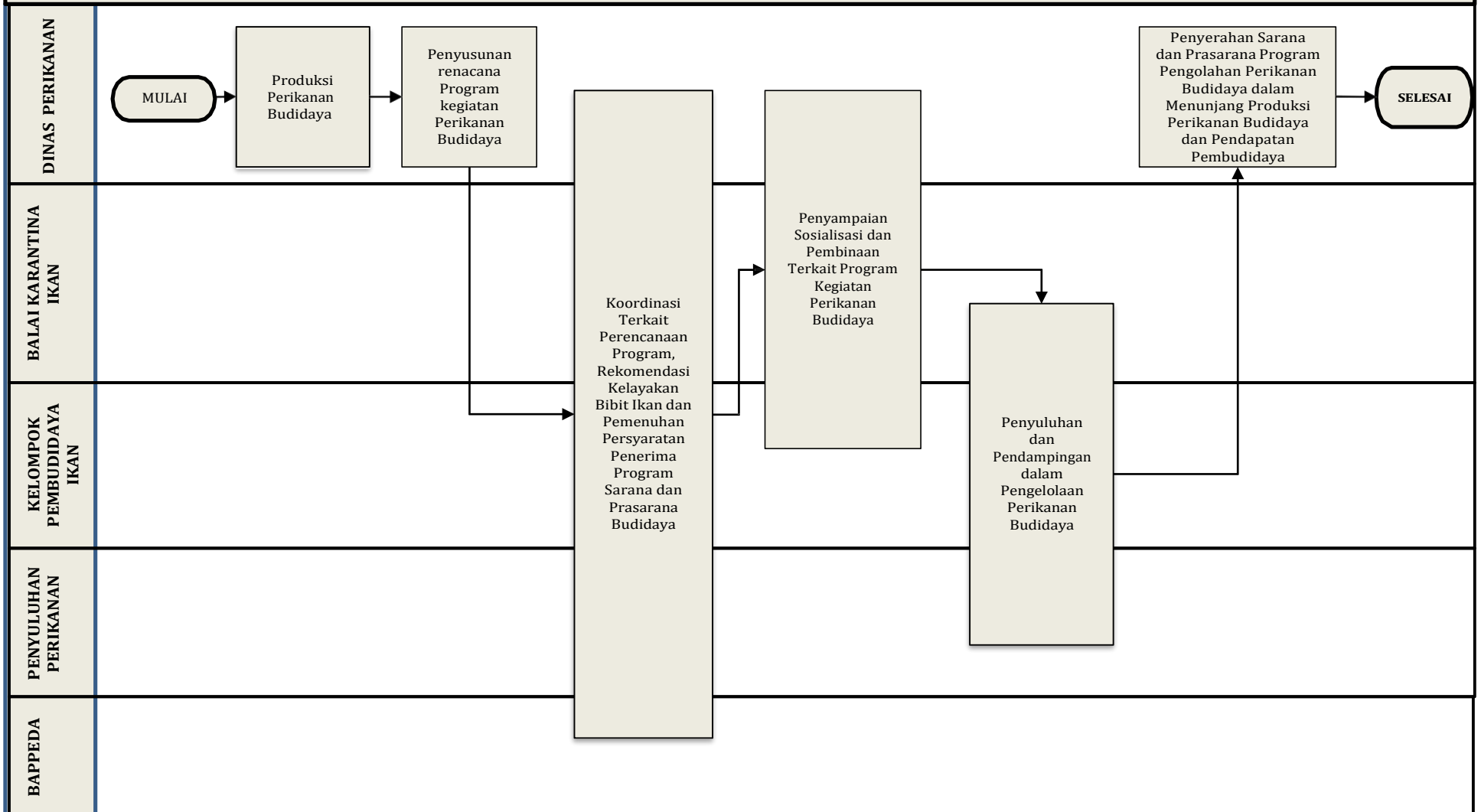
BTN-03.05 CFM03 : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)





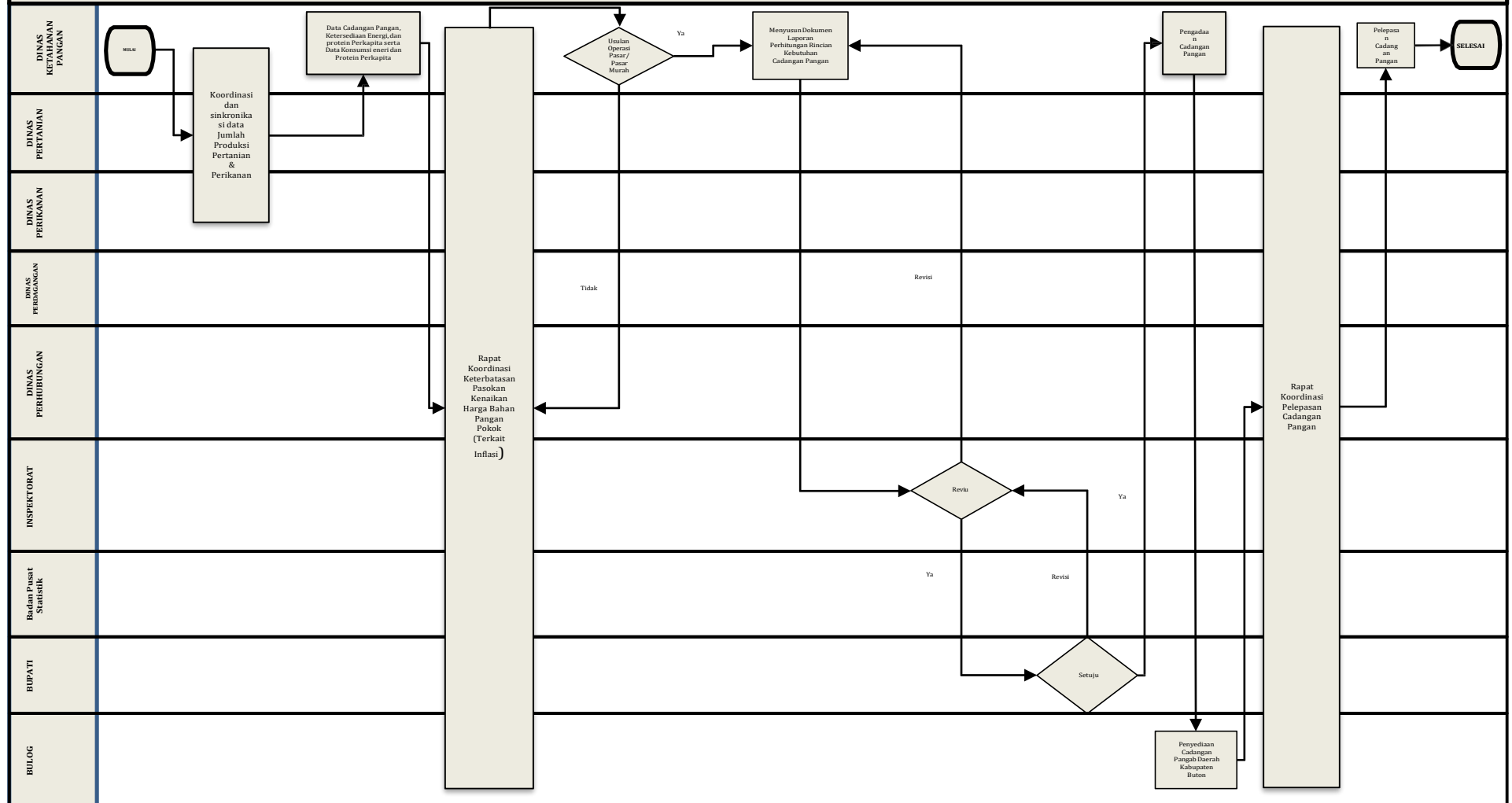
PETA LINTAS FUNGSI

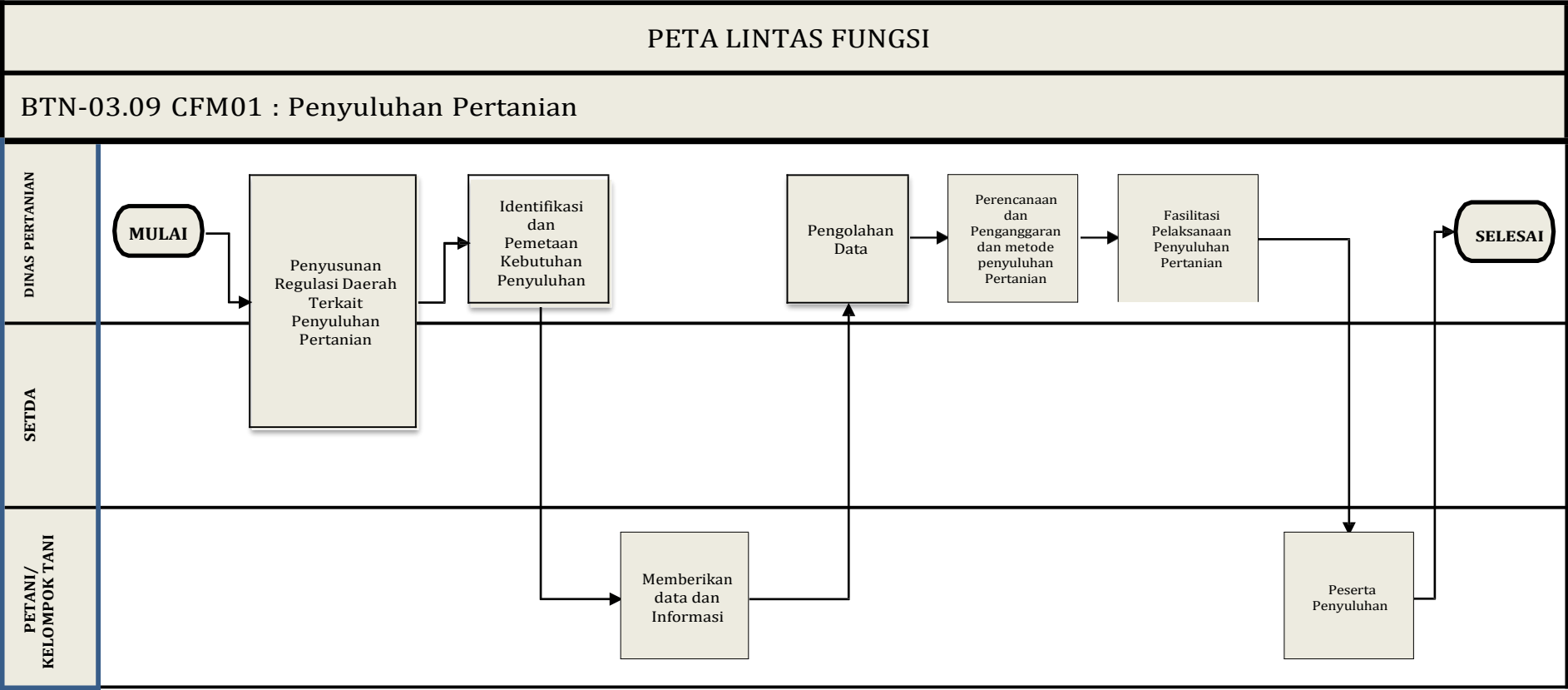
BTN-01.01 CFM02 : Pengelolaan Perikanan Budidaya



PETA LINTAS FUNGSI

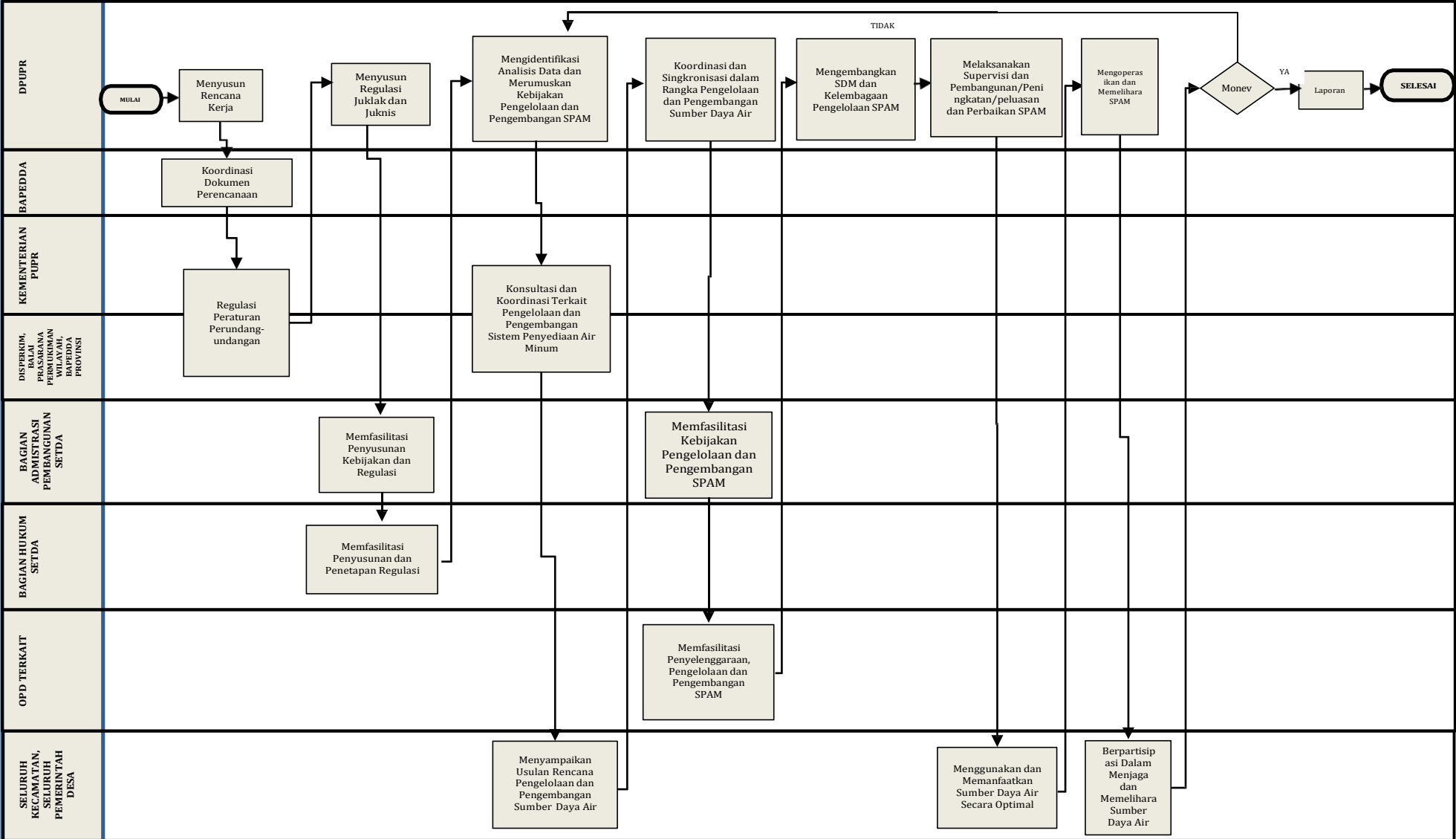
BTN-03.08 CFM01 : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat





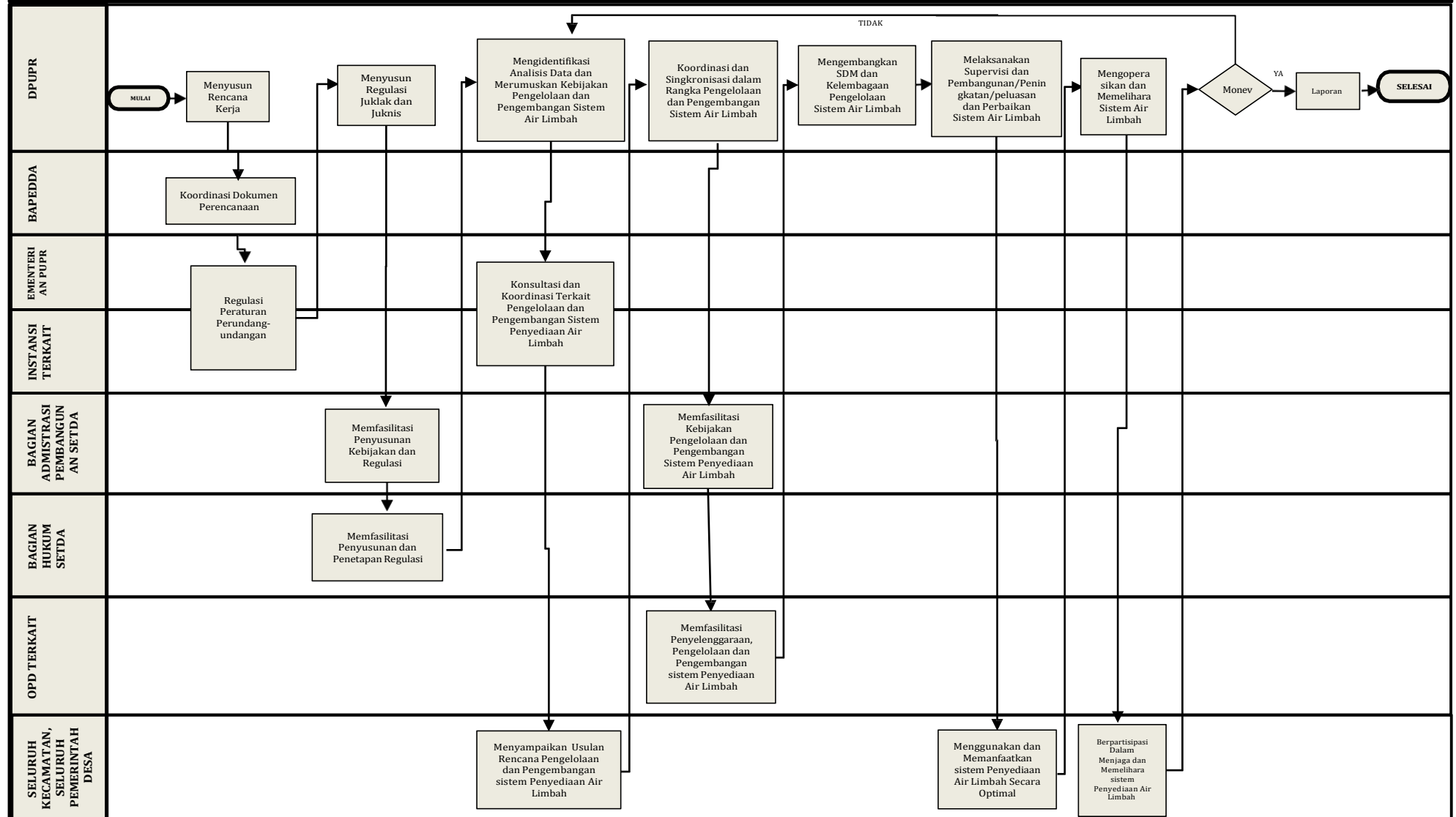
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-03.10 CFM01 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



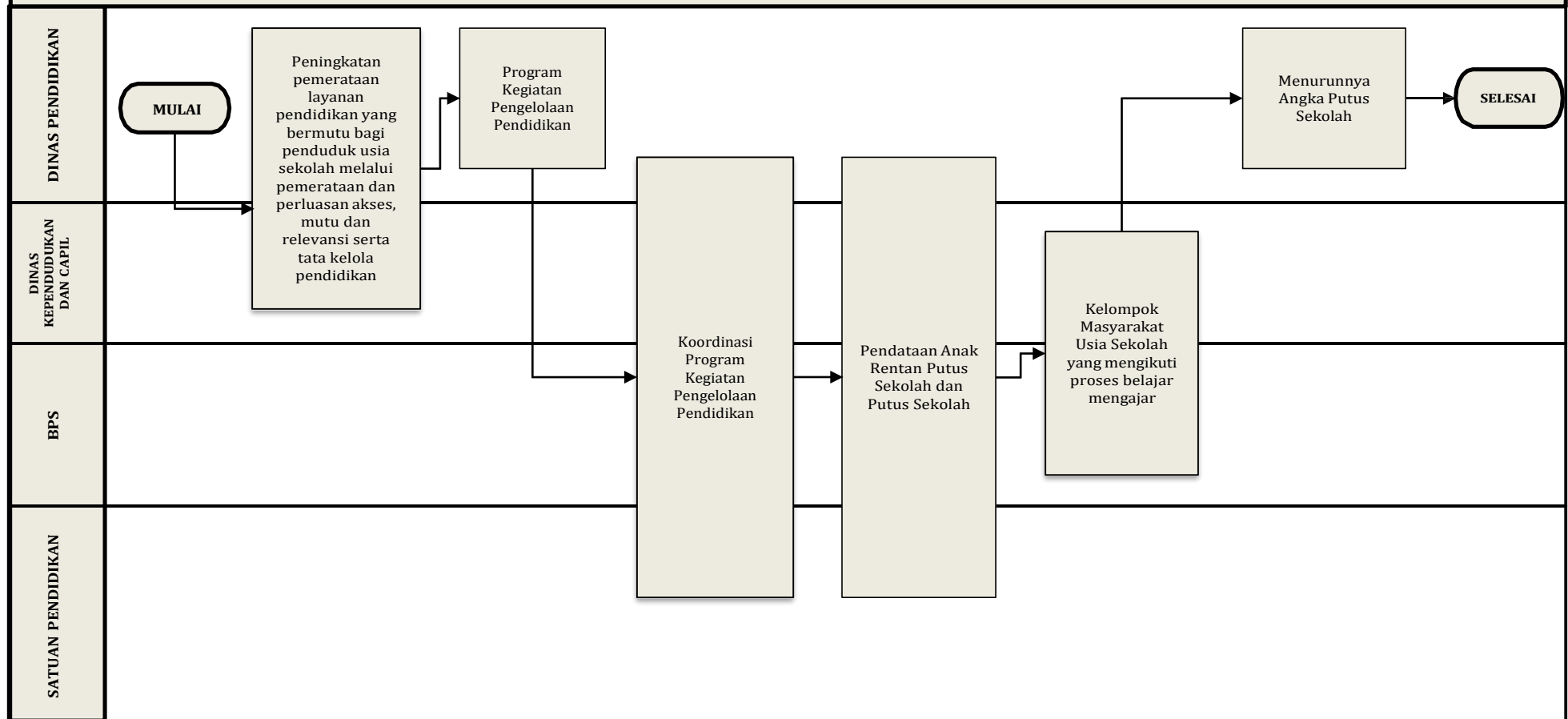
PETA LINTAS FUNGSI

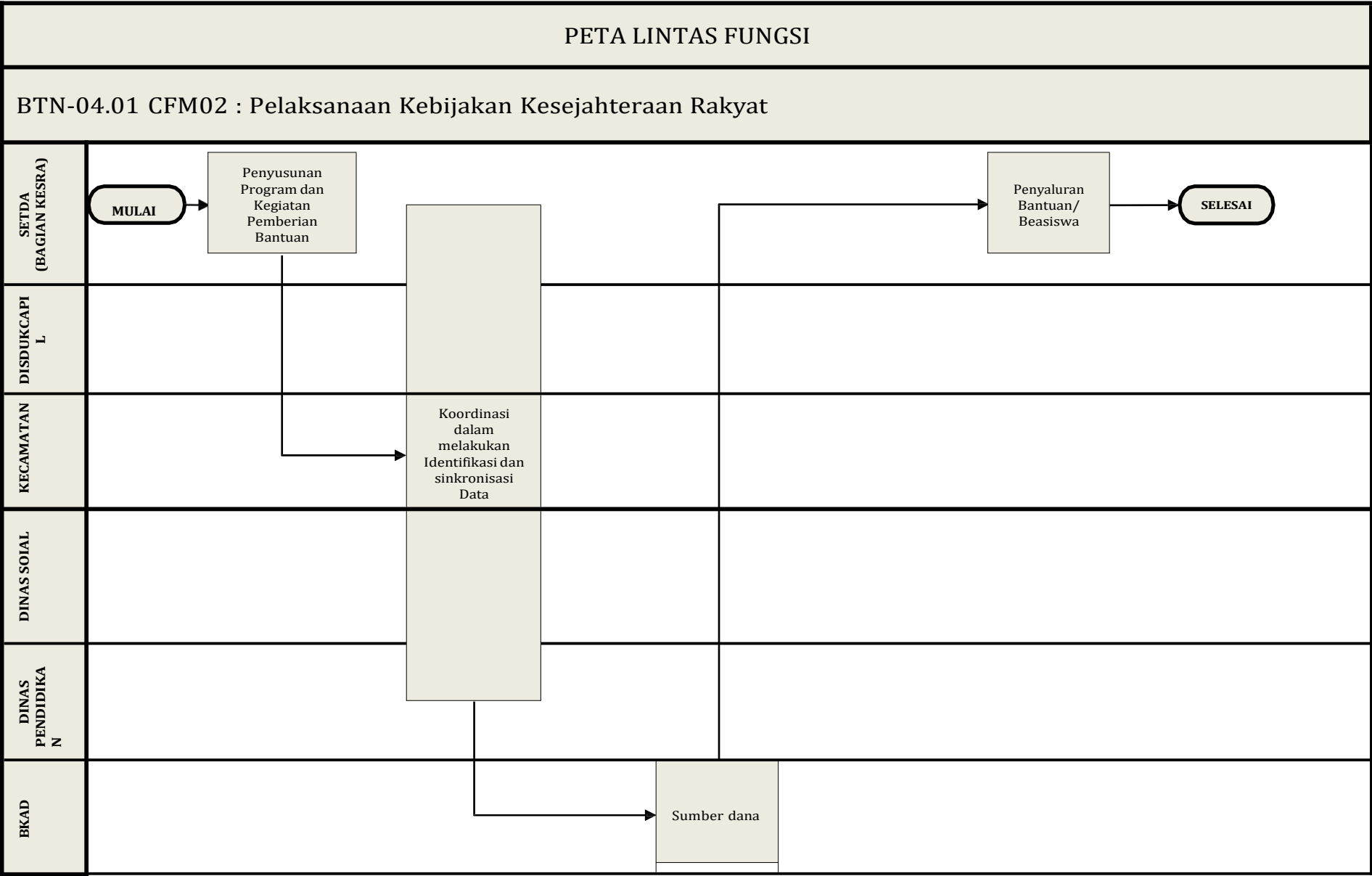
BTN-03.10 CFM02 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah



PETA LINTAS FUNGSI

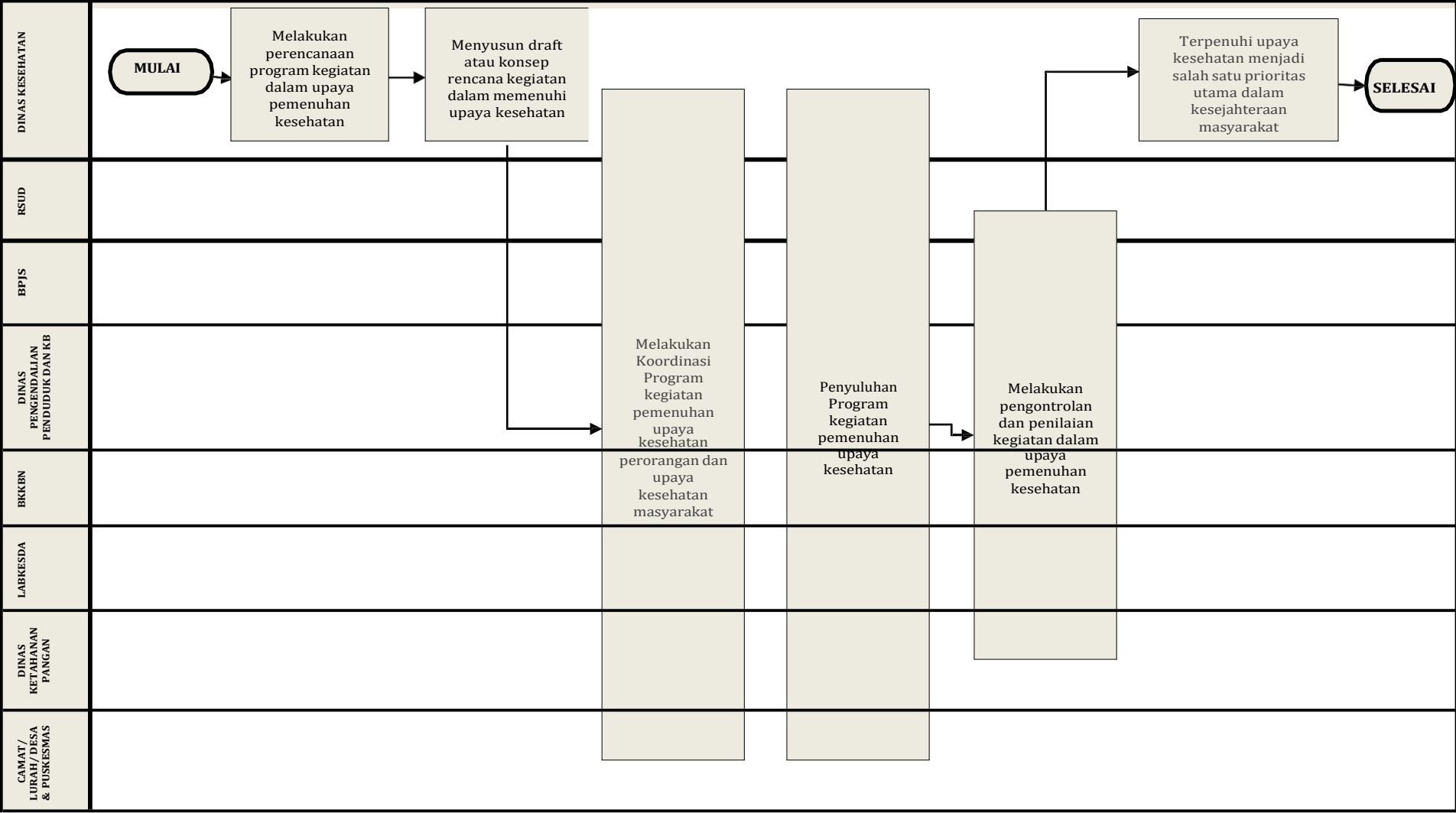
BTN-04.01 CFM01 : Pengelolaan Pendidikan





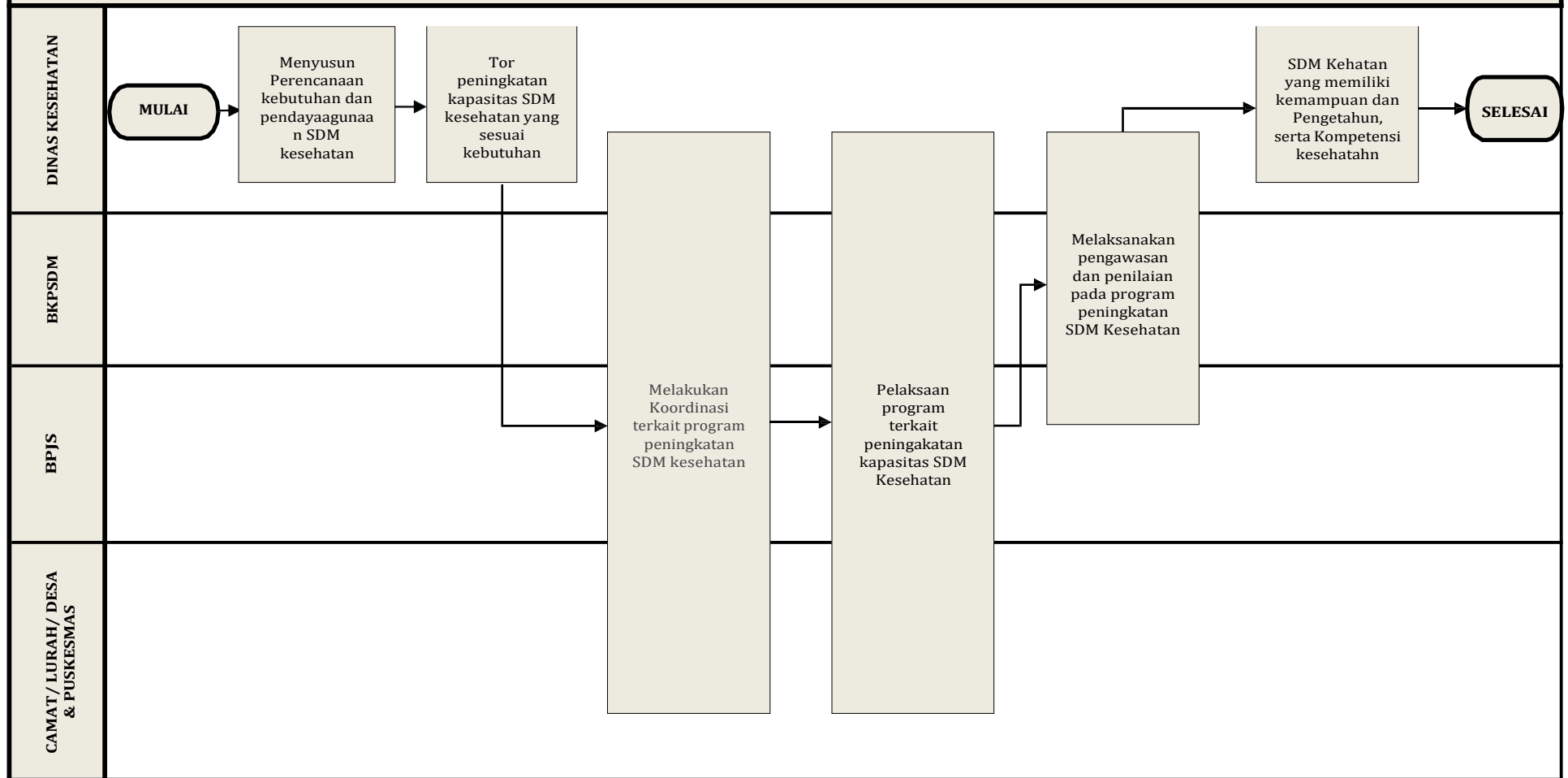
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.02 CFM01 : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat



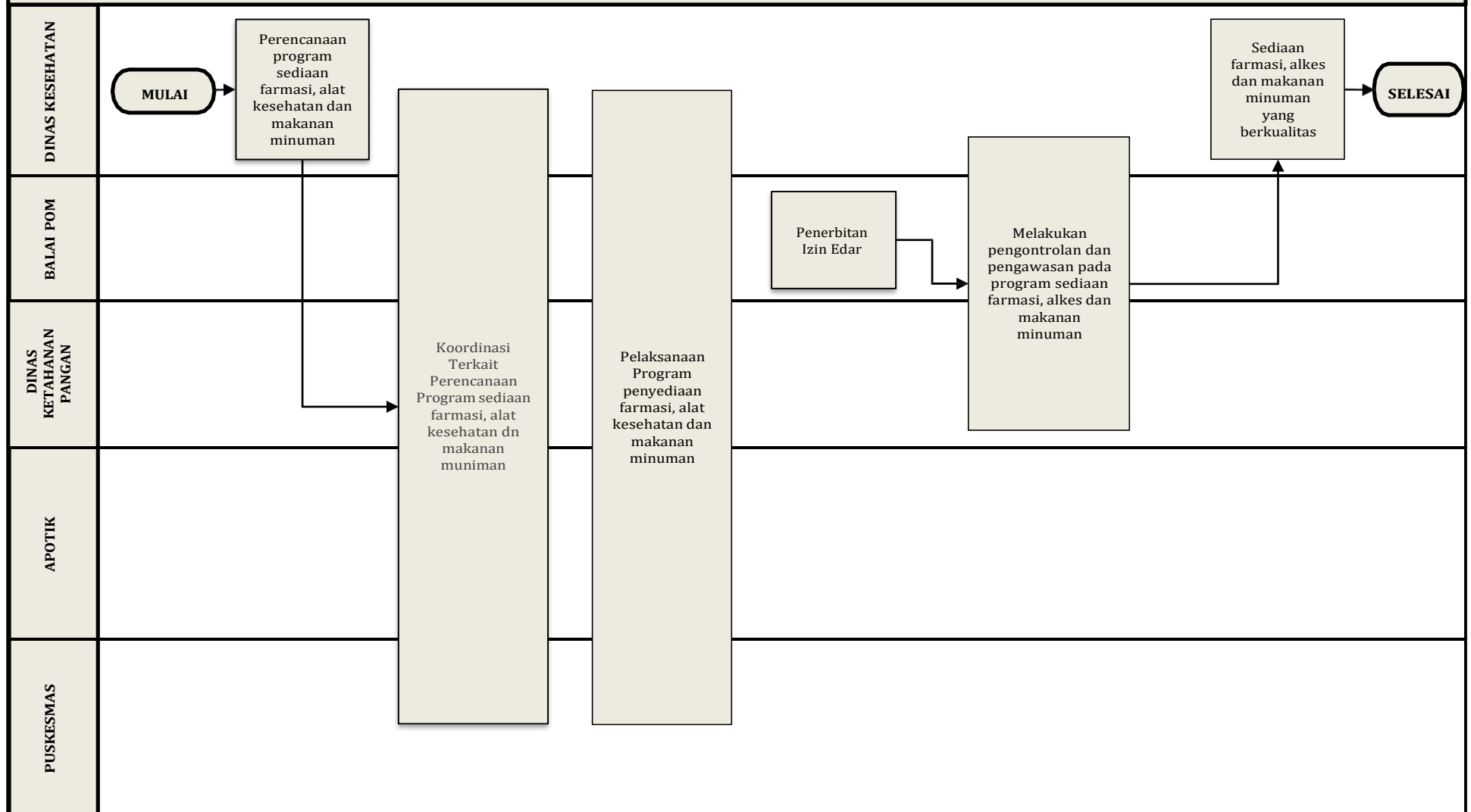
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.02 CFM02 : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan



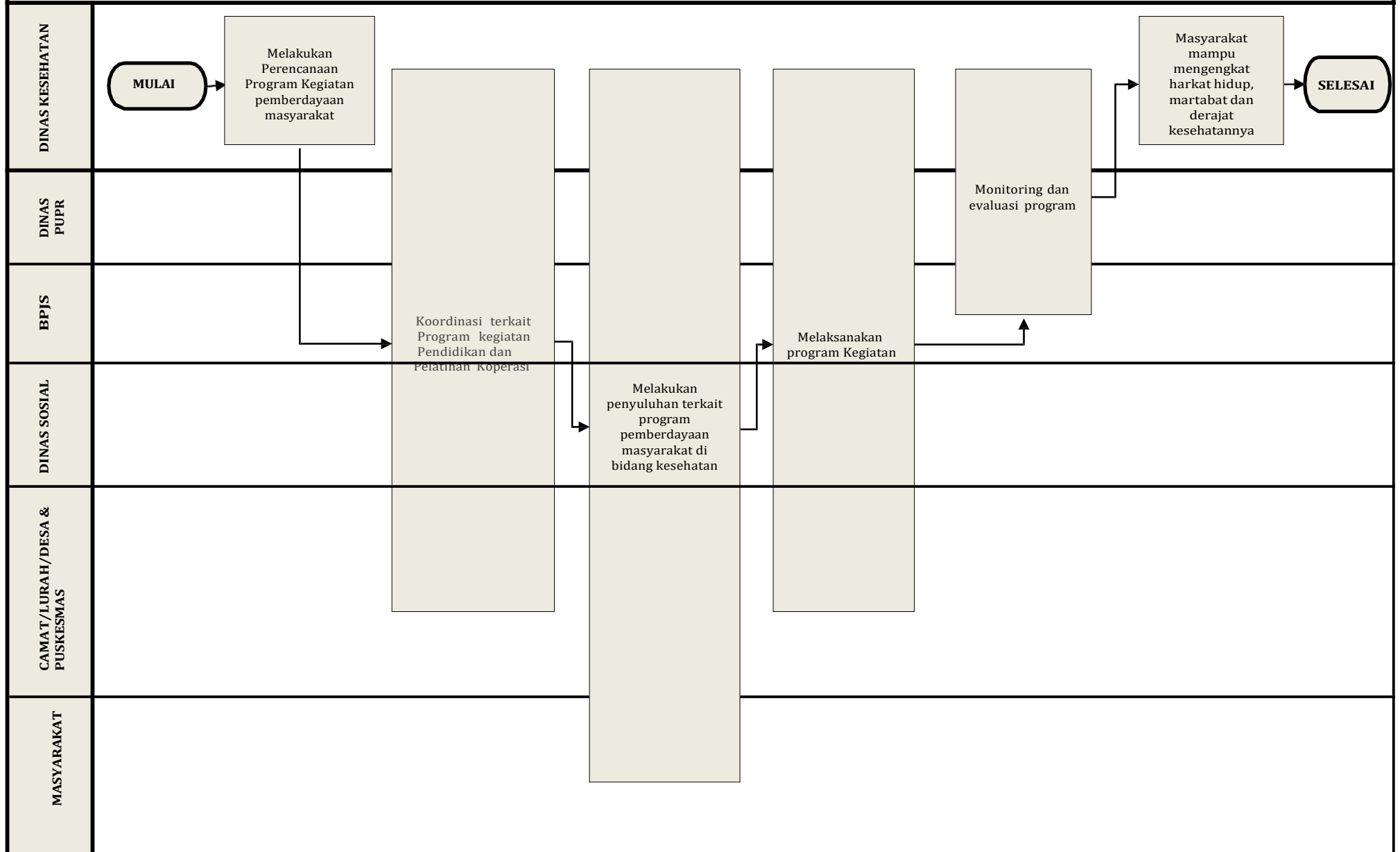
PETA LINTAS FUNGSI

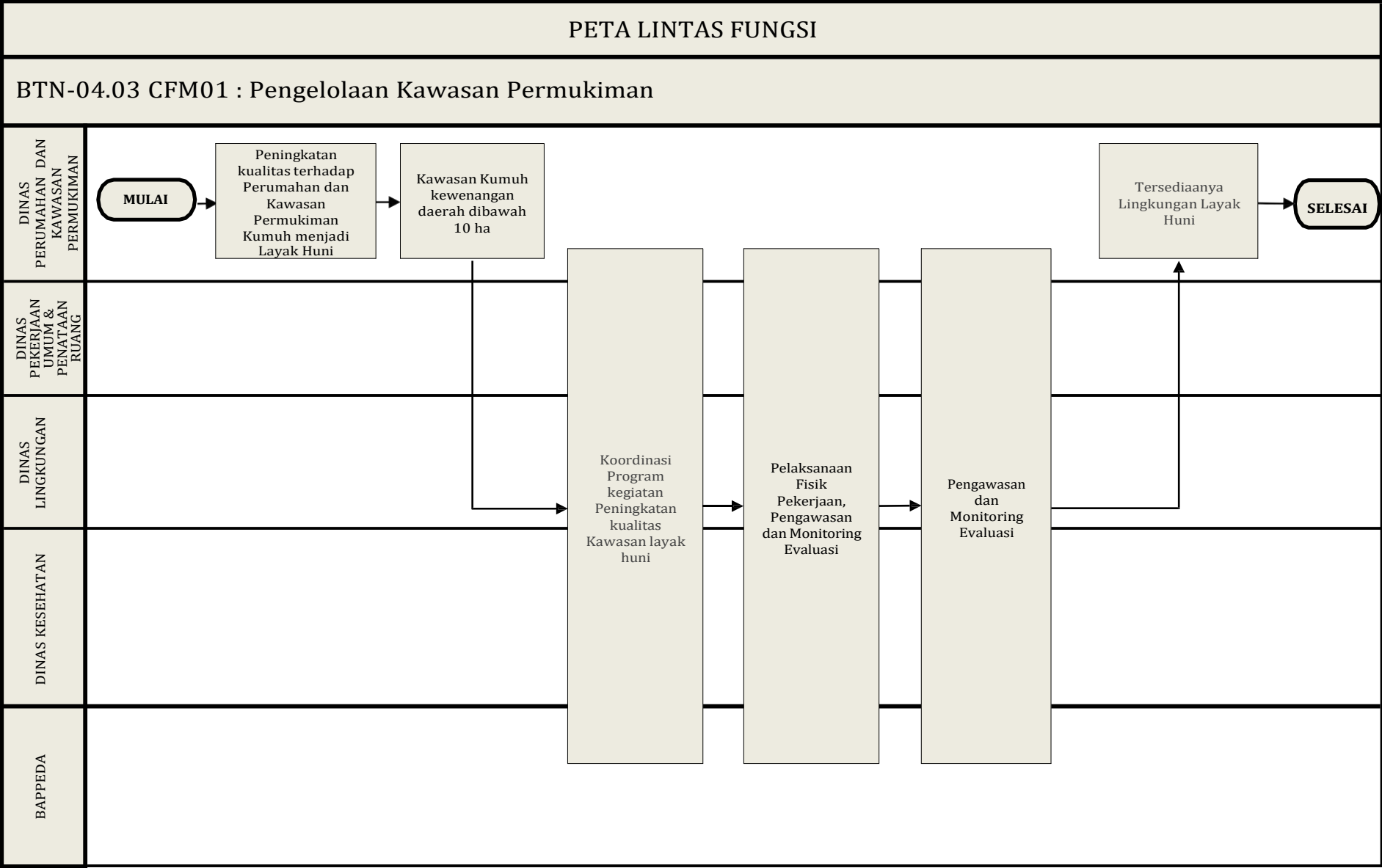
BTN-04.02 CFM03 : Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman



PETA LINTAS FUNGSI

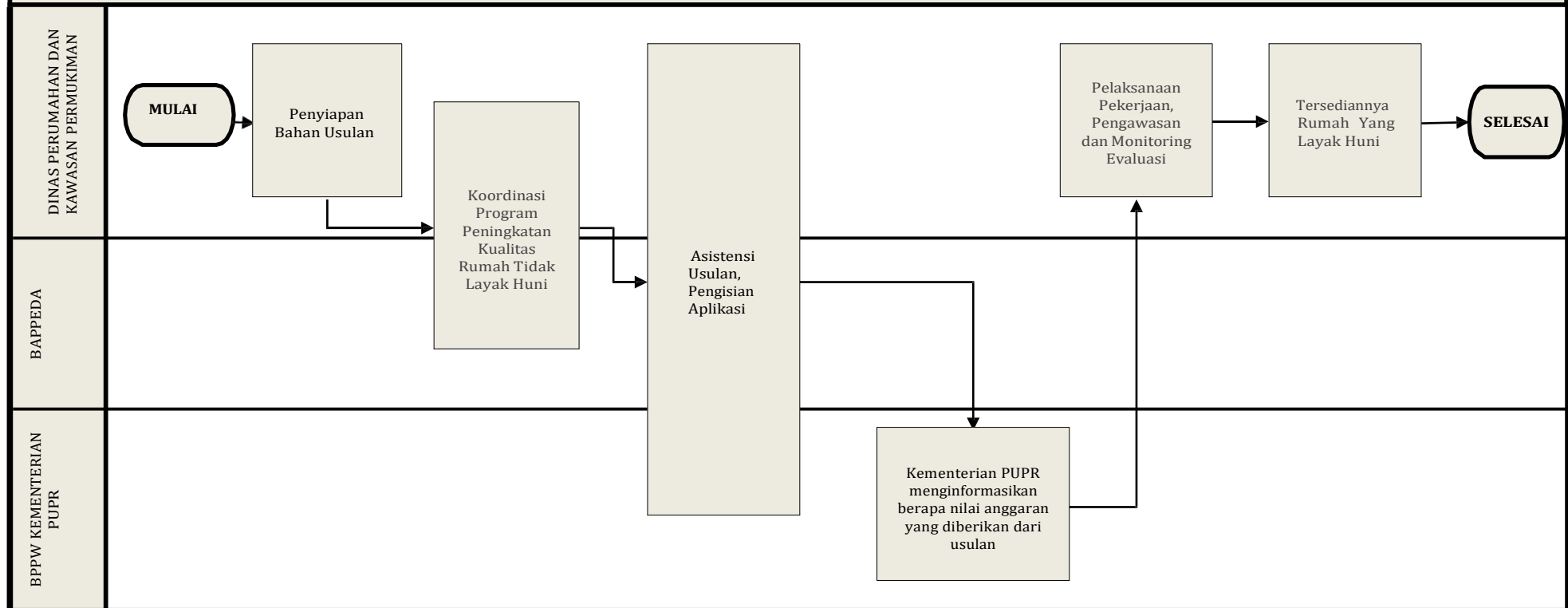
BTN-04.02 CFM04 : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

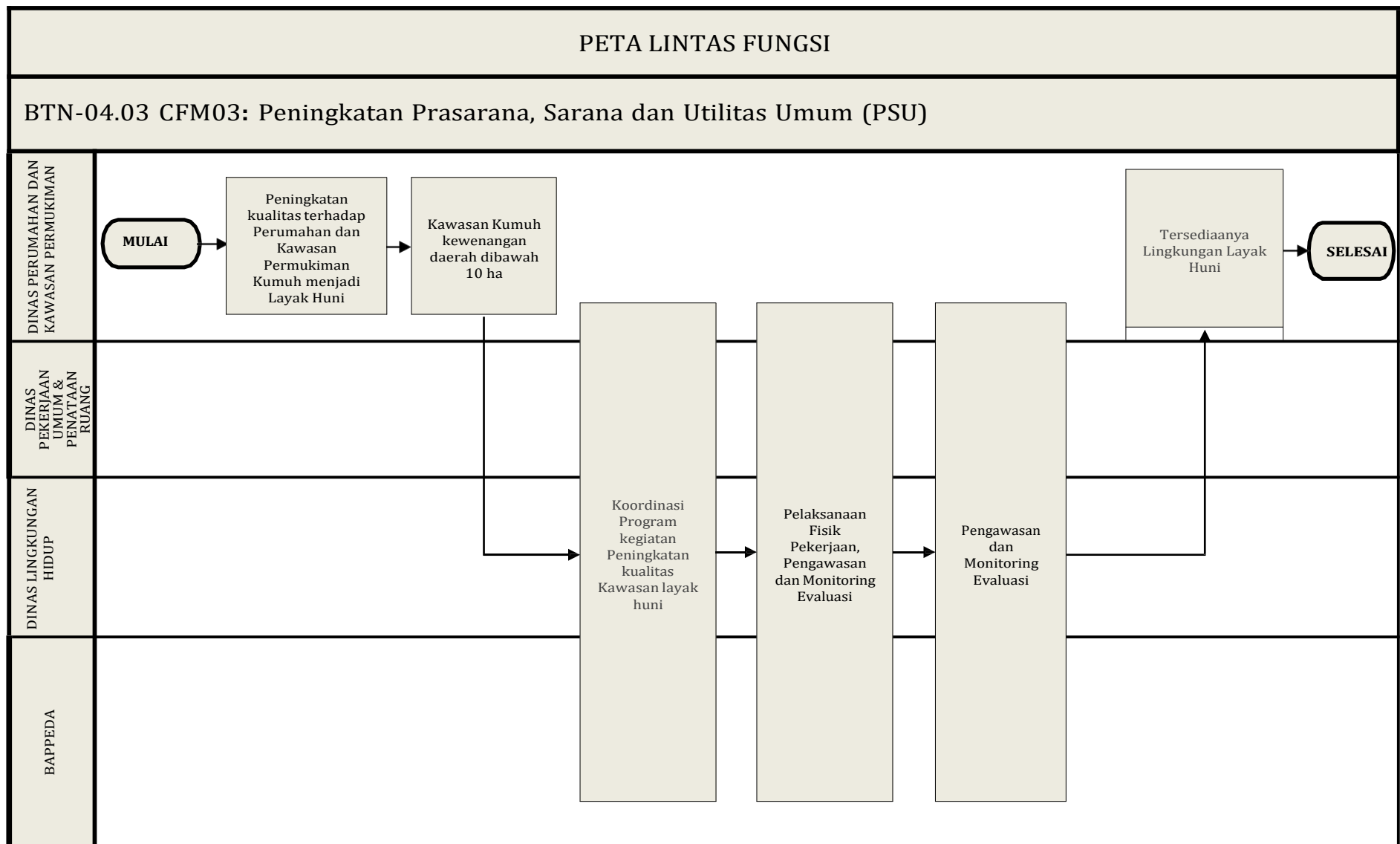




PETA LINTAS FUNGSI

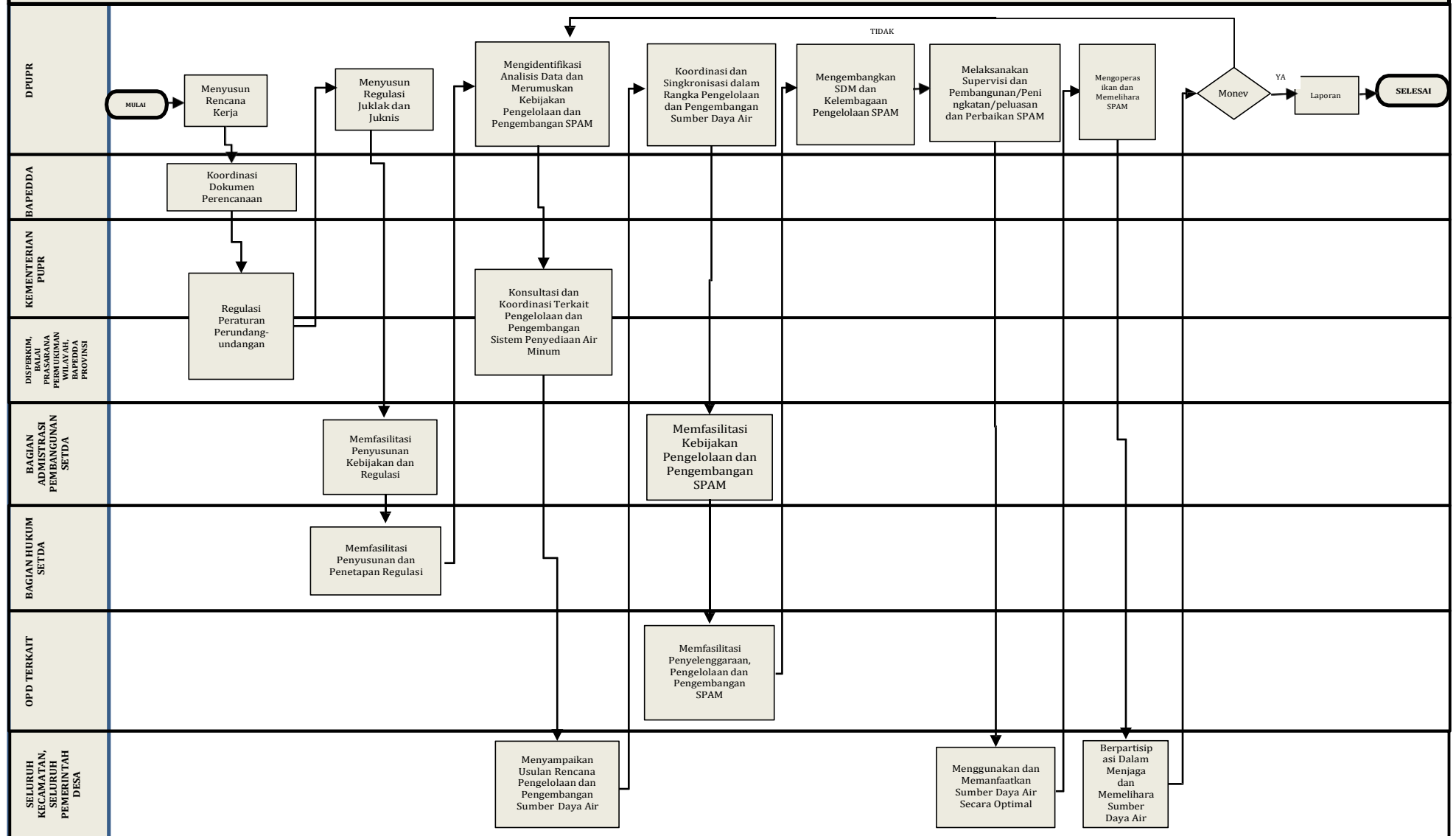
BTN-04.03 CFM02 : Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh





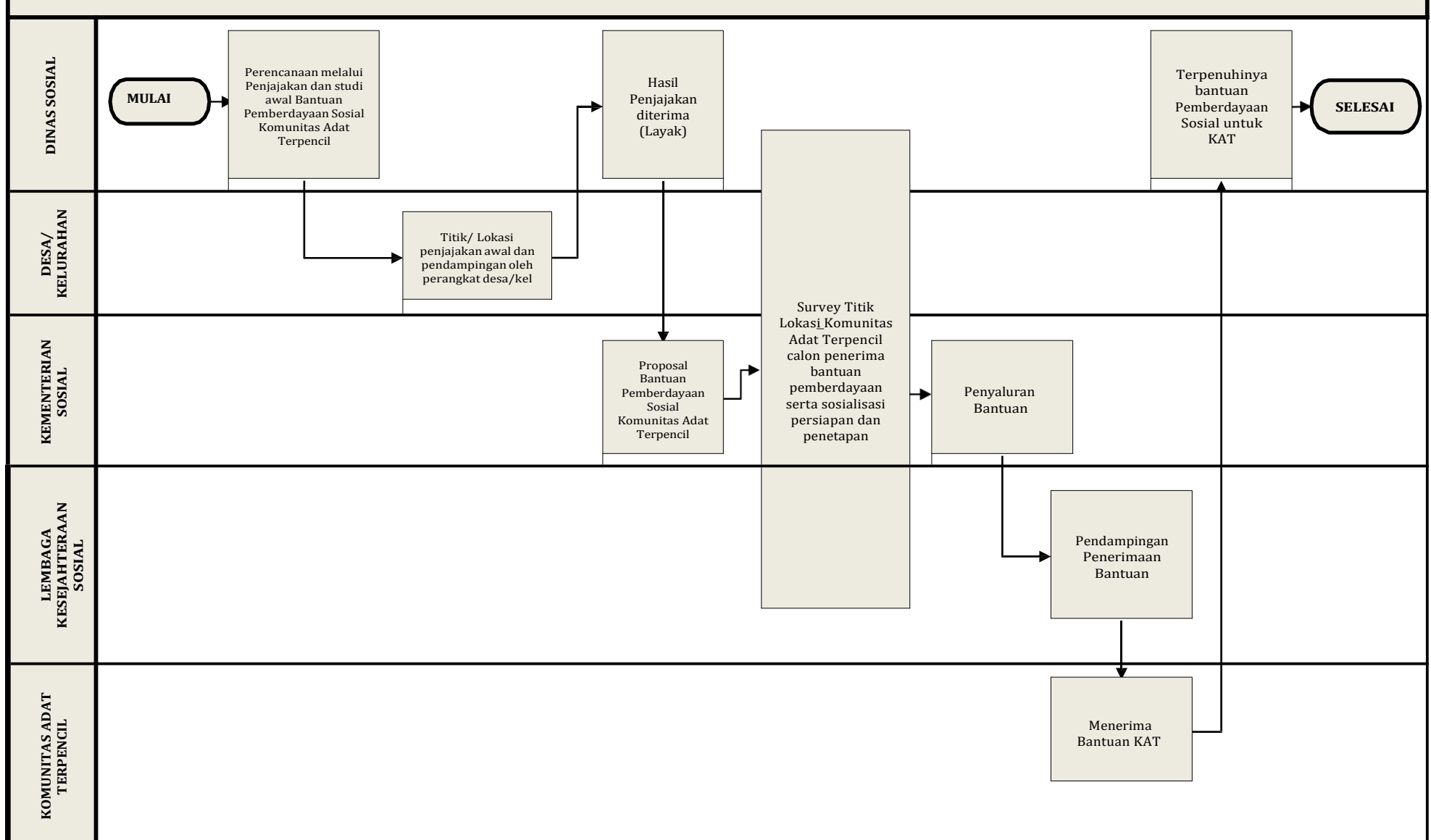
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.03 CFM04 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



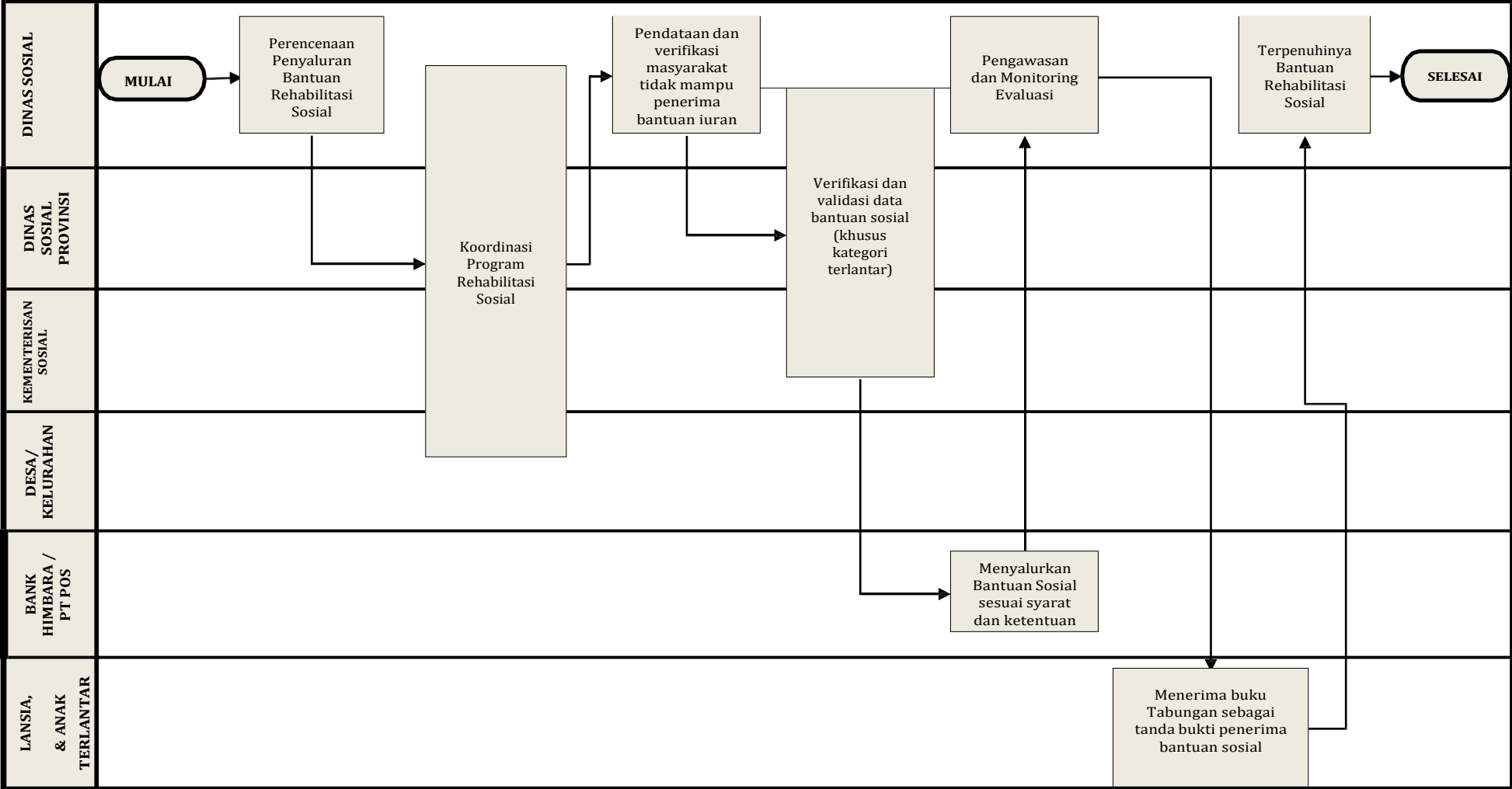
PETA LINTAS FUNGSI

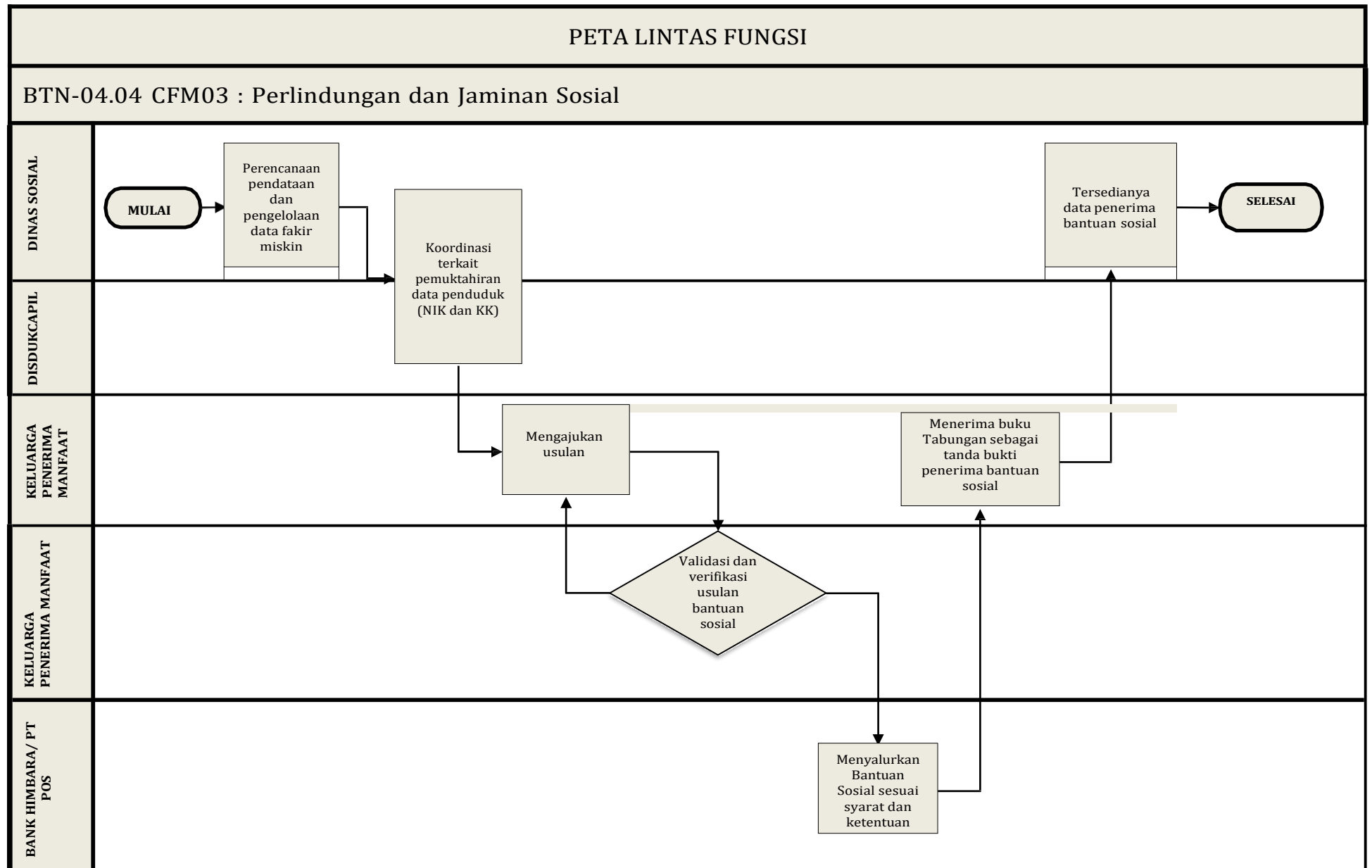
BTN-04.04 CFM01 : Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan



PETA LINTAS FUNGSI

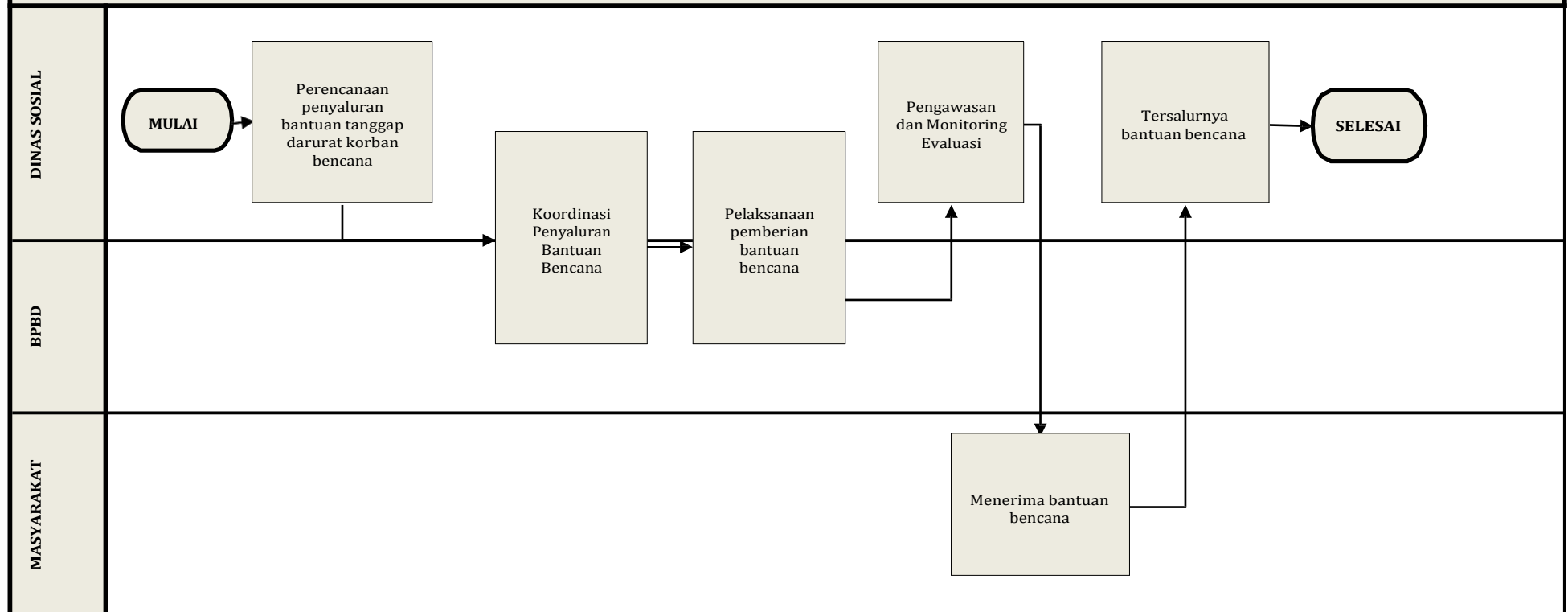
BTN-04.04 CFM02: Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
--

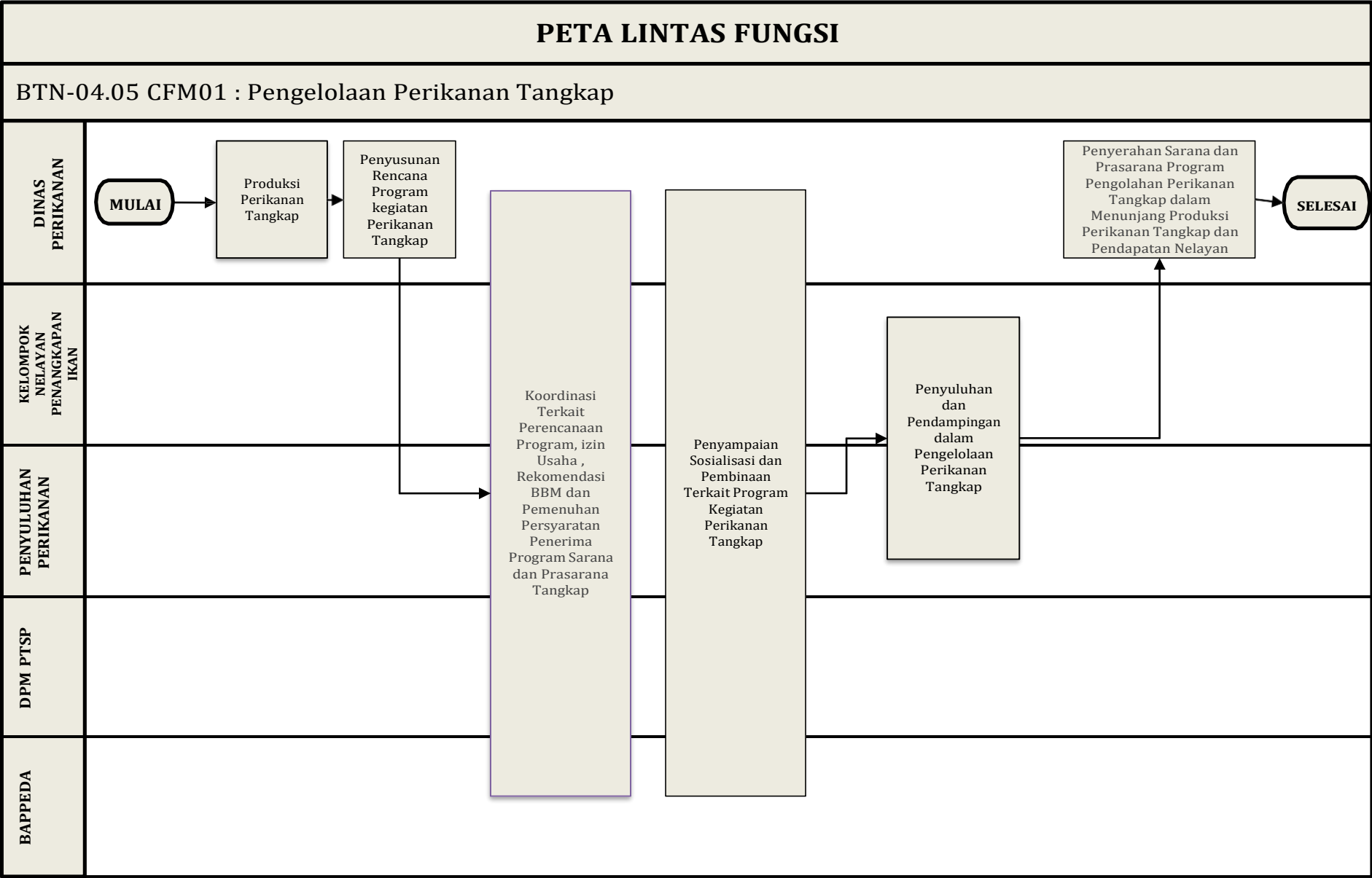




PETA LINTAS FUNGSI

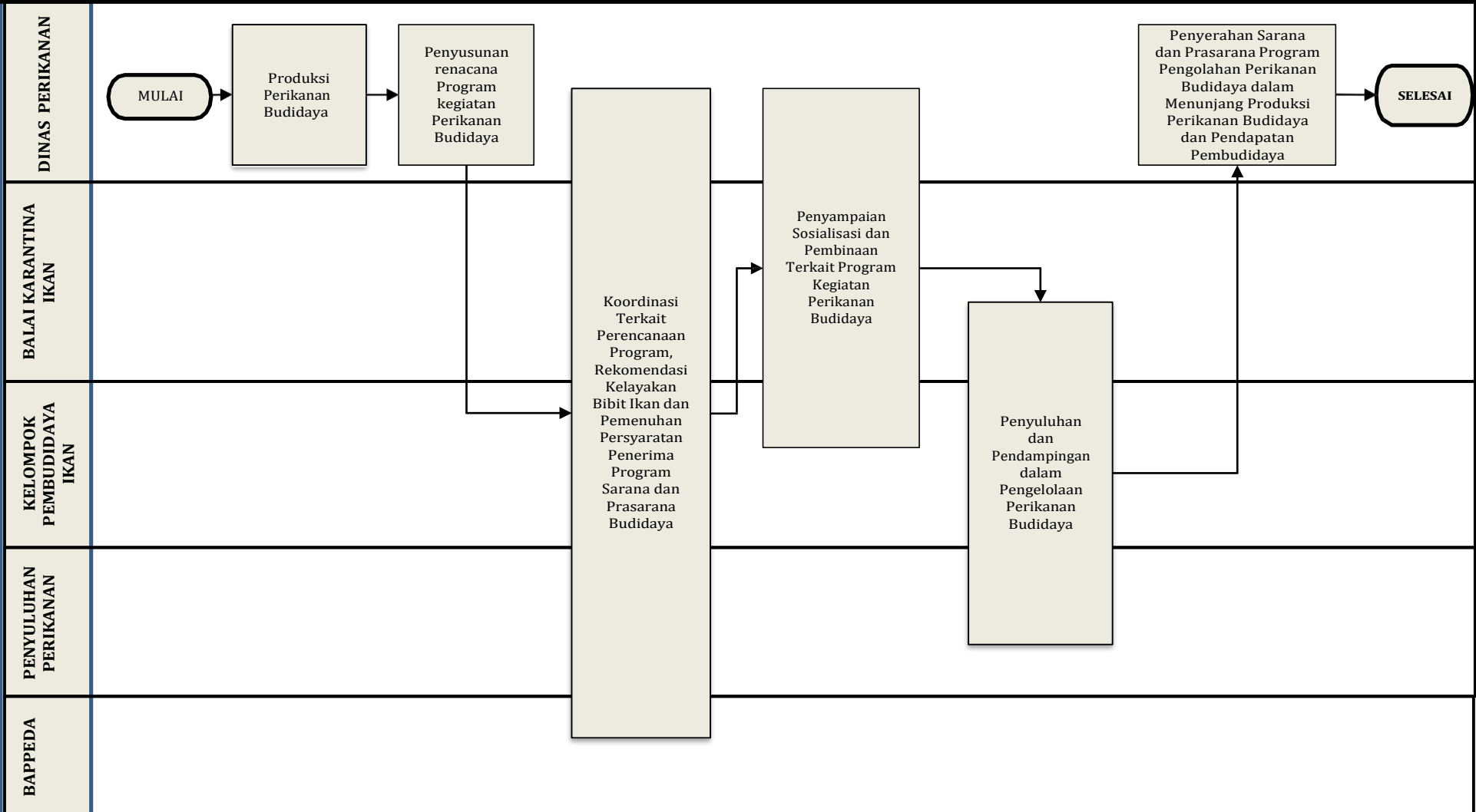
BTN-04.04 CFM04 : Penanganan Korban Bencana

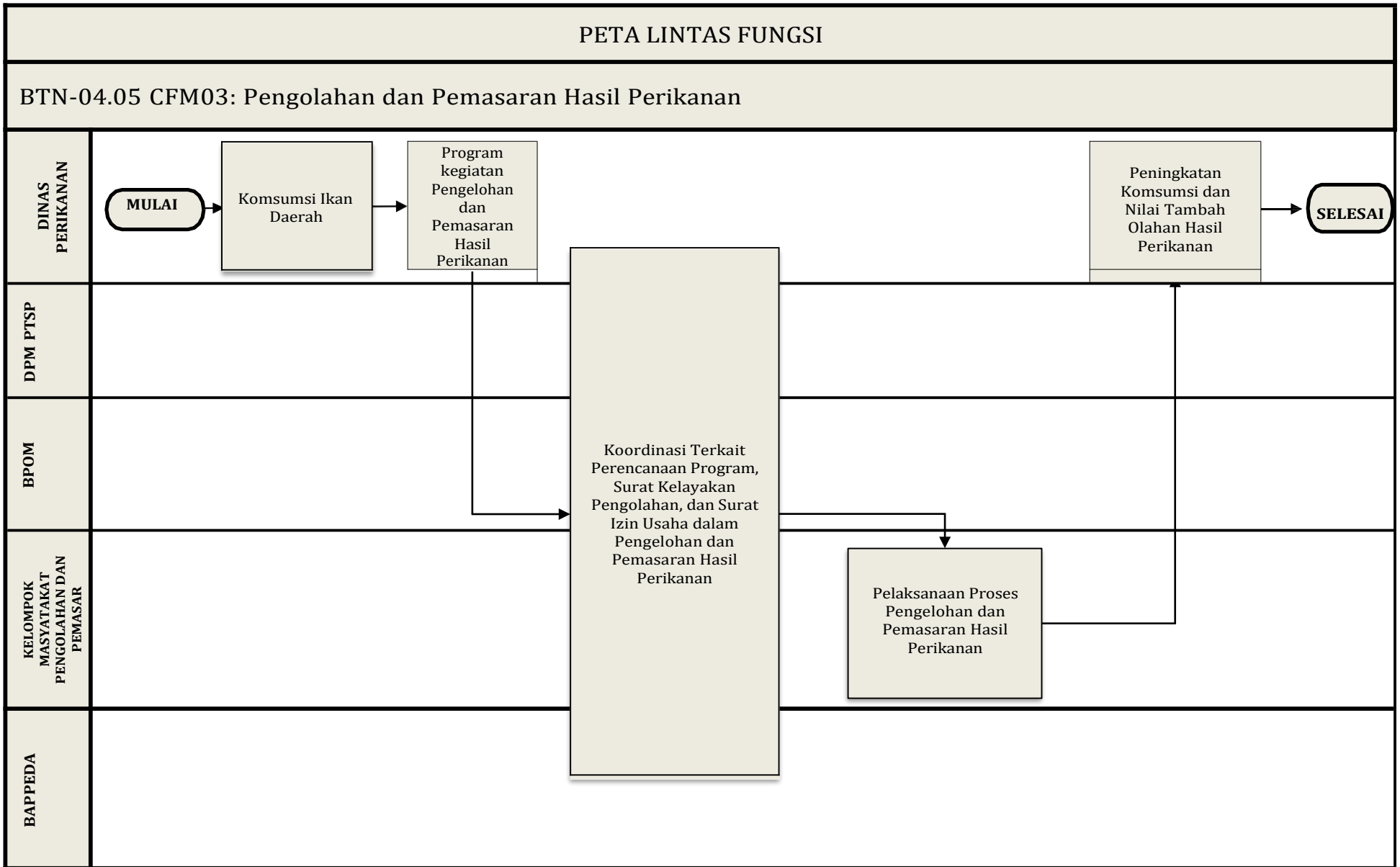


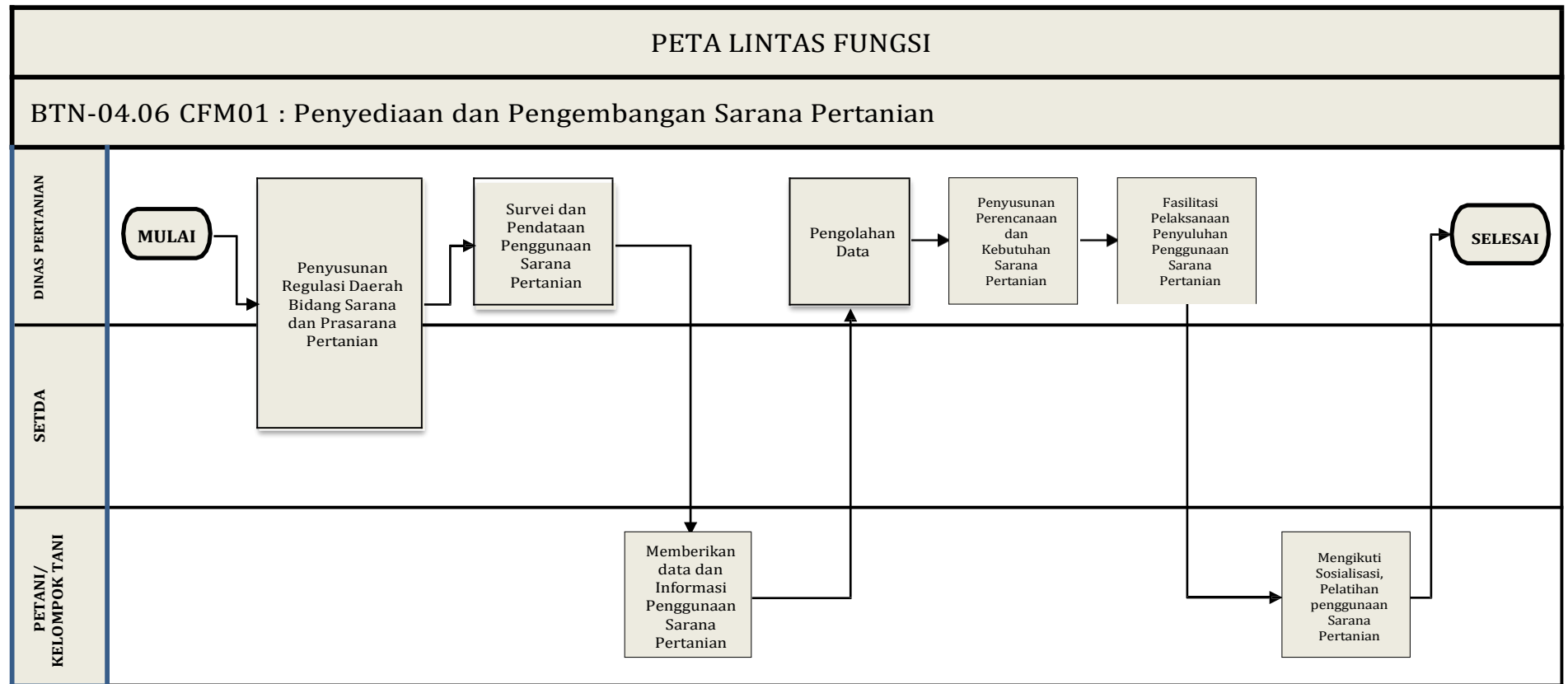


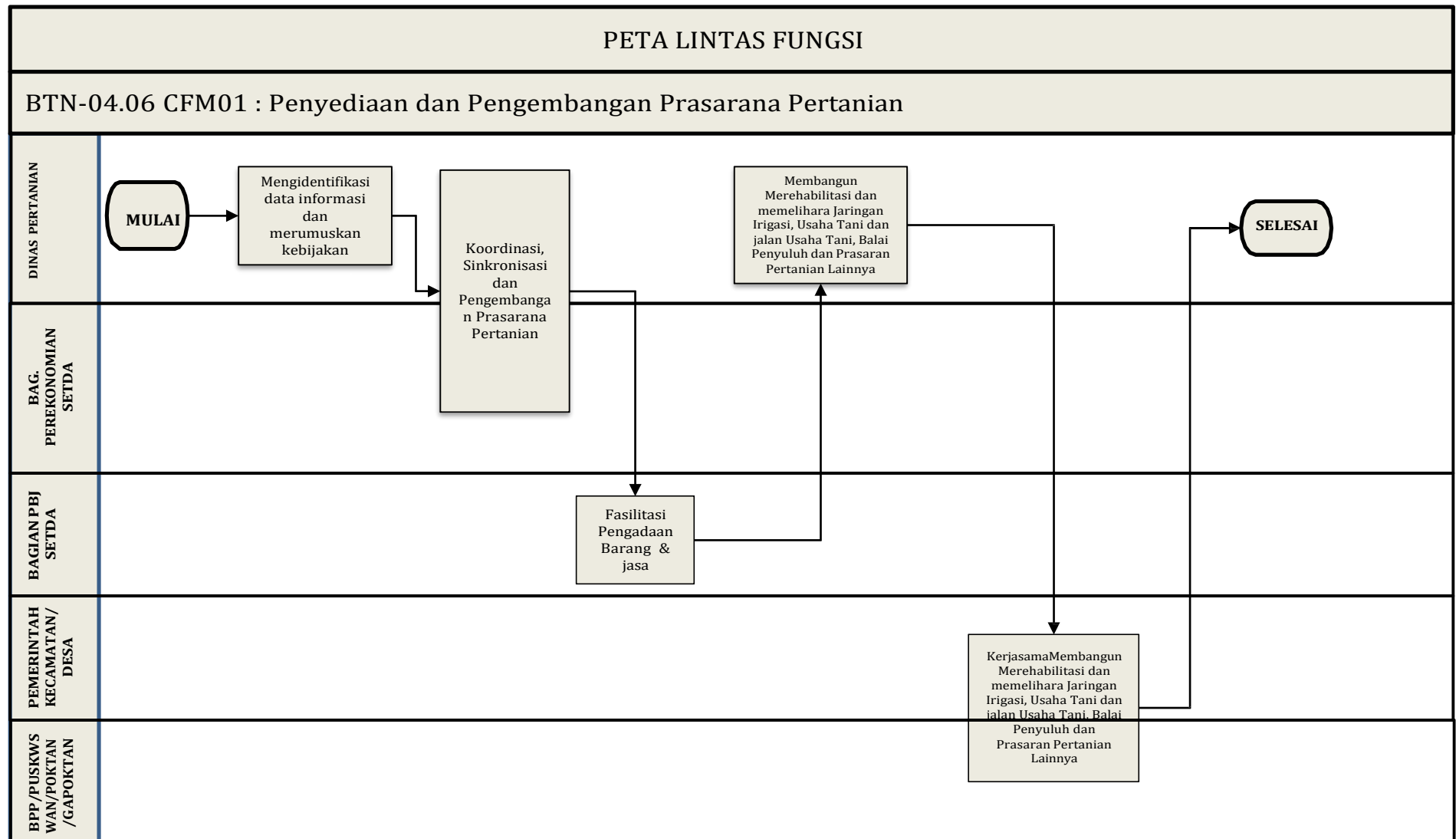
PETA LINTAS FUNGSI

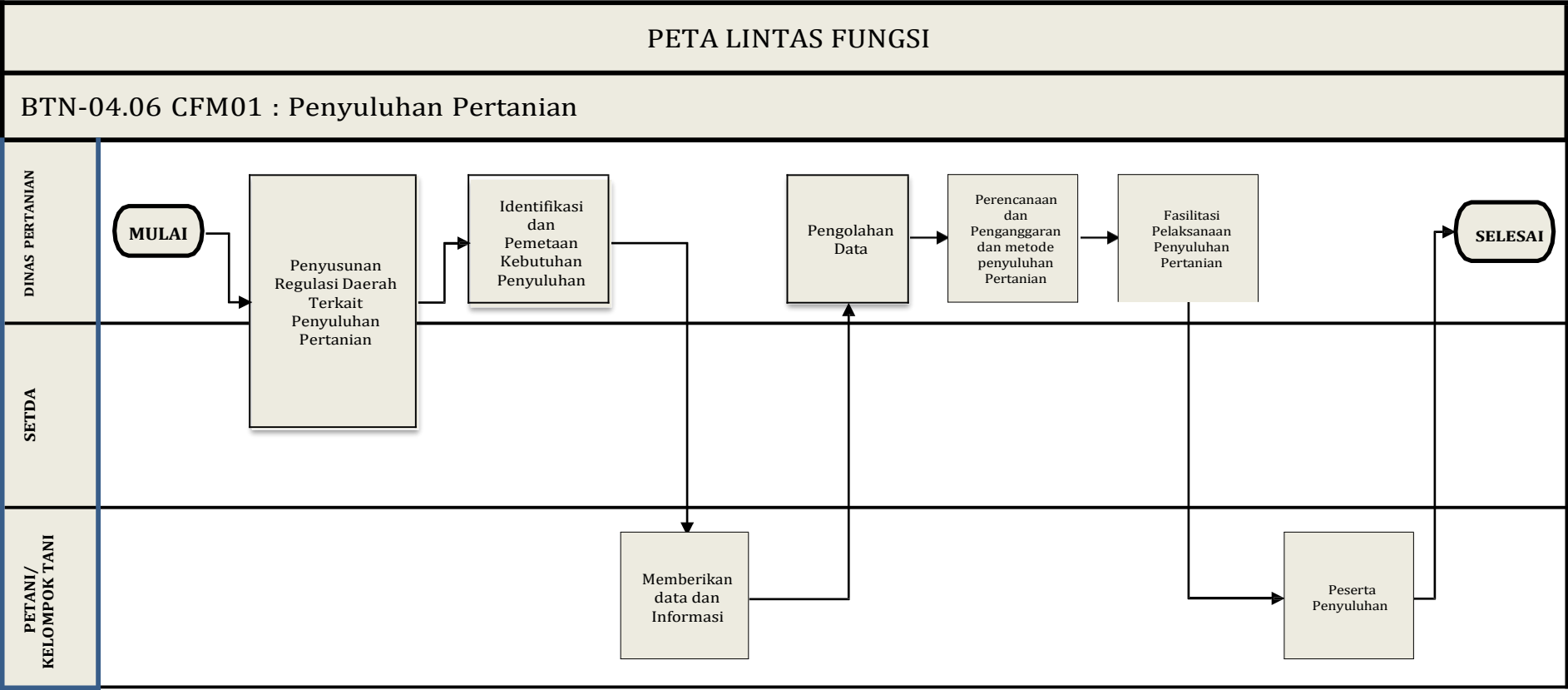
BTN-04.05 CFM02 : Pengelolaan Perikanan Budidaya
--

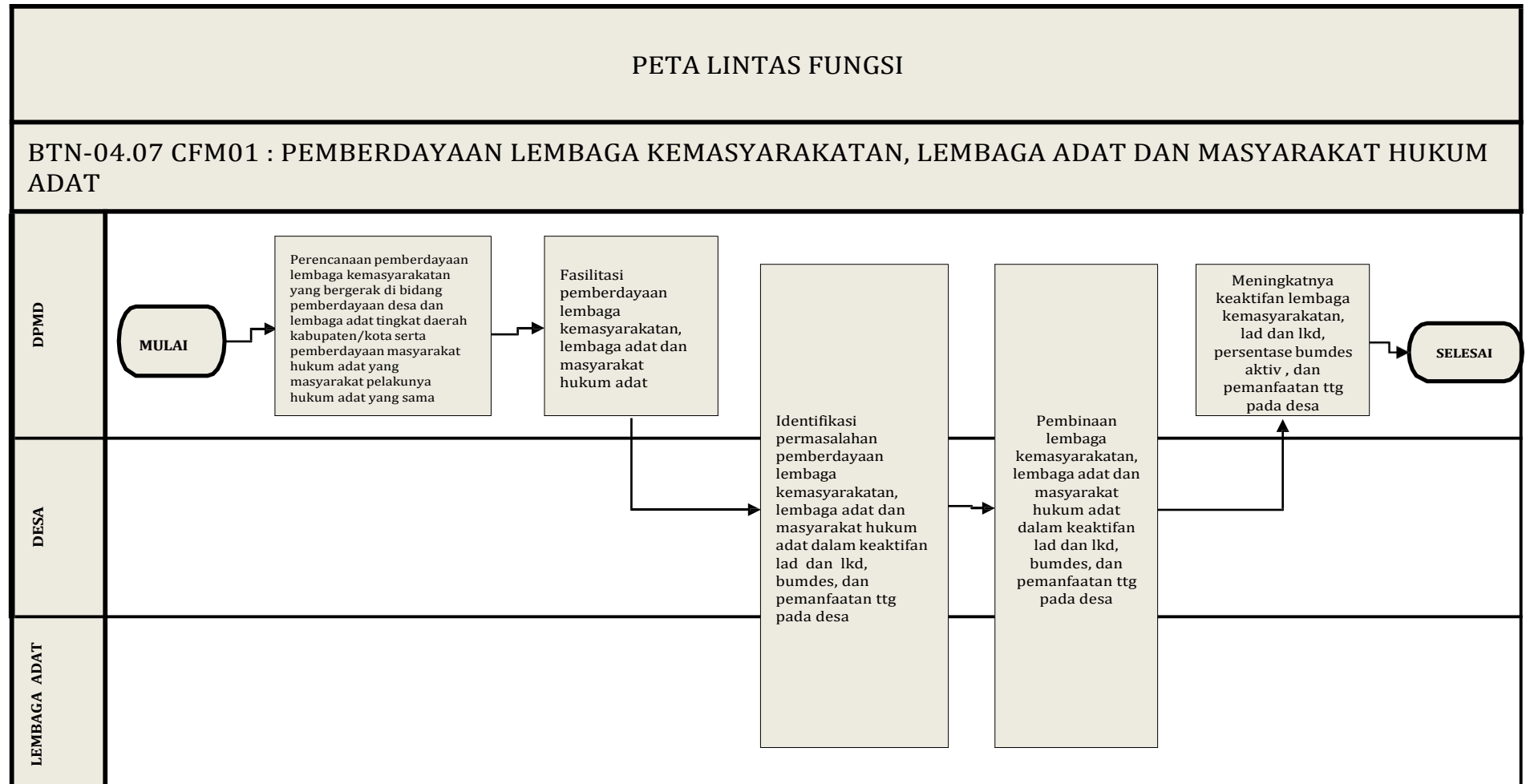






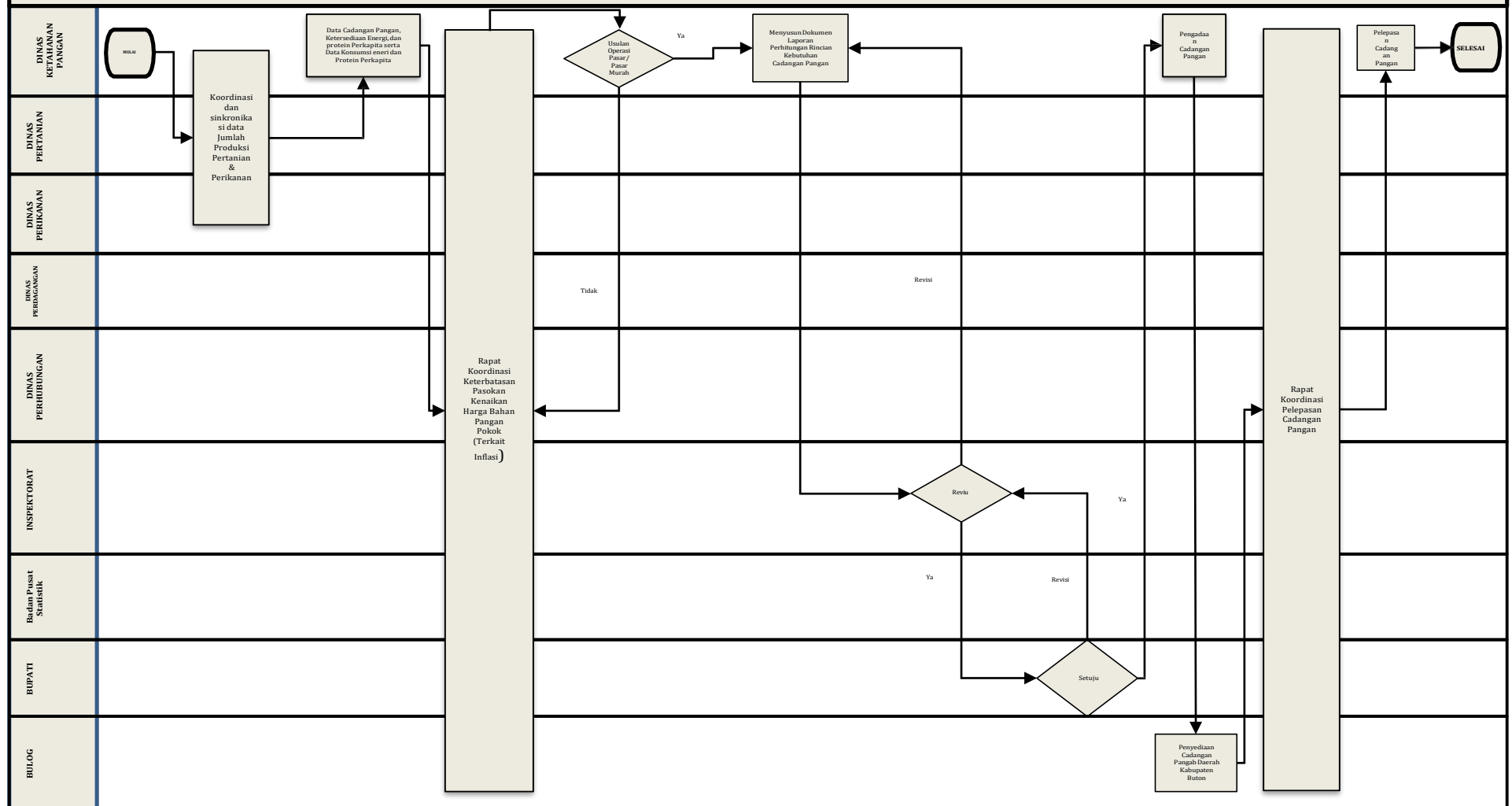


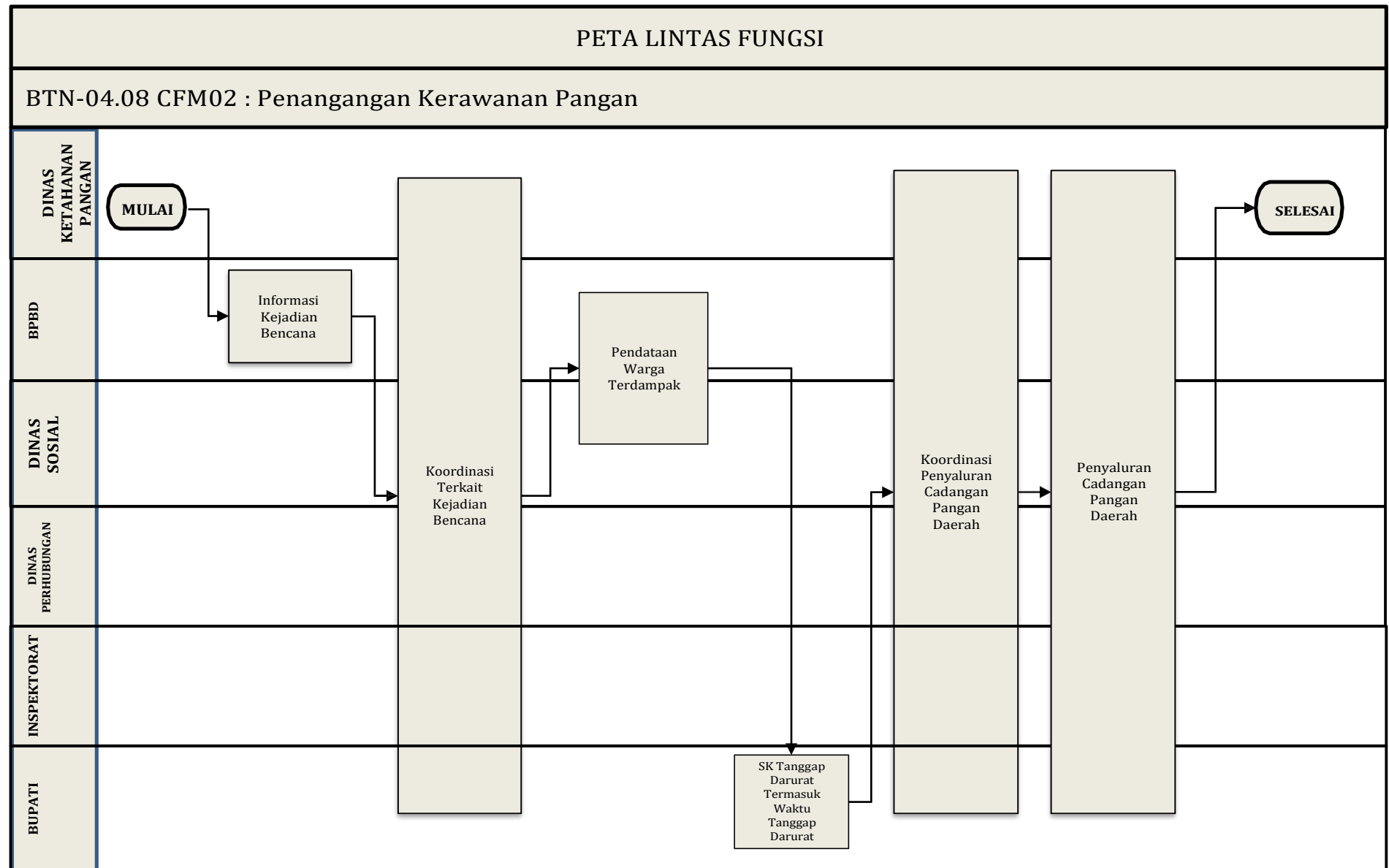


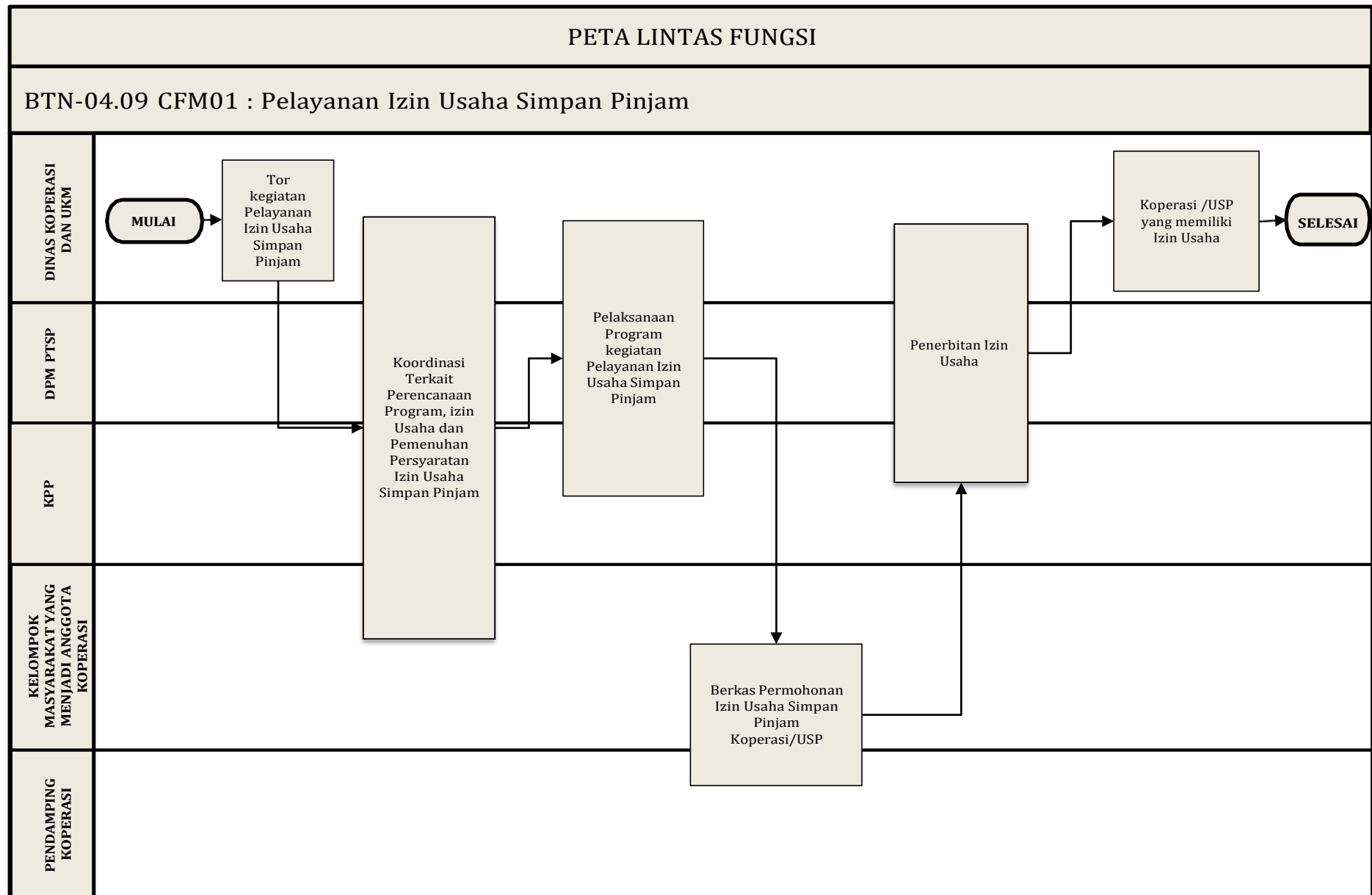


PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.08 CFM01 : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

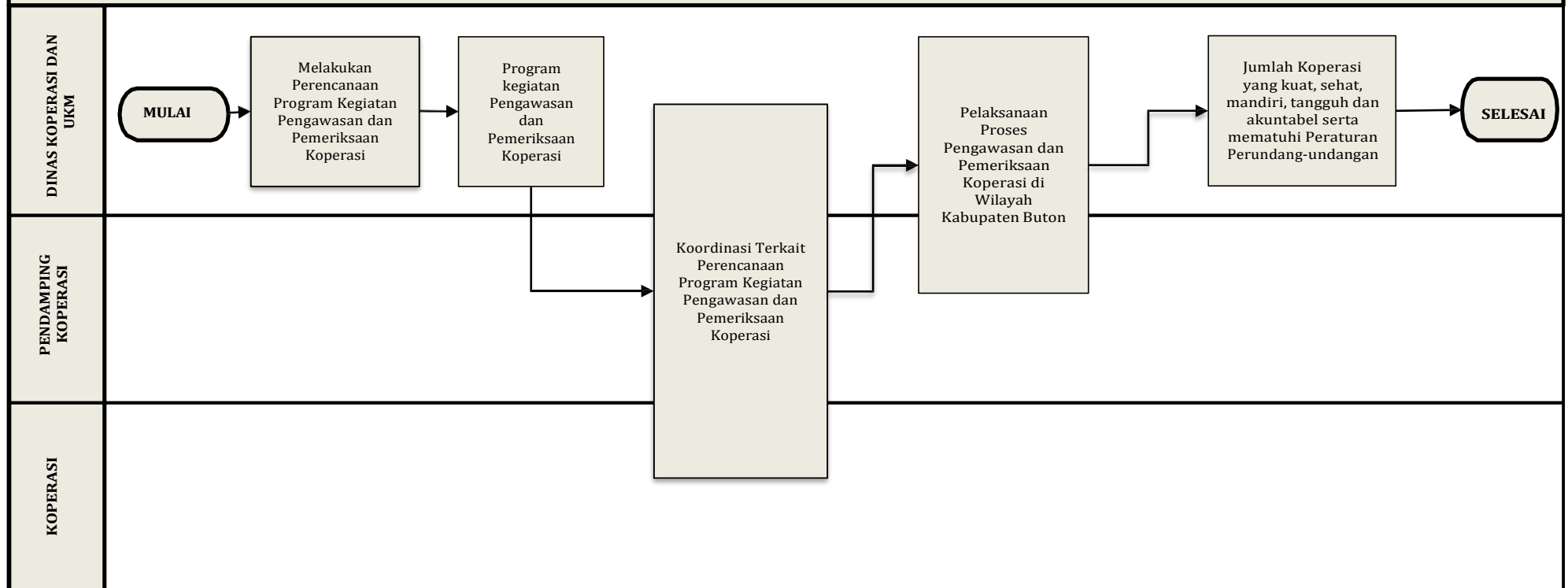






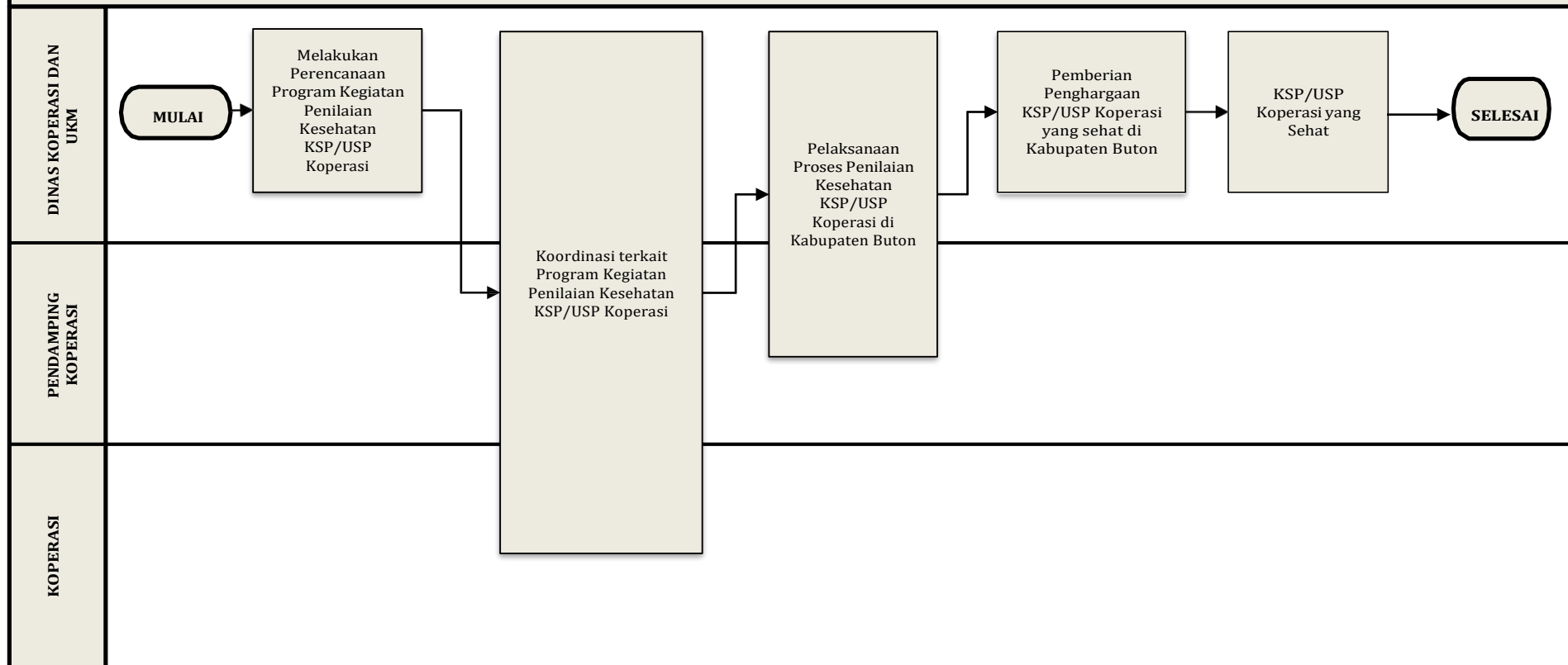
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.09 CFM02 : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



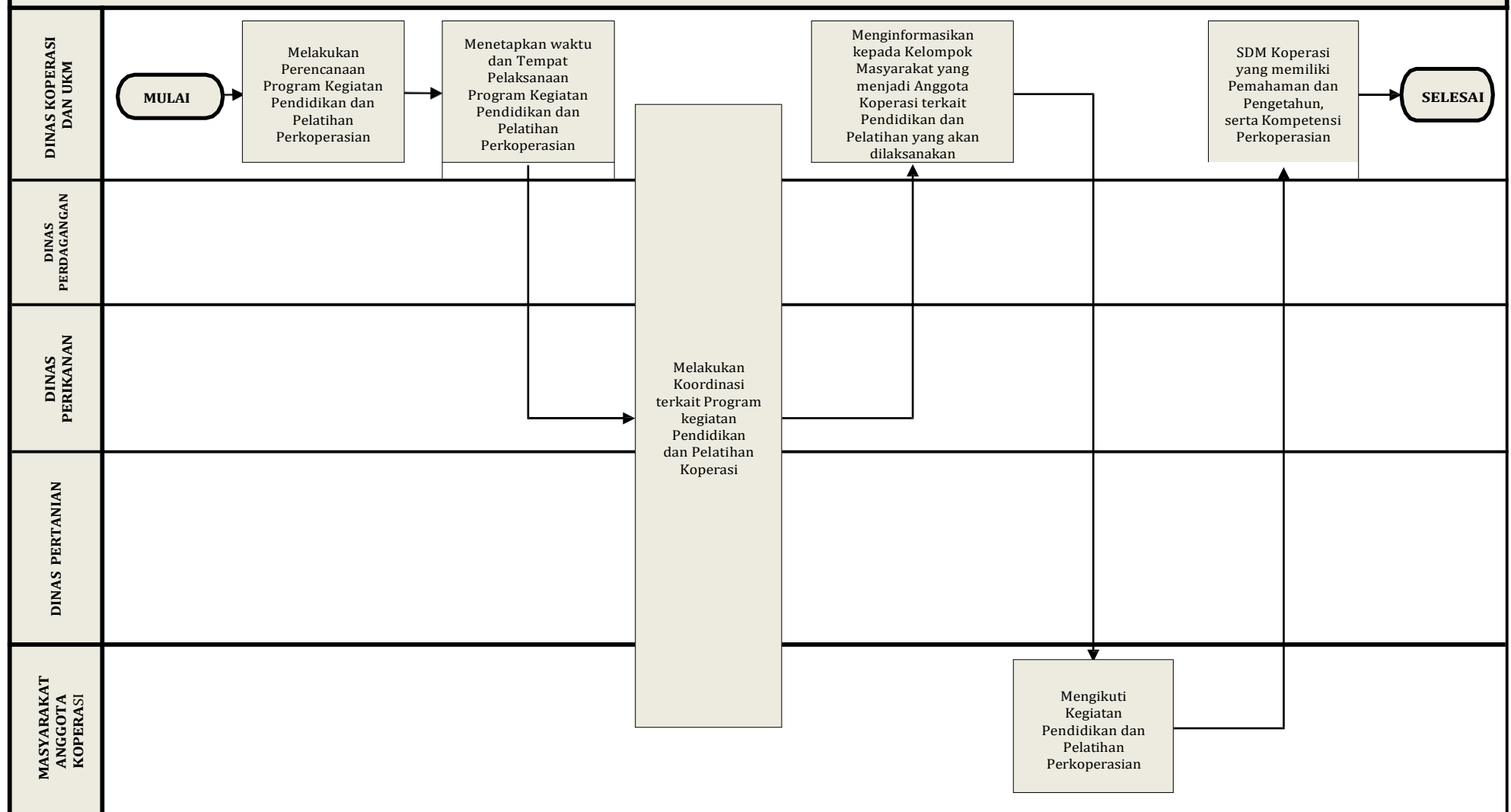
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.09 CFM03 : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi



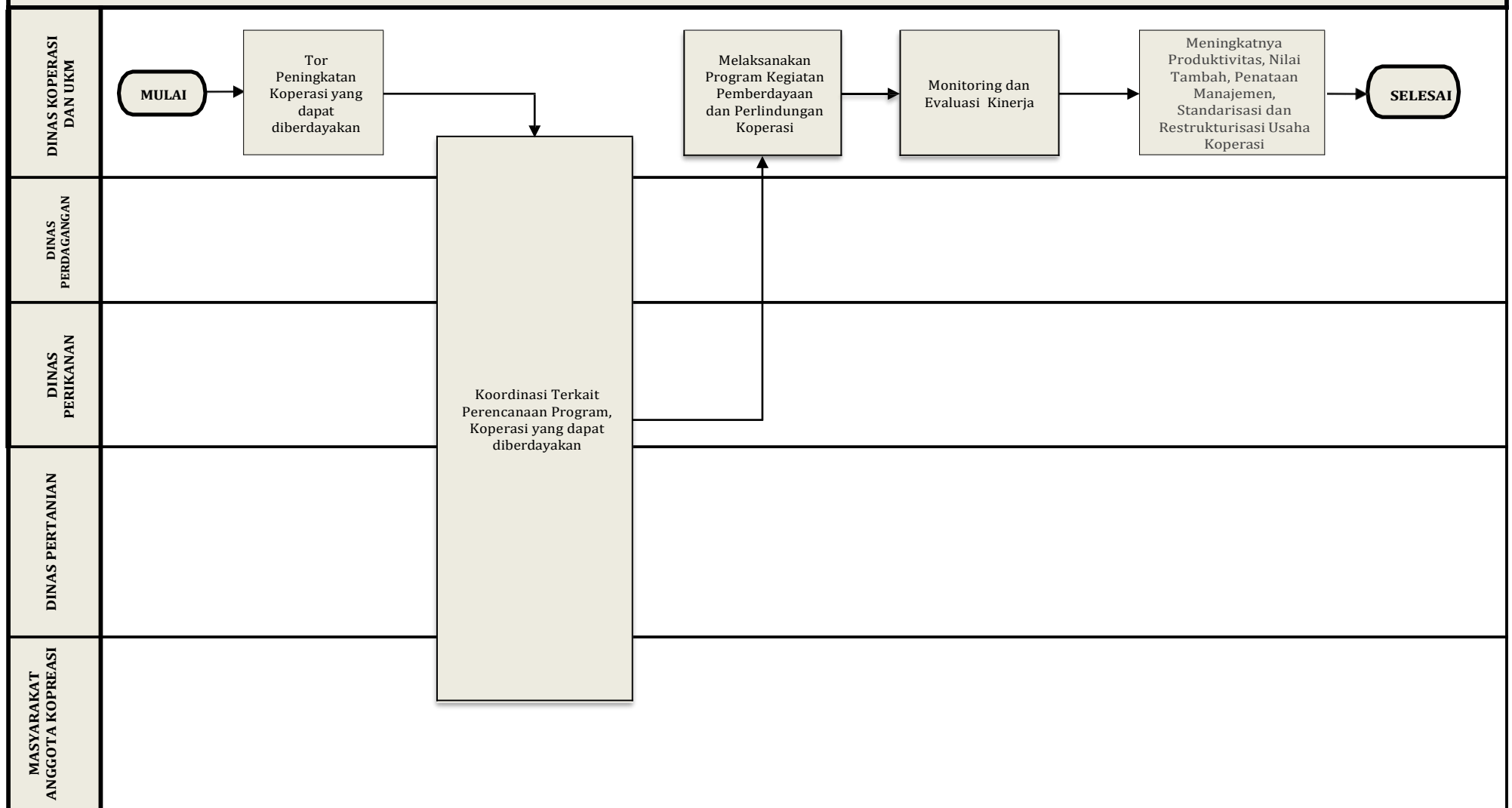
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.09 CFM04 : Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



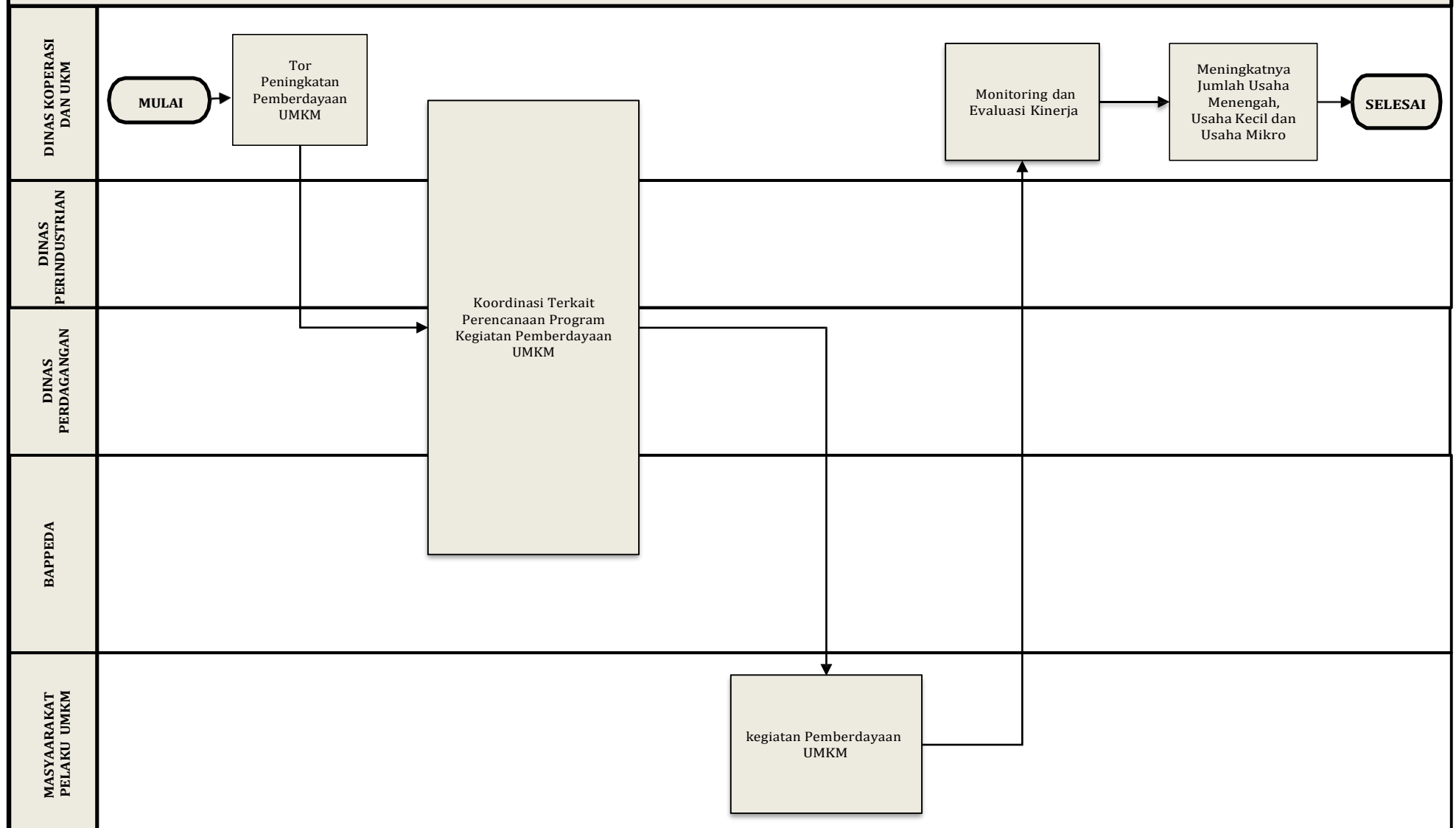
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.09 CFM05 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



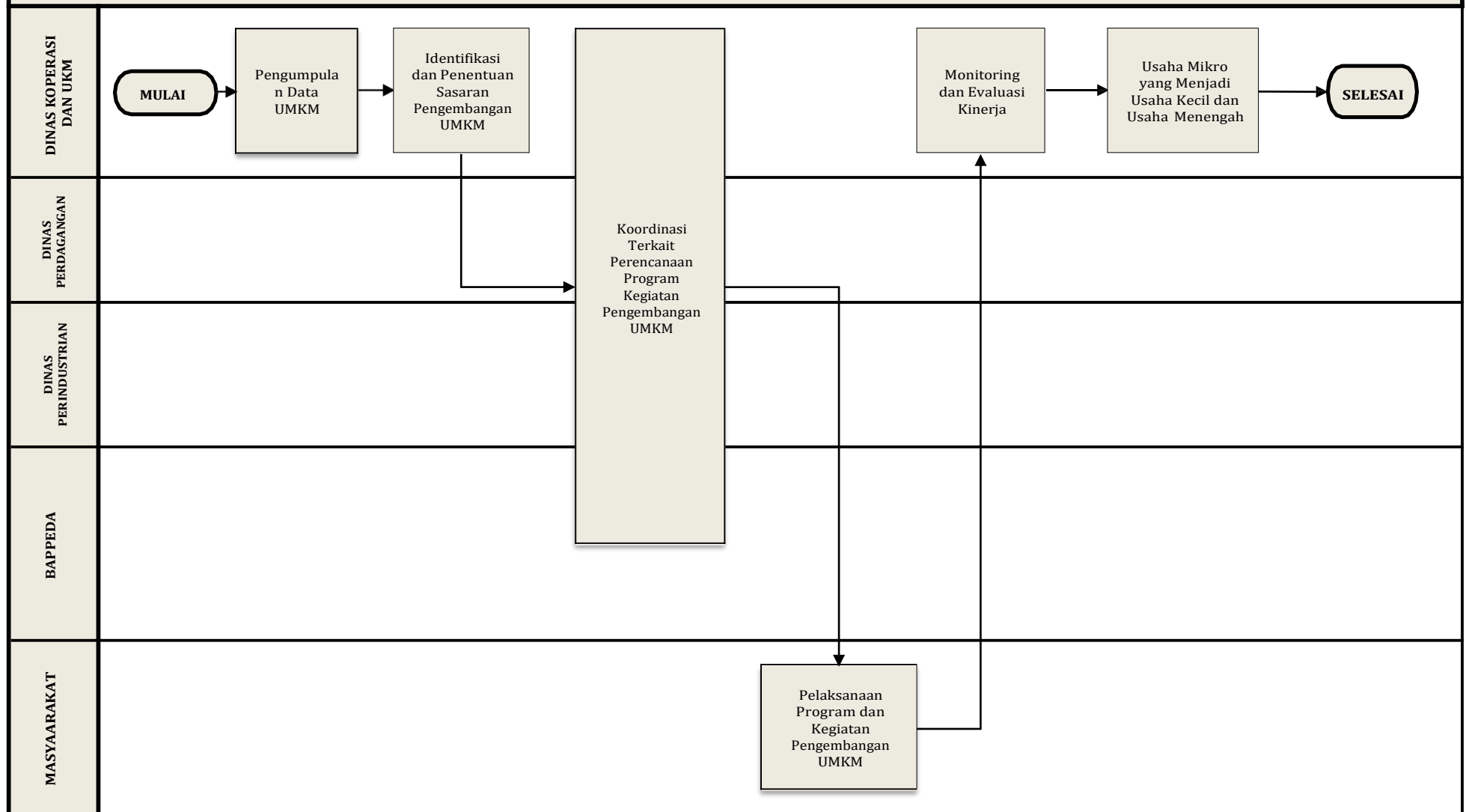
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.09 CFM06 : Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro



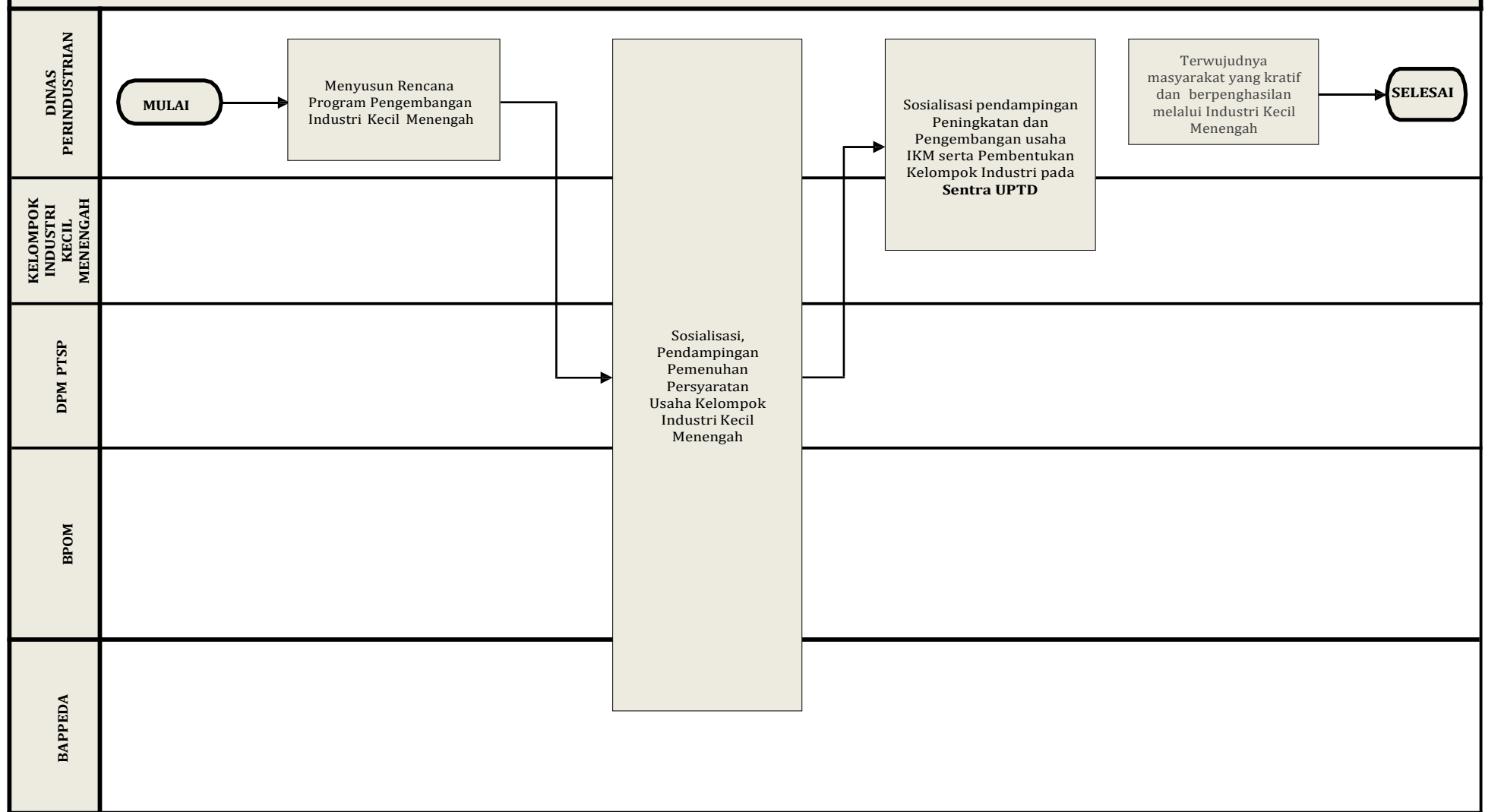
PETA LINTAS FUNGSI

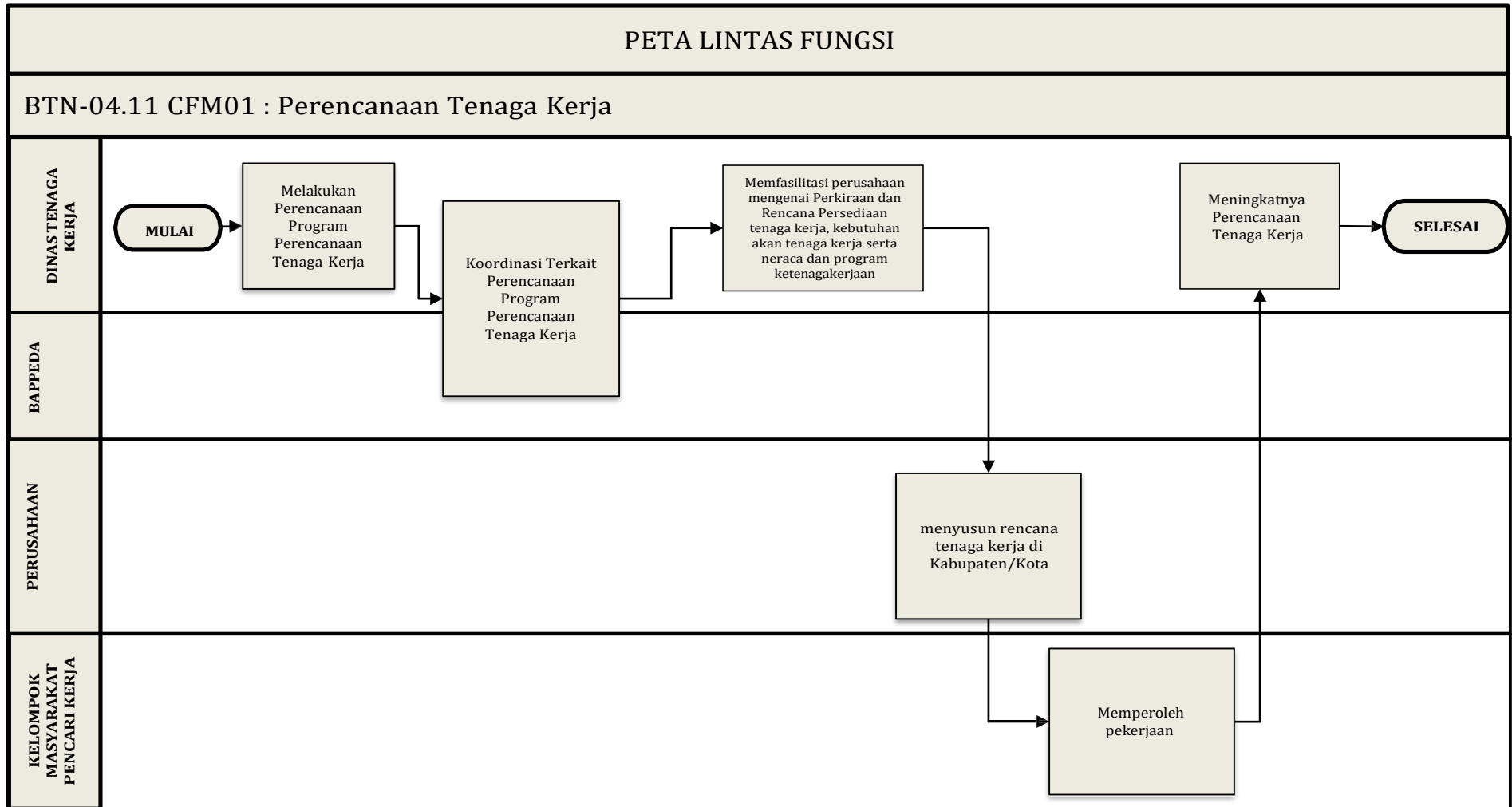
BTN-04.09 CFM07 : Pengembangan UMKM

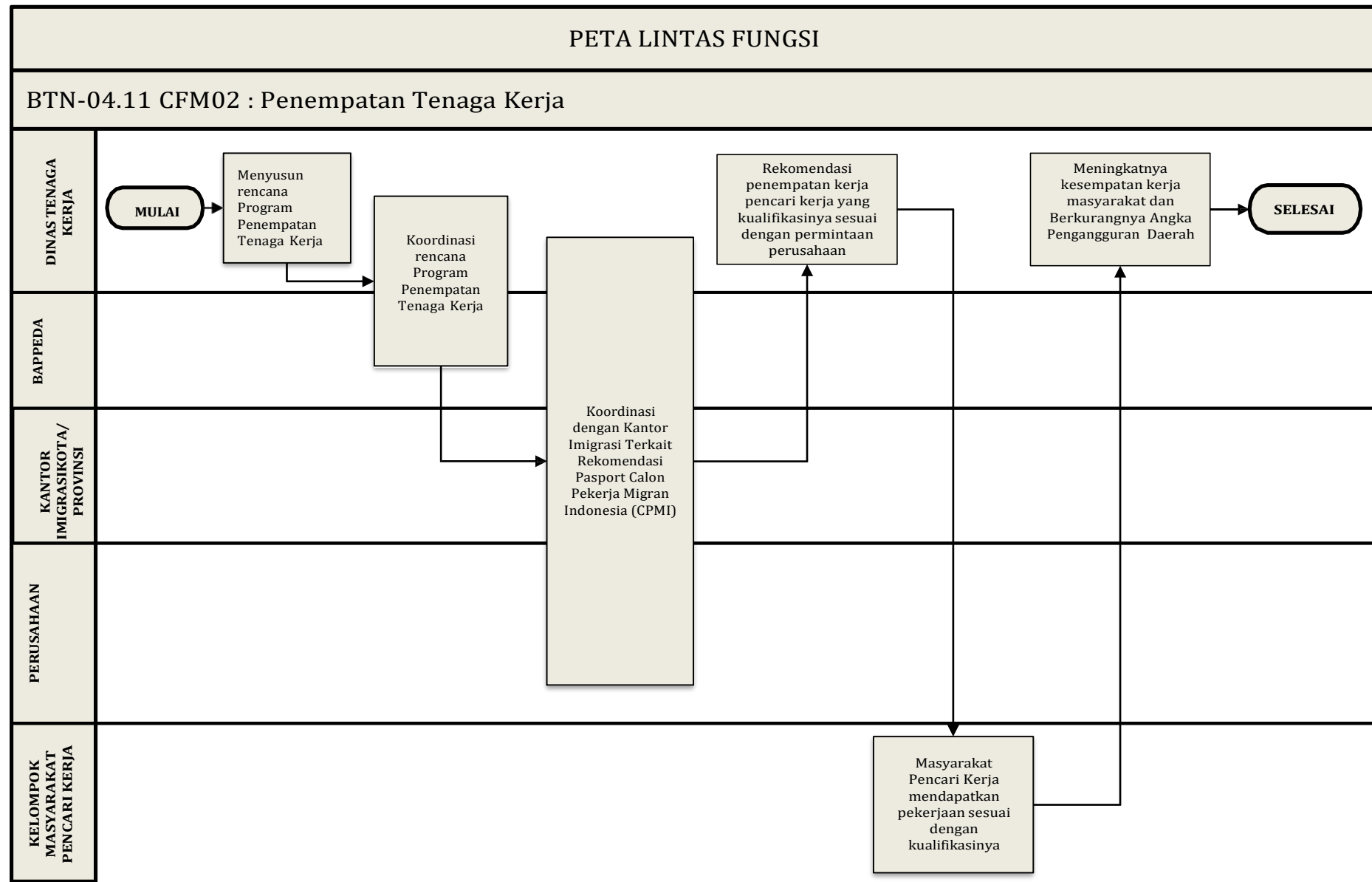


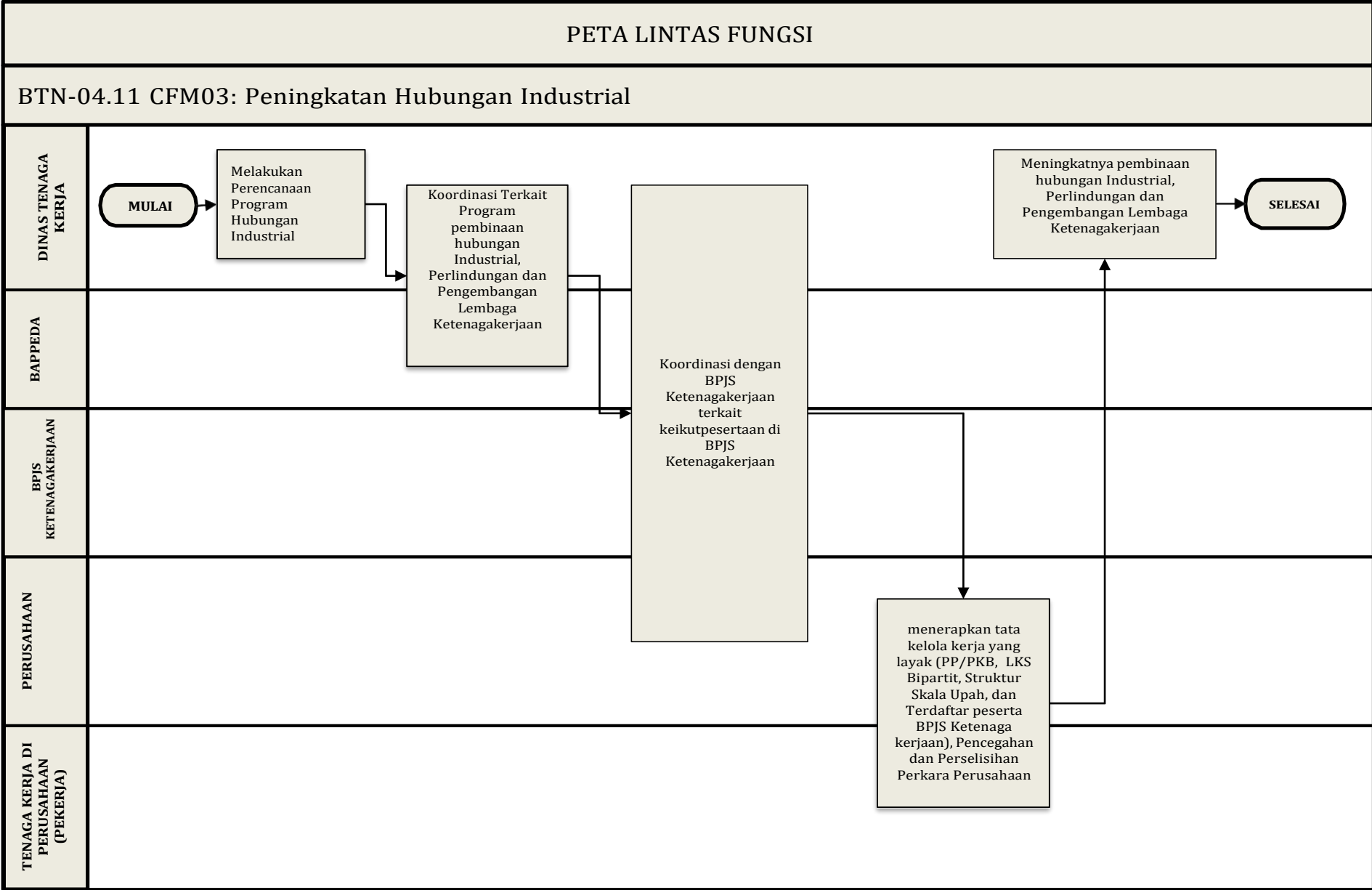
PETA LINTAS FUNGSI

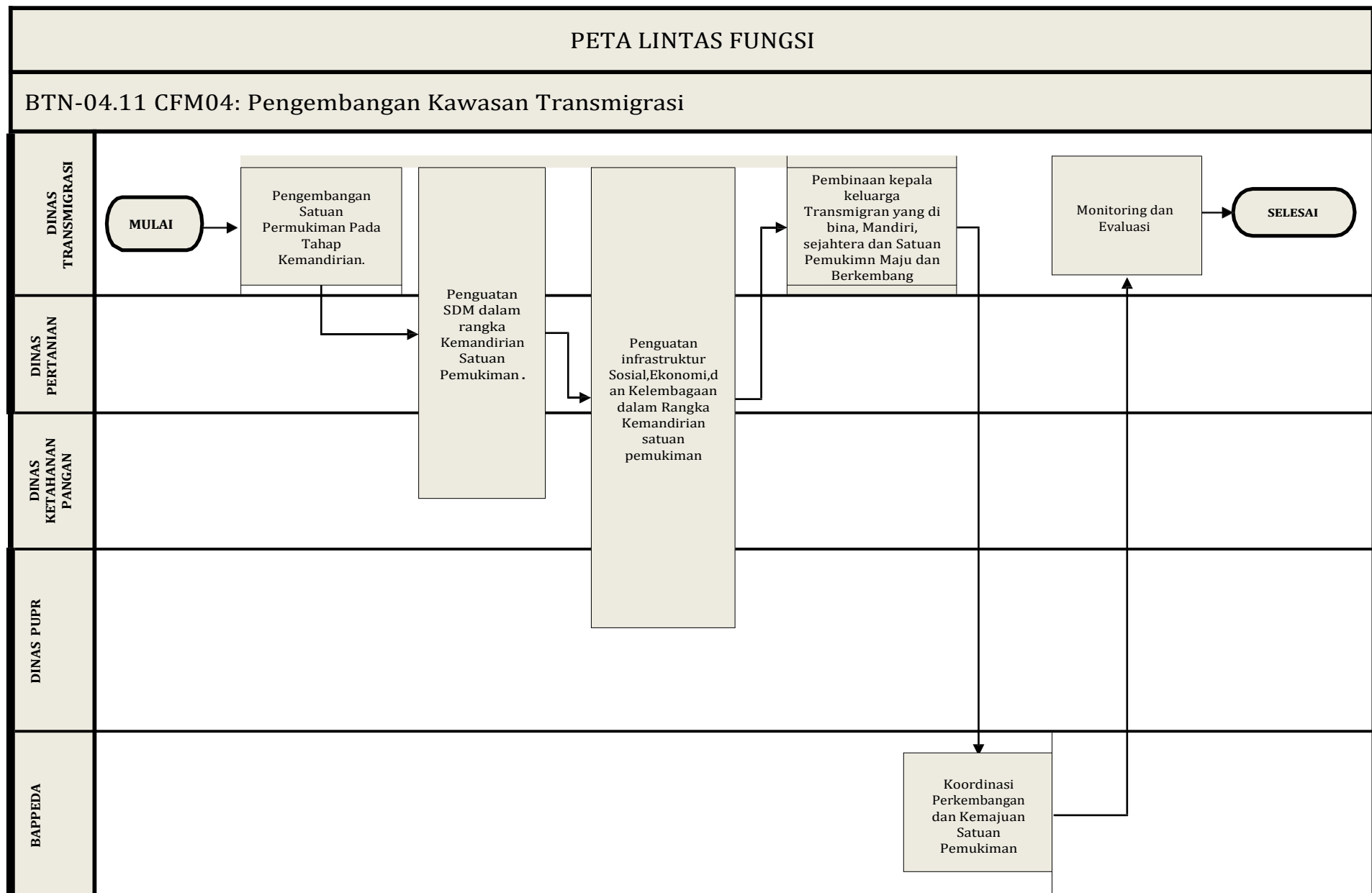
BTN-04.10 CFM01 : Perencanaan dan Pembangunan Industri





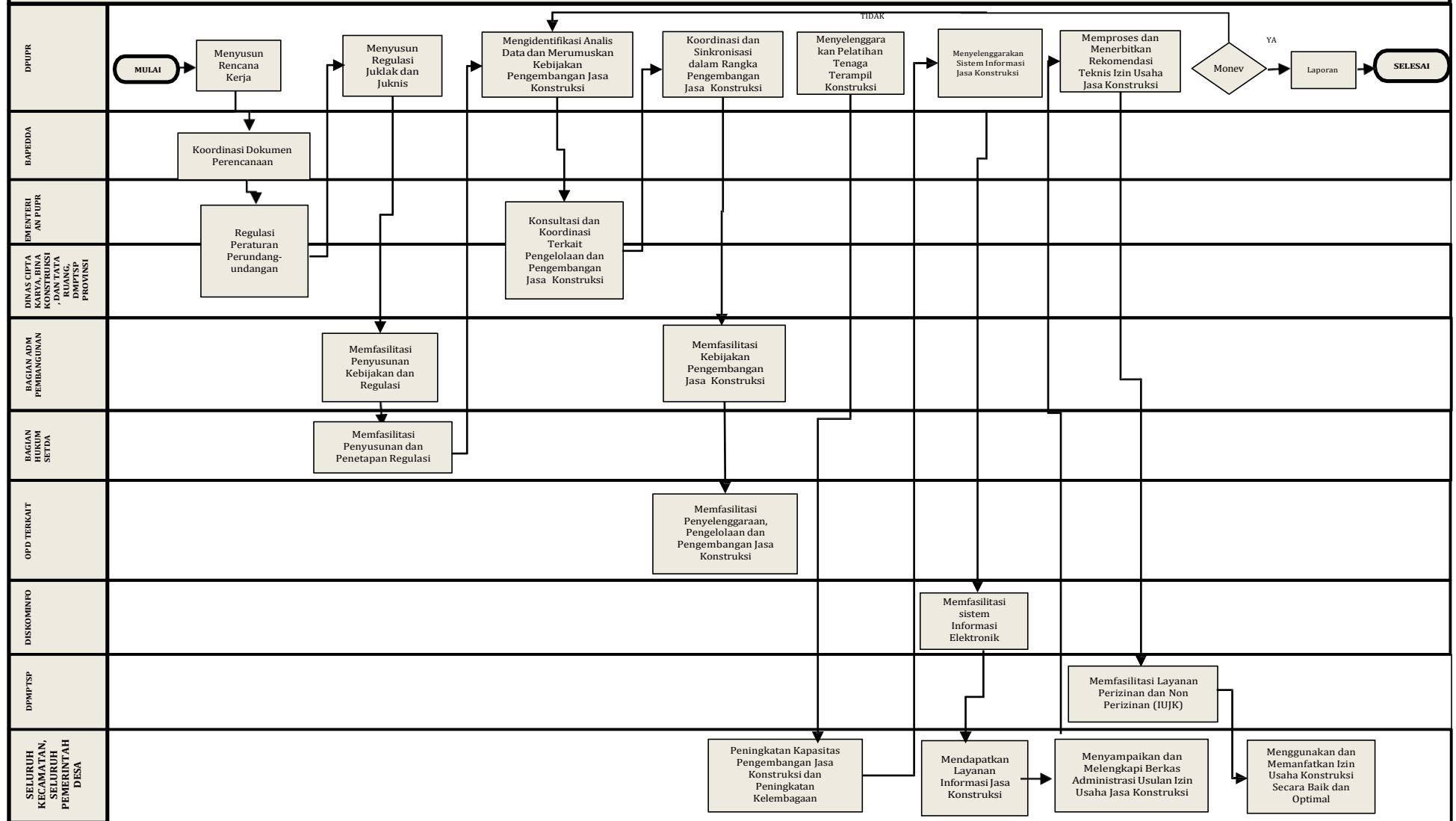






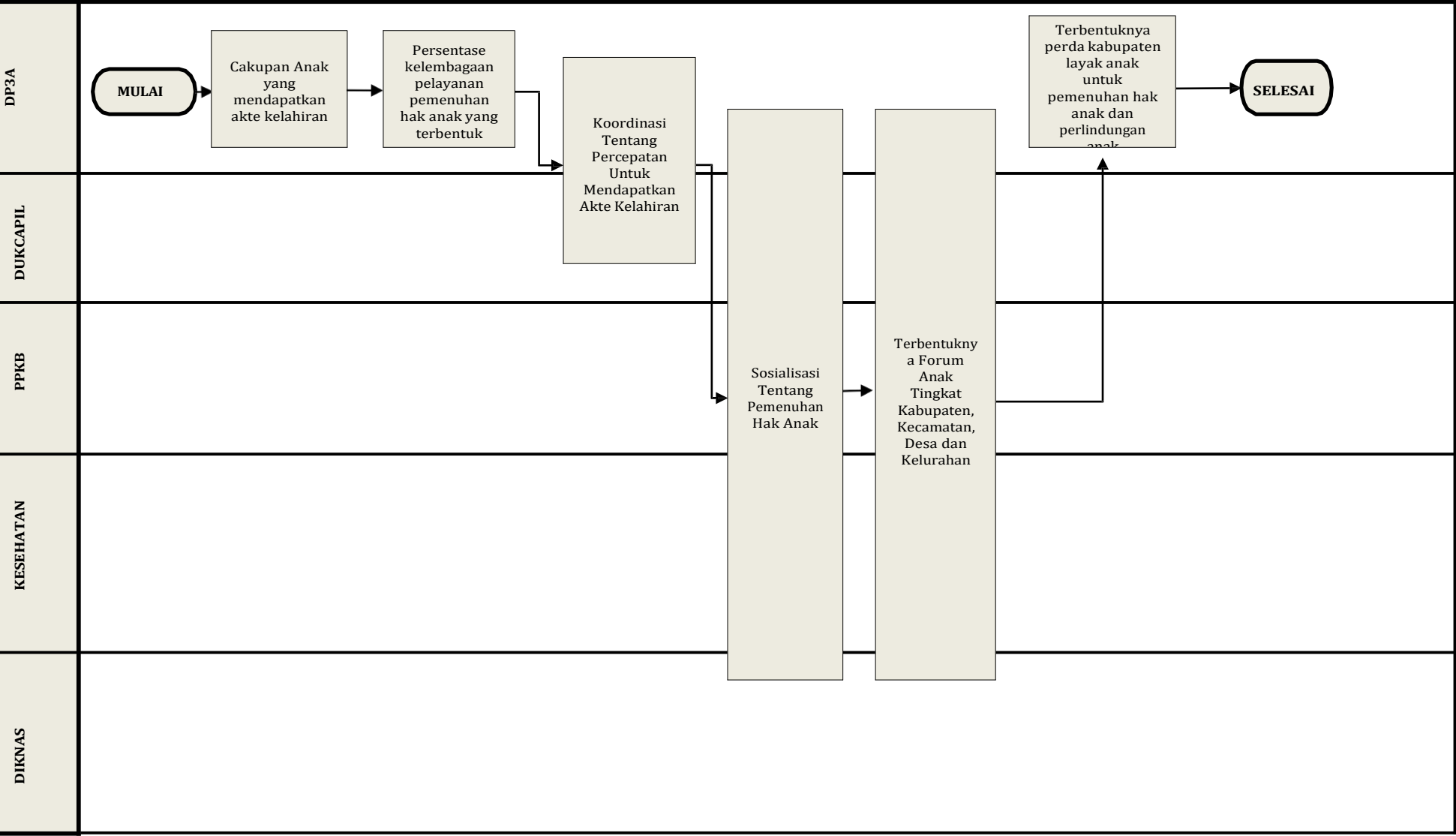
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-04.11 CFM05 : Pengembangan Jasa Konstruksi



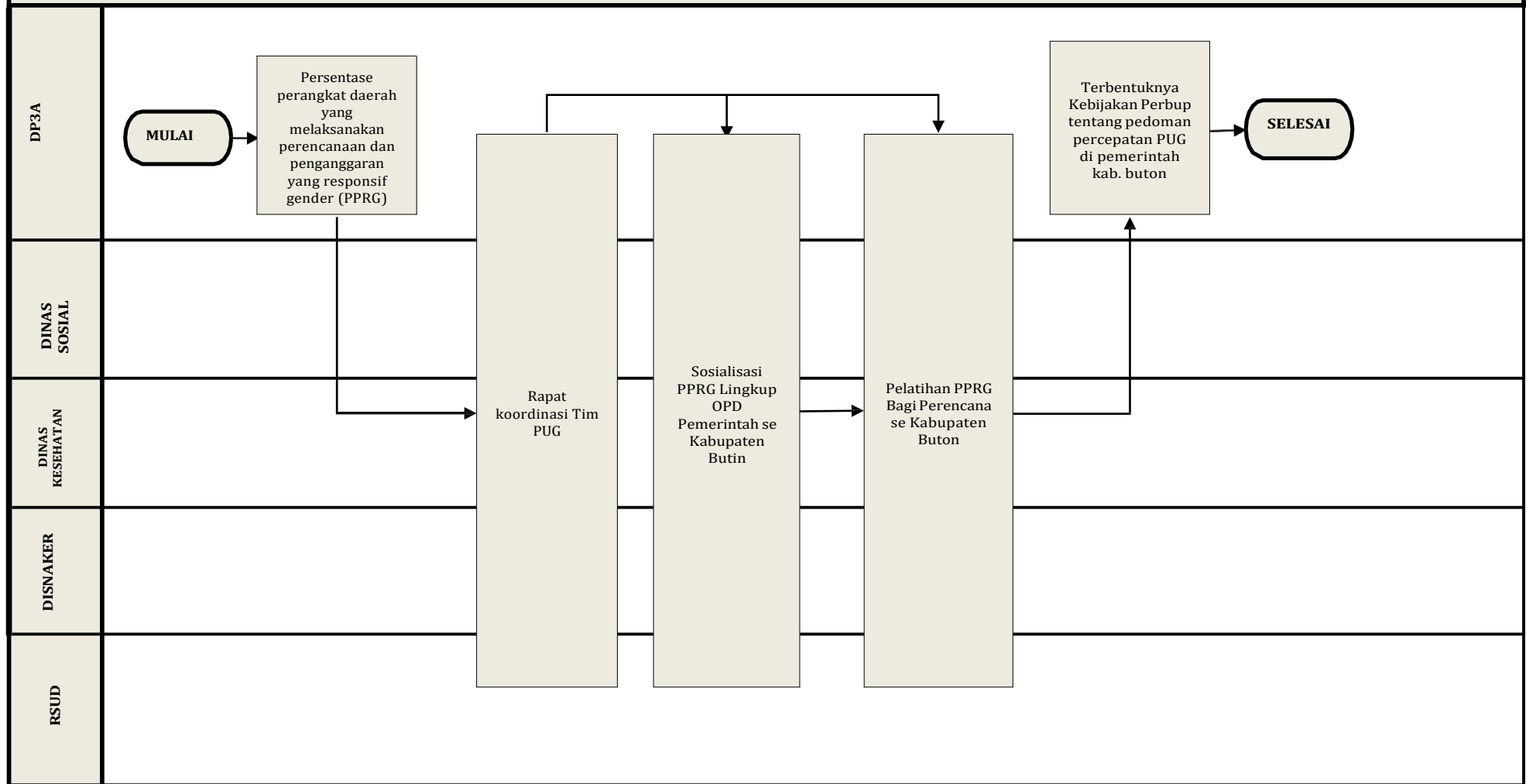
PETA LINTAS FUNGSI

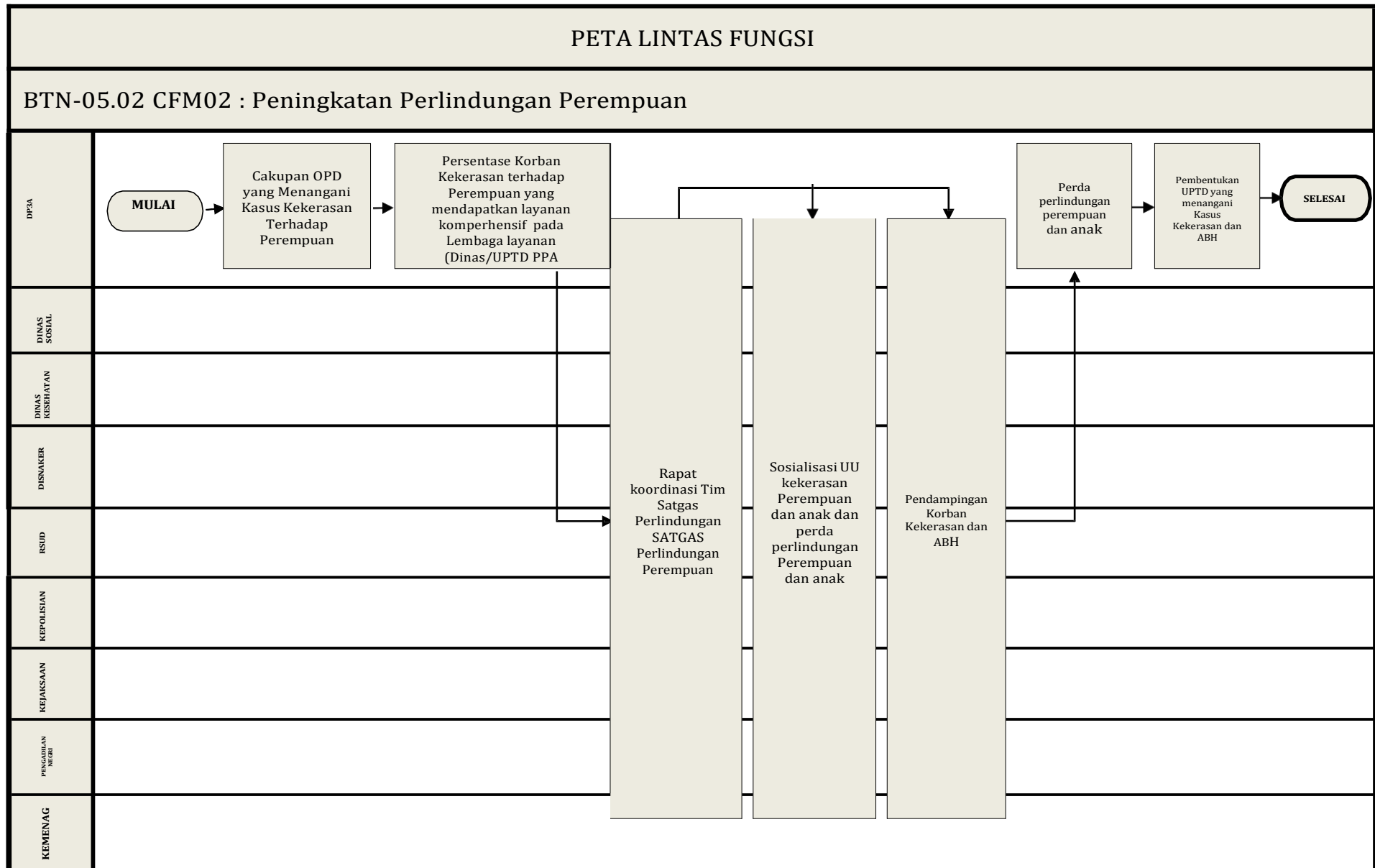
BTN-05.01 CFM01 : Pemenuhan Hak Anak



PETA LINTAS FUNGSI

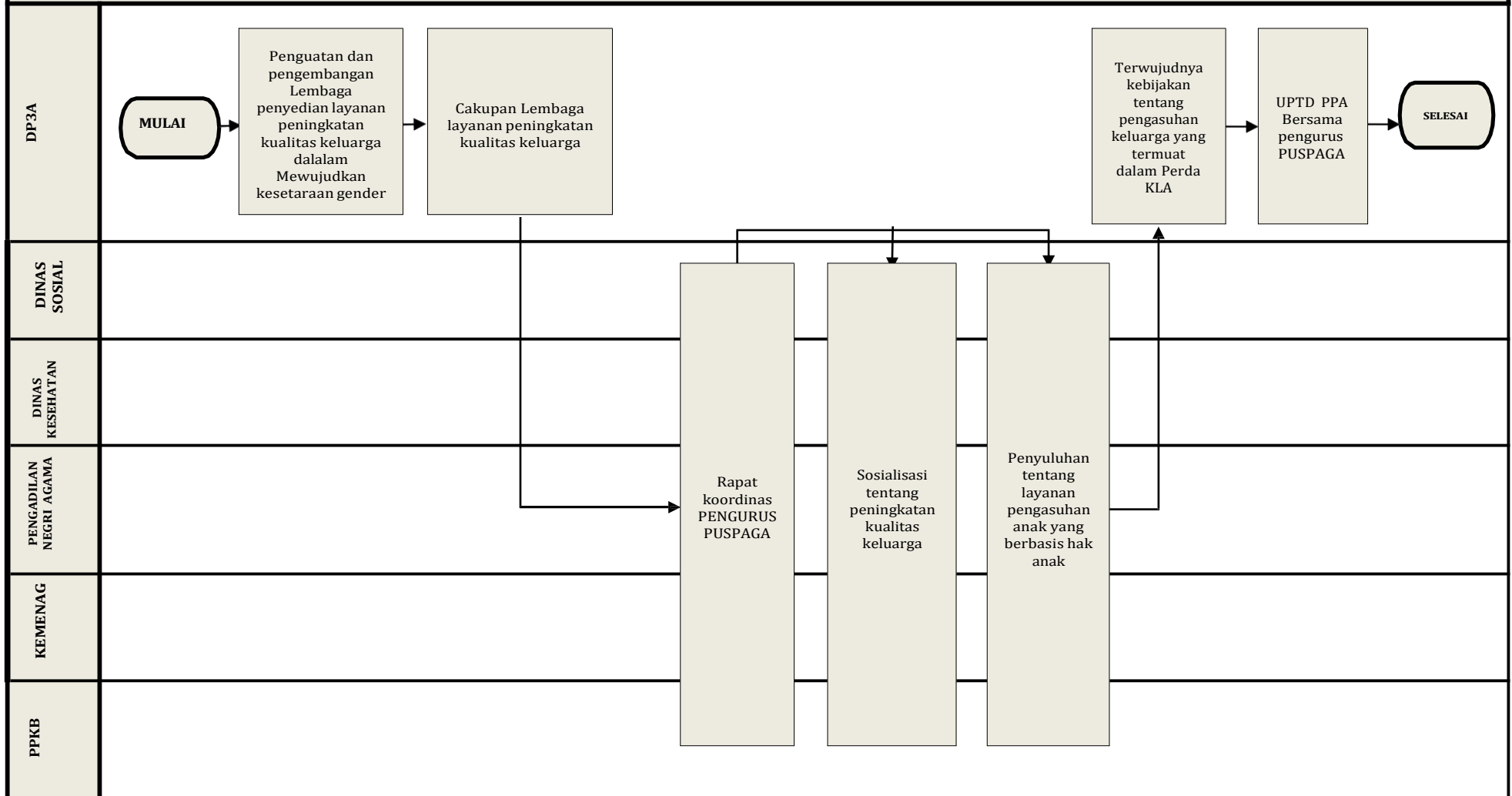
BTN-05.02 CFM01 : Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan





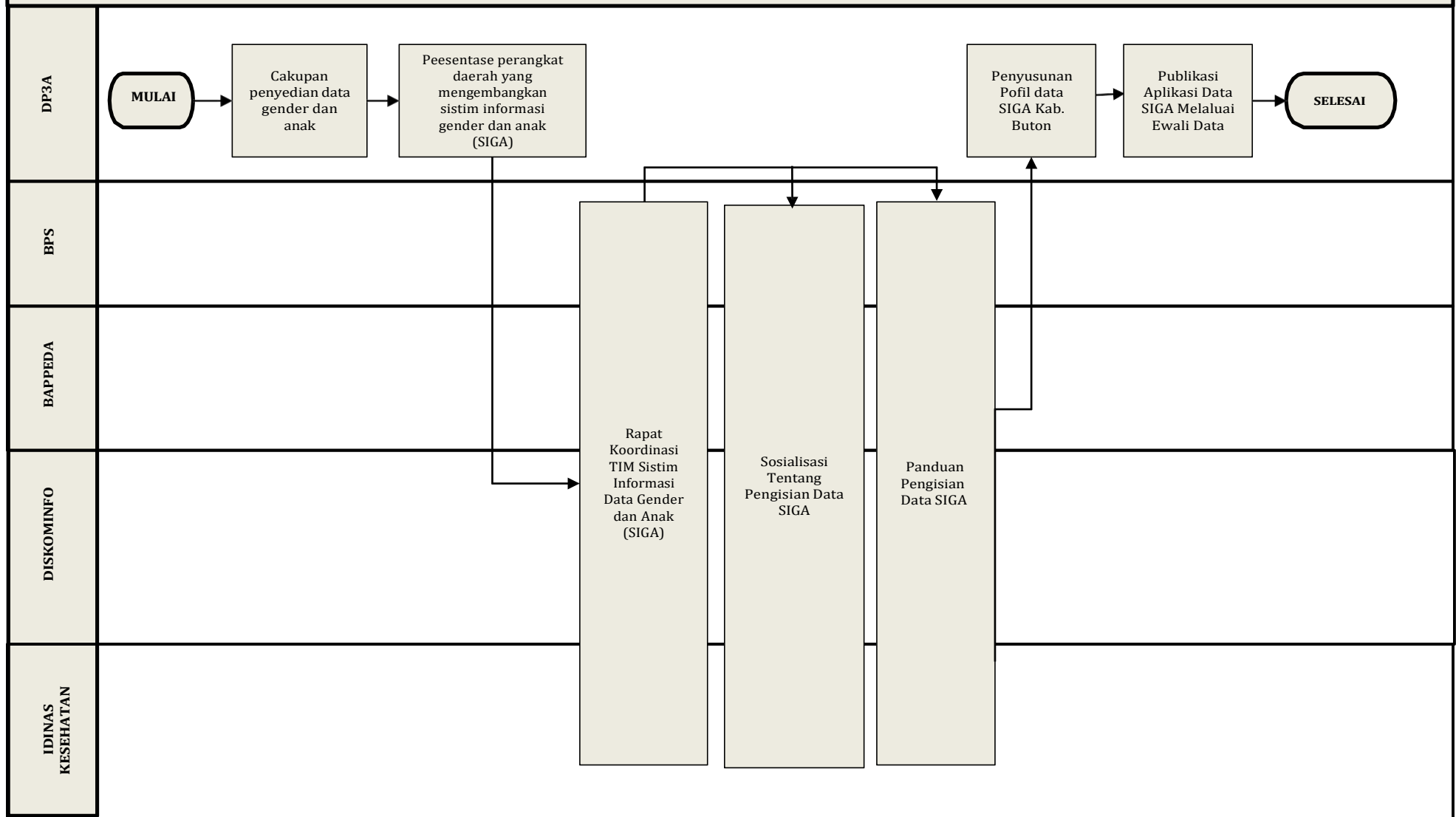
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-05.02 CFM03 : Peningkatan Kualitas Keluarga



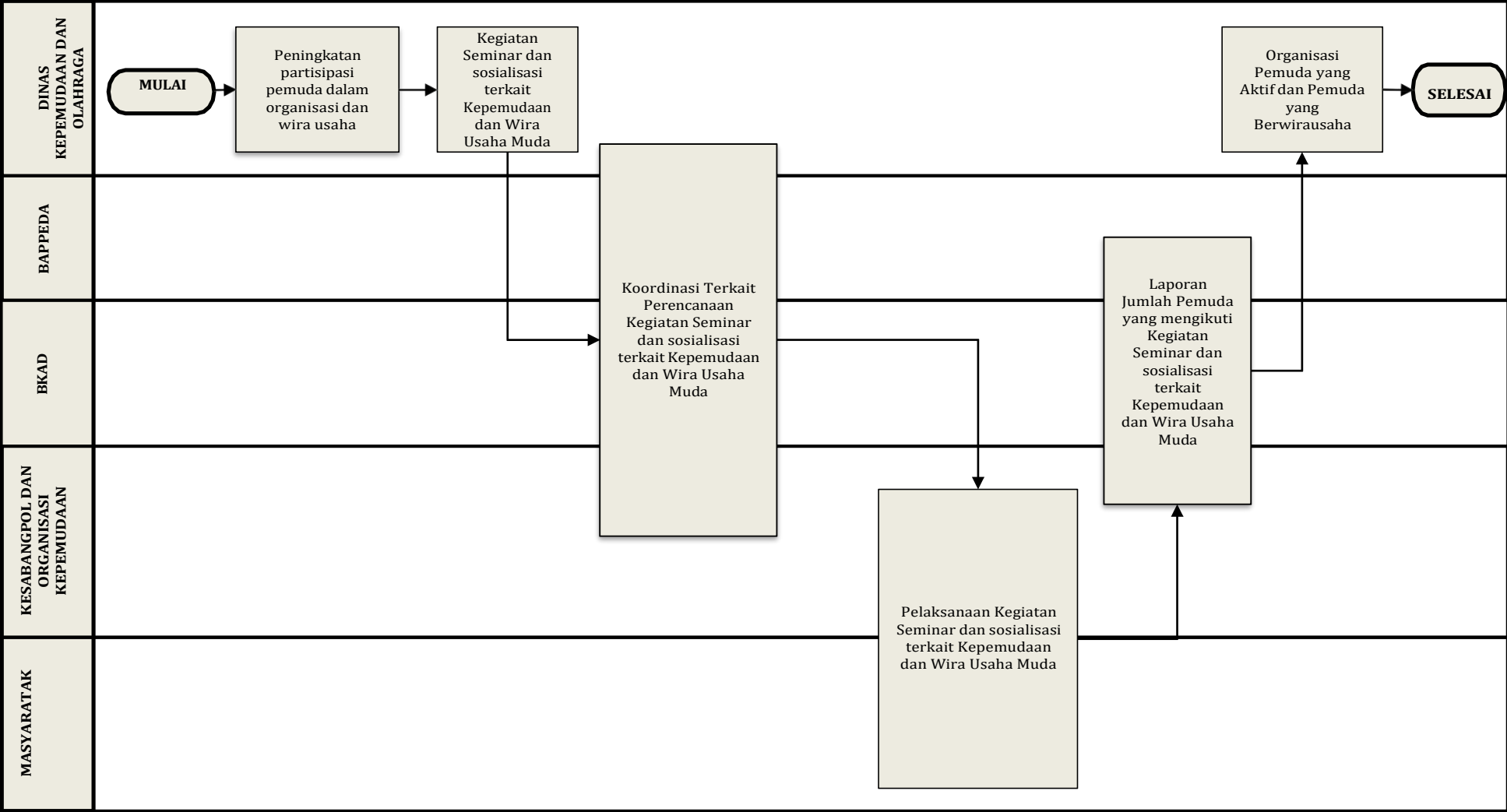
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-05.02 CFM04: Pengelolaan Sistim Data Gender dan Anak



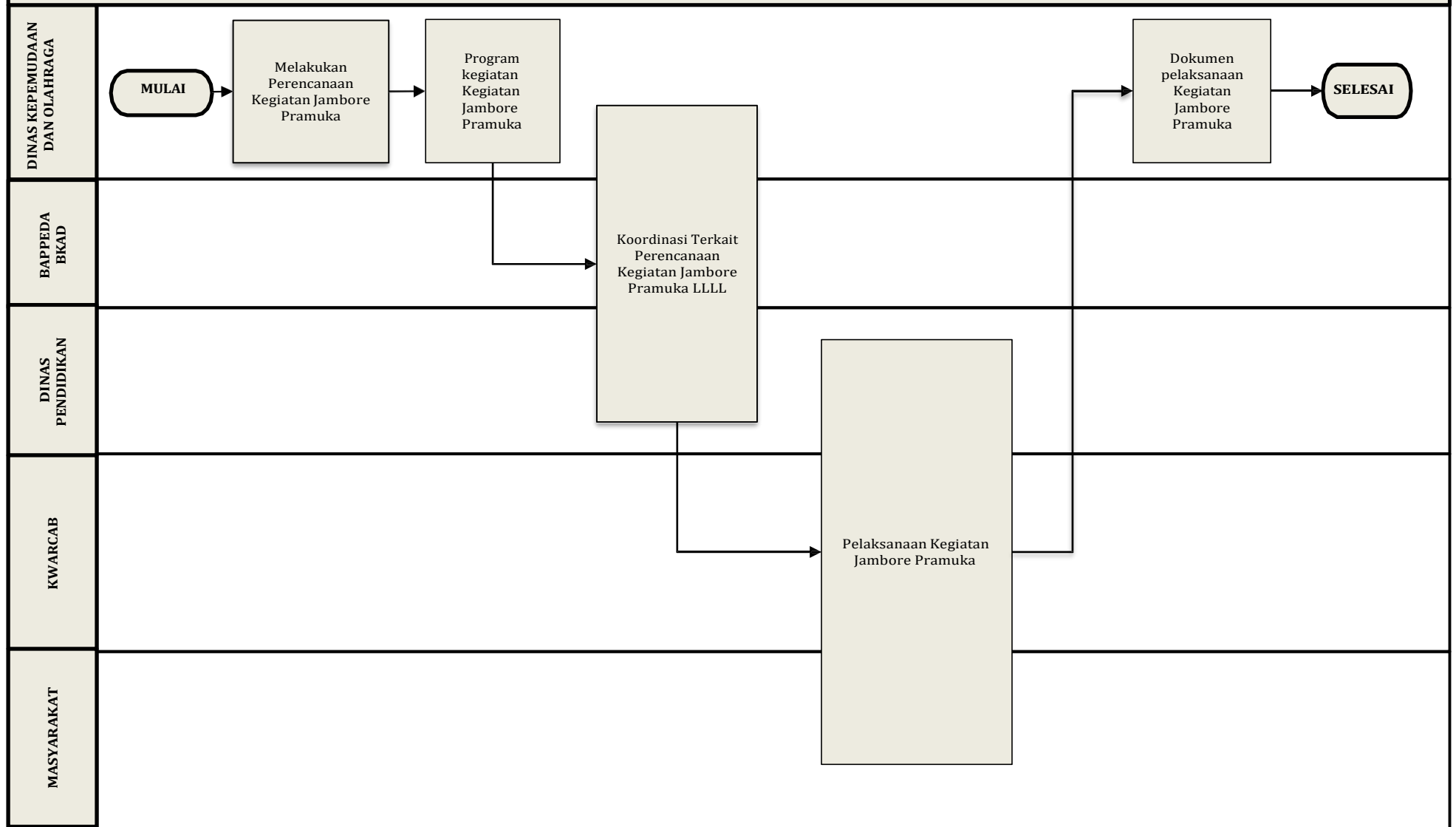
PETA LINTAS FUNGSI

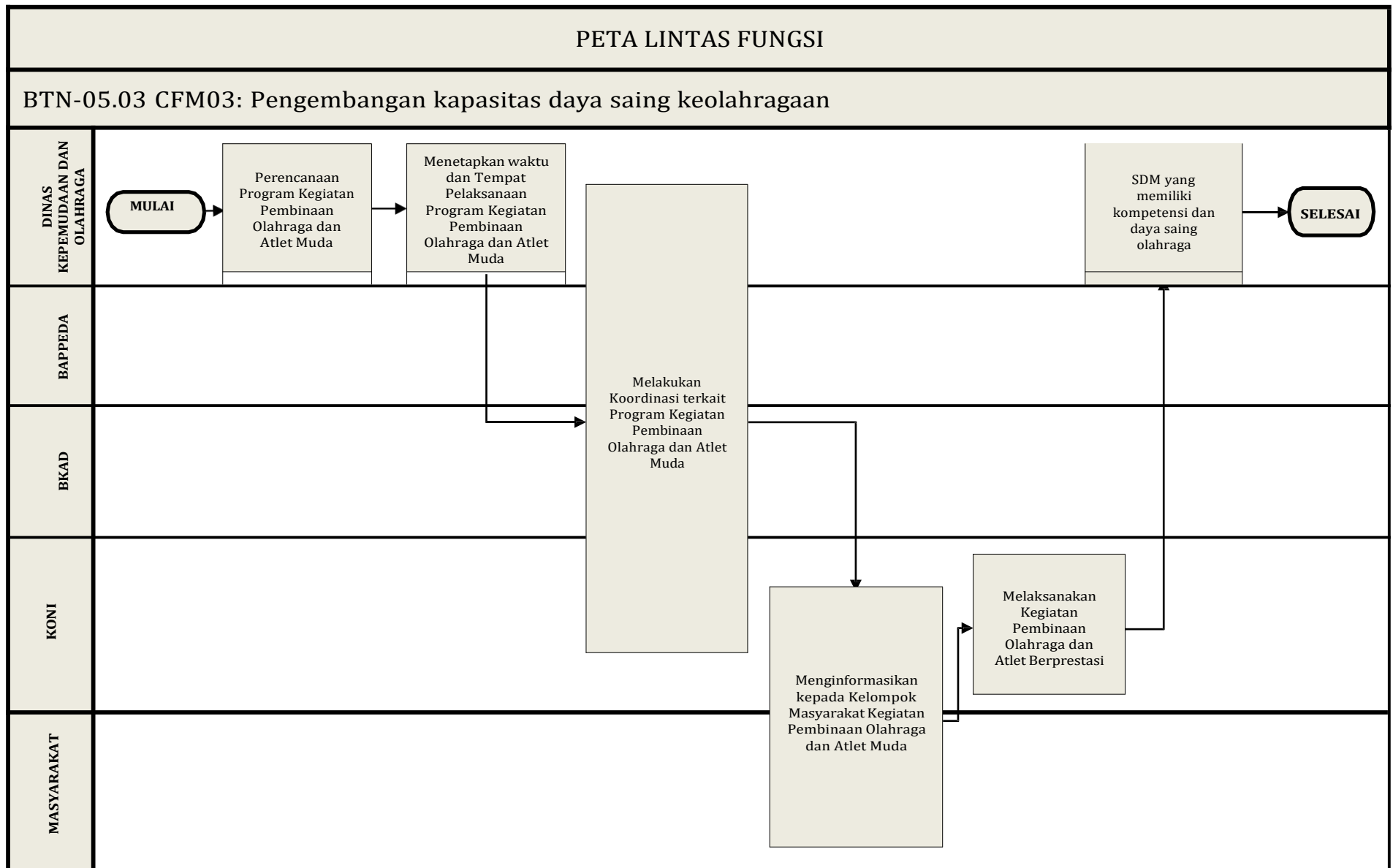
BTN-05.03 CFM01: Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan



PETA LINTAS FUNGSI

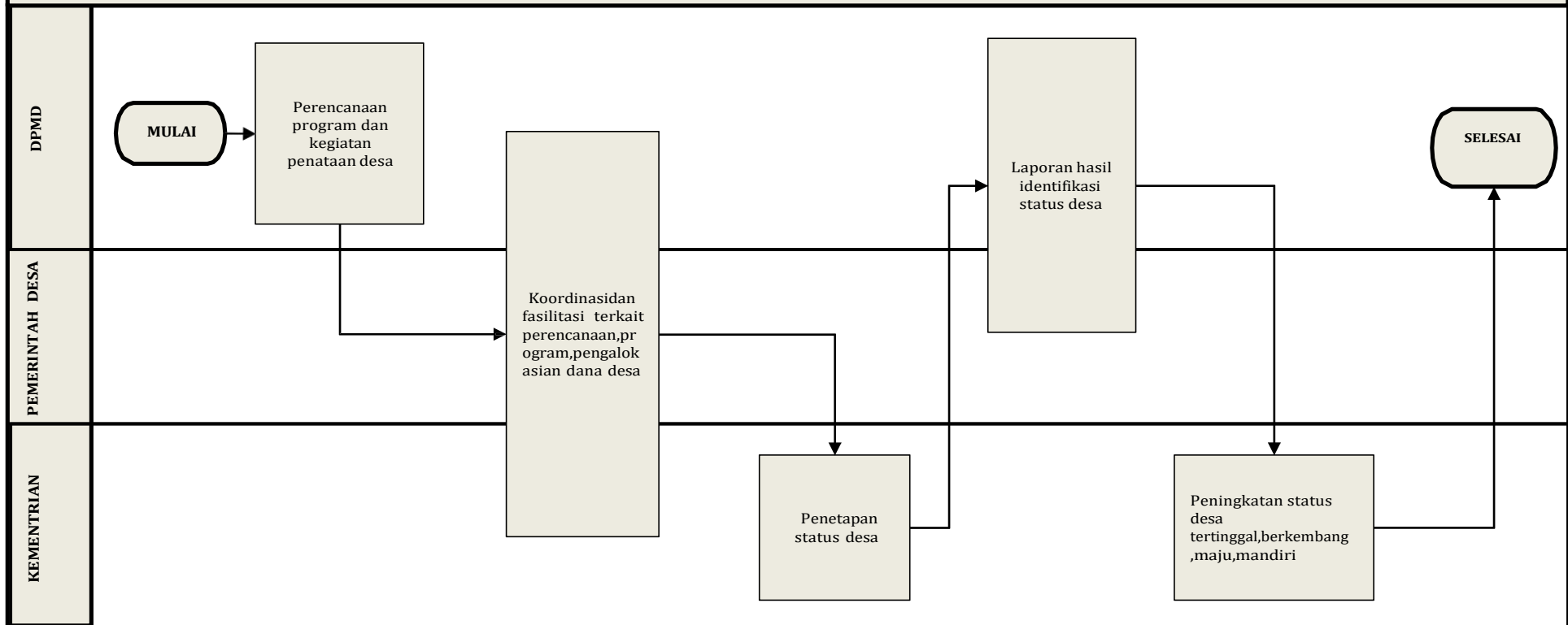
BTN-05.03 CFM02 : Pengembangan kapasitas kepramukaan





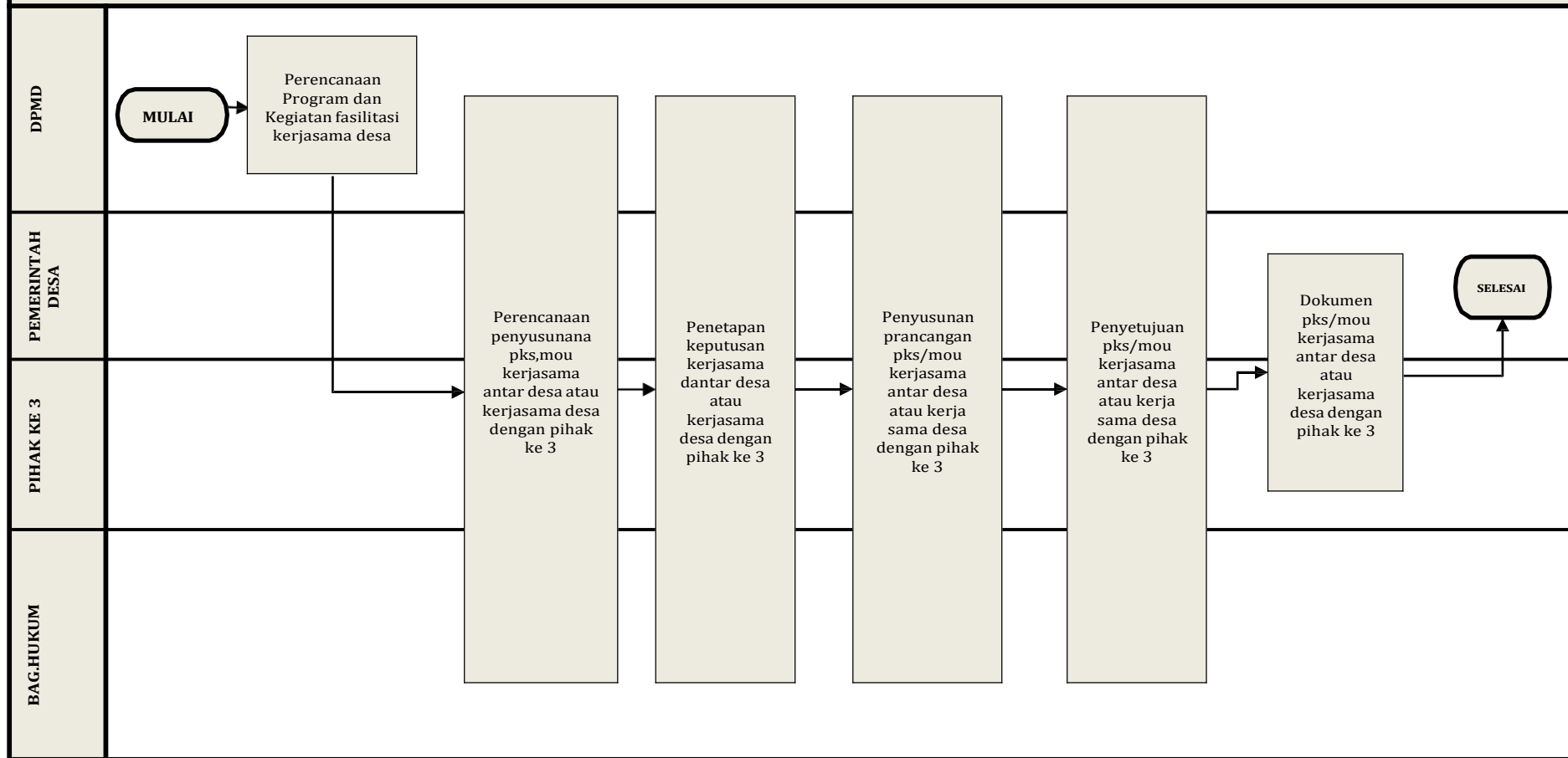
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-06.01 CFM01 : Penataan Desa



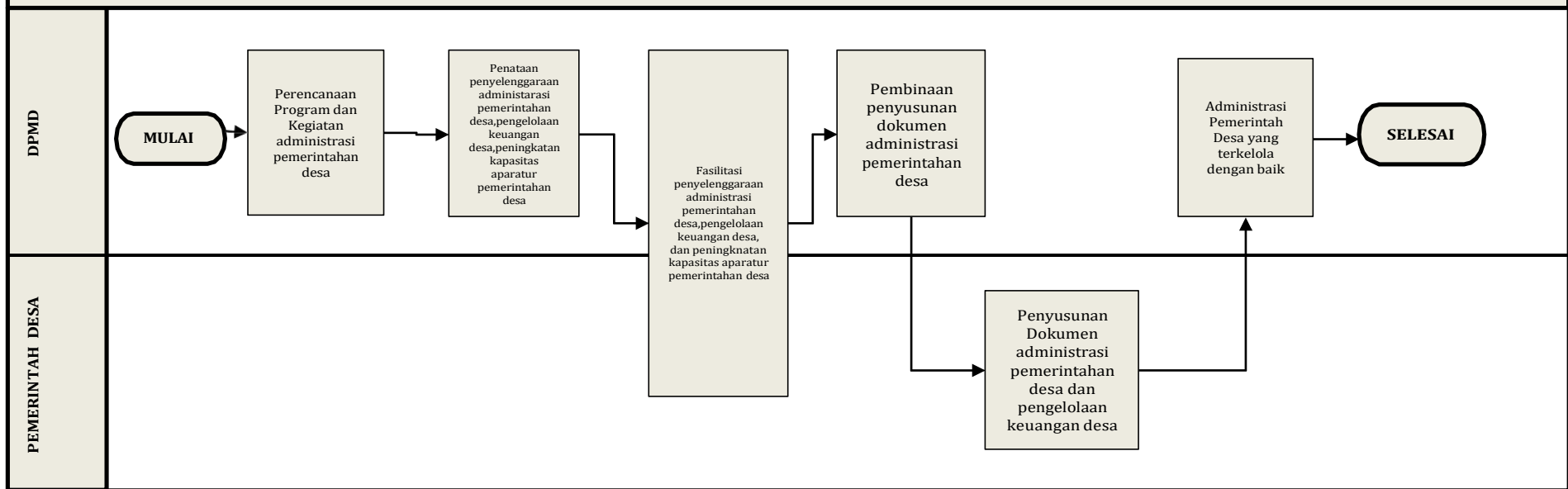
PETA LINTAS FUNGSI

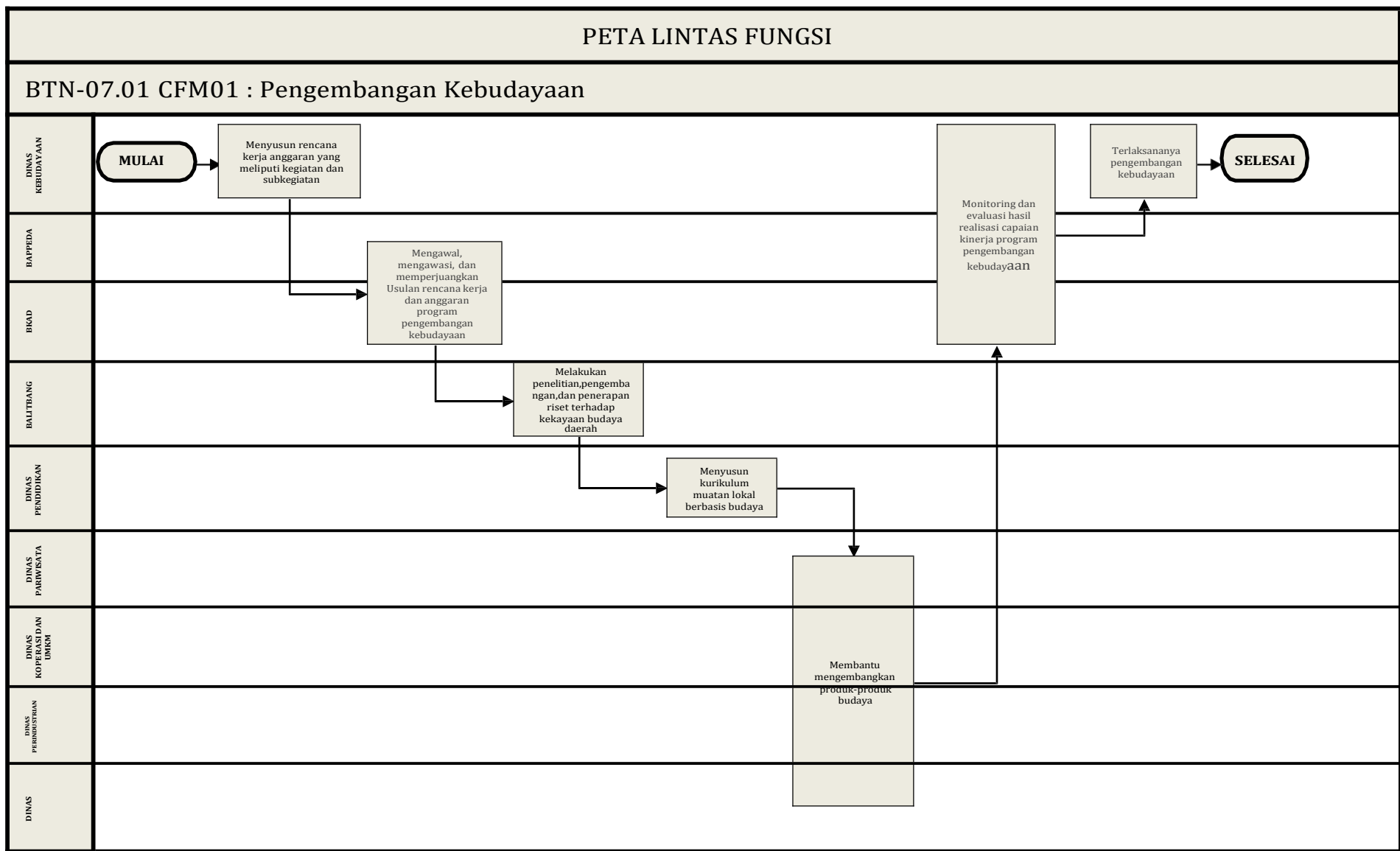
BTN-06.01 CFM02 : Peningkatan Kerjasama Desa



PETA LINTAS FUNGSI

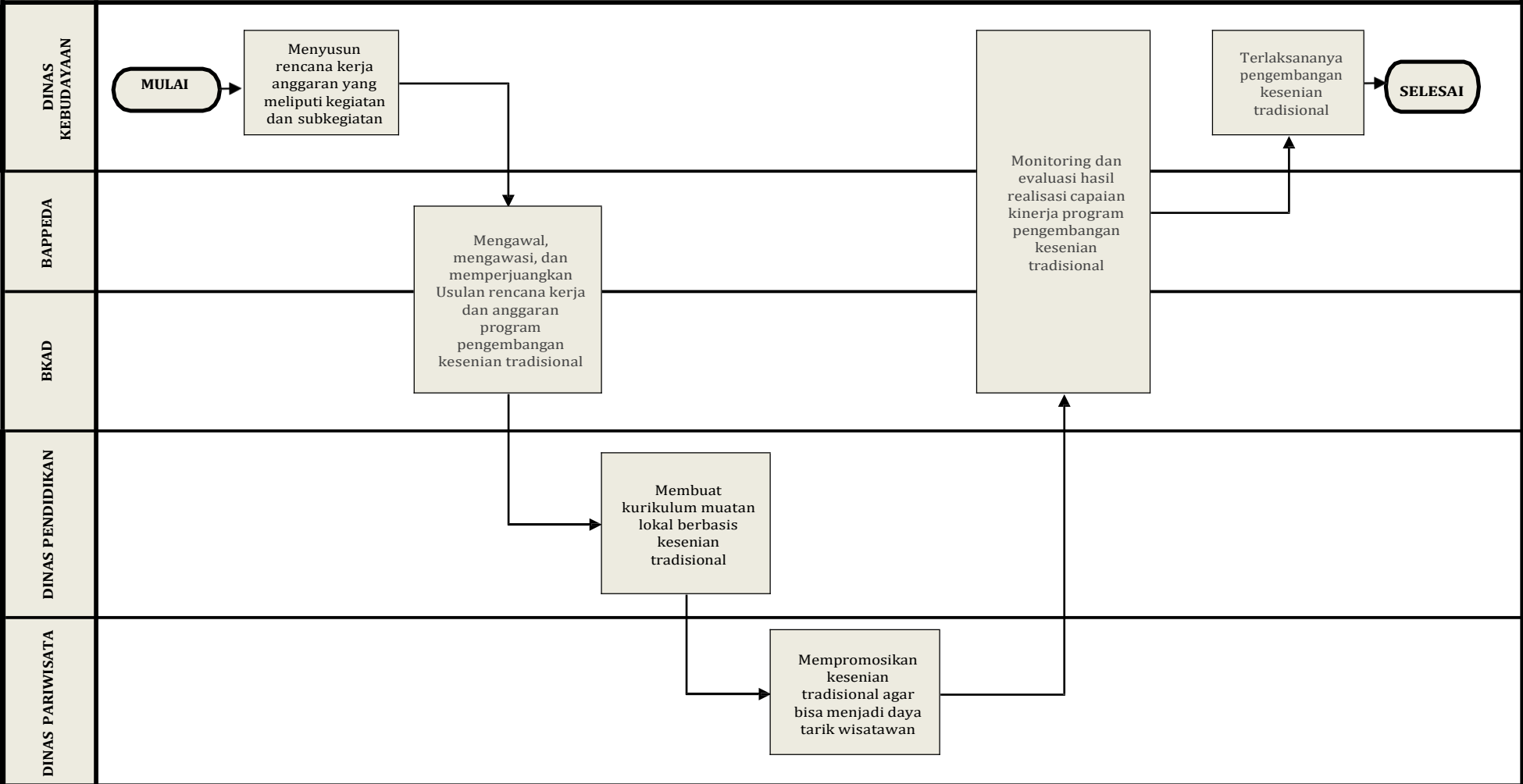
BTN-06.01 CFM03 : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

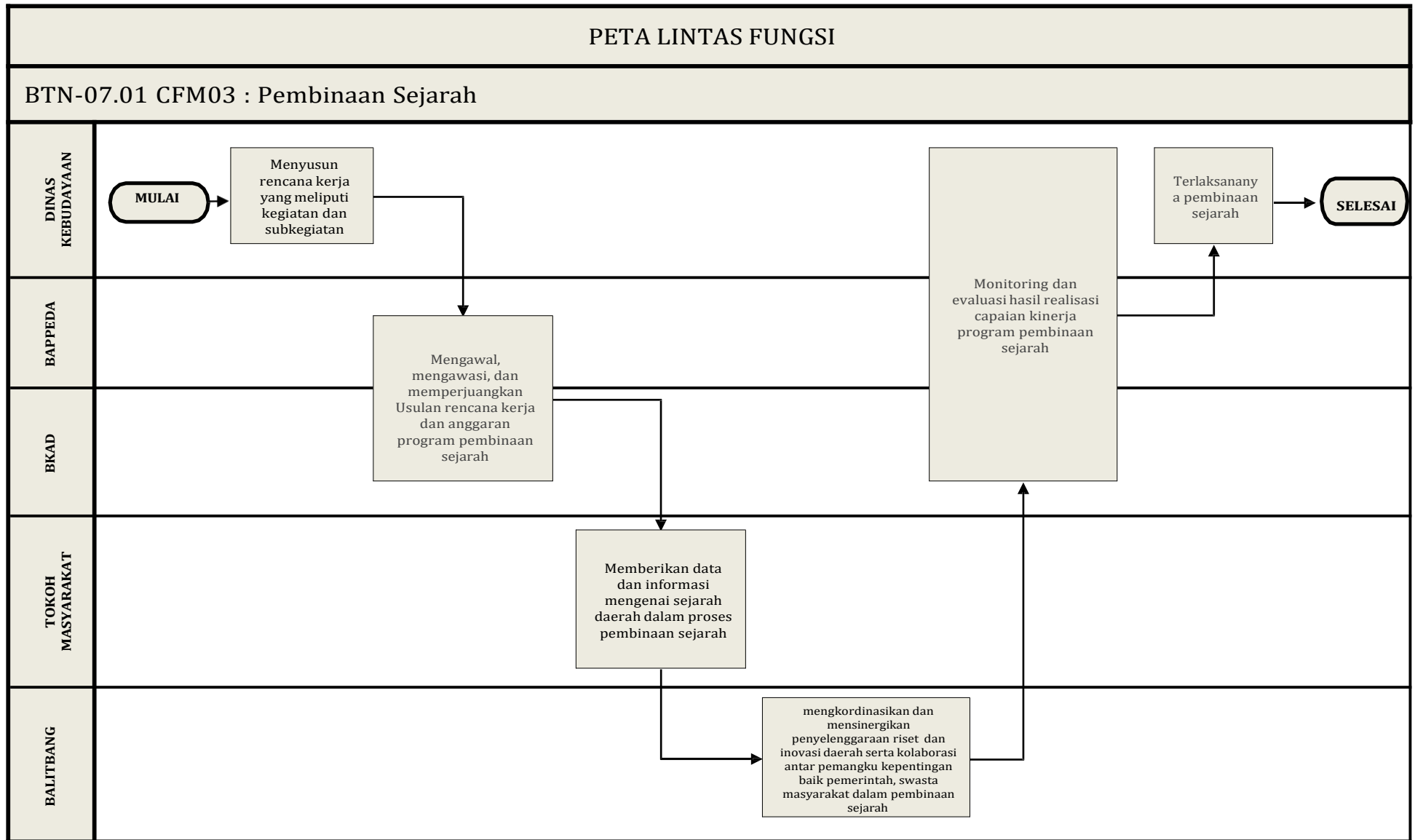


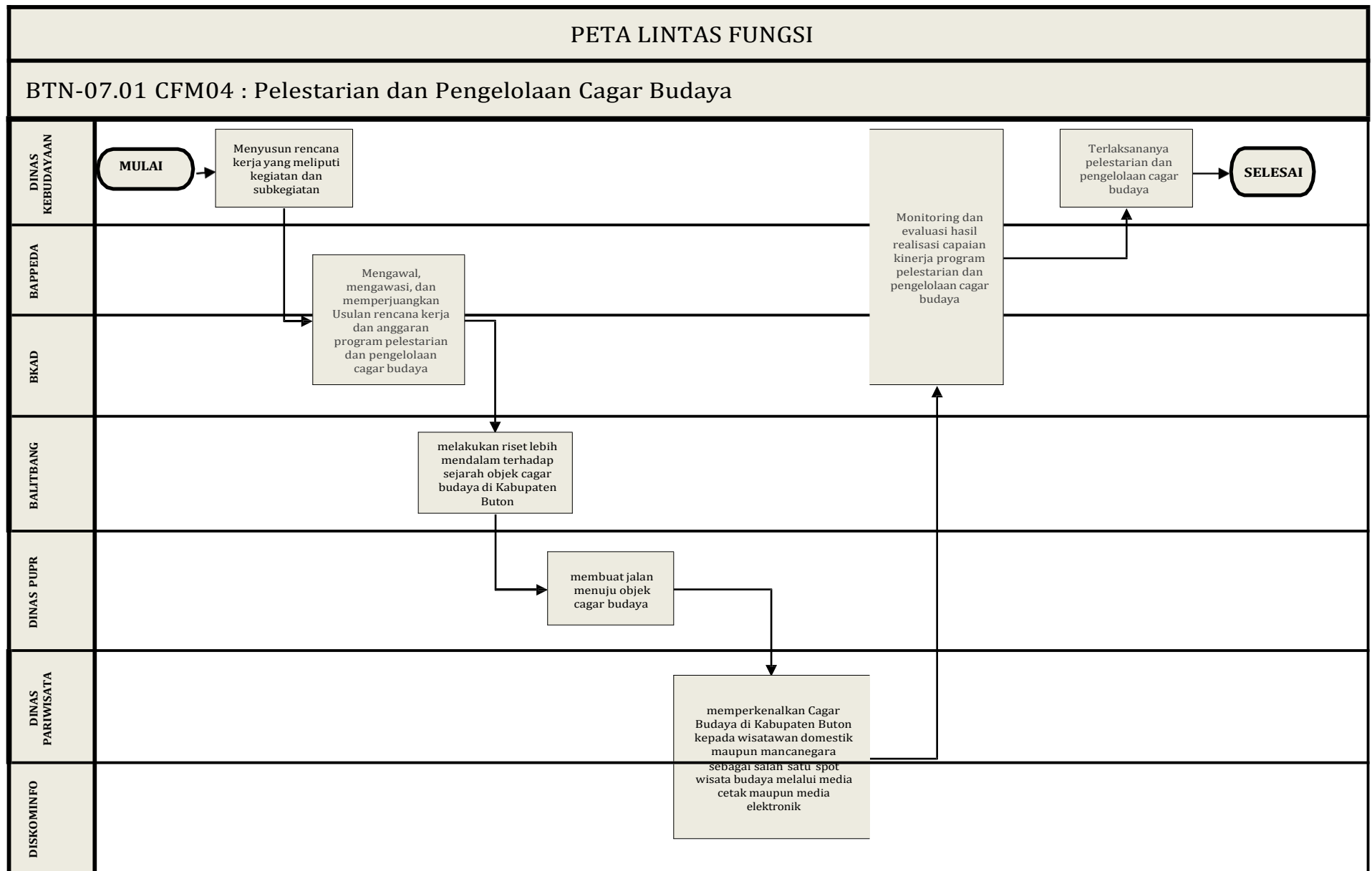


PETA LINTAS FUNGSI

BTN-07.01 CFM01 : Pengembangan Kesenian Tradisional

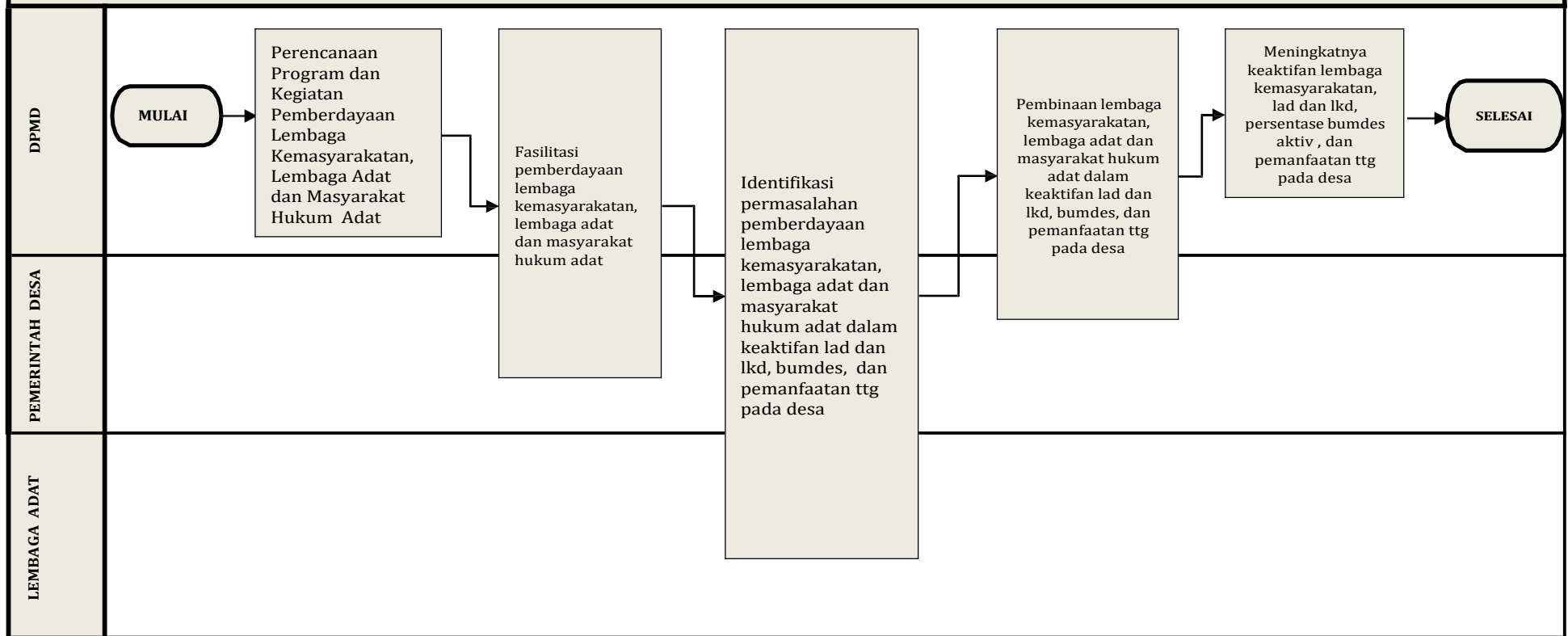






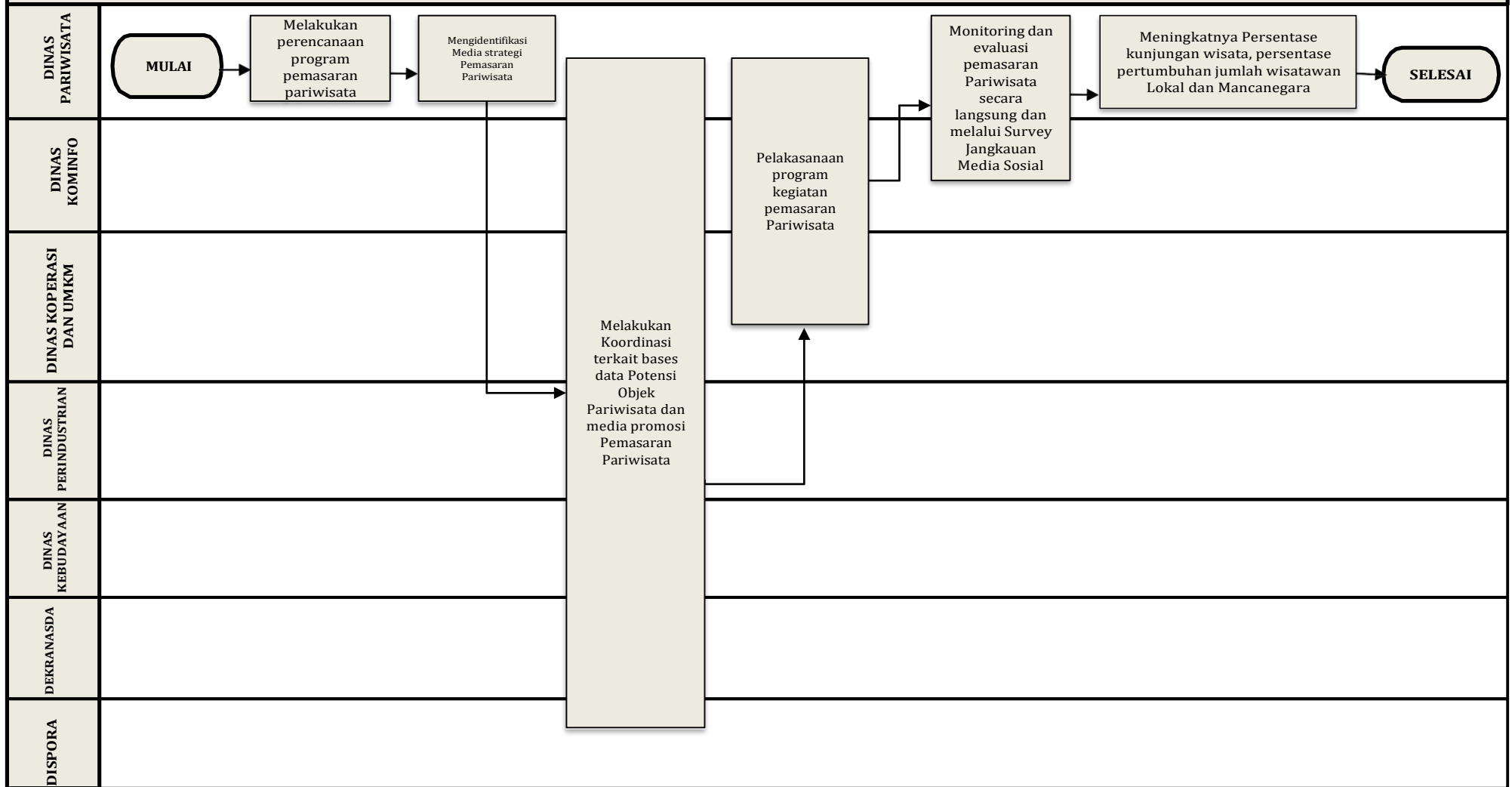
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-07.01 CFM05 : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat



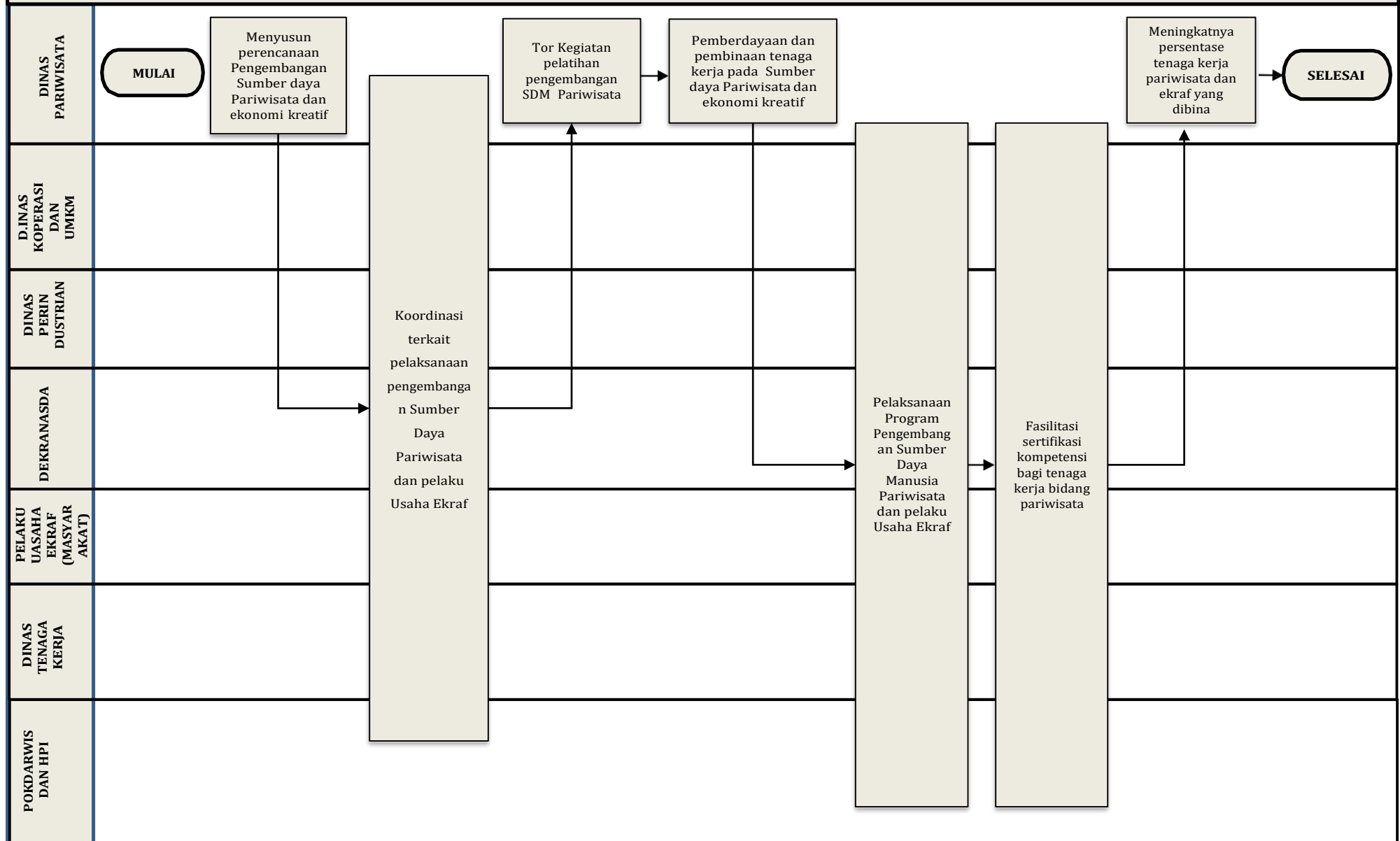
PETA LINTAS FUNGSI

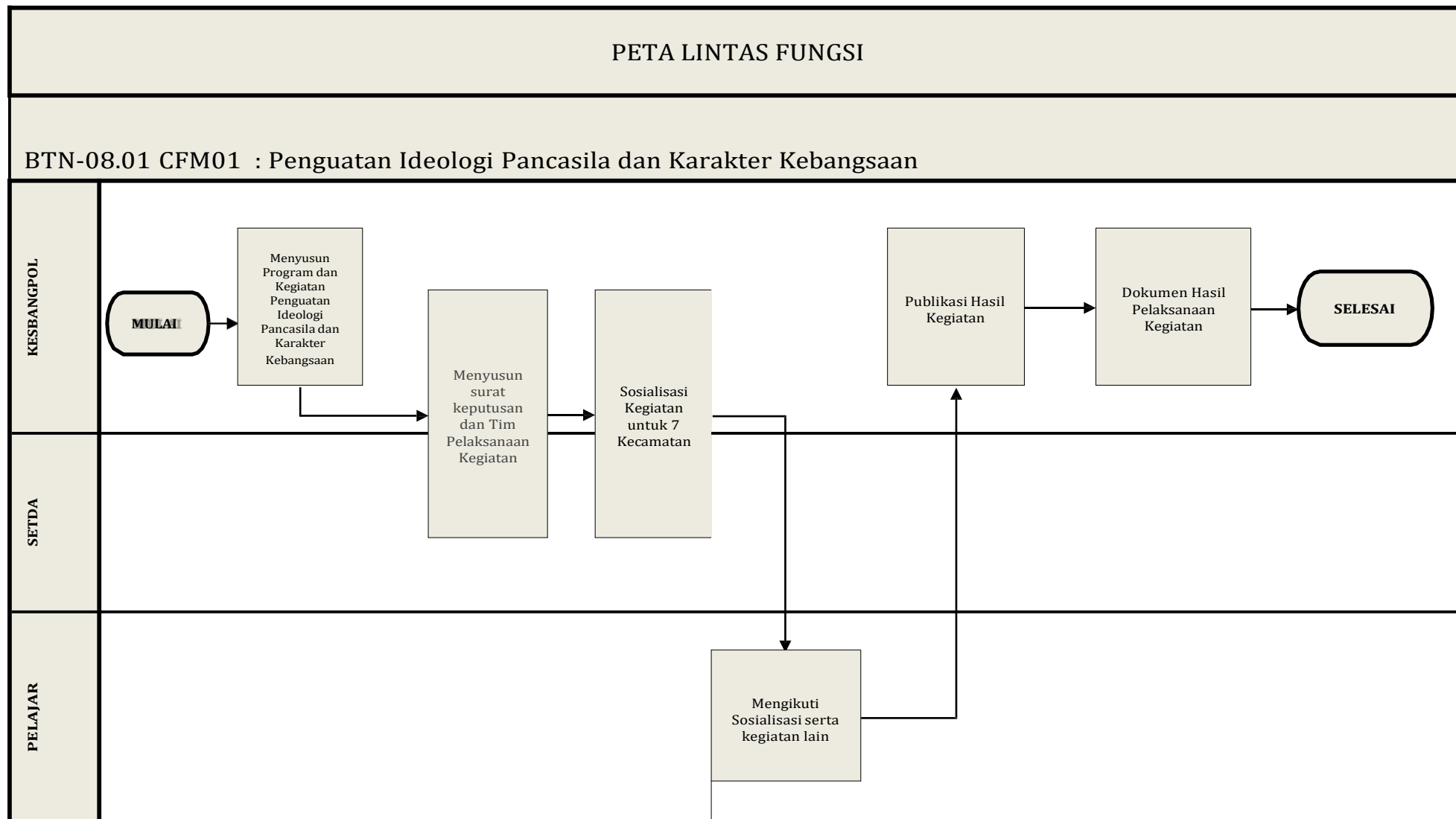
BTN-07.02 CFM01: Peningkatan Pemasaran Pariwisata



PETA LINTAS FUNGSI

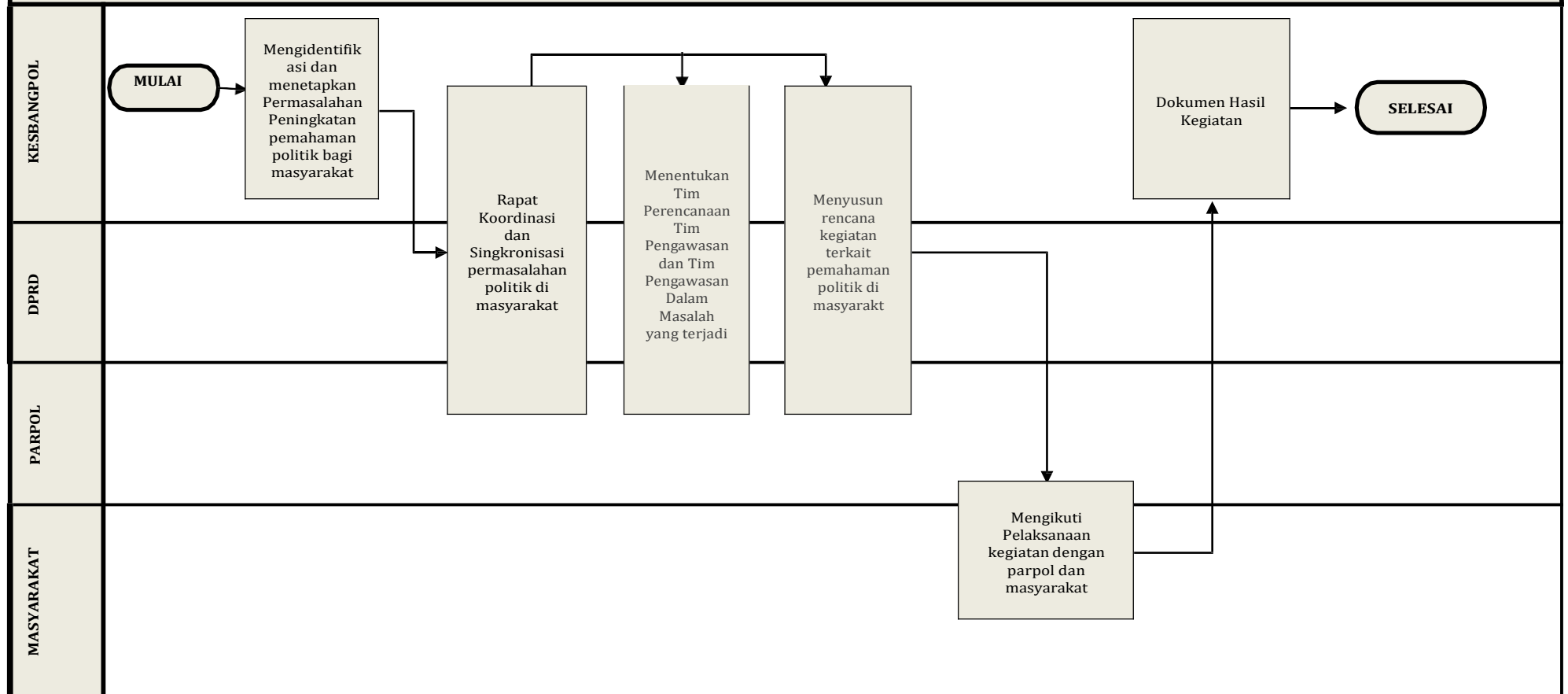
BTN-07.02 CFM02 : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

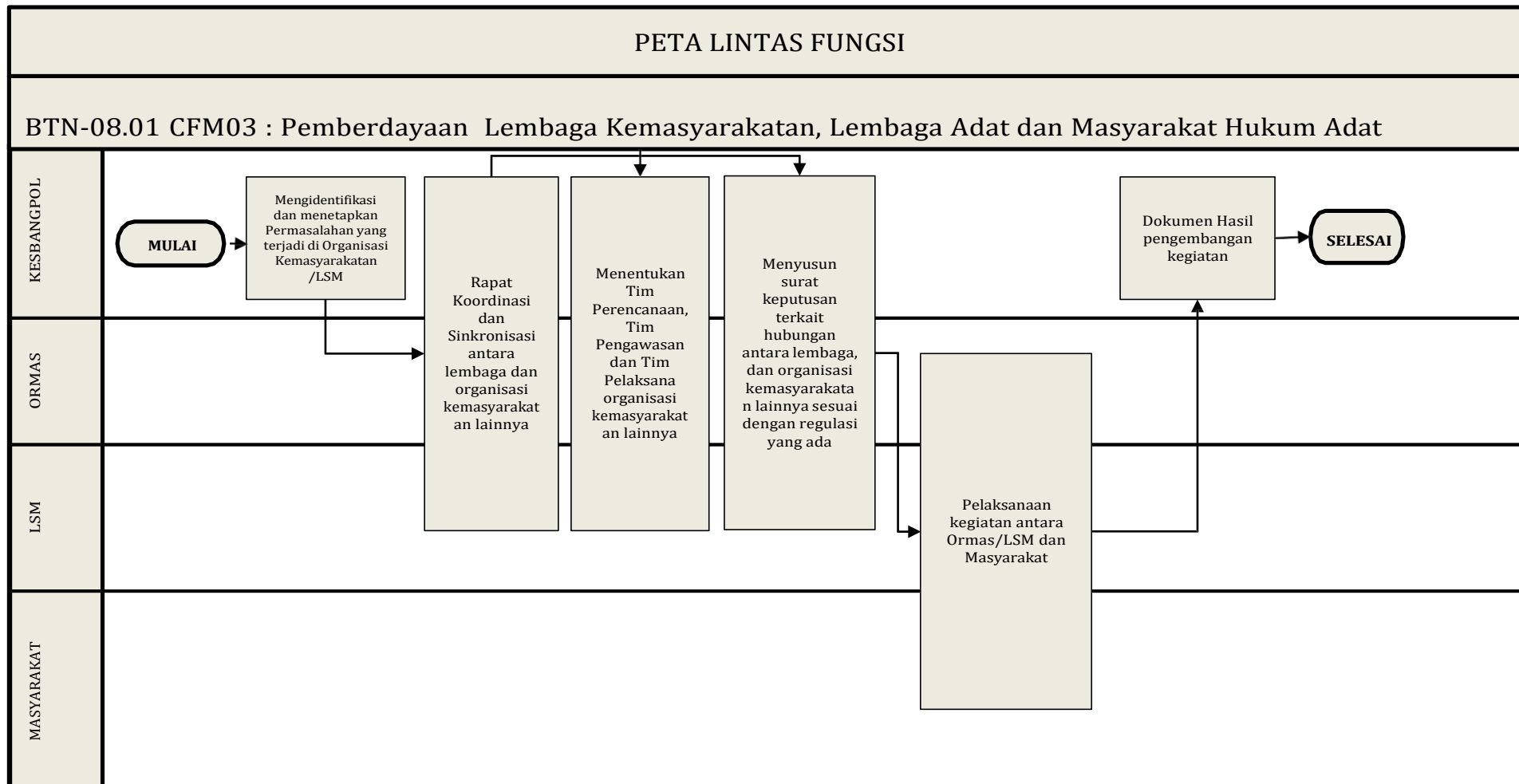


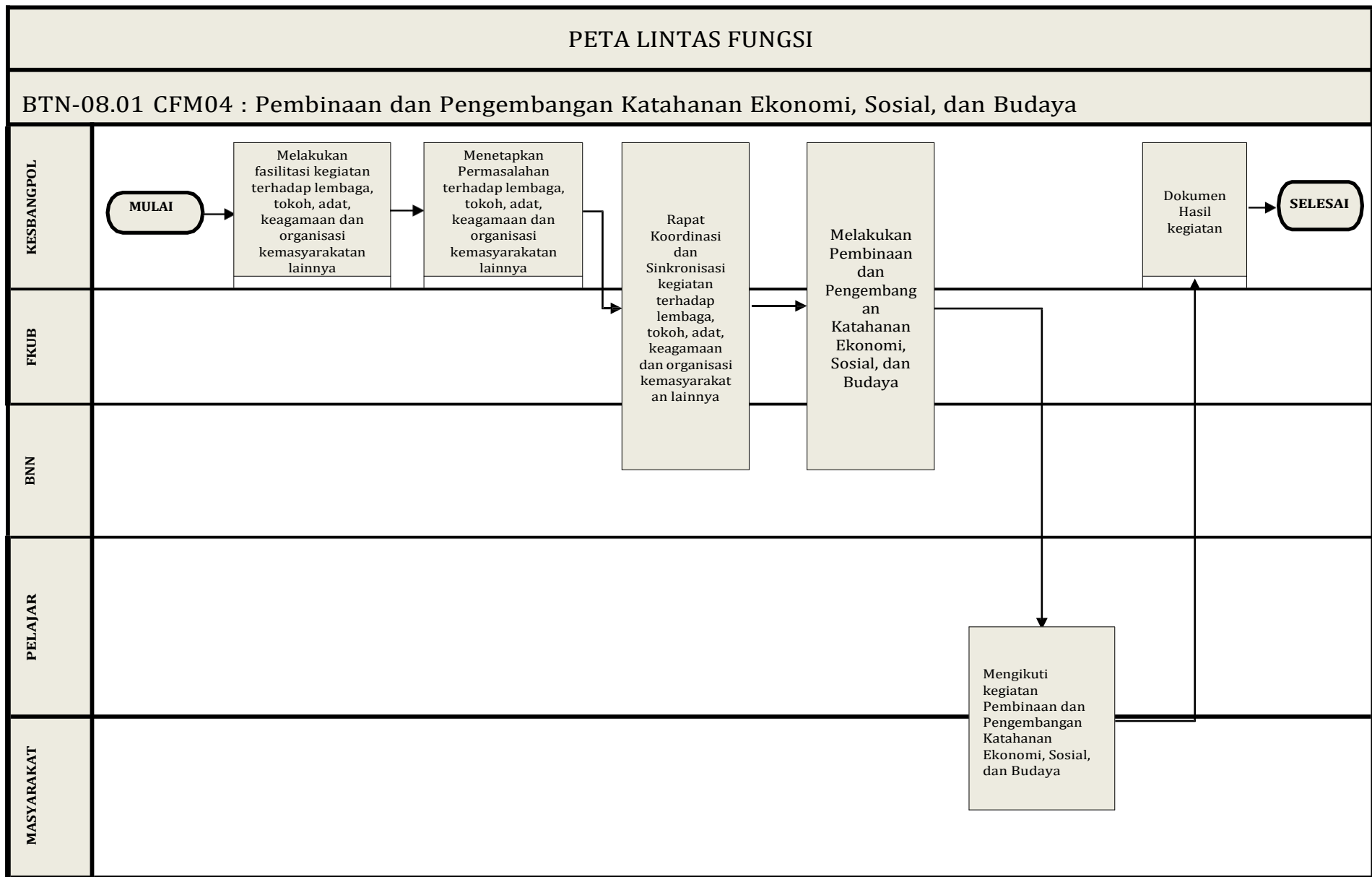


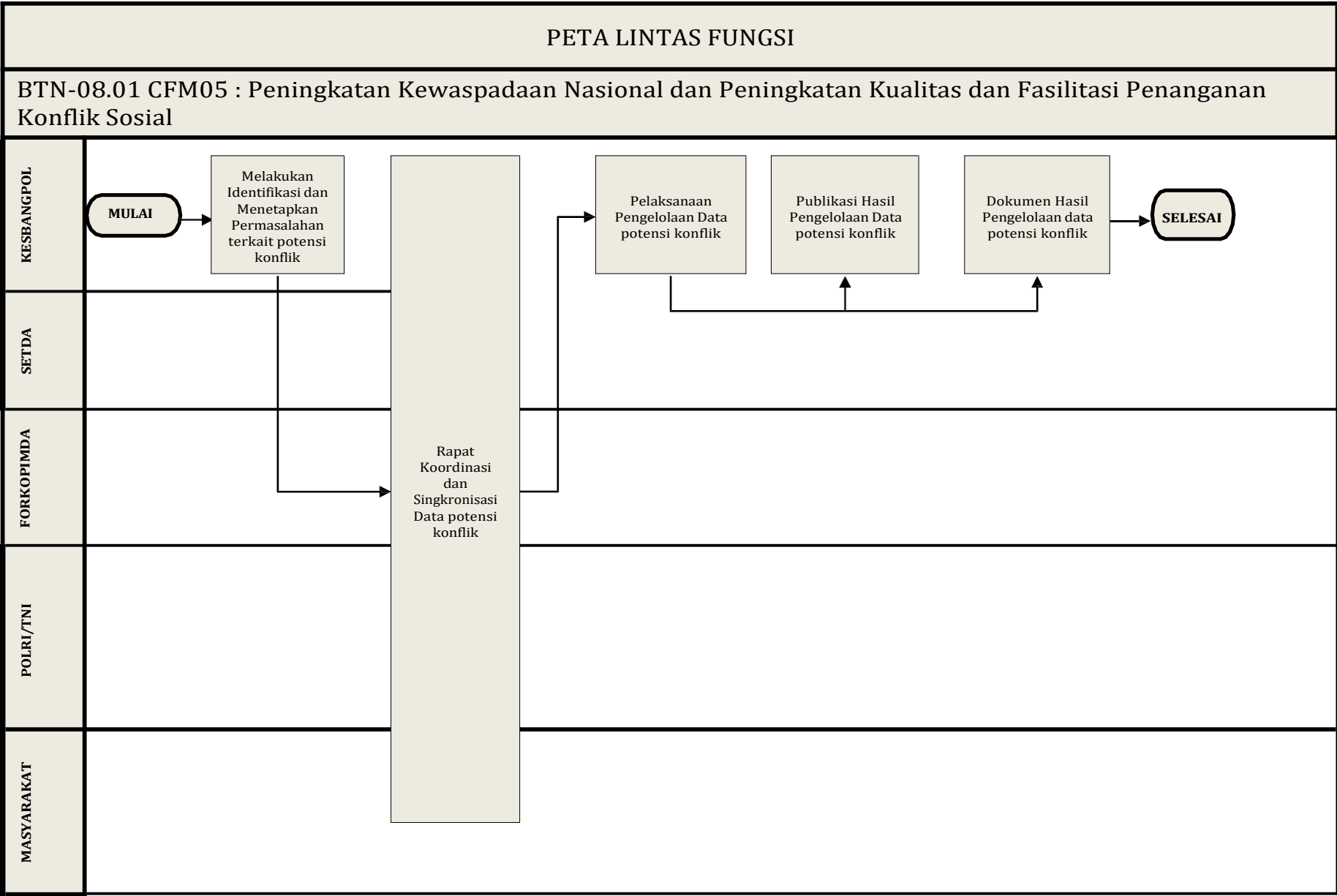
PETA LINTAS FUNGSI

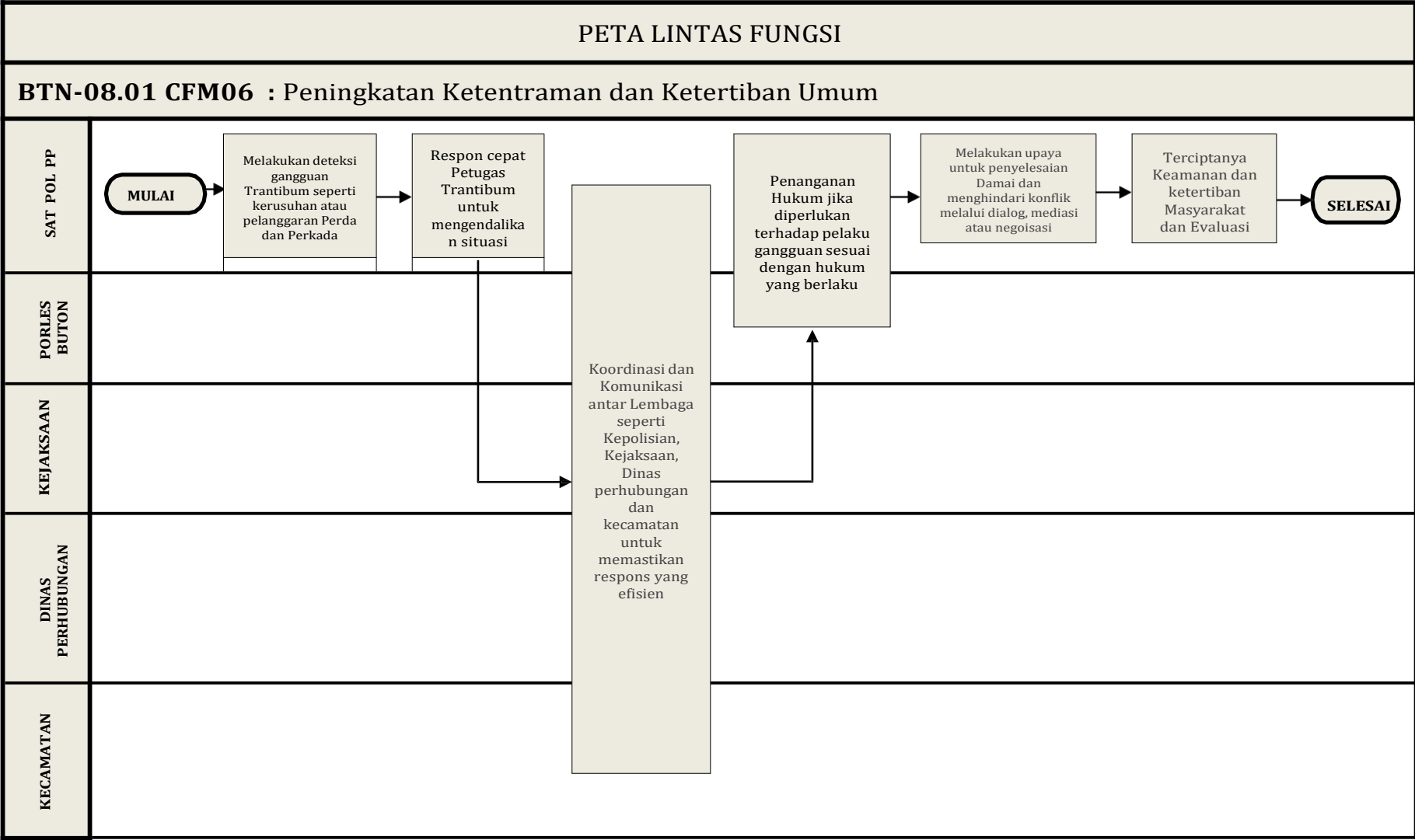
BTN-08.01 CFM02 : Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik





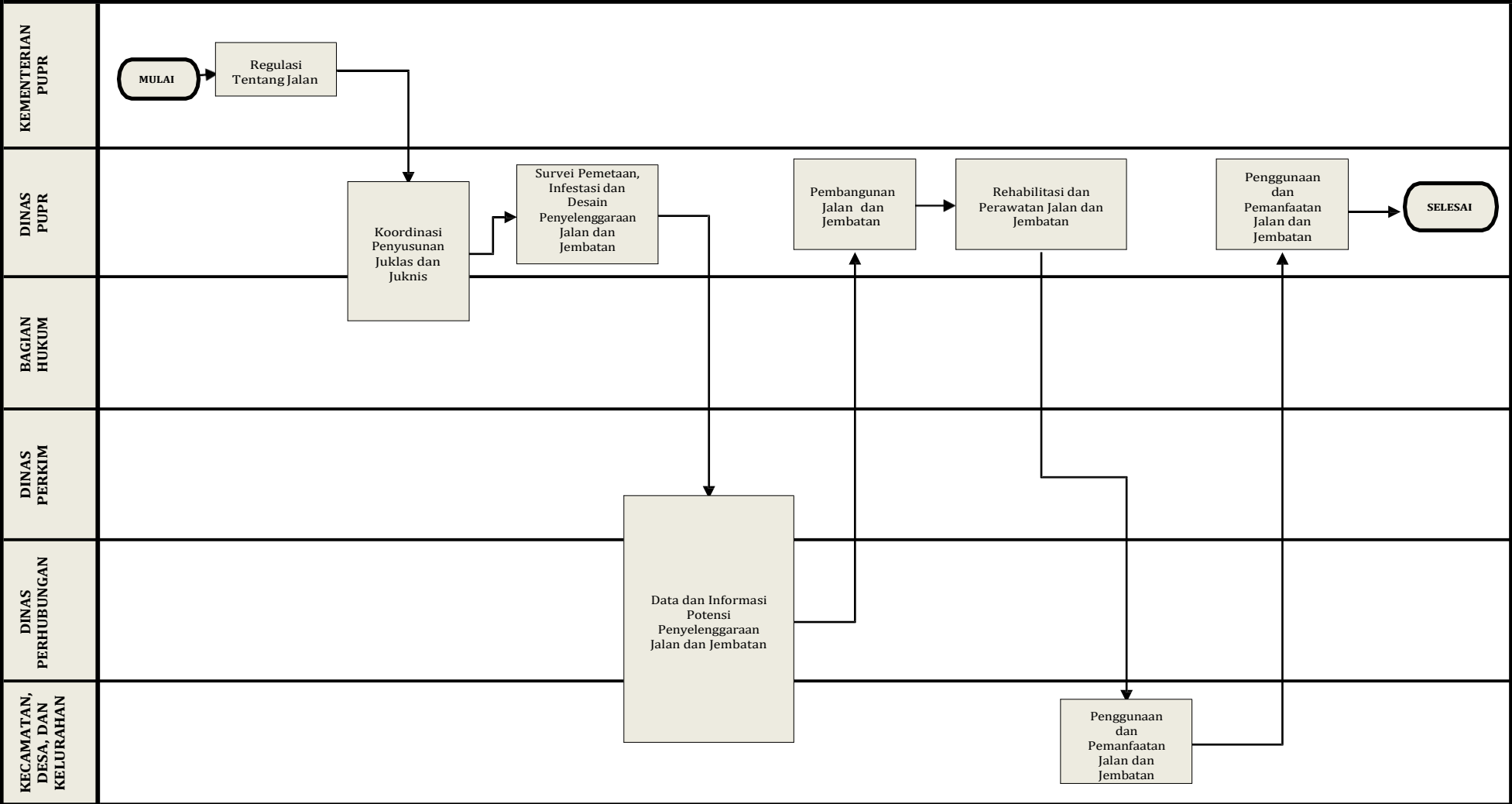






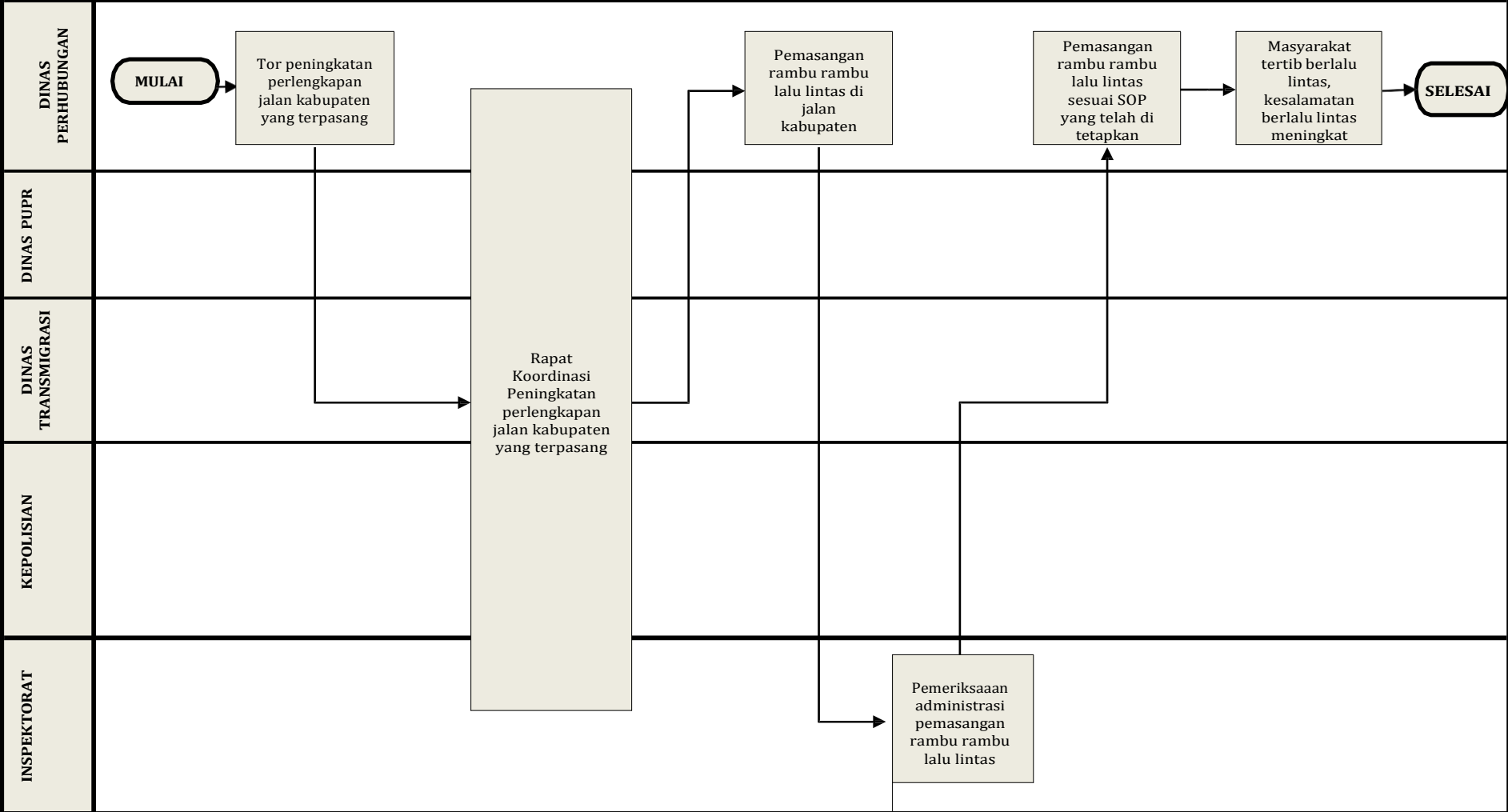
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-09.01 CFM01 : Peningkatan Penyelenggaraan Jalan



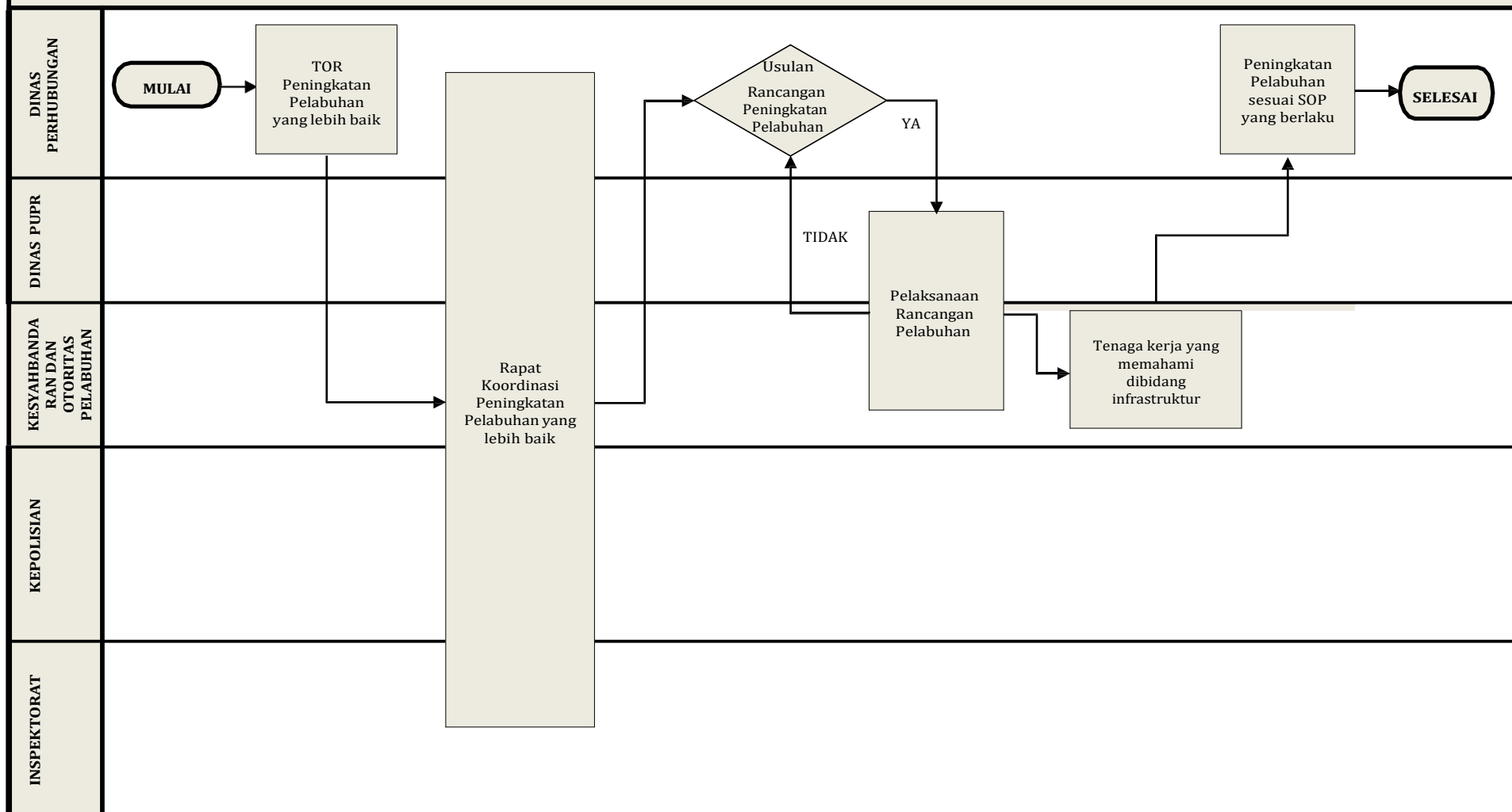
PETA LINTAS FUNGSI

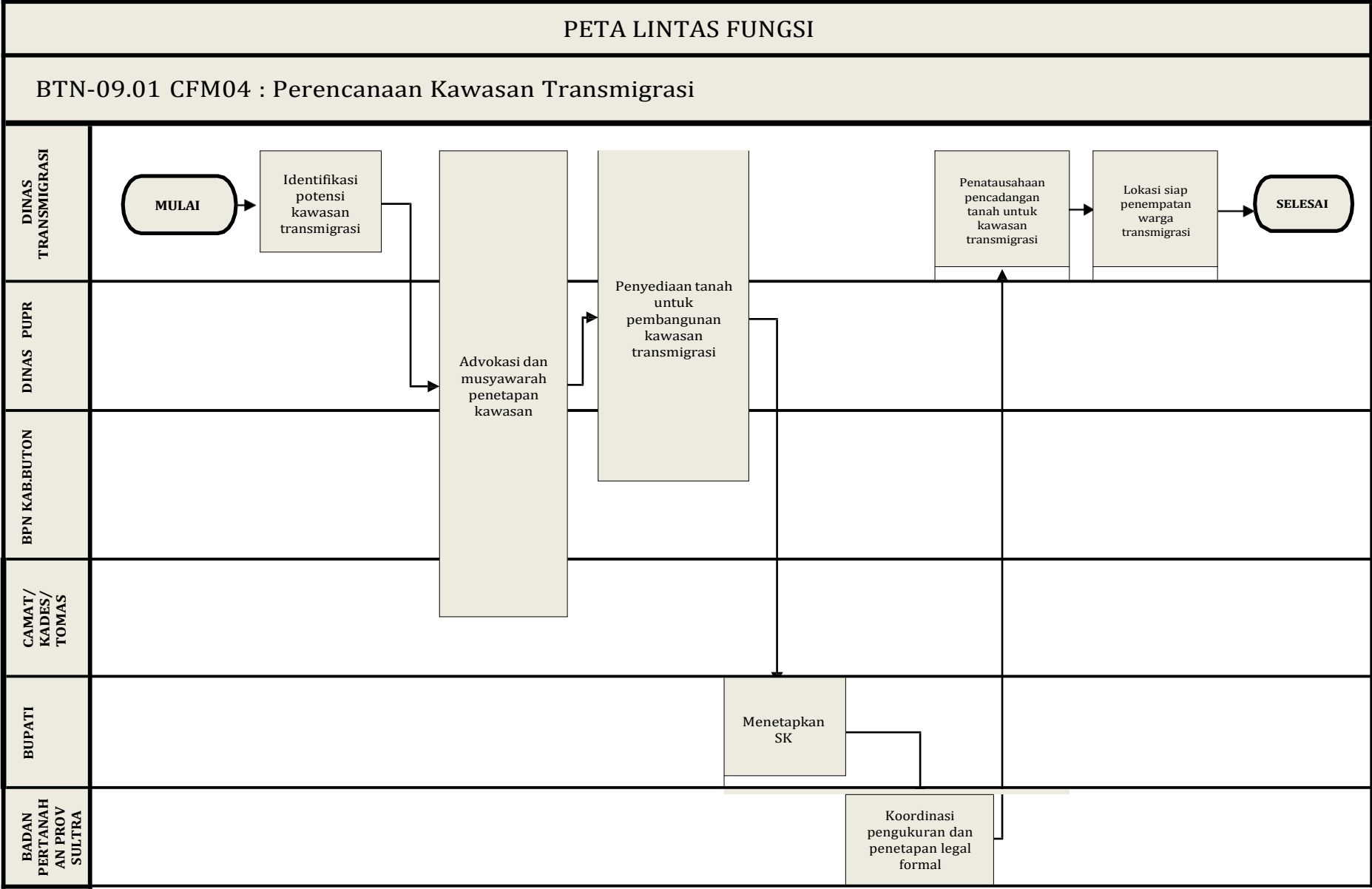
BTN-09.01 CFM02 : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)



PETA LINTAS FUNGSI

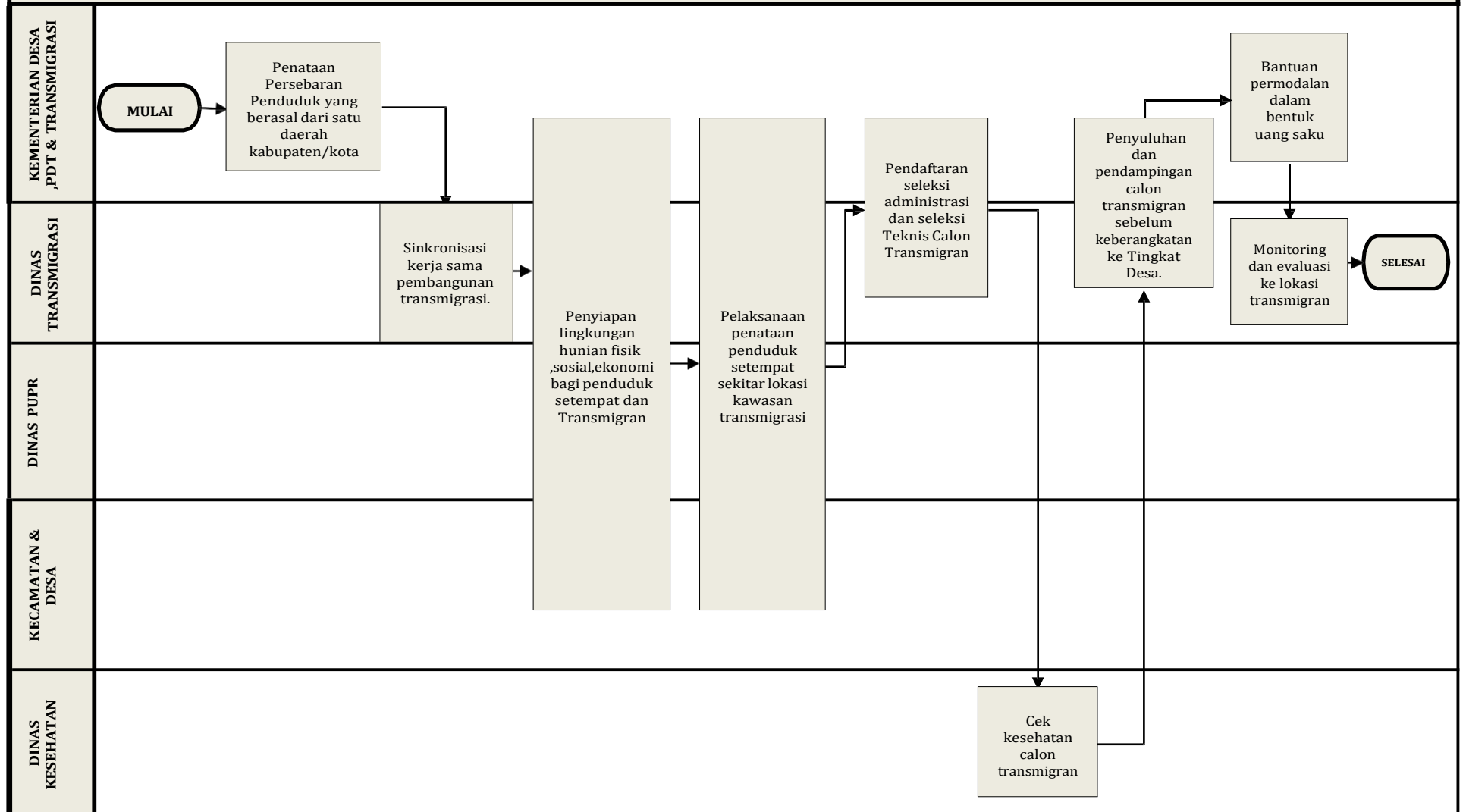
BTN-09.01 CFM03 : Pengelolaan Pelayaran





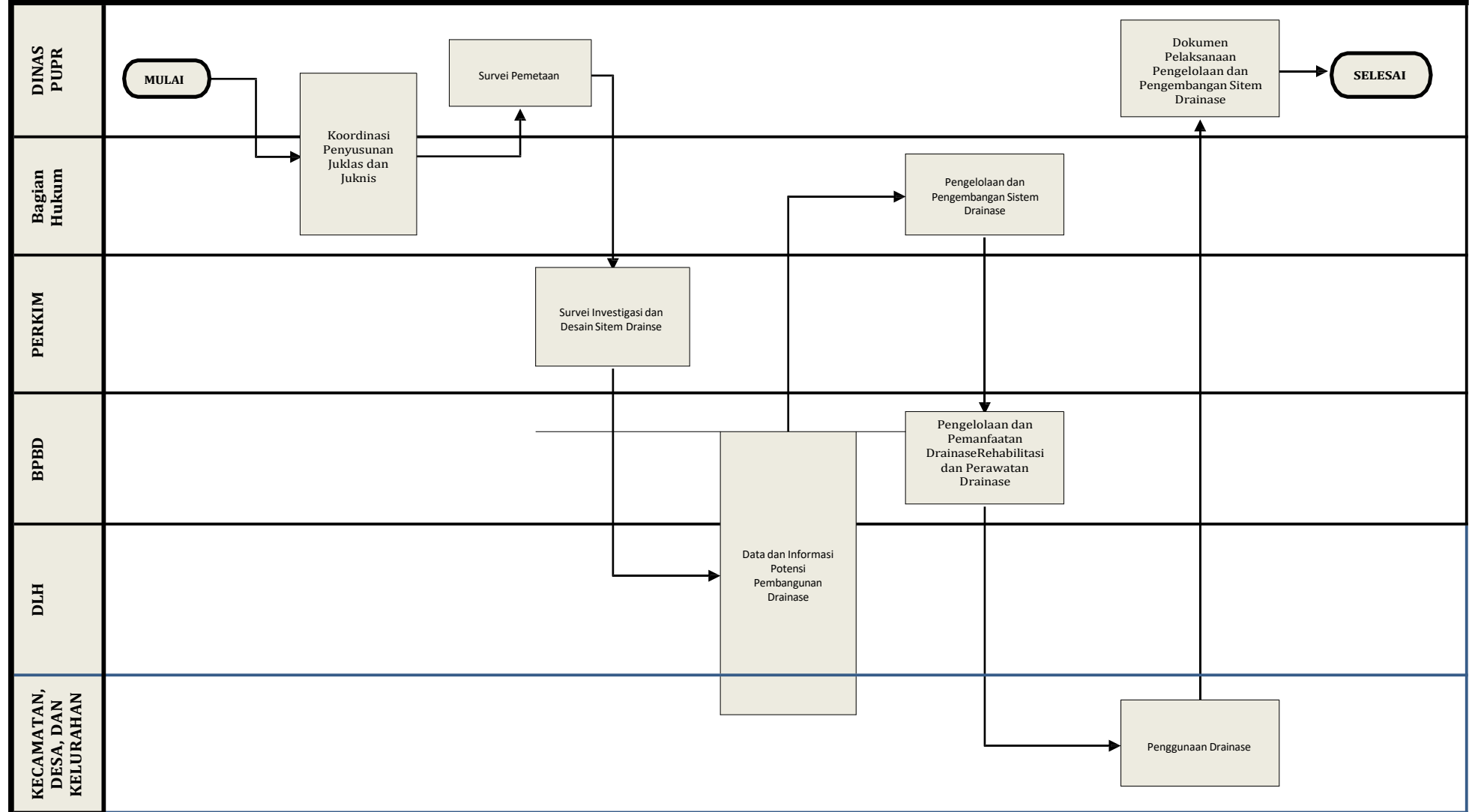
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-09.01 CFM05 : Pembangunan Kawasan Transmigrasi

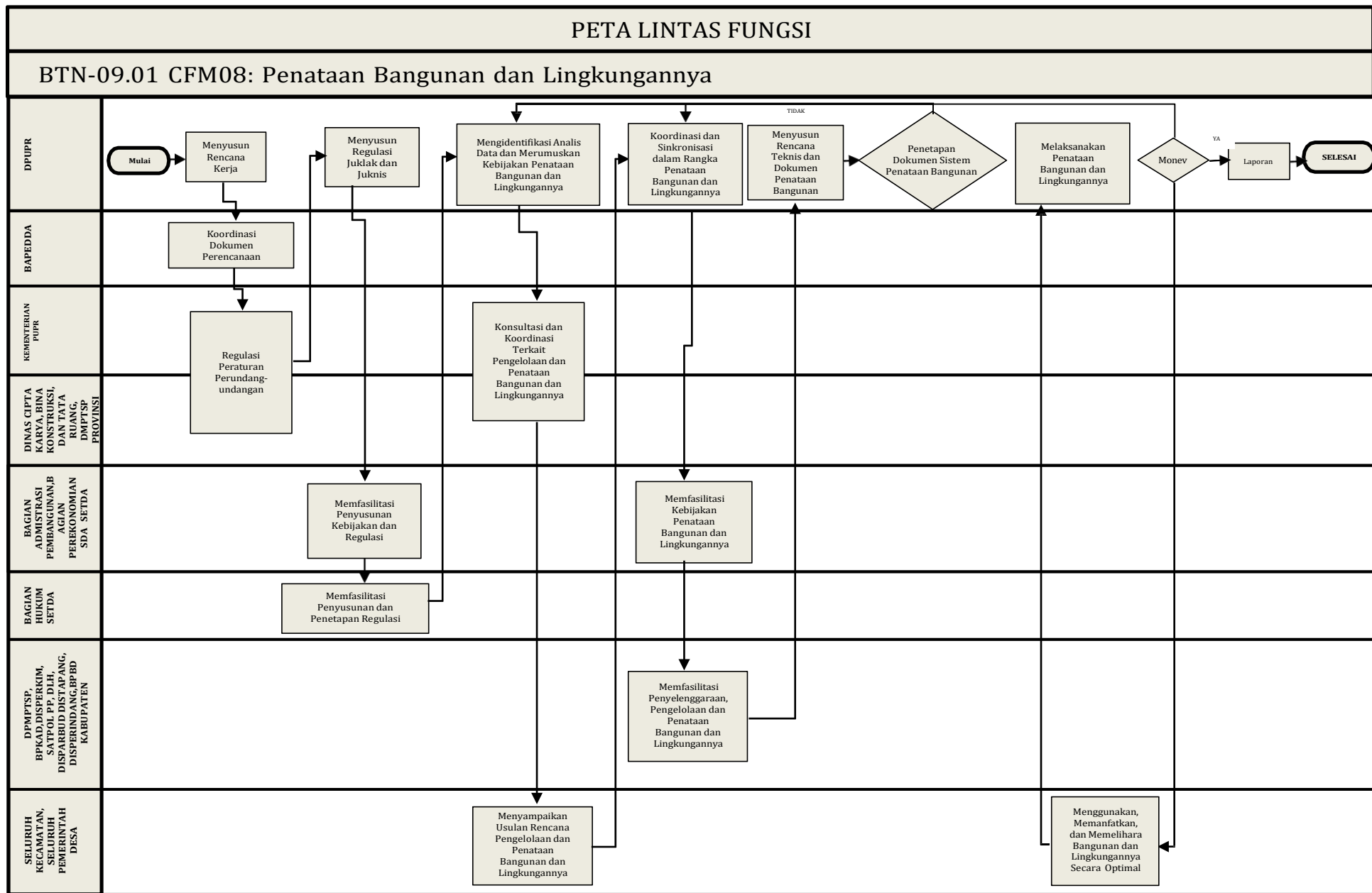


PETA LINTAS FUNGSI

BTN-09.01 CFM06 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

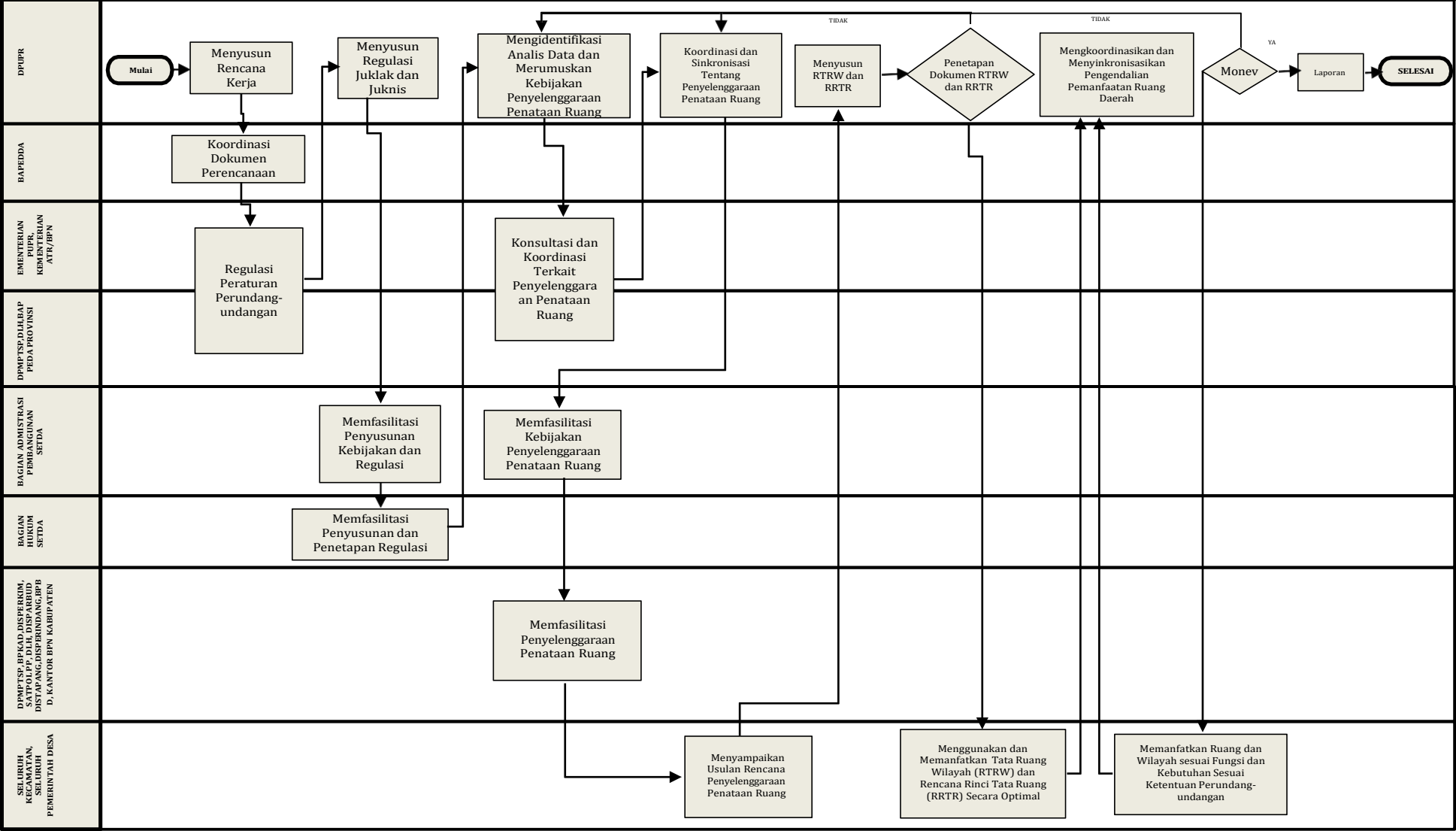


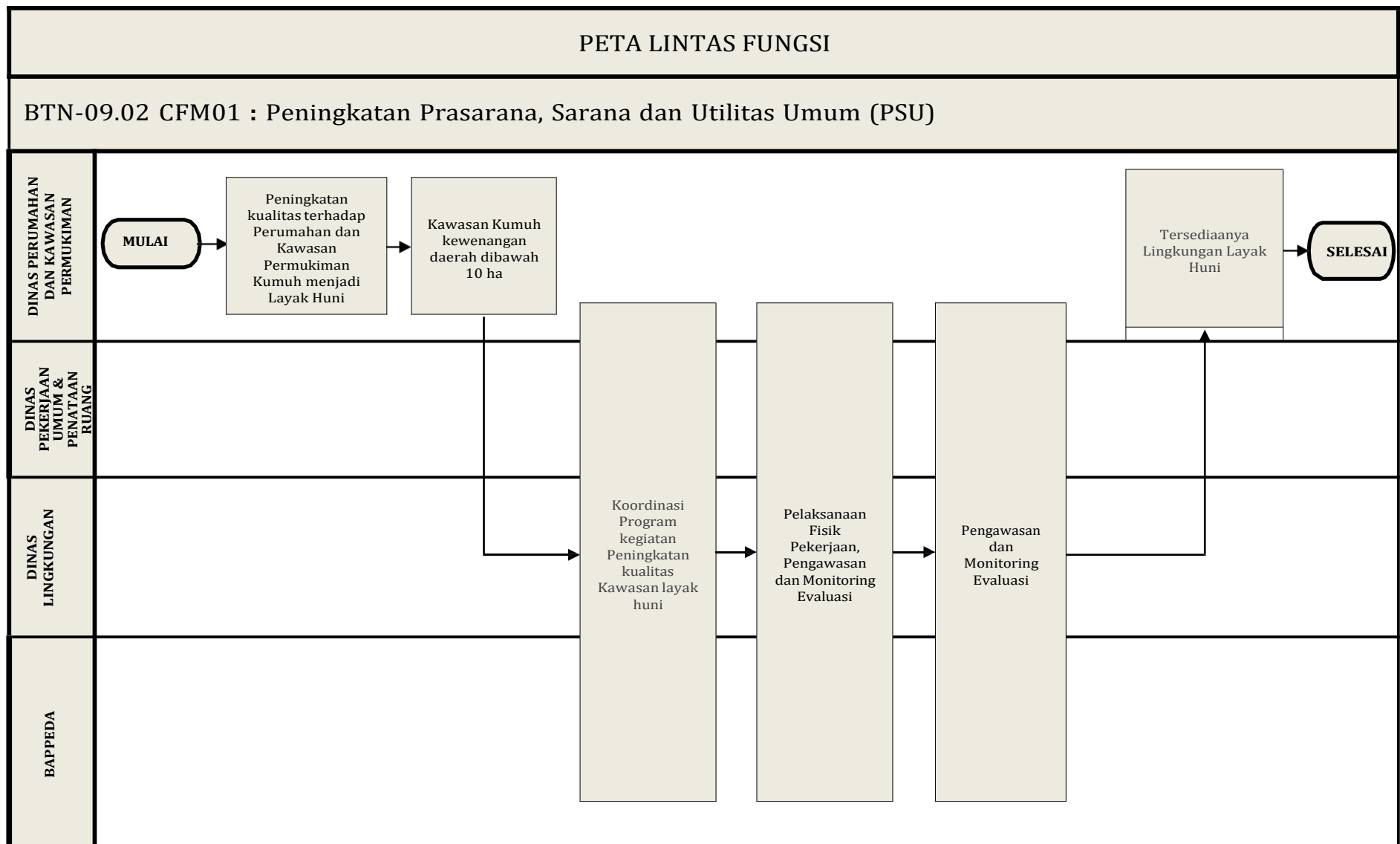
PETA LINTAS FUNGSI									
BTN-09.01 CFM07 : Penataan Bangunan Gedung									
DPUPR	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> S1[Menyusun Rencana Kerja] S1 --> S2[Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis] S2 --> S3[Mengidentifikasi Analisis Data dan Merumuskan Kebijakan Penataan Bangunan Gedung] S3 --> S4[Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penataan Bangunan Gedung] S4 --> S5[Memproses dan menerbitkan rekomendasi PBG dan SLF Bangunan Gedung] S5 --> S6[Melaksanakan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Gedung] S6 --> S7[Melaksanakan Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung] S7 --> D1{Money} D1 -- YA --> L1[Laporan] D1 -- TIDAK --> S5 S7 -- TIDAK --> S5 S7 --> M1[Monev] M1 --> L1 L1 --> SELESAI([SELESAI]) </pre>								
BAPEDDA									
KEMENTERIAN PUPR									
DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN PERENCANAAN DMTSP PROVINSI									
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA									
BAGIAN HUKUM SETDA									
BPKAD, DISPERKIM, SATPOL PP, DLH, DISKAMINFO, DISTAN, DISPE, RINDANG, BPBD KABUPATEN									
DPMPPTSP									
SELURUH KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA									



PETA LINTAS FUNGSI

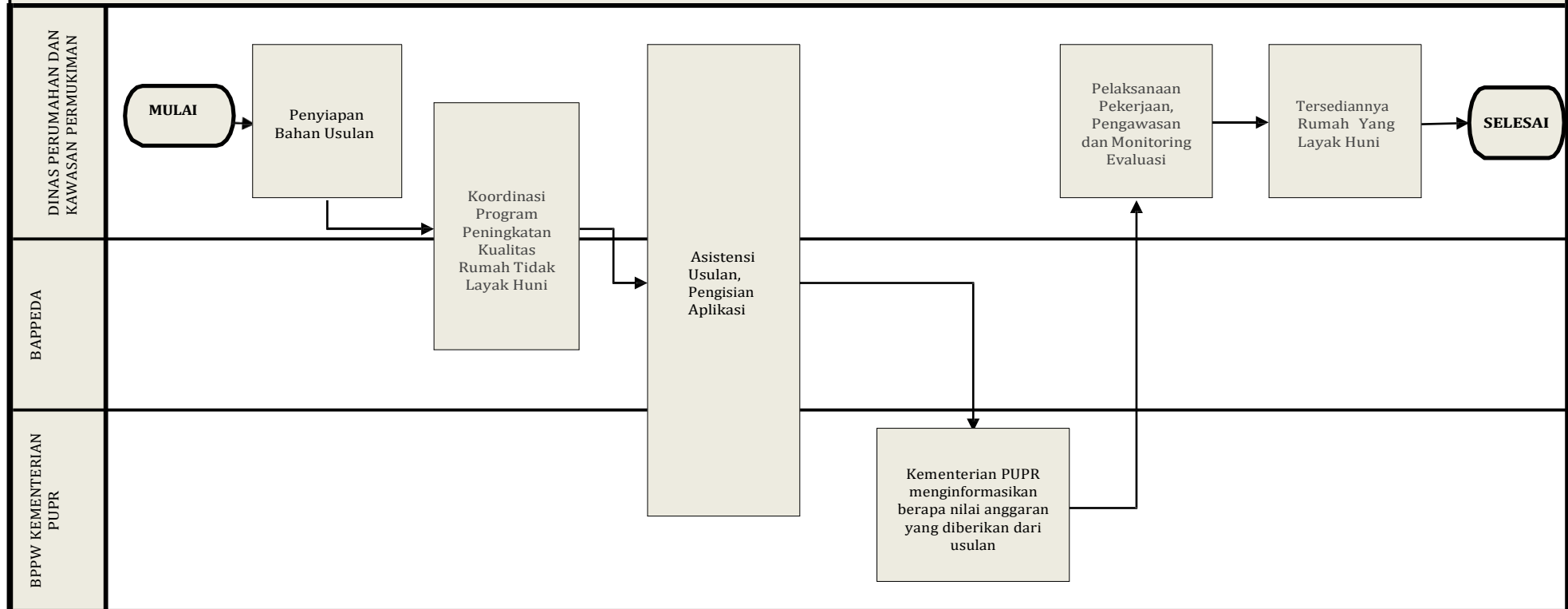
BTN-09.01 CFM09 : Penyelenggaraan Penataan Ruang





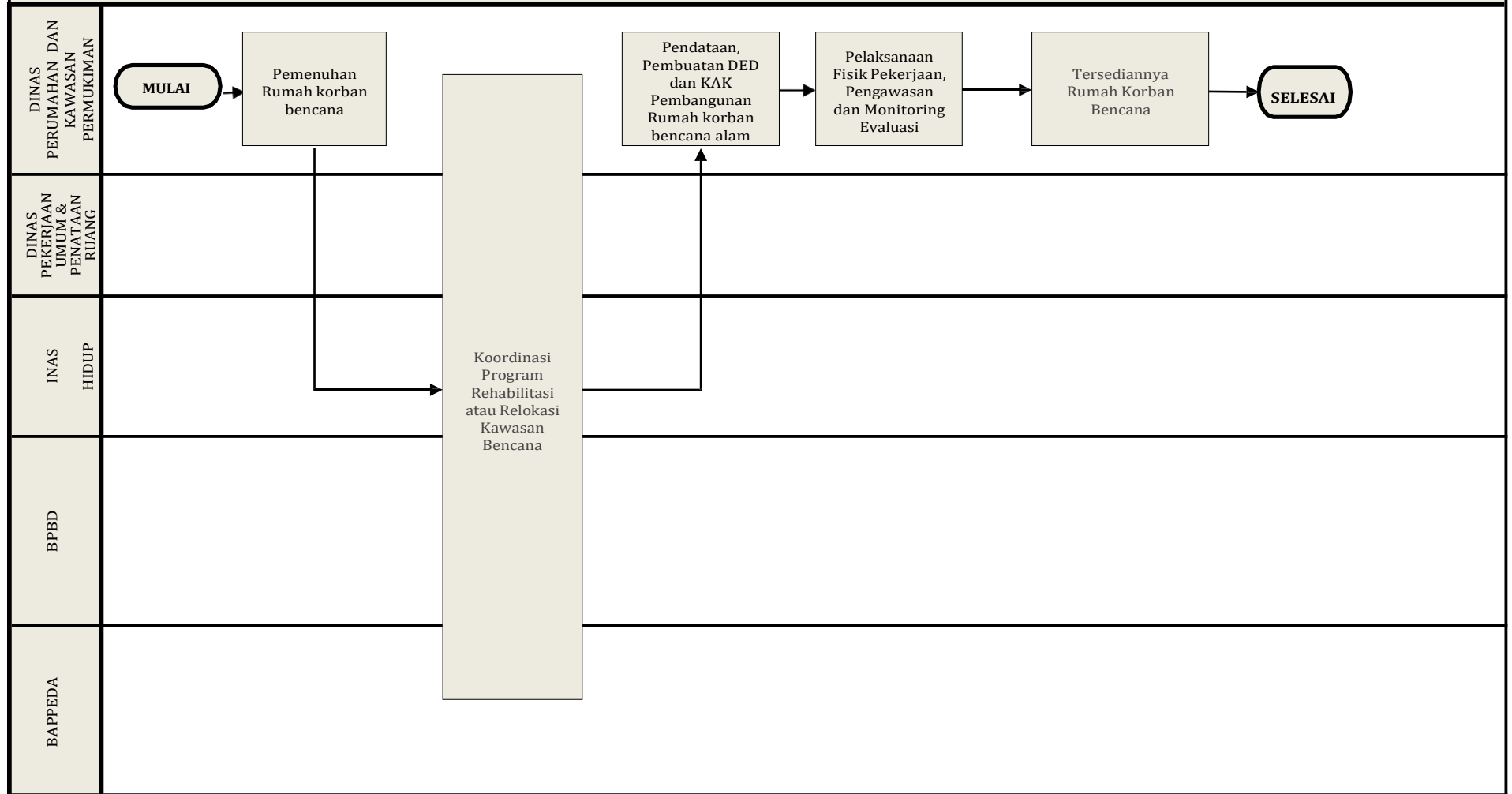
PETA LINTAS FUNGSI

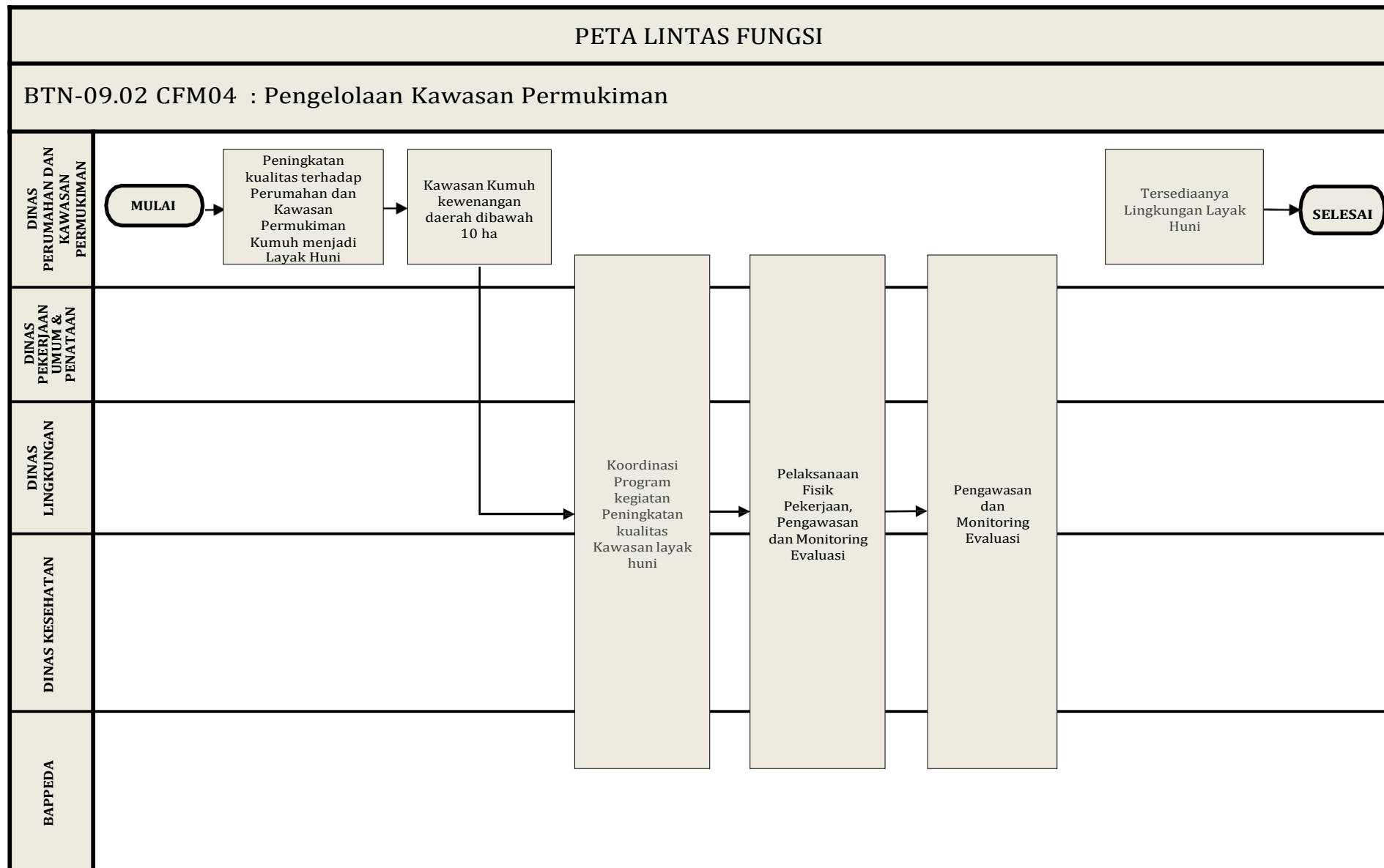
BTN-09.02 CFM02 : Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

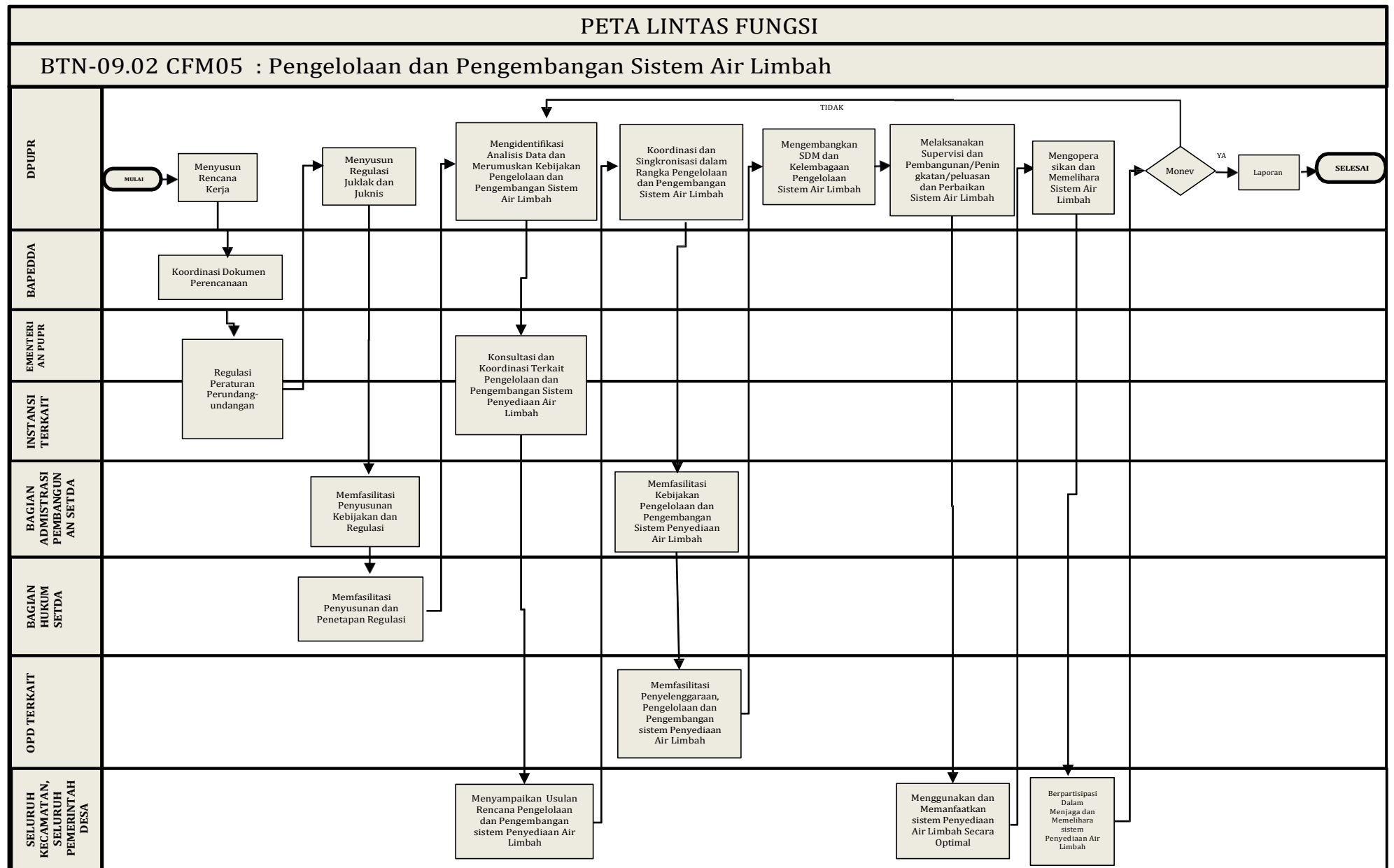


PETA LINTAS FUNGSI

BTN-10.01.03 : Pengembangan Perumahan

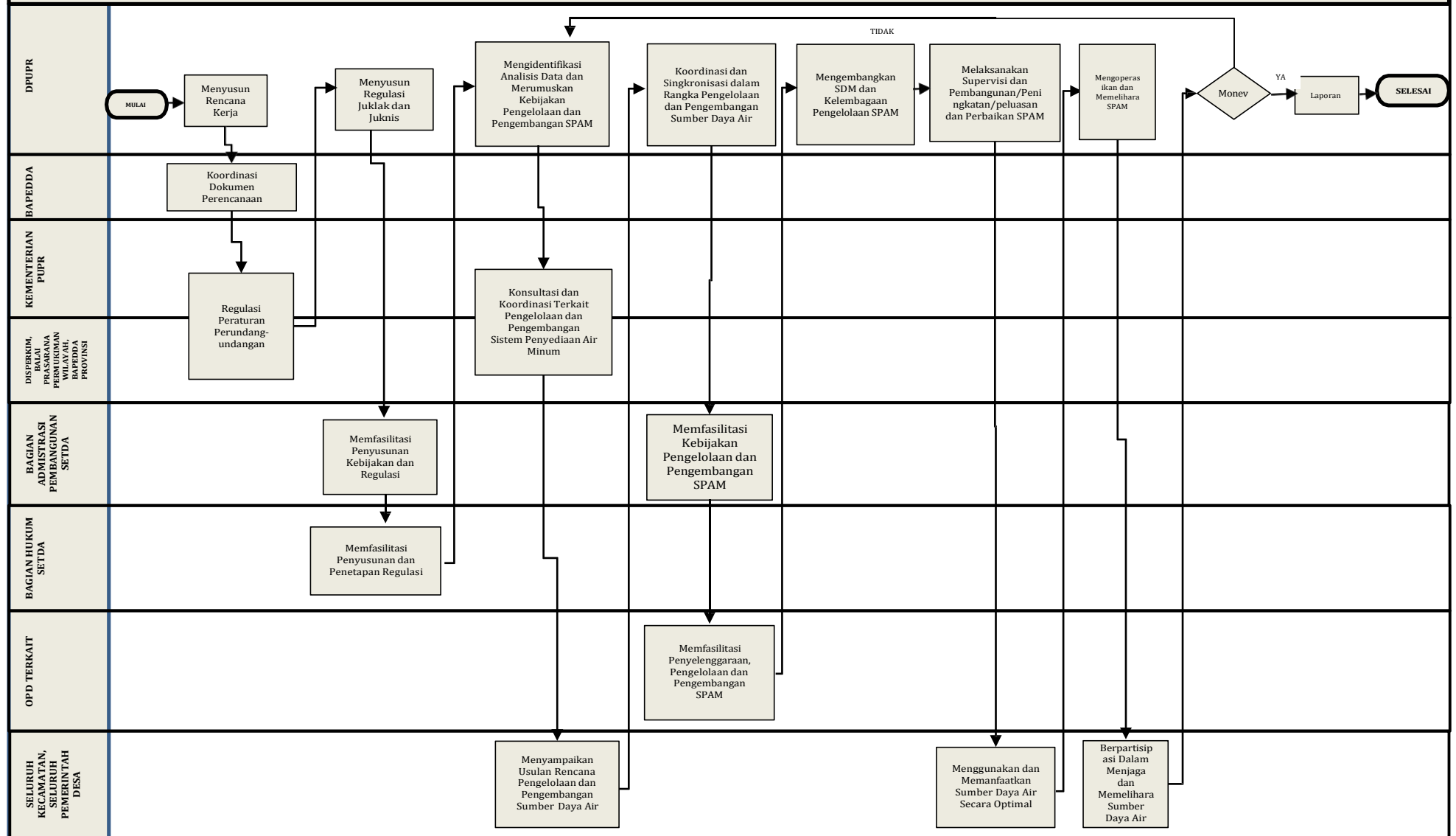






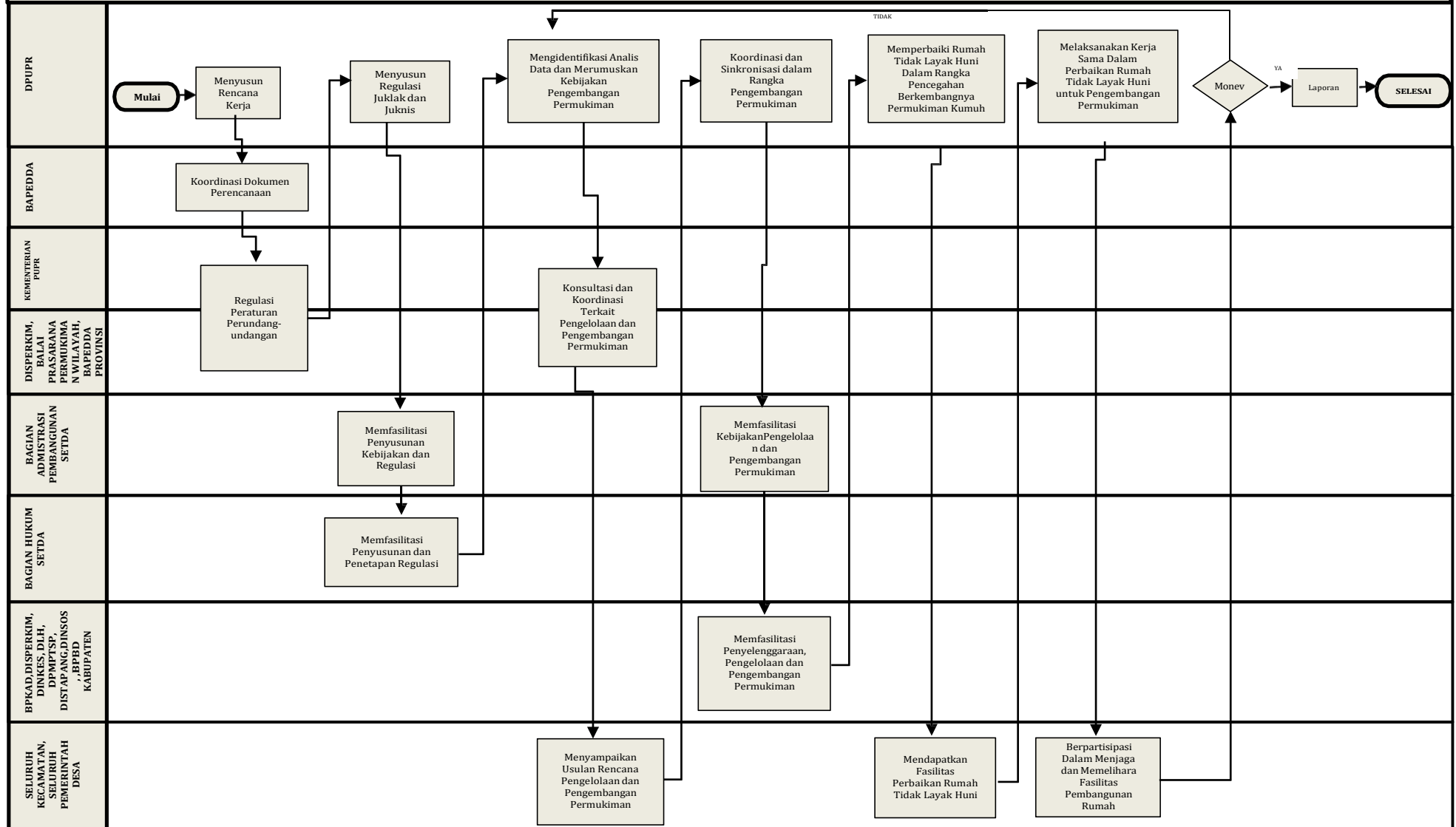
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-09.02 CFM06 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



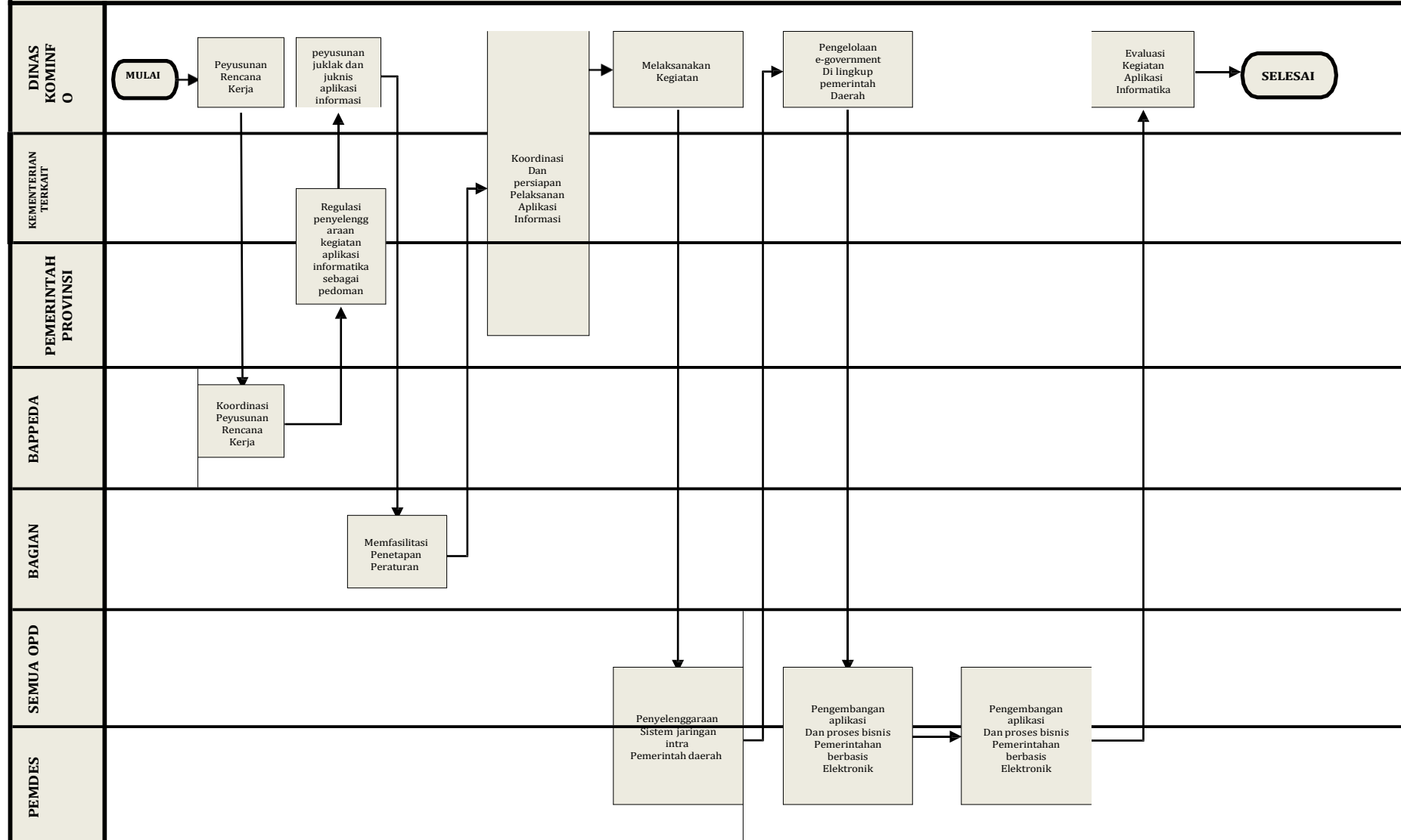
PETA LINTAS FUNGSI

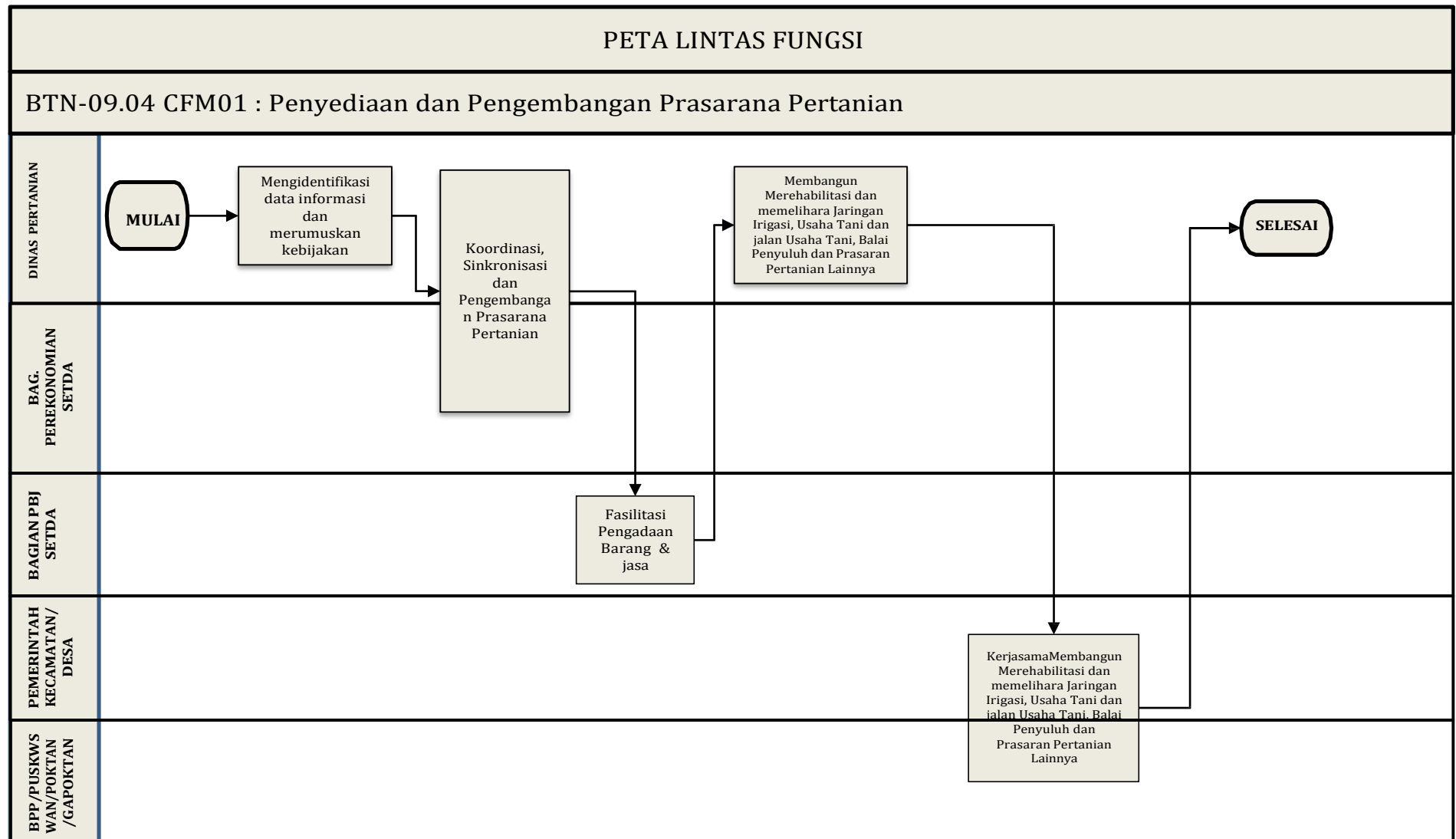
BTN-09.02 CFM07 : Pengembangan Permukiman

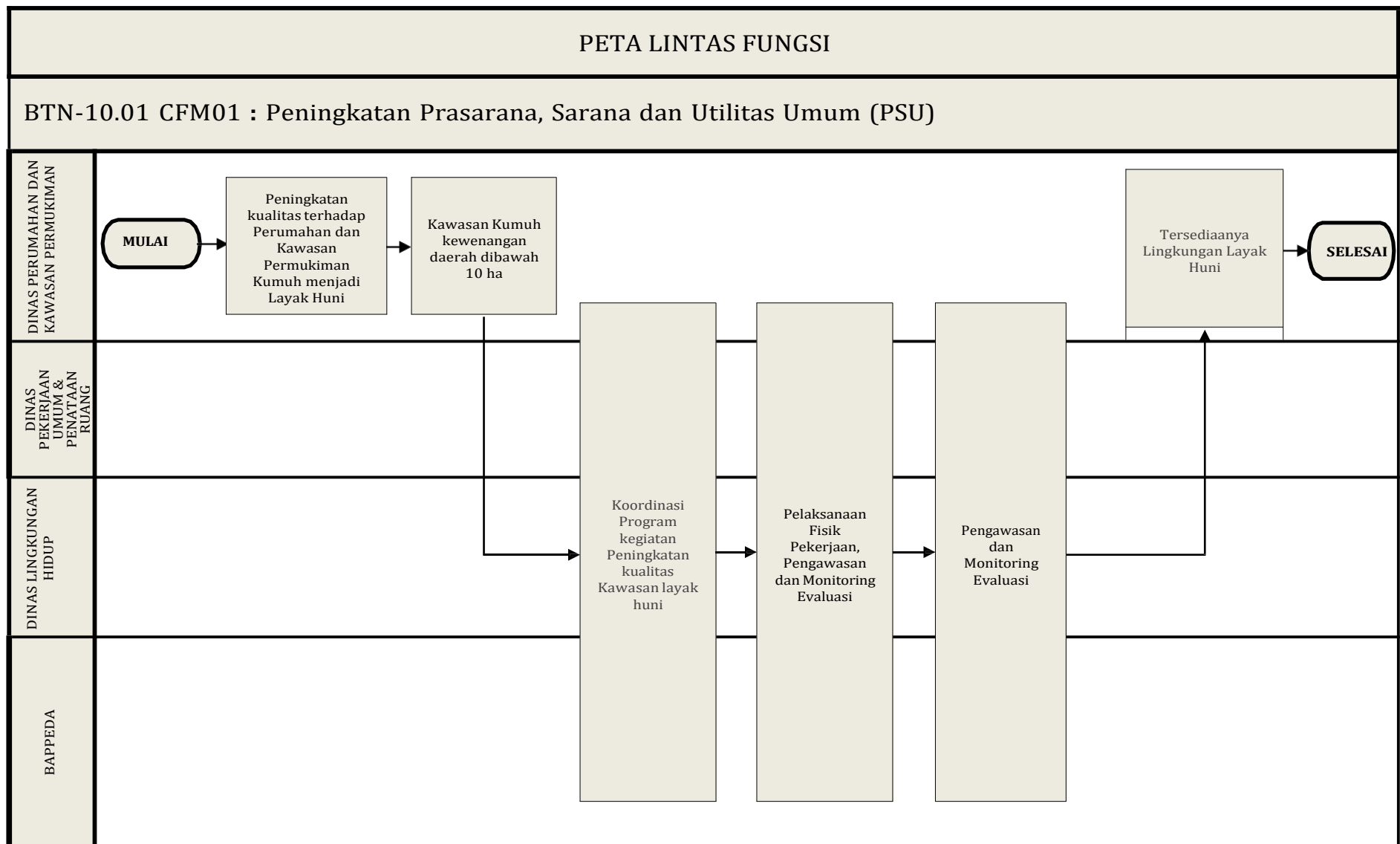


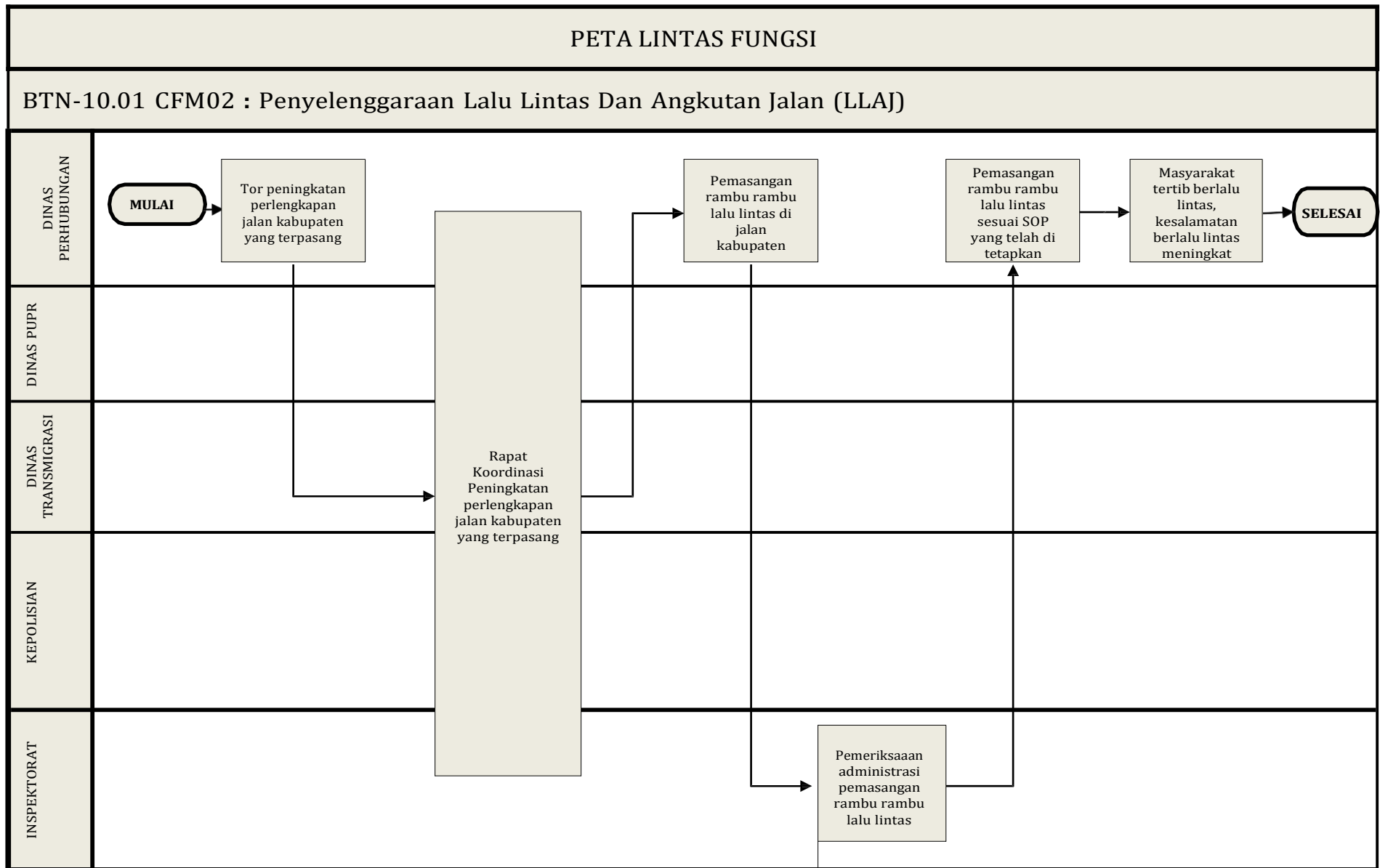
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-09.03 CFM01 : Pengelolaan Aplikasi Informatika



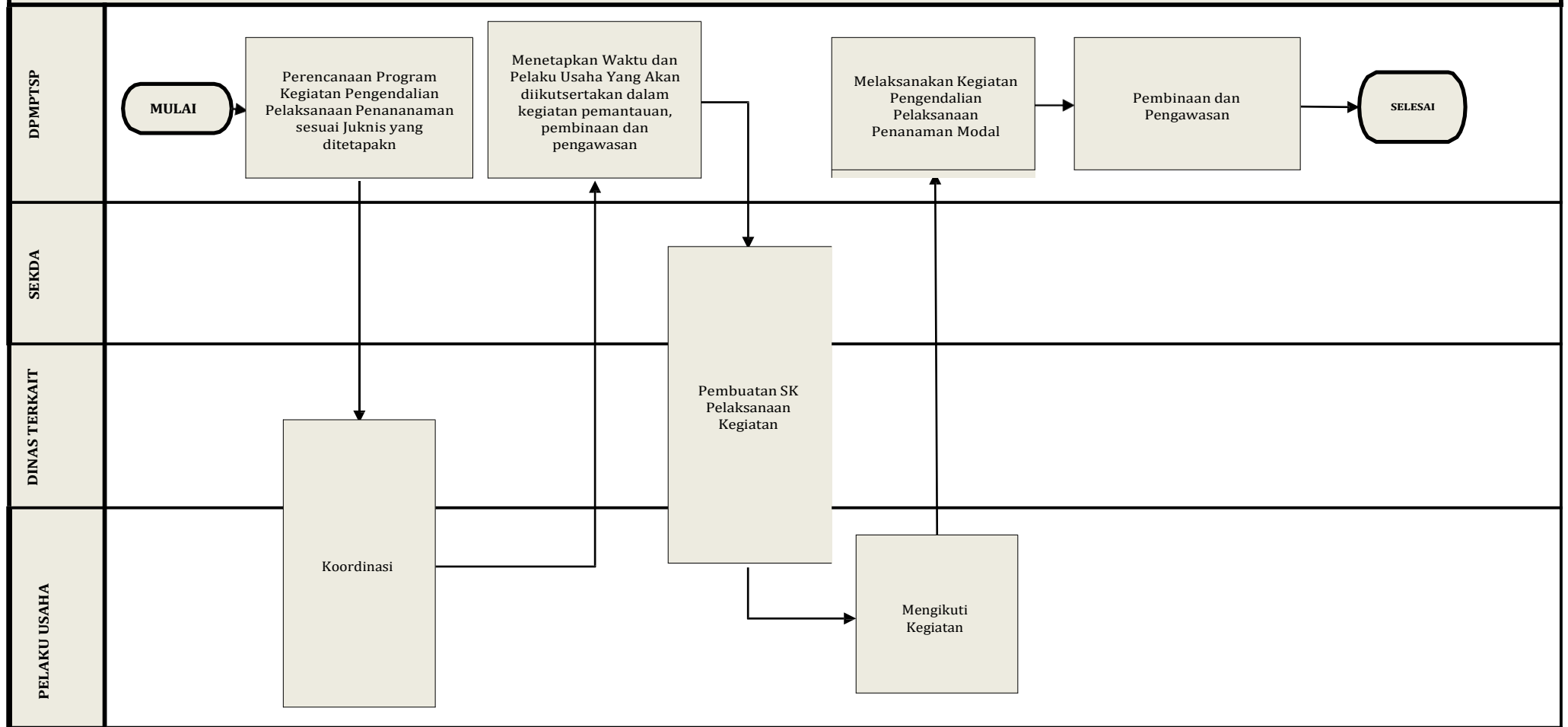






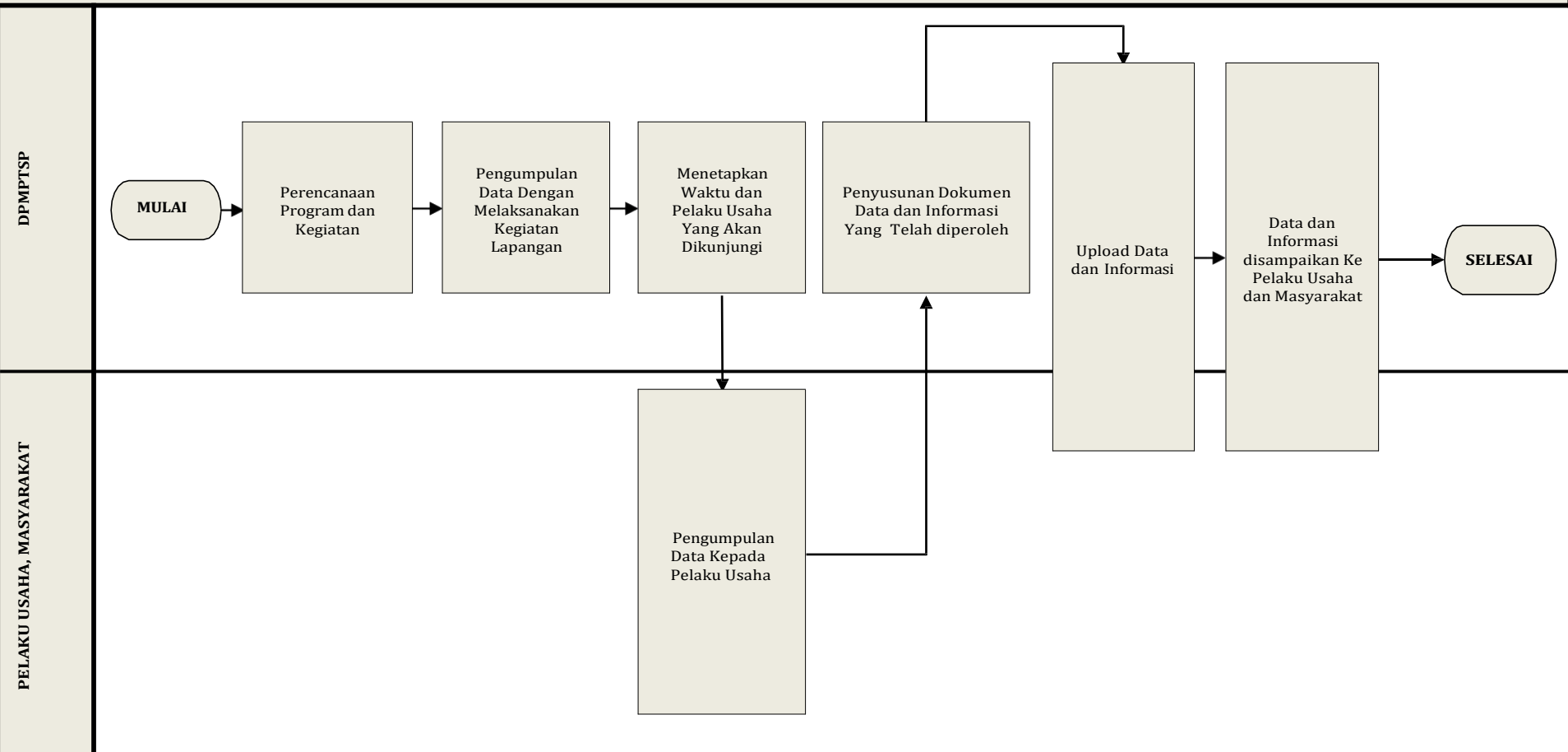
PETA LINTAS FUNGSI

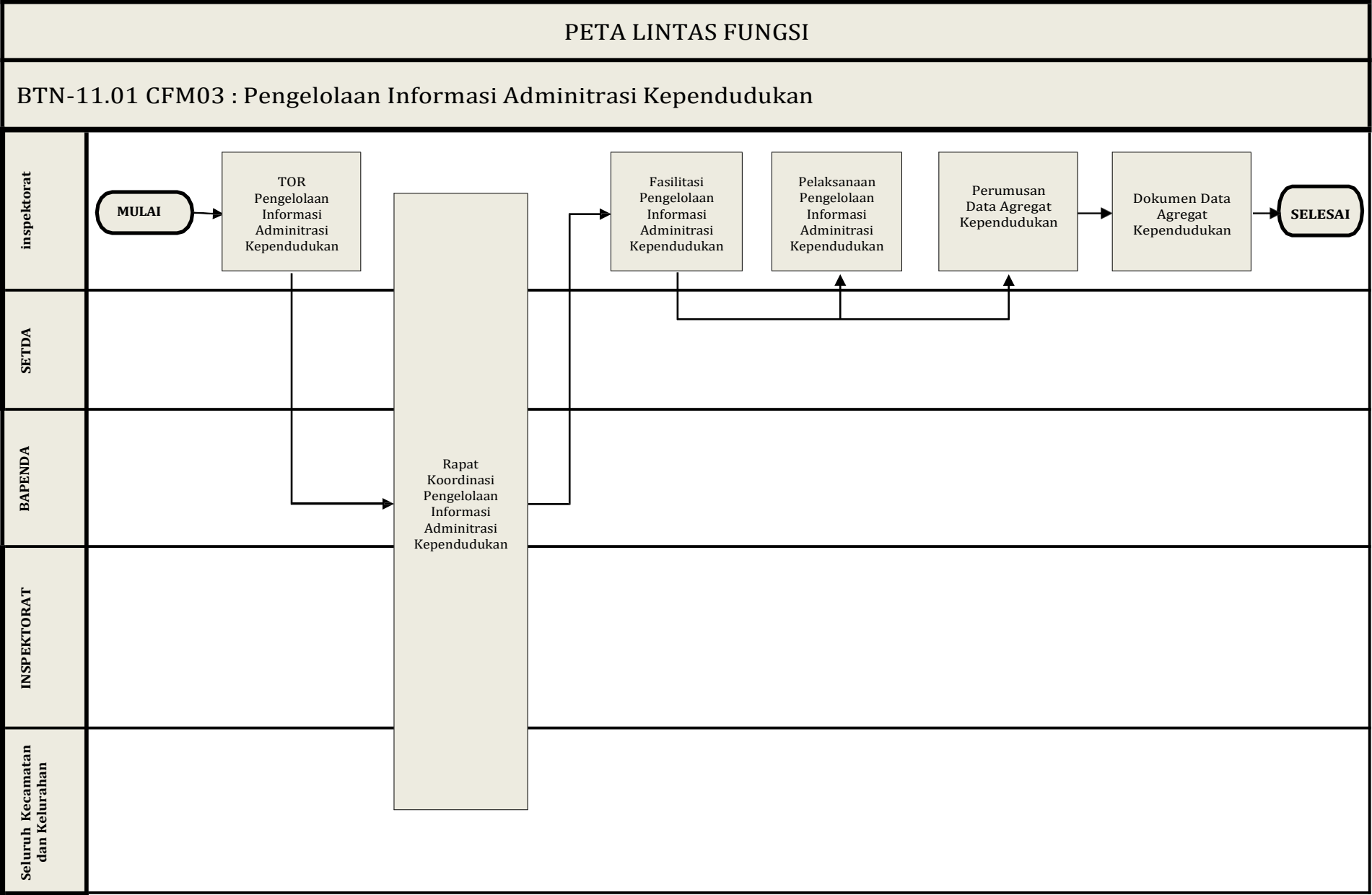
BTN-11.01 CFM01 : Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

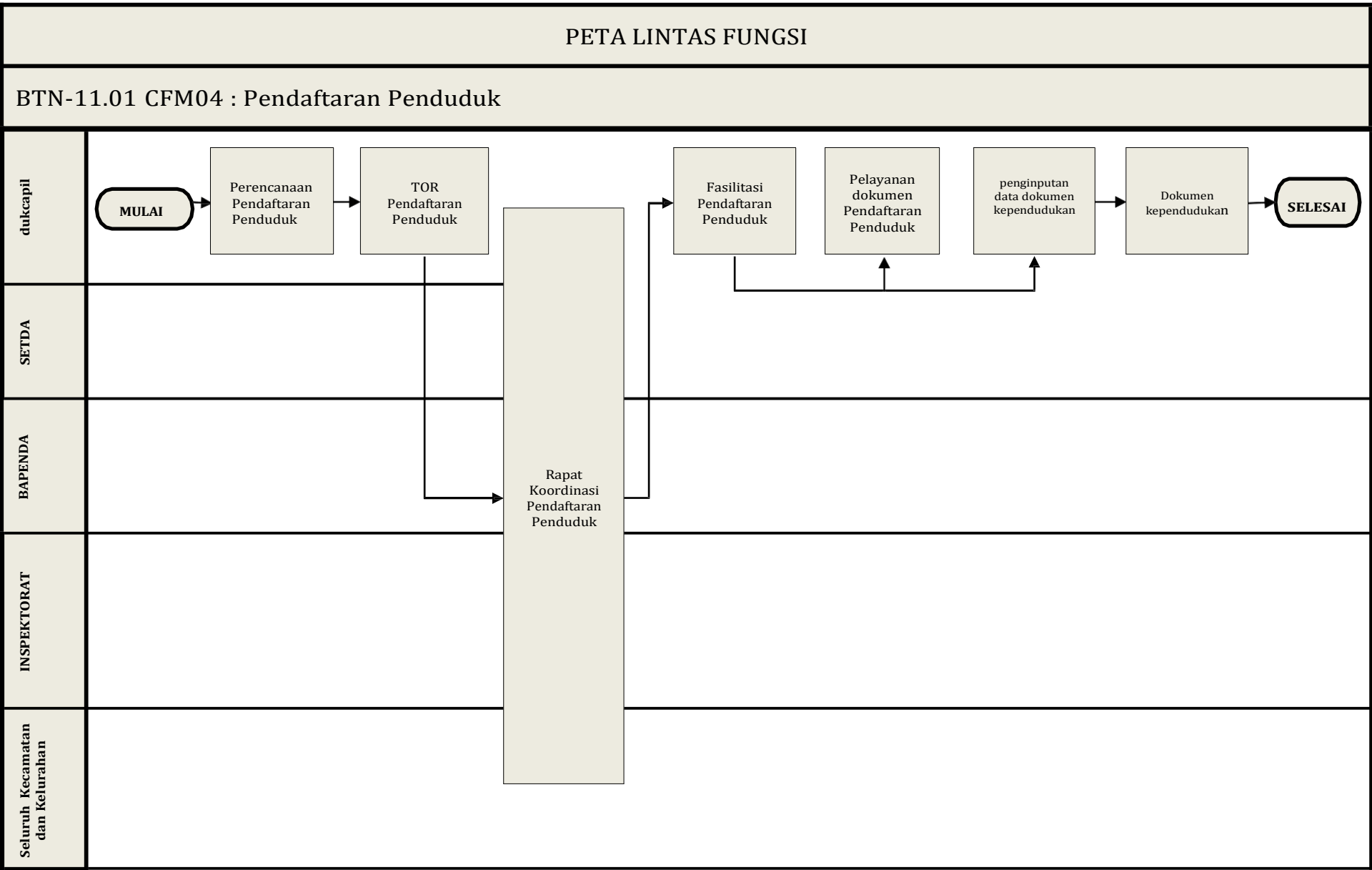


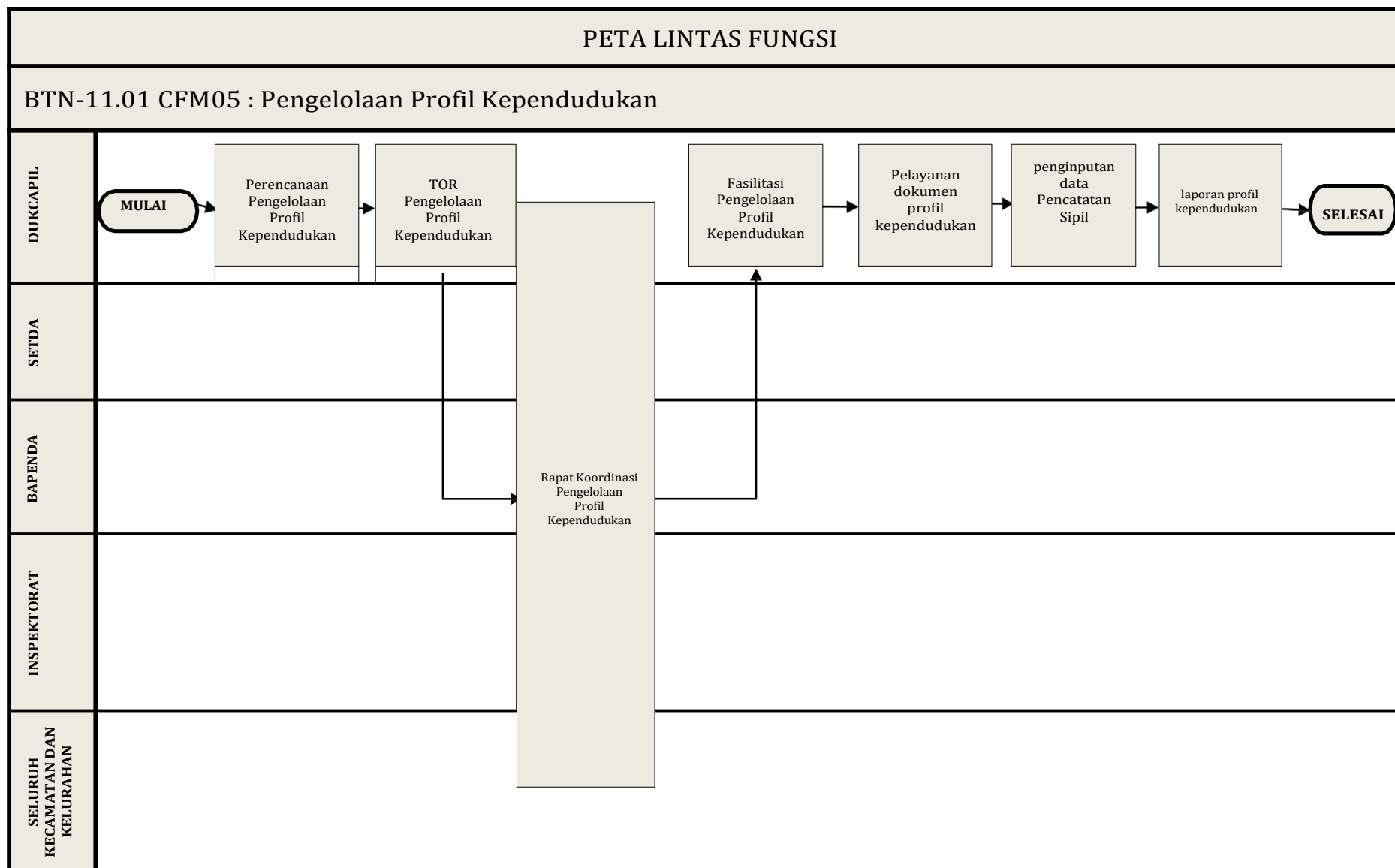
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-11.01 CFM02 : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



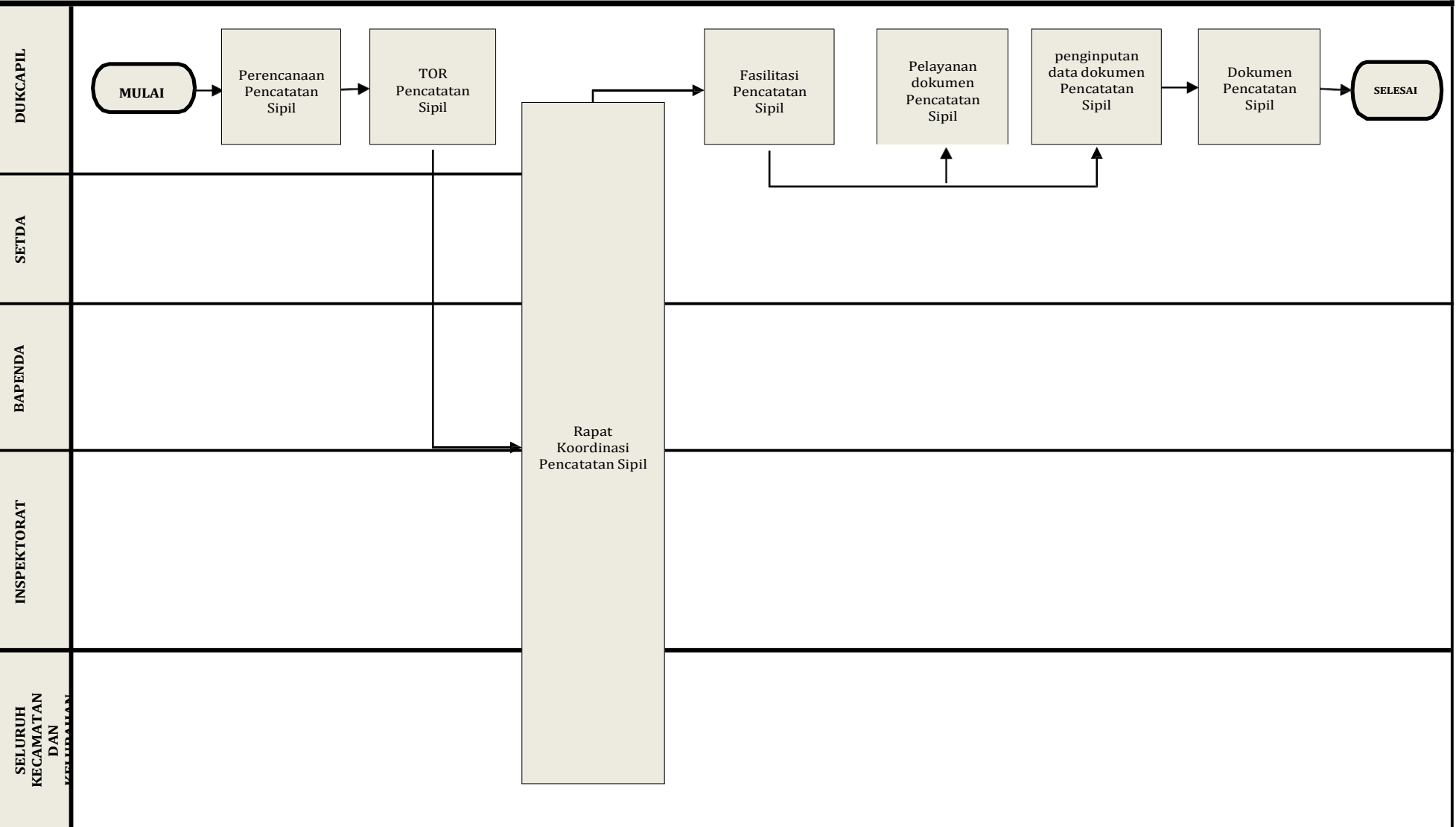






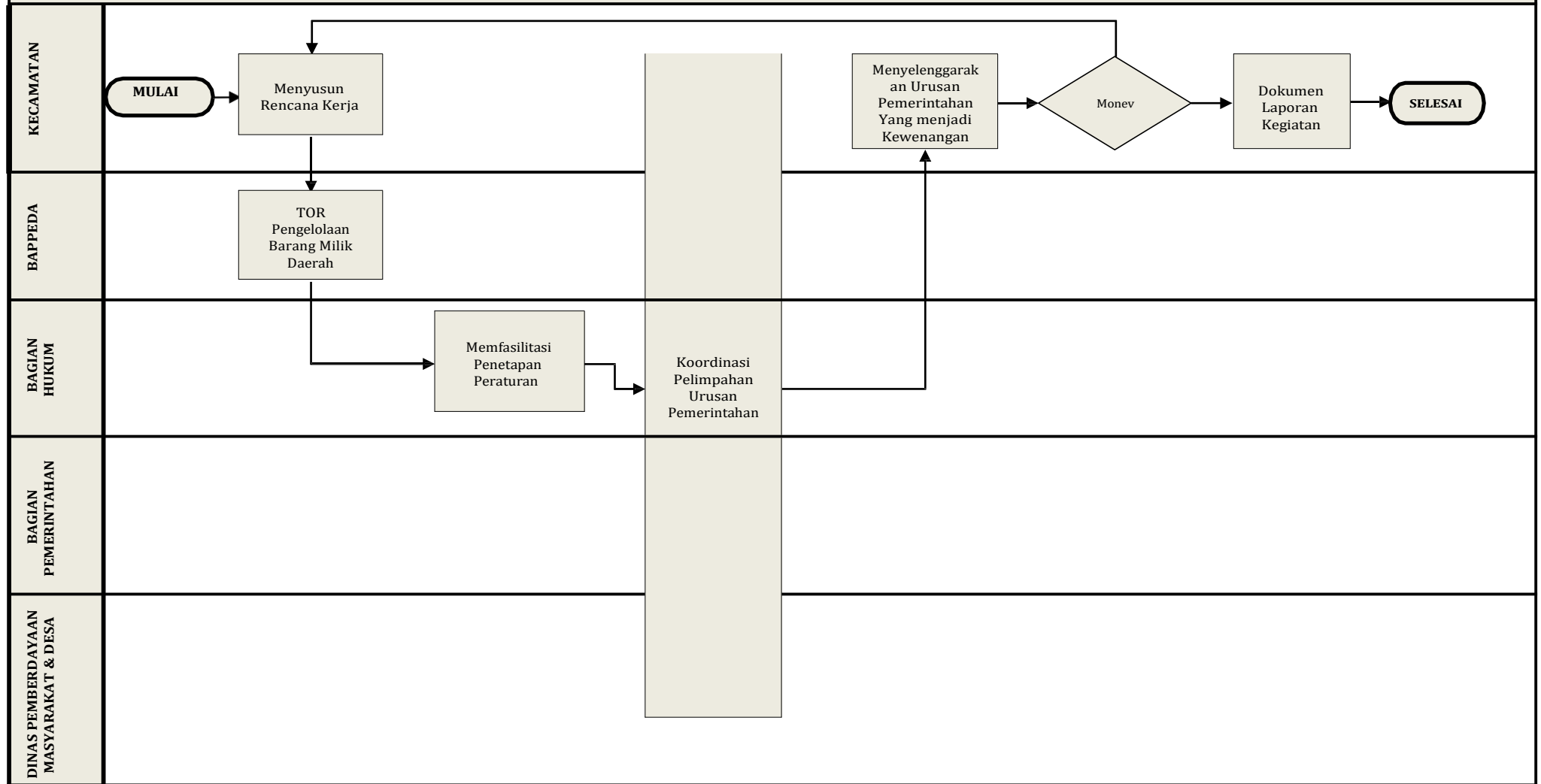
PETA LINTAS FUNGSI

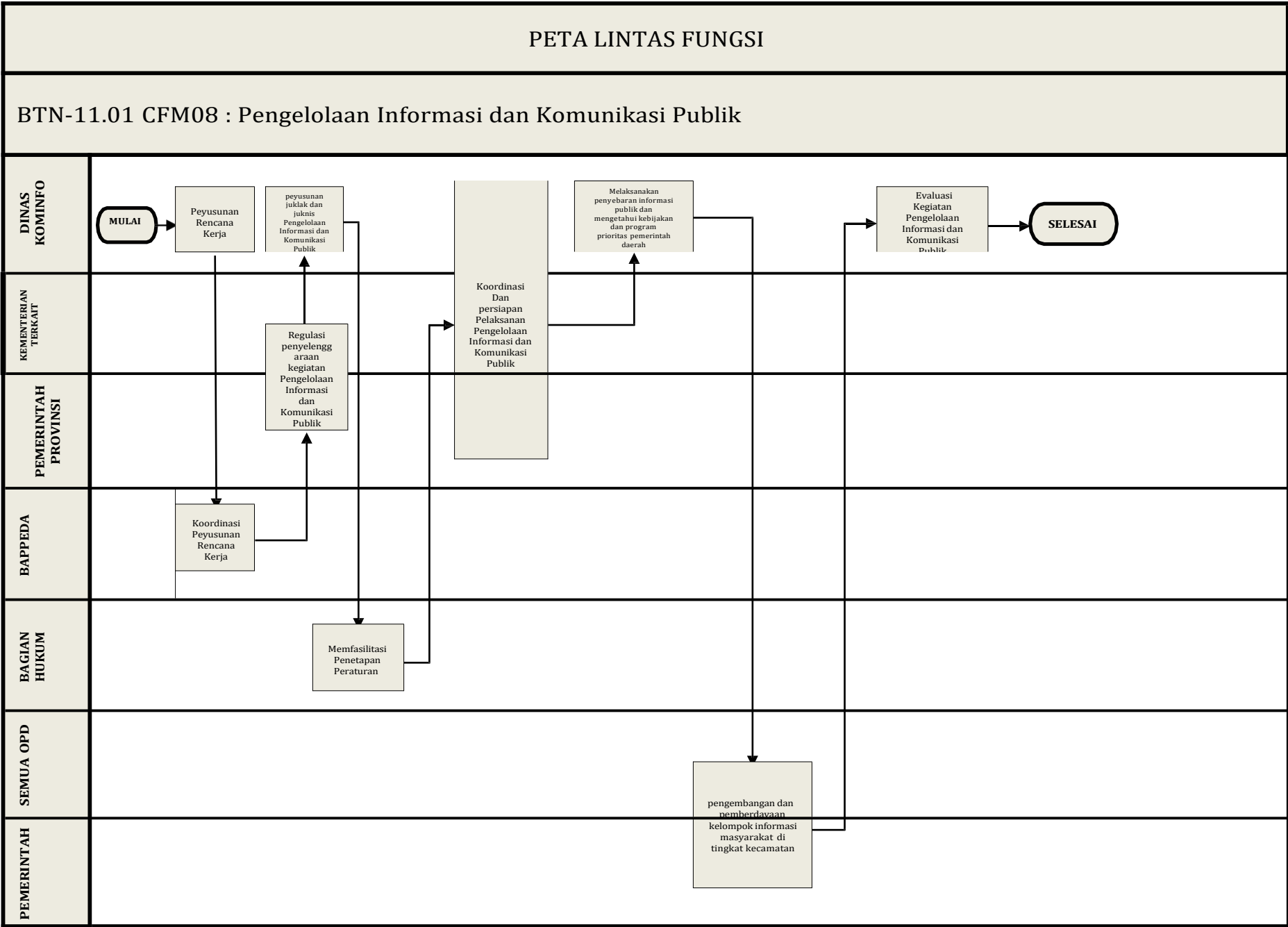
BTN : 03.01.04 CFM 06: Pencatatan Sipil



PETA LINTAS FUNGSI

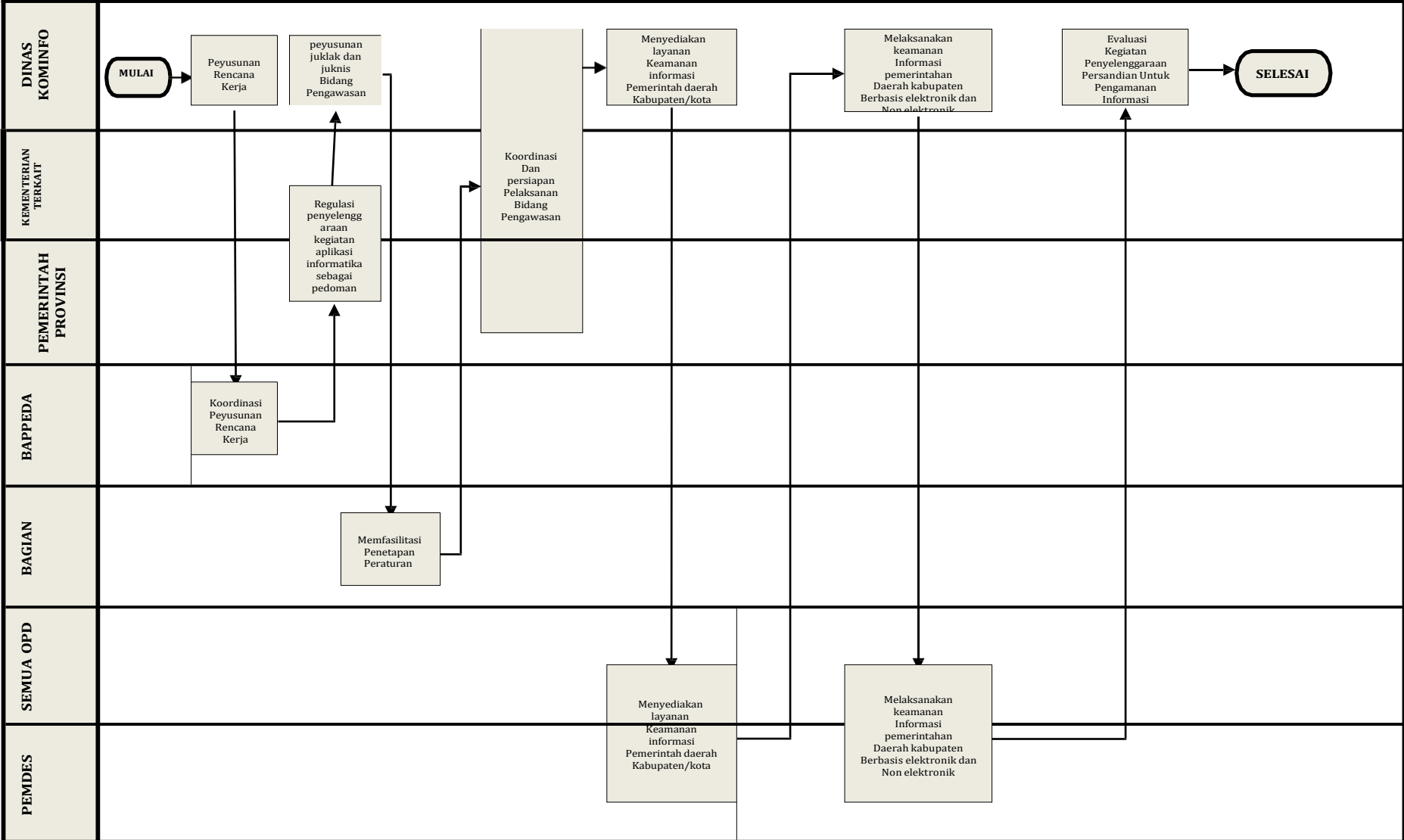
BTN-11.01 CFM07 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan





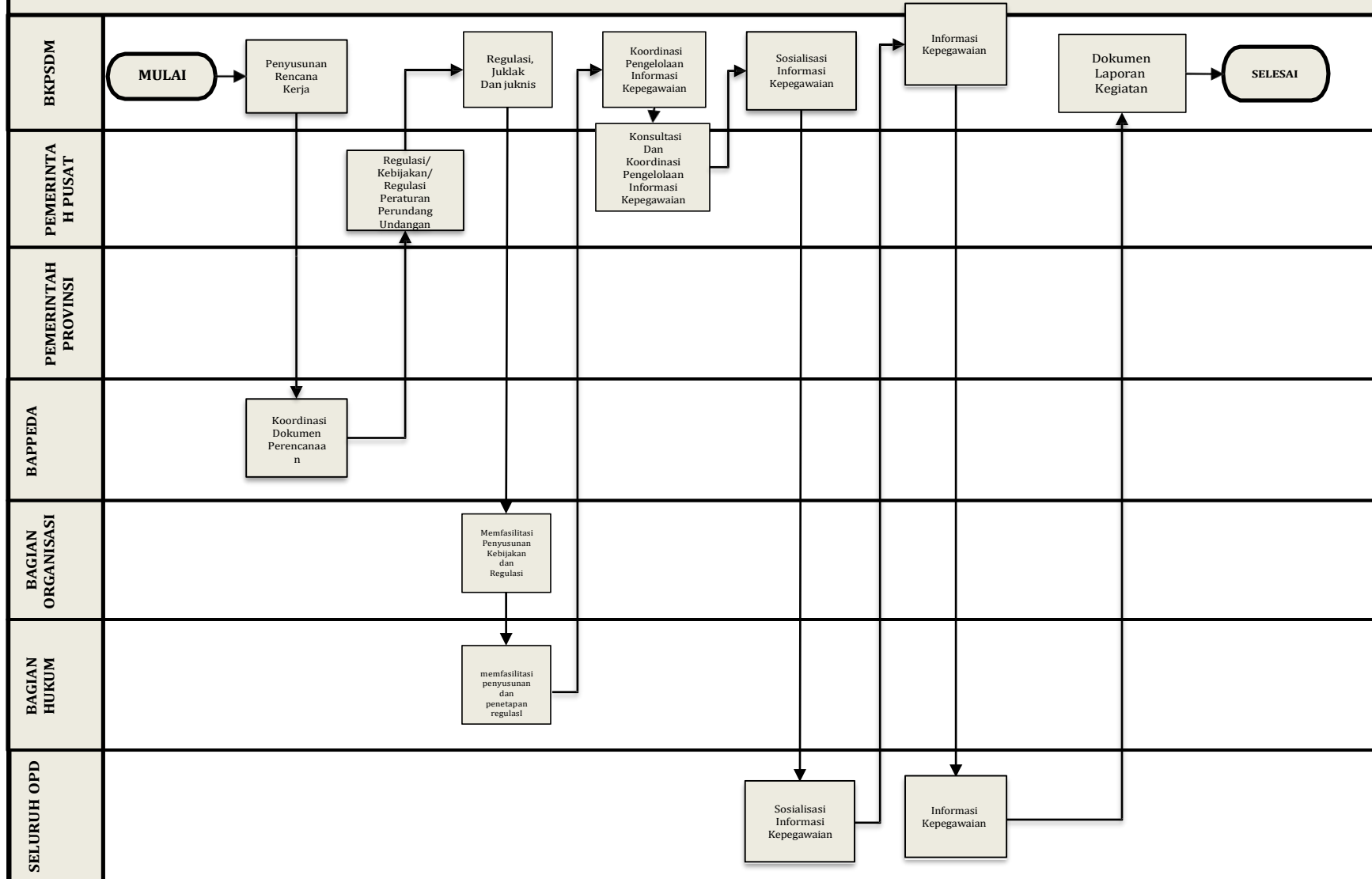
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-11.01 CFM09 : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



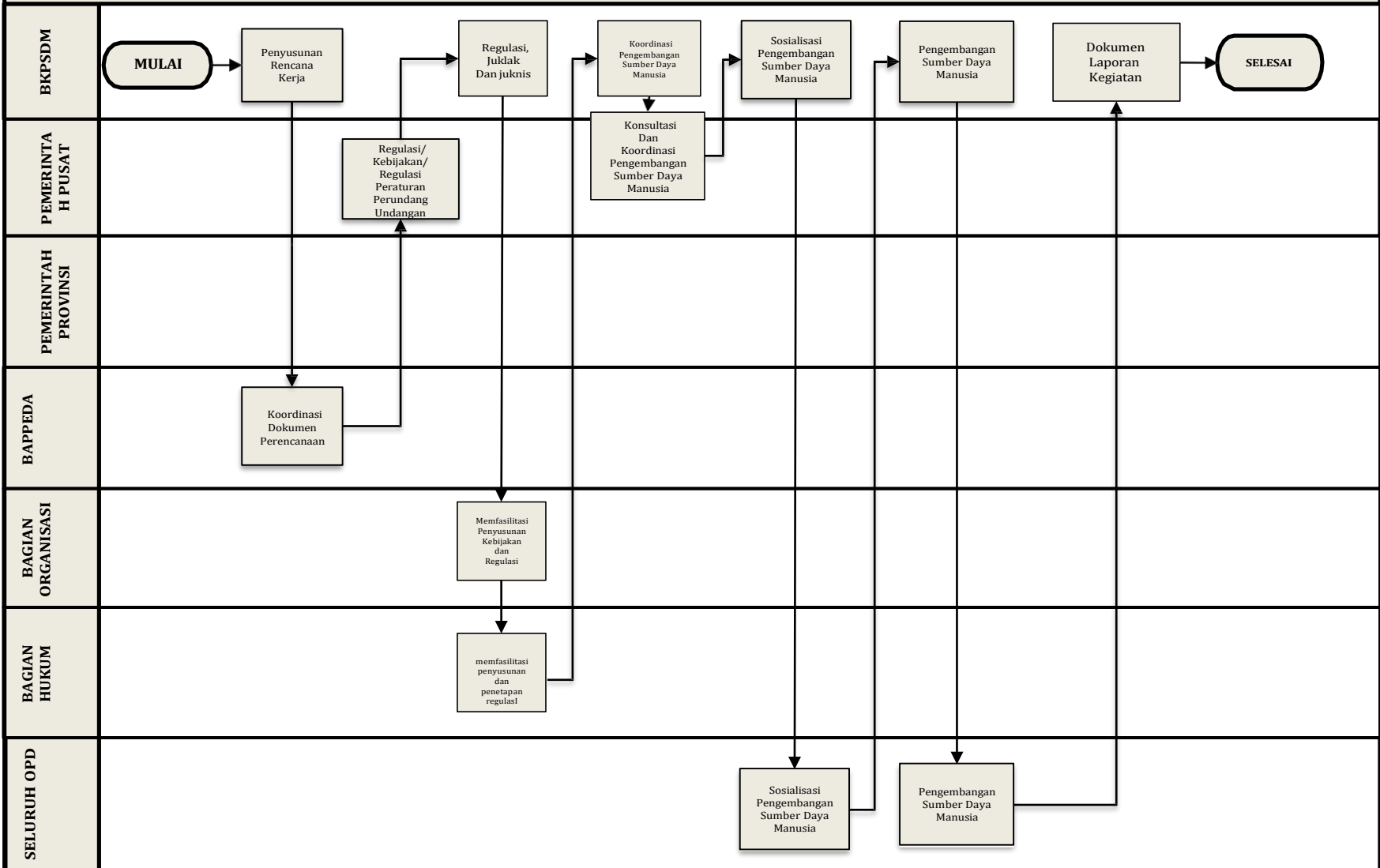
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-12.01 CFM01 : Pengelolaan Kepegawaian Daerah.



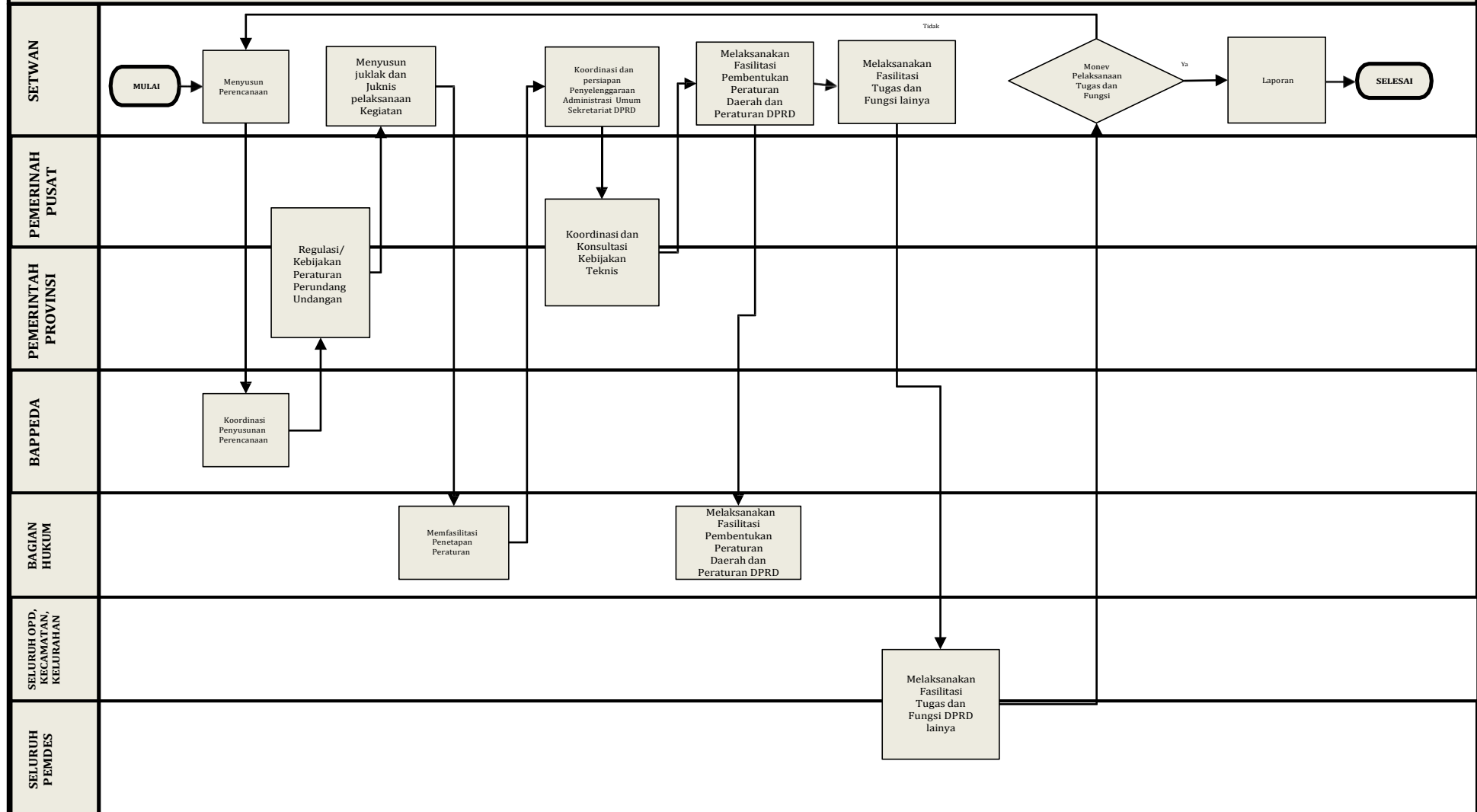
PETA LINTAS FUNGSI

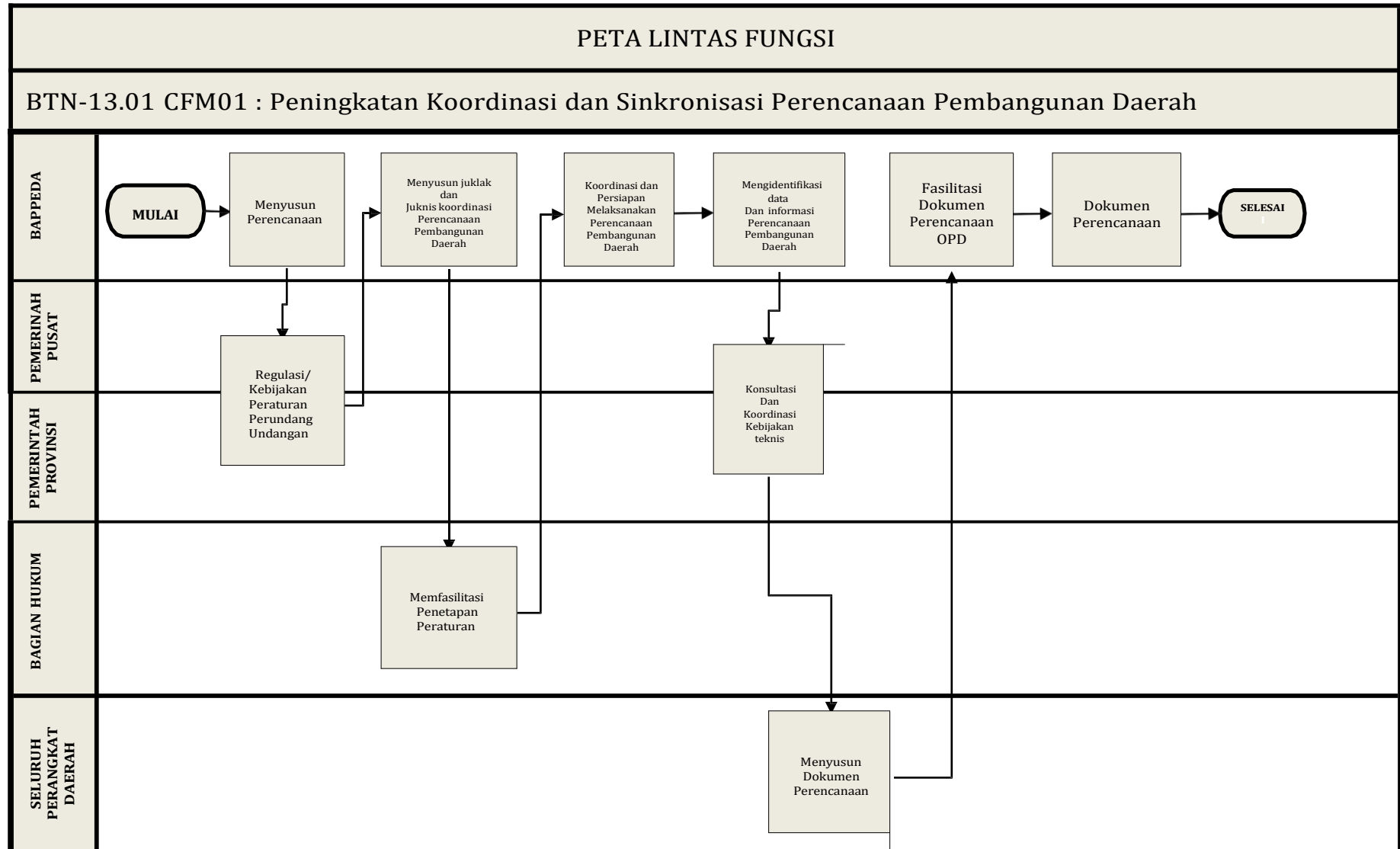
BTN-12.01 CFM02 : Pengembangan Sumber Daya Manusia
--

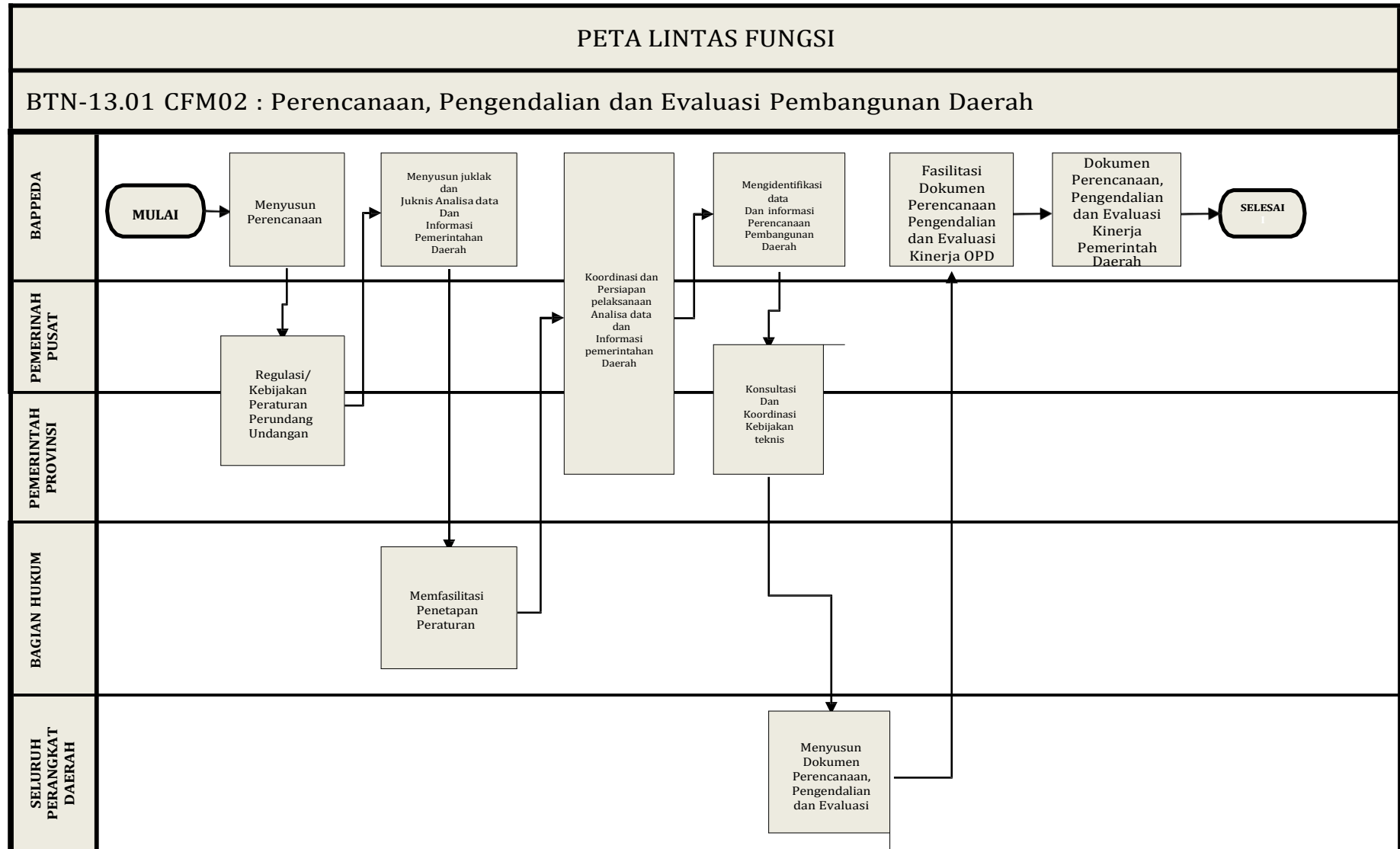


PETA LINTAS FUNGSI

BTN-12.01 CFM03 : Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

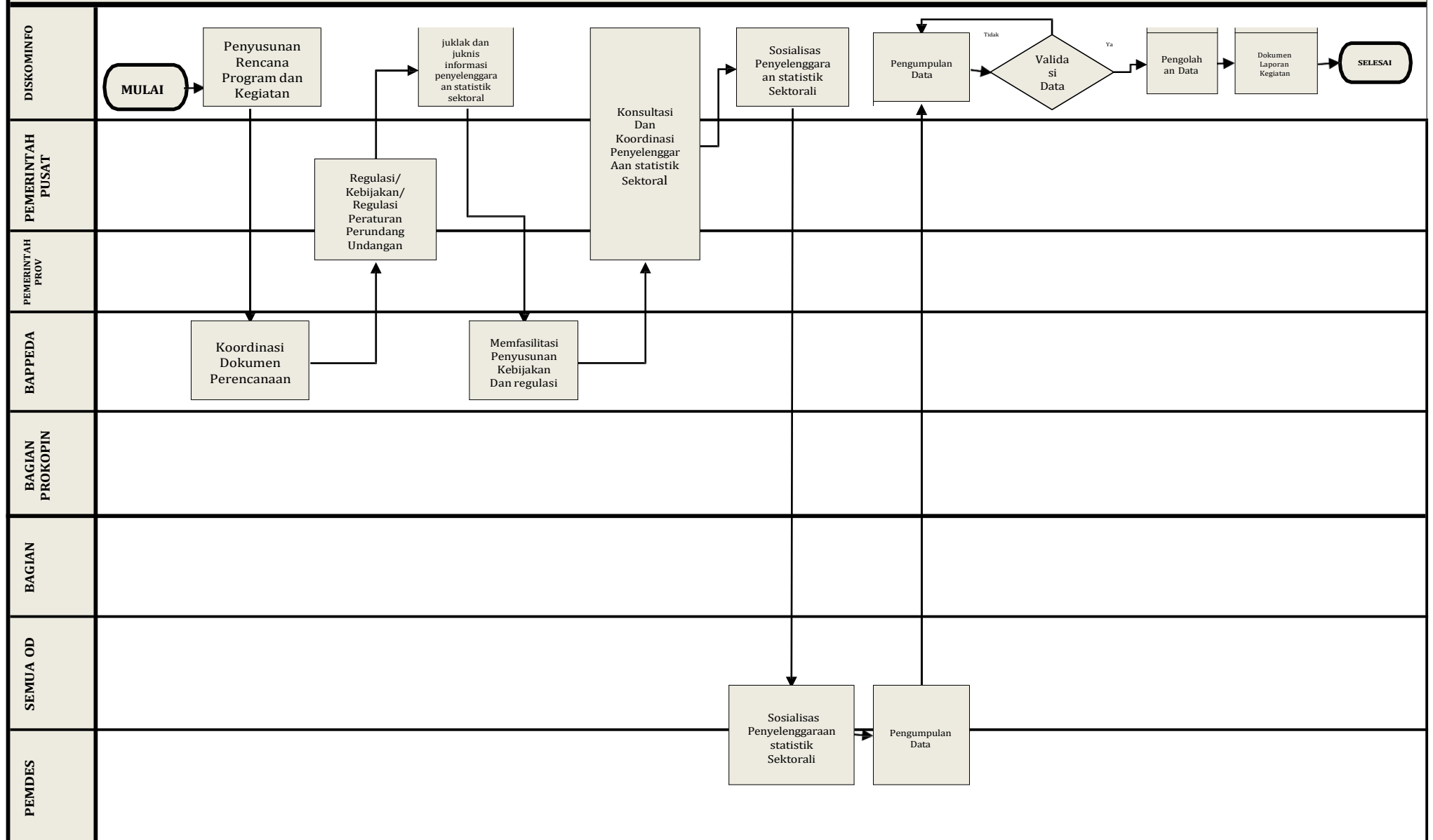


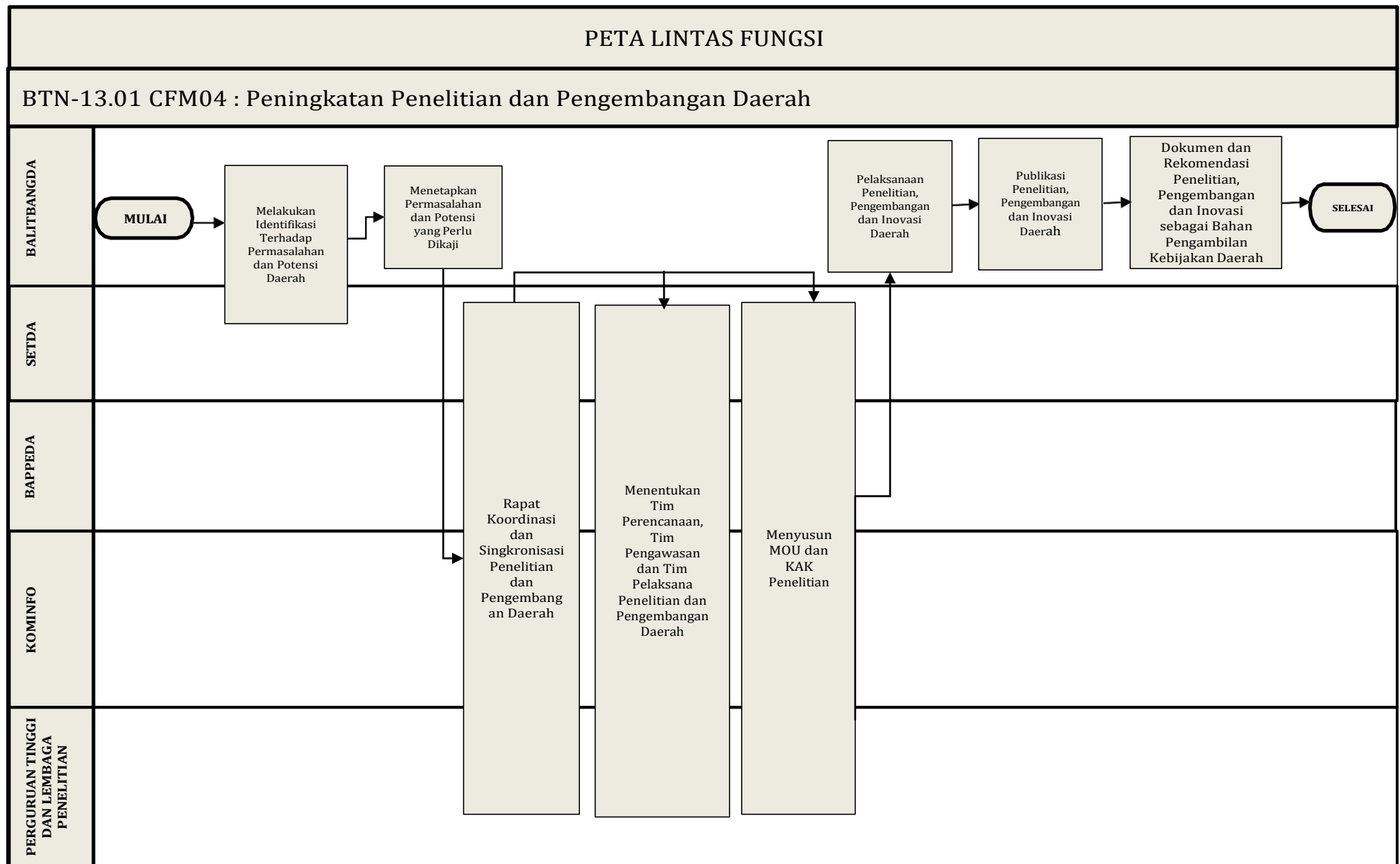




PETA LINTAS FUNGSI

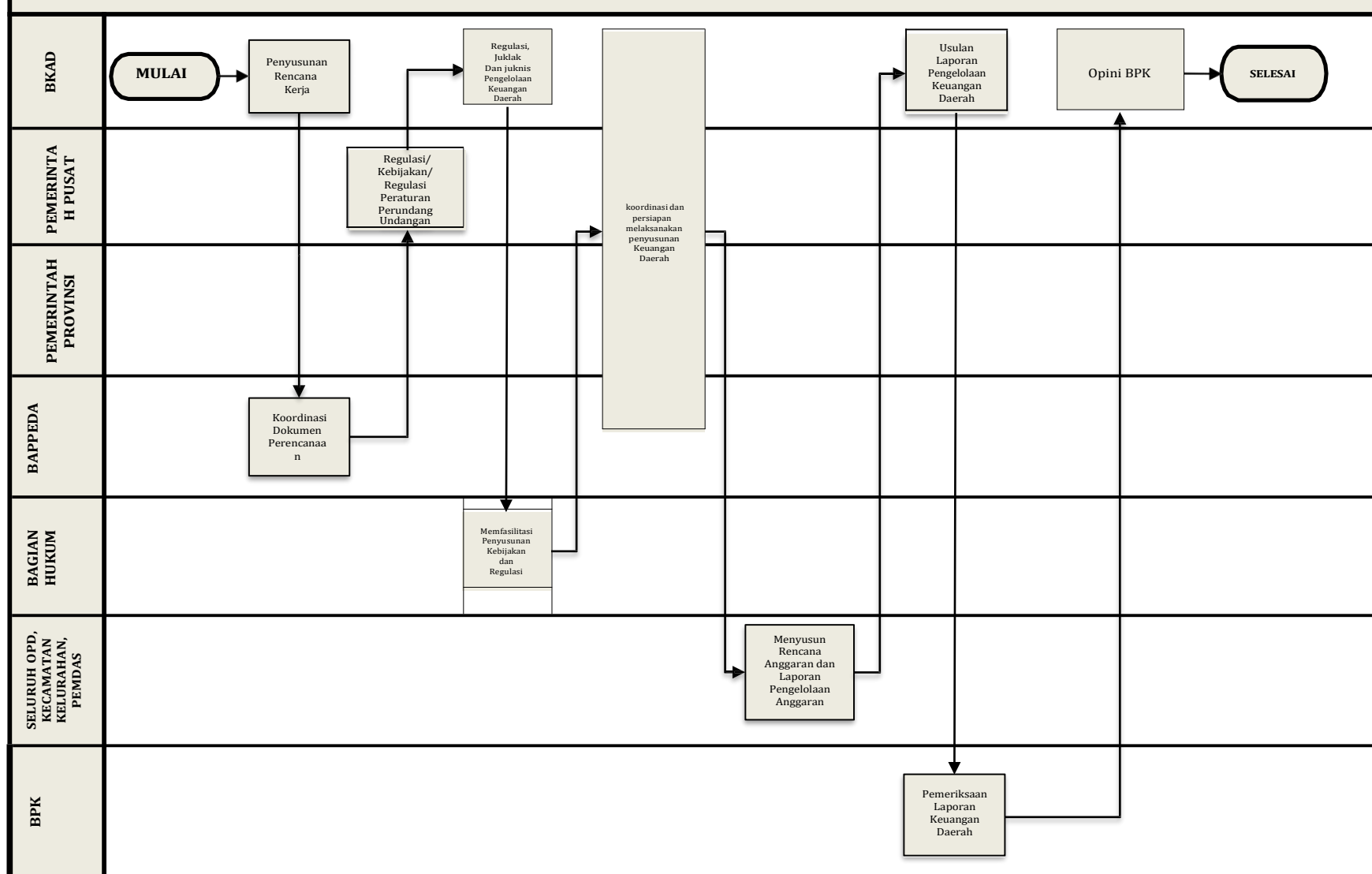
BTN-13.01 CFM03 : Penyelenggaraan Statistik Sektoral





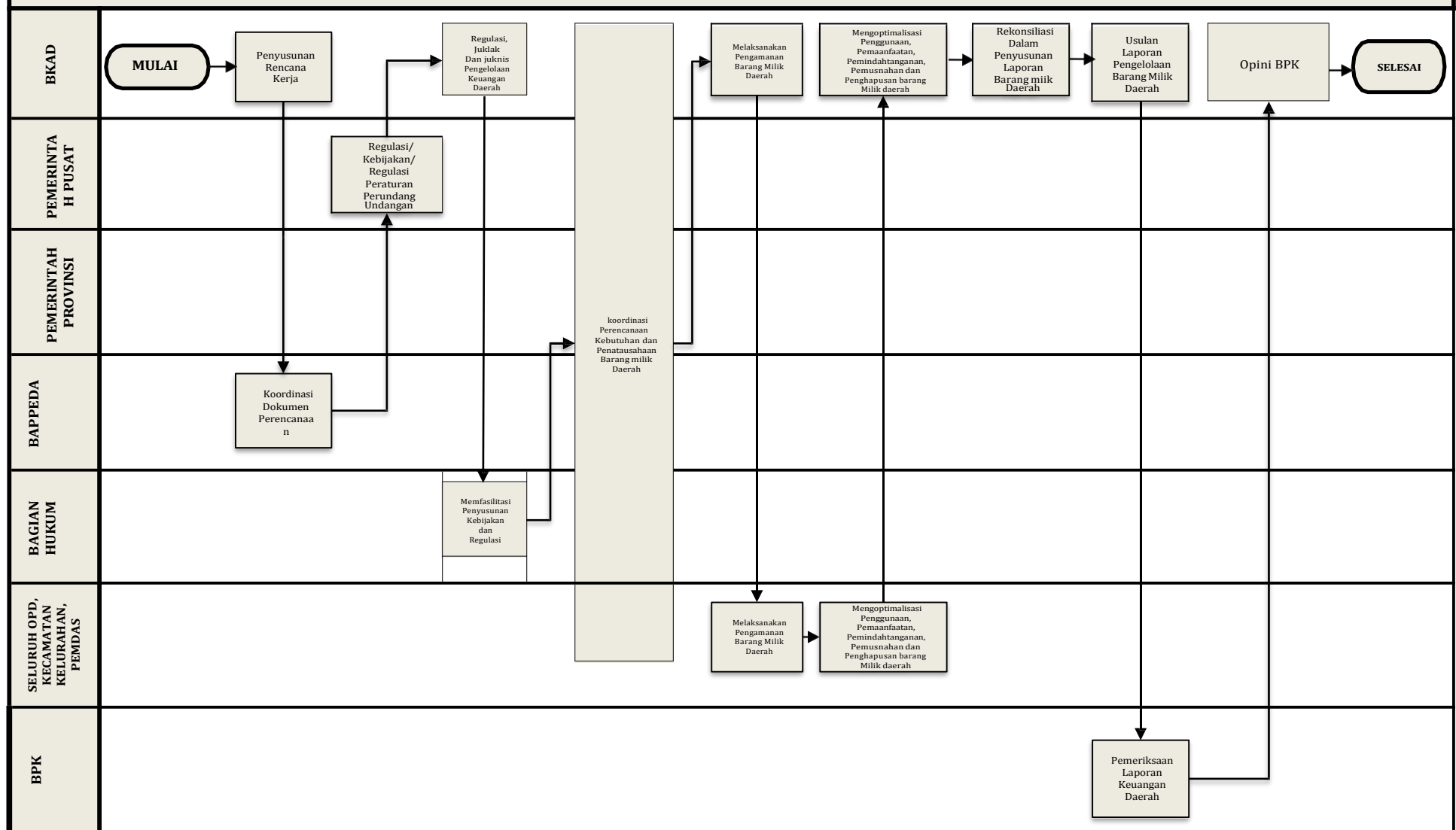
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-14.01 CFM02 : Pengelolaan Keuangan Daerah



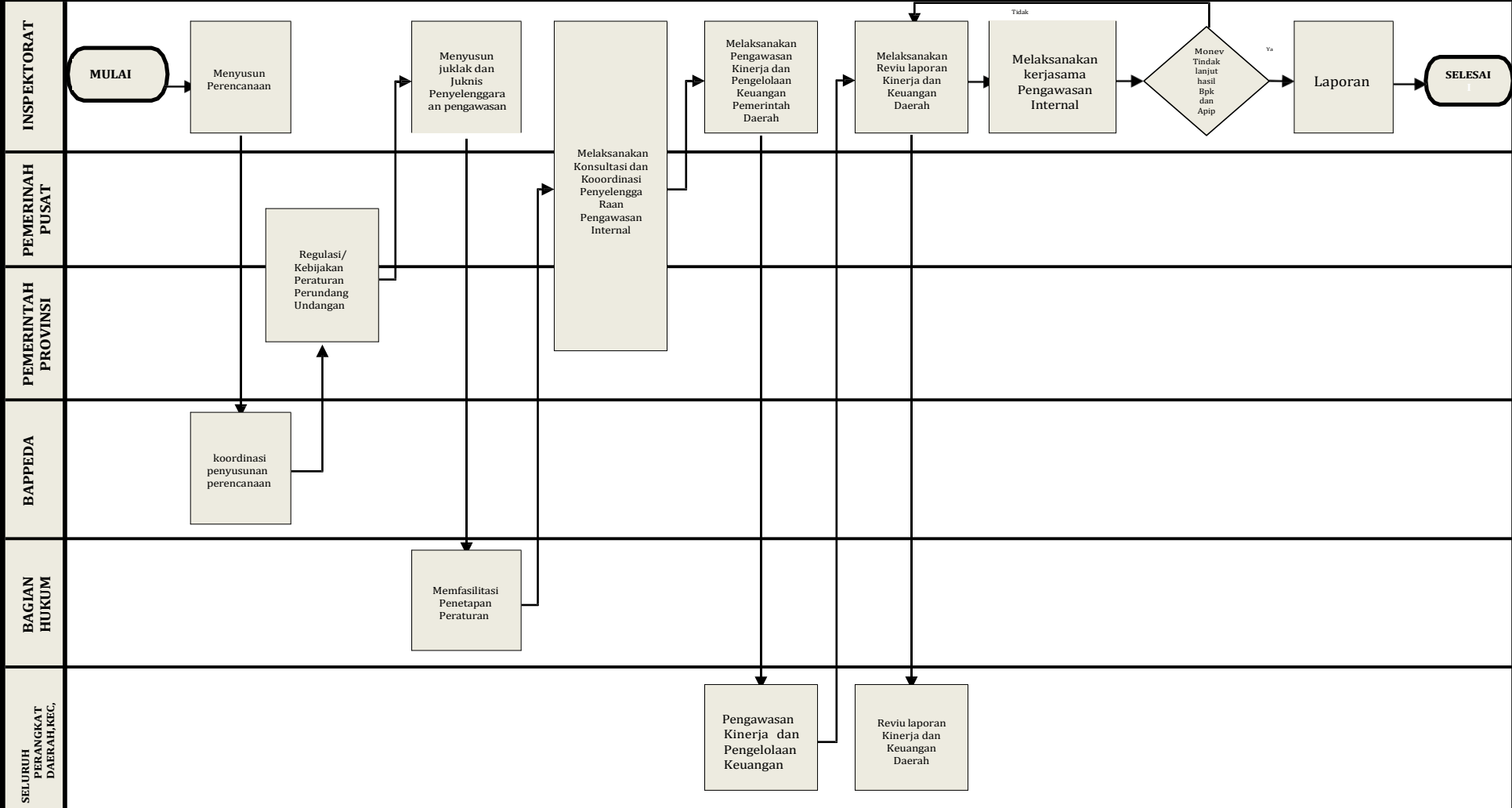
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-14.01 CFM03 : Pengelolaan Barang Milik Daerah



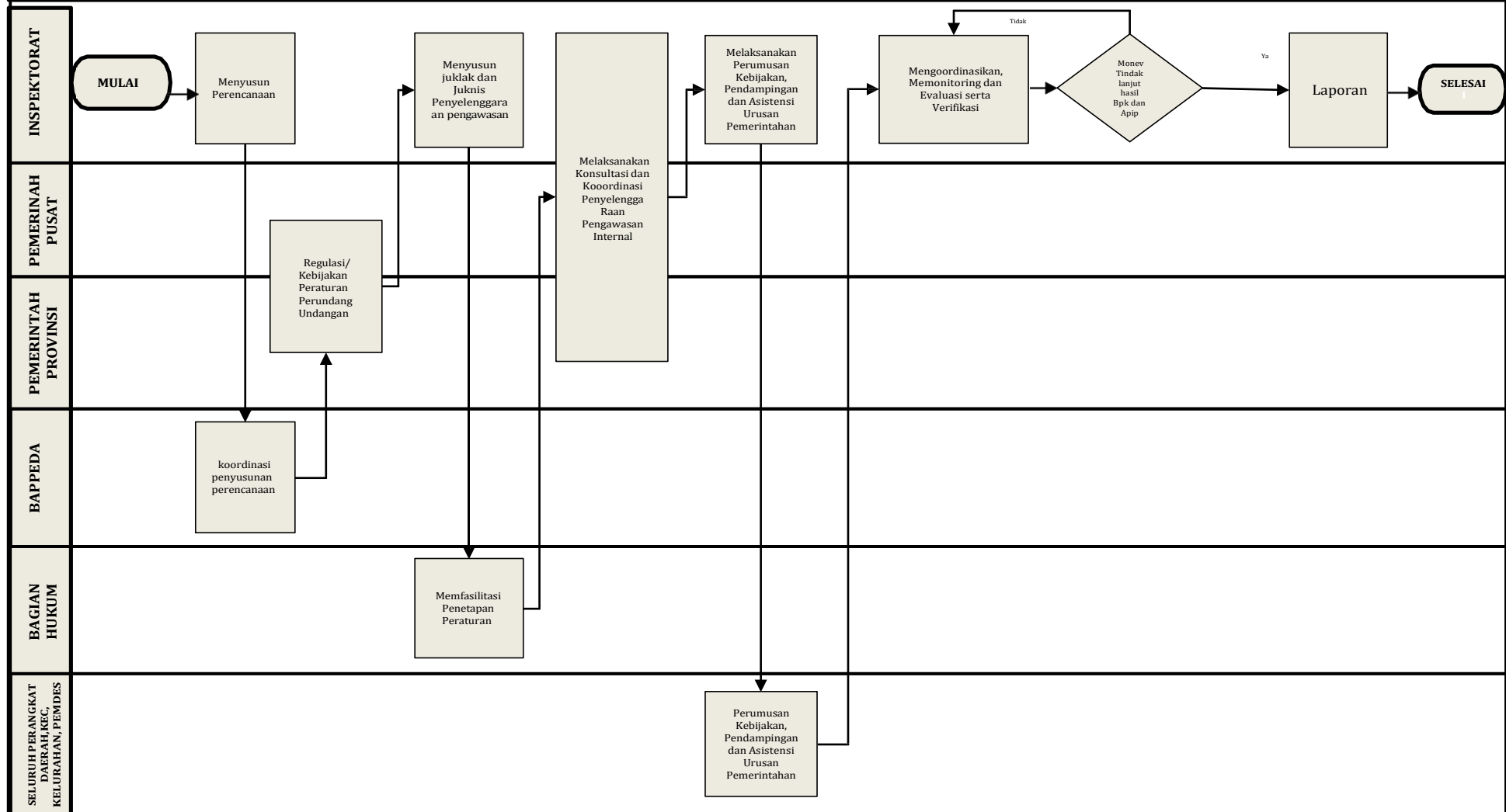
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-15.01 CFM01: Penyelenggaraan pengawasan



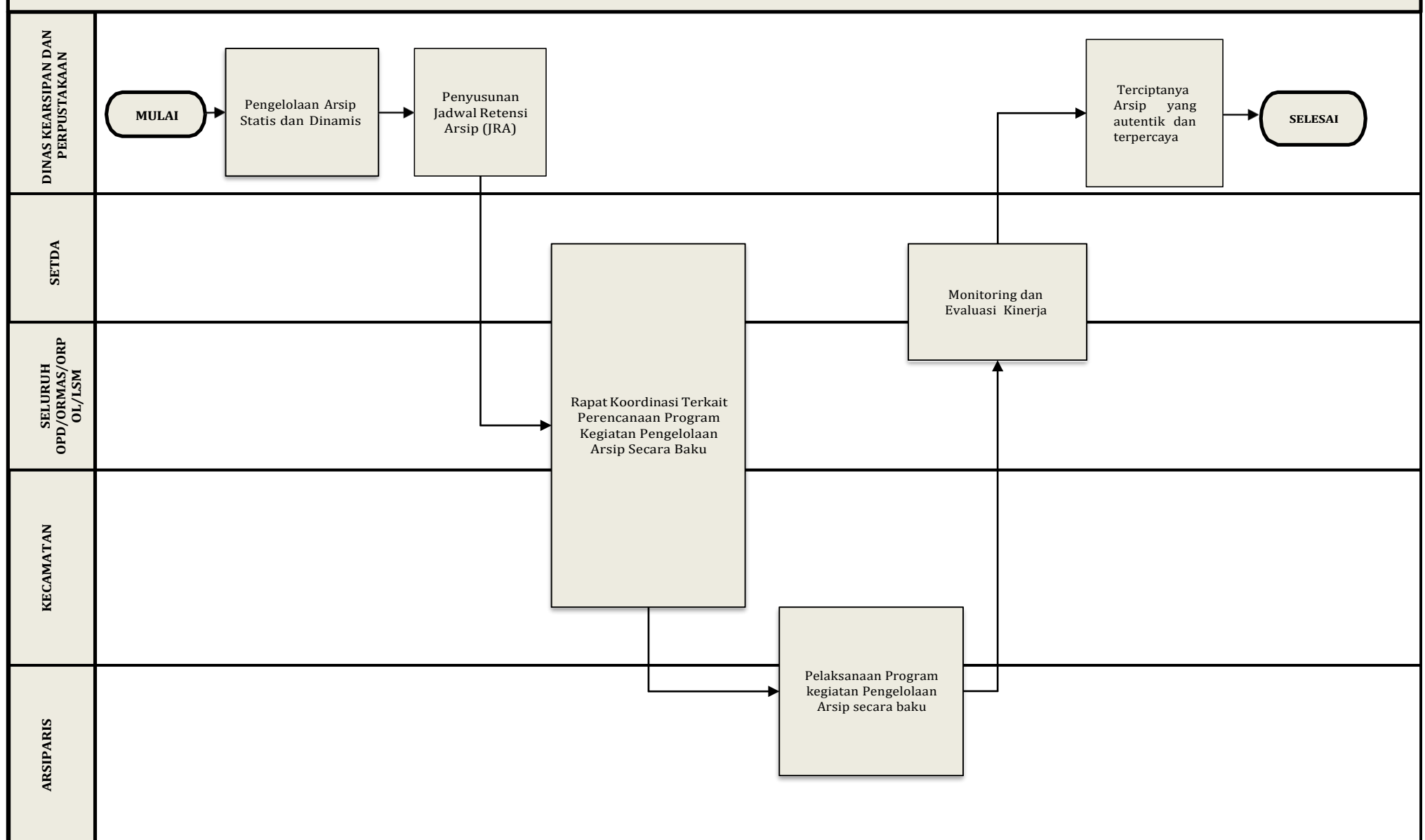
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-15.01 CFM02 : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



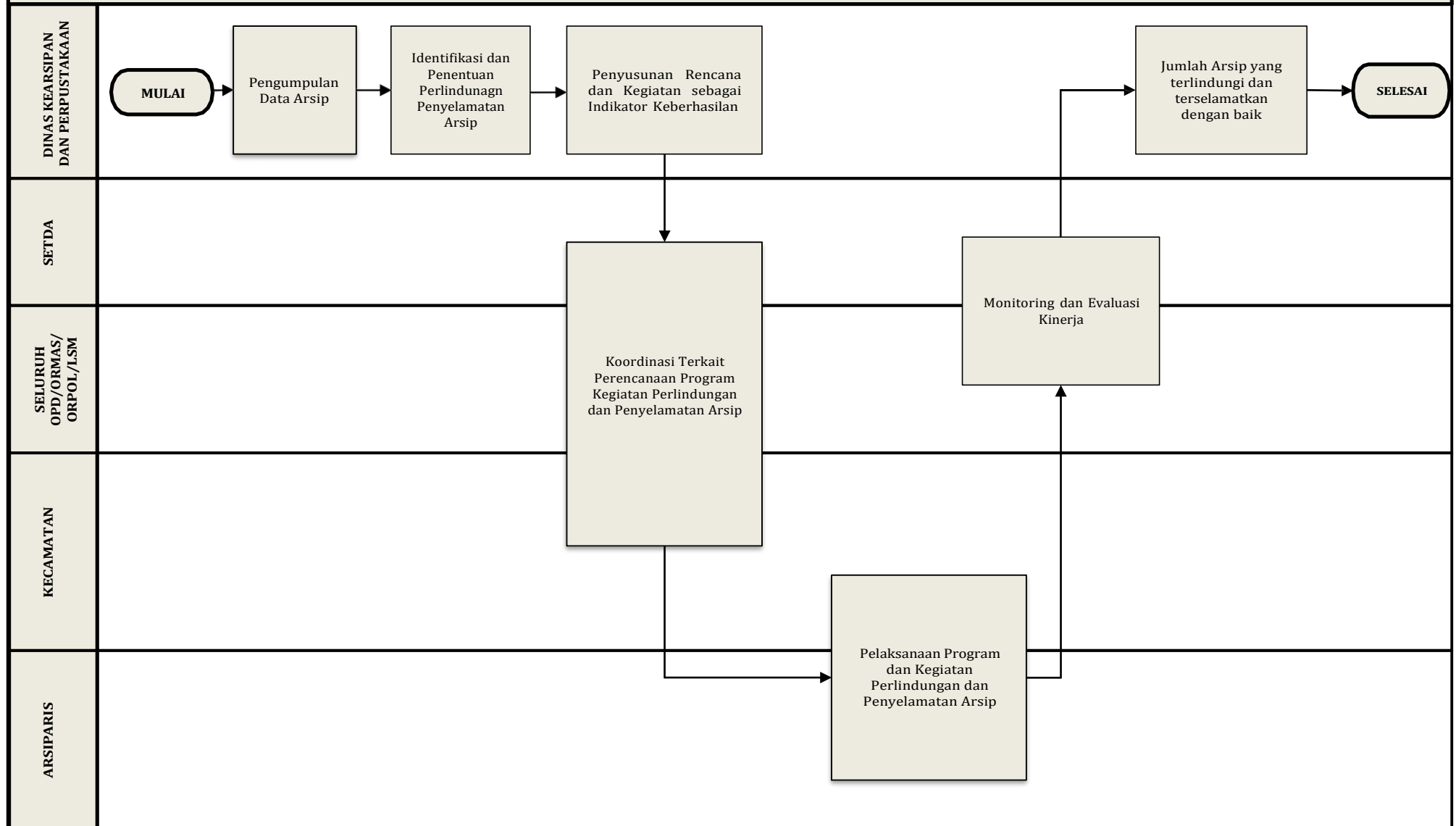
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-16.01 CFM01 : Pengelolaan Arsip



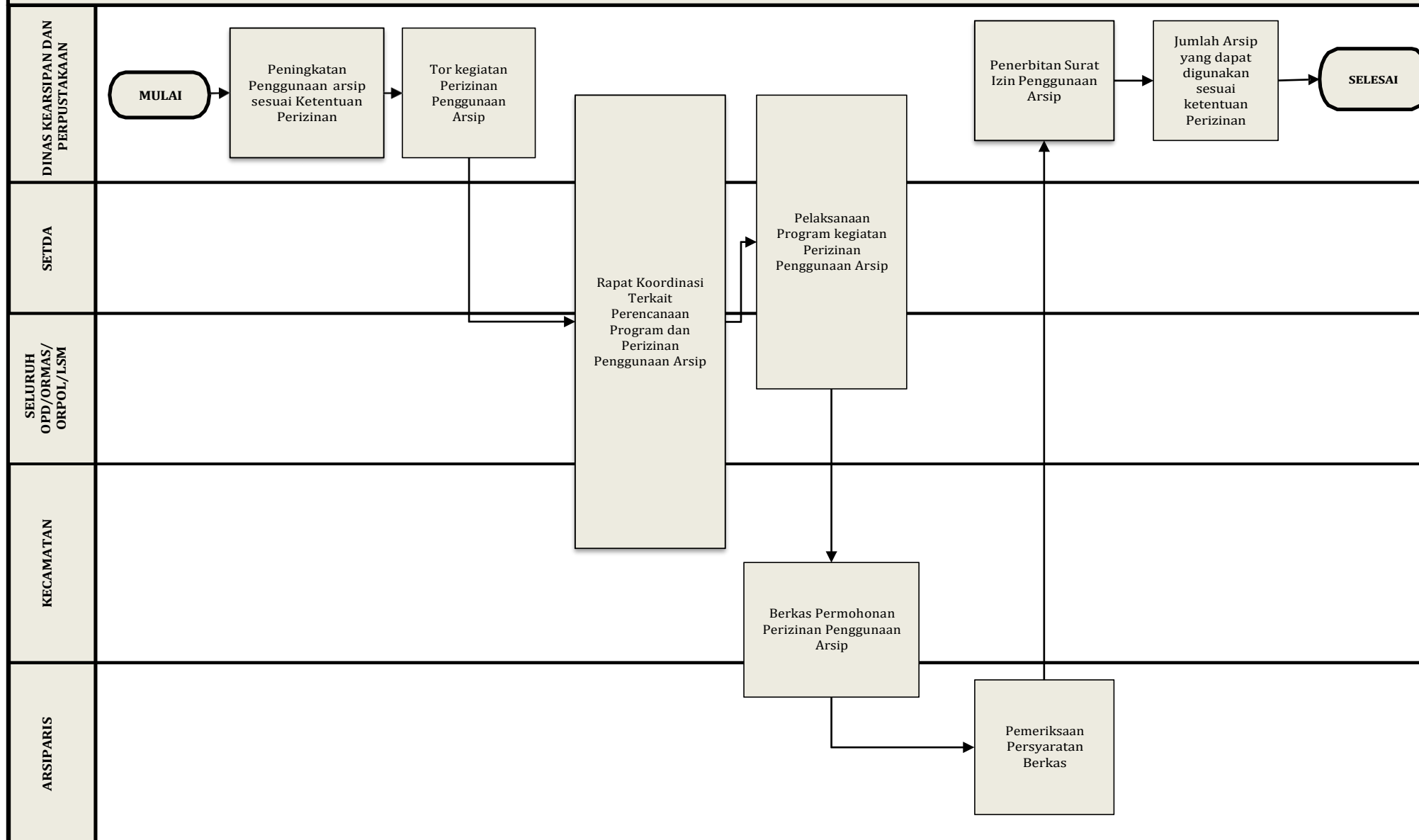
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-16.01 CFM02 : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip



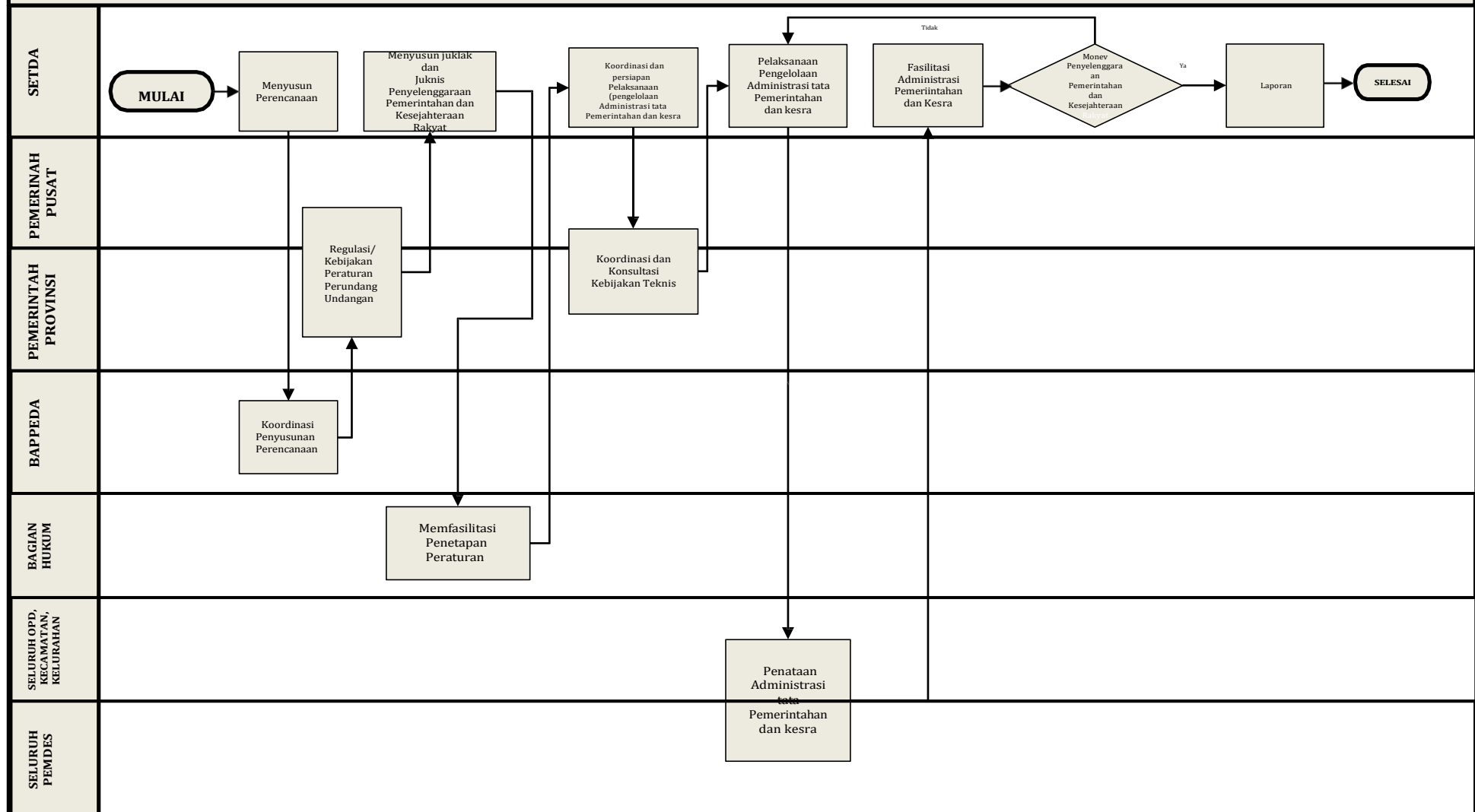
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-16.01 CFM03 : Perizinan Penggunaan Arsip



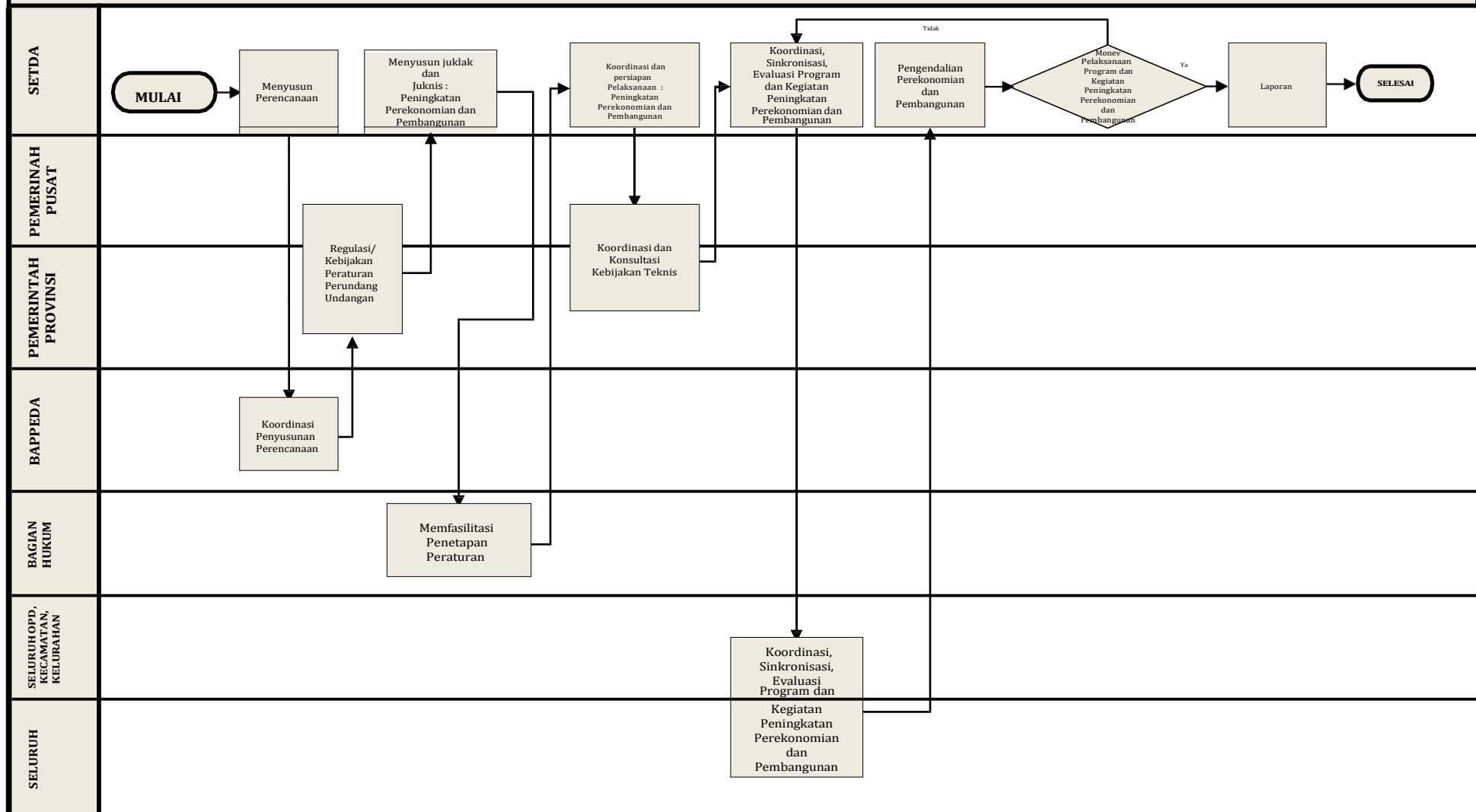
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-16.01 CFM04: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



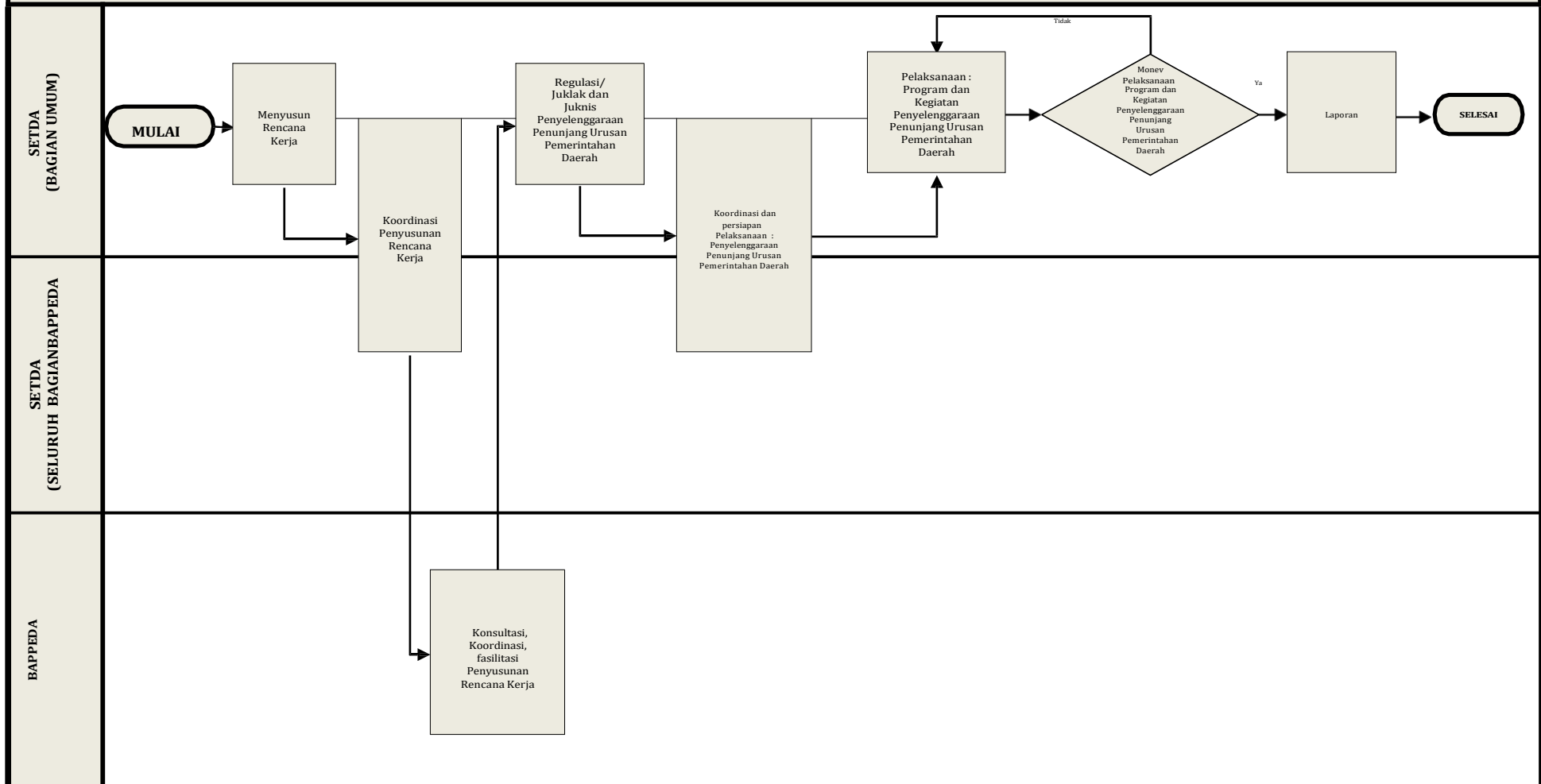
PETA LINTAS FUNGSI

BTN-16.01 CFM05 : Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan



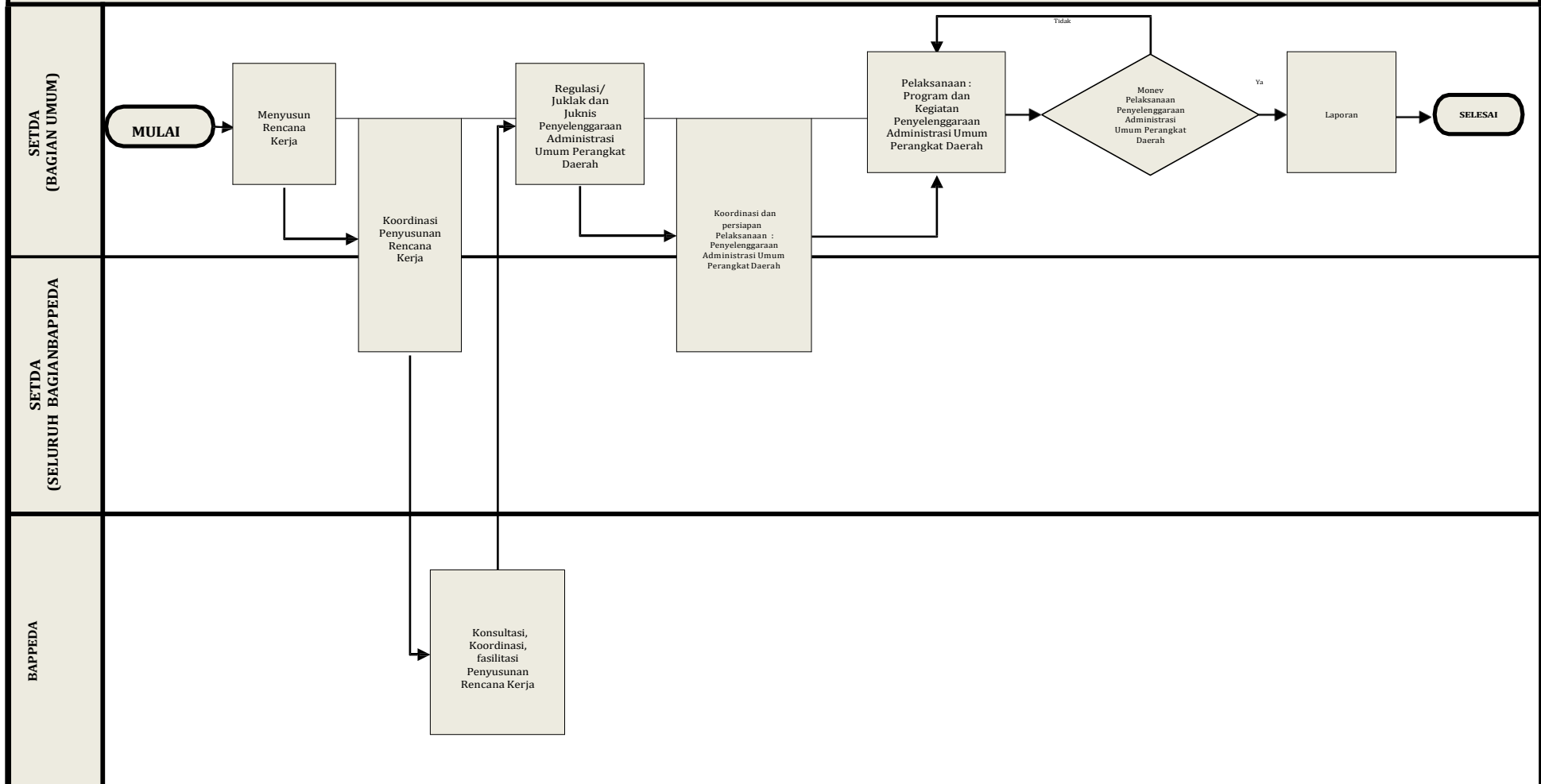
PETA LINTAS FUNGSI

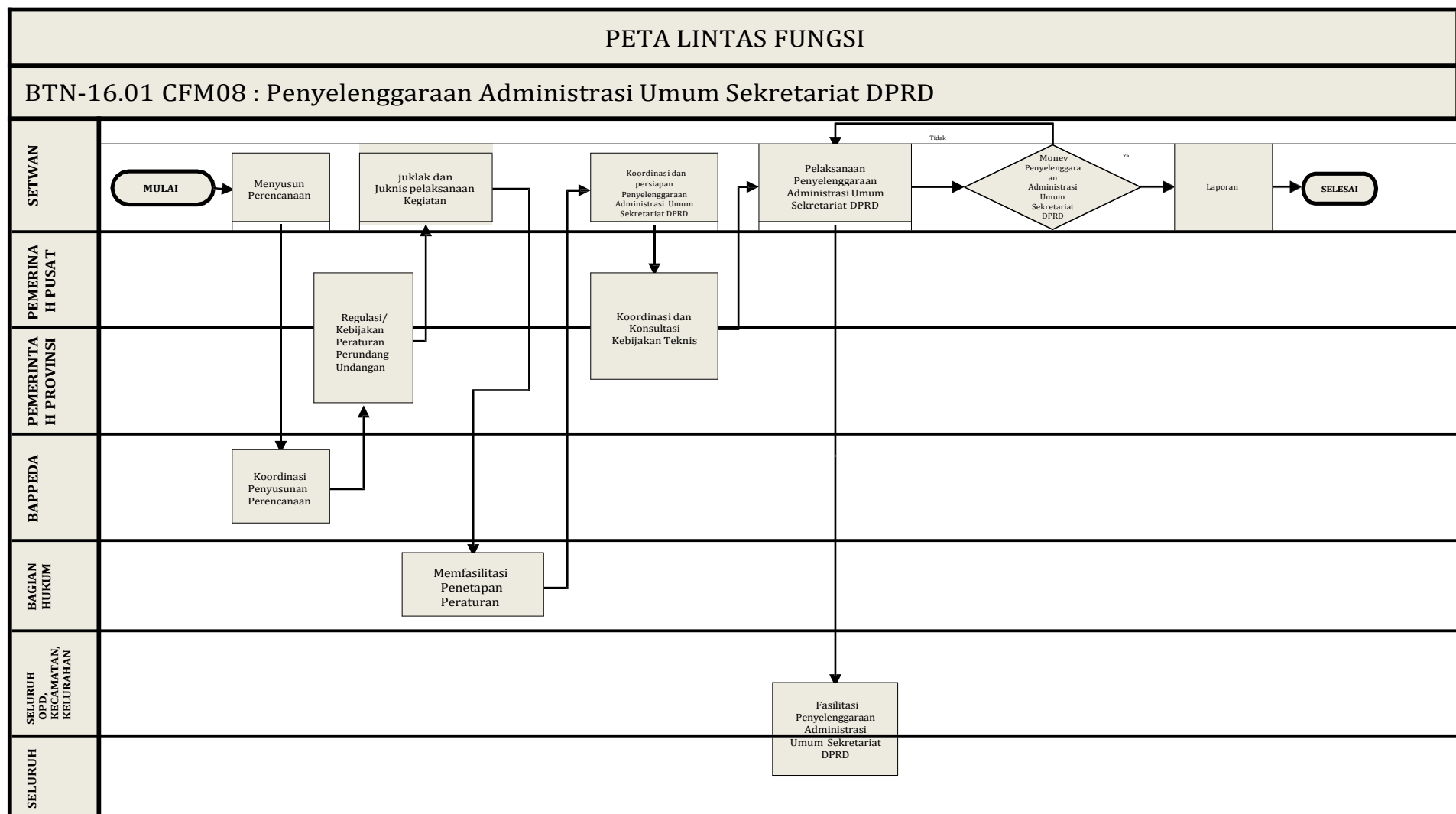
BTN-16.01 CFM06 : Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



PETA LINTAS FUNGSI

BTN-16.01 CFM07 : Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah





BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA